



Pemerintah Daerah
Kabupaten Sinjai

Rancangan Akhir
**RENCANA
PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH
DAERAH (RPJMD)
TAHUN 2025-2029
KABUPATEN SINJAI**



BAPPEDA
TAHUN 2025





BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 128 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sinjai di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 314, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7065);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun .. Nomor...);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2025-2045
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SINJAI

dan

BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Bupati adalah Bupati Sinjai.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang adalah dokumen perencanaan Pembangunan makro yang berisi visi, misi dan arah Pembangunan jangka waktu 20 Tahun, Dokumen RPJP merupakan kesepakatan/komitmen kebijakan yang pasti namun fleksibel dalam tahapan pelaksanaannya.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan RPJM Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi
17. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi
18. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

RPJM Daerah Mengacu pada RPJM Nasional dan RPJM Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 3

- (1) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat visi, misi dan program Bupati.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Sistematiكا Penyusunan RPJM Daerah sebagai berikut terdiri dari:
 - a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II GAMBARAN UMUM;
 - c. BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
 - d. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH;
 - e. BAB V PENUTUP;
- (2) Sistematiكا penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Program Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 dilaksanakan sesuai dengan RPJM Daerah.
- (2) Rincian dari Program Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah Melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal ...

BUPATI SINJAI,

RATNAWATI ARIF

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ANDI JEFRIANTO ASAPA

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2024 NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI
SELATAN ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumber daya keuangan daerah. Pendekatan yang digunakan dalam merencanakan pembangunan adalah melalui perencanaan partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat sebagai *stakeholders*. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 5 (Lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Dokumen perencanaan daerah merupakan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang disesuaikan dengan kewenangannya.

Dokumen RPJMD merupakan suatu dokumen rencana yang sangat penting bagi arah pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas produk dan proses penyusunan dokumen, yang diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan *review* berkala atas implementasinya. Penyusunan RPJMD telah dilakukan melalui pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, *bottom-up* dan *top-down process*. Dengan demikian RPJMD disusun sesuai kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, akuntabel dan konsisten dengan rencana lainnya yang relevan.

Capaian keberhasilan pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sinjai hingga saat ini, berawal dari hasil

rumusan perencanaan pembangunan yang telah dilakukan tahun sebelumnya seperti tertuang dalam pola dasar pembangunan daerah maupun rencana strategis daerah. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dalam indikator makro pembangunan seperti indeks pembangunan manusia, produk domestik regional bruto perkapita, kemiskinan, dan gini ratio yang cenderung mengalami penurunan.

Kedudukan RPJMD yang penting dan strategis menunjukkan bahwa keberadaannya sangat dibutuhkan bagi penyelenggara pemerintah daerah. Ketiadaan dokumen RPJMD akan menimbulkan ketidakjelasan terhadap arah dan sasaran pokok pembangunan untuk masa 5 (Lima) tahun mendatang, sekaligus sulit untuk menjaga kesinambungan pembangunan dari setiap periode pemerintahan. Selain itu, untuk merumuskan tahapan rencana pembangunan tahunan memerlukan landasan dalam RPJMD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN ... NOMOR ...

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan

Pembangunan daerah merupakan bagian dari kerangka pembangunan nasional oleh karena itu harus sinergi dan saling mendukung pencapaian target pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, Bupati dan Wakil Bupati terpilih menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) setelah dilantik. Rancangan awal RPJMD dimulai setelah pelantikan yang merupakan penyempurnaan dan rancangan teknokratik dengan mempertimbangkan visi misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih. RPJMD disusun dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran tahapan pertama RPJPD 2025-2045. Periode pertama dari pembangunan jangka Panjang Kabupaten sinjai diarahkan pada kebijakan “Konsolidasi Penguatan Landasan Transformasi”. Tahap pertama ini dilakukan konsolidasi penguatan landasan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang disertai dengan penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta penguatan keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah. Tahapan penguatan landasan transformasi ini didukung implementasi pembangunan kewilayahan yang merata dengan pemenuhan sarana prasarana, serta penguatan pembiayaan pembangunan.

Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan mengintegrasikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing daerah serta menjamin bahwa isu-isu pembangunan berkelanjutan telah termuat dalam dokumen perencanaan, dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi dan adaptasi.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6775);
8. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26

Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
19. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);

28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025-2029
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2032
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan yang mengatur arah pembangunan dalam jangka waktu lima tahun memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2025-2029.

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Sinjai mempedomani dokumen RPJMN tahun 2025-2029 dalam menetapkan prioritas pembangunan yang sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional atau regional.

2. Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan (RPJMD) Tahun 2025-2029.
3. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Sinjai mempedomani dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan (RPJMD) Tahun 2025-2029. dalam menetapkan prioritas pembangunan yang sejalan dengan kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sinjai Tahun 2025-2045.

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2025-2029

berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sinjai Tahun 2025-2045, khususnya pentahapan yang mana periode 2025-2029, merupakan tahapan pertama dari pembangunan jangka Panjang daerah Kabupaten Sinjai yang diarahkan pada kebijakan “Penguatan Fondasi Transformasi”.

5. Dokumen KLHS: Rancangan Awal RPJMD harus memperhatikan aspek lingkungan hidup dan keberlanjutan, sehingga terdapat keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian.

6. Dokumen Perencanaan lainnya.

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD memperhatikan dokumen perencanaan sektor lain yang telah tersusun, antara lain dokumen manajemen penanggulangan bencana. paradigma penanggulangan bencana telah bergeser orientasinya ke arah pengurangan risiko. Oleh karena itu, diperlukan upaya terpadu melalui perencanaan dan pengintegrasian penanggulangan bencana ke dalam dokumen perencanaan daerah.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Maksud penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai 2025-2029 untuk menyempurnakan rancangan teknokratik dengan mempertimbangkan visi misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih. RPJMD disusun dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

1.4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai 2025-2029 adalah:

- a. **Mendorong Pembangunan yang terarah dan terencana:** RPJMD berfungsi sebagai peta jalan pembangunan daerah, sehingga semua program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara terarah, terkoordinasi, dan terukur. Ini membantu mencegah pemborosan sumber daya dan meningkatkan efektivitas pembangunan.

- b. **Mewujudkan Visi Misi Daerah:** RPJMD merupakan penjabaran dari visi misi Kepala daerah yang terpilih.
- c. **Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat:** RPJMD bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur.
- d. **Meningkatkan Daya Saing Daerah:** RPJMD juga menargetkan untuk meningkatkan daya saing daerah dalam berbagai aspek seperti ekonomi, investasi dan pariwisata.
- e. **Menjamin ketersediaan Sumber Daya:** RPJMD membantu dalam merencanakan dan mengelola sumber daya daerah secara efisien dan berkelanjutan.
- f. **Memperkuat Koordinasi dan Sinergi:** RPJMD mendorong koordinasi dan sinergi antar-lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
- g. **Transparansi dan Akuntabilitas:** RPJMD menjadi dasar untuk melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kinerja pembangunan. Proses penyusunan dan implementasinya harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

1.5 Sistematika Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN;

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH;

BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH;

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

A. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

1. Potensi dan Peran Strategis Daerah

Kabupaten Sinjai terdiri dari 9 Kecamatan, 67 Desa, 13 Kelurahan dan 321 Dusun/Lingkungan. Ibu kota Kabupaten berada di Kecamatan Sinjai Utara. Luas wilayah Kabupaten Sinjai menurut Badan Pusat Statistik yaitu 819.96 km², sedangkan menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-145 Tahun 2022 luas wilayah Kabupaten Sinjai yaitu 864.72 km².

Kabupaten Sinjai dapat ditempuh dengan jalur darat dari Kota Makassar sebagai Ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan melalui 3 (tiga) jalur yaitu, melalui jalur selatan (Sinjai-Bantaeng-Makassar) dengan jarak tempuh 233 km, melalui jalur barat (Sinjai-Malino-Makassar) dengan jarak tempuh 164 km dan melalui jalur utara (Sinjai-Maros-Makassar) dengan jarak tempuh 186 km. Sedangkan untuk jalur laut dapat ditempuh dengan menggunakan kapal penumpang maupun kapal barang melalui Pelabuhan Larea-rea dan Pelabuhan Cappa Ujung yang terletak di Muara Sungai Tangka.

Secara geografis Kabupaten Sinjai terletak diantara 502°56° - 5021°16° Lintang Selatan (LS) dan antara 1190° 56°30°-1200° 25°33° Bujur Timur (BT). Berdasarkan posisi geografis, Kabupaten Sinjai memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bone.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng
- Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone, dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Gowa.

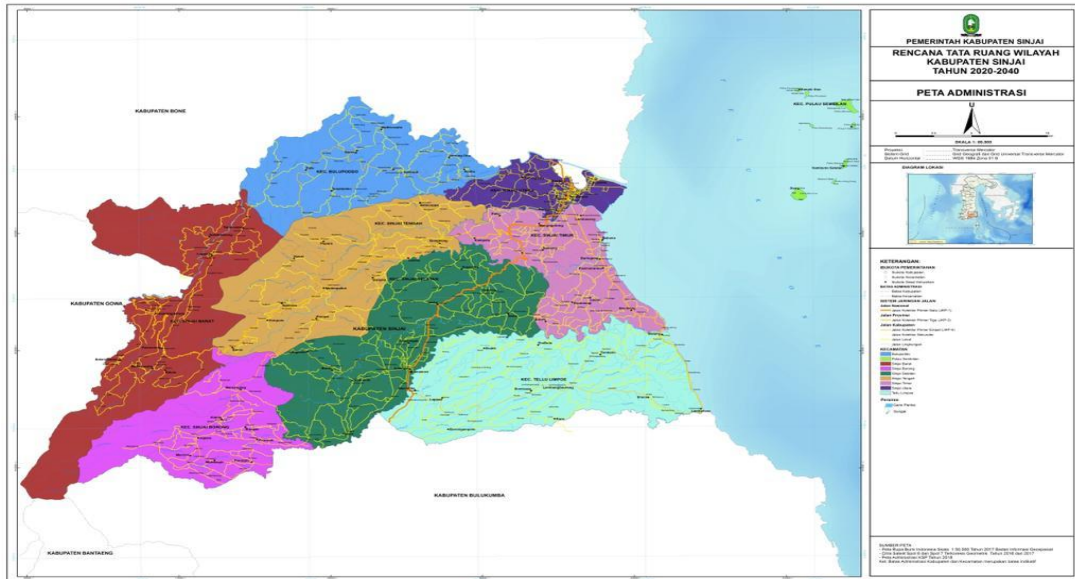
Wilayah Kabupaten Sinjai didominasi oleh wilayah pegunungan, perbukitan, dataran dan pesisir serta pulau-pulau kecil. Jumlah pulau yang berpenghuni adalah 9 (Sembilan) pulau. Daerah pegunungan di Kabupaten Sinjai

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI TAHUN 2025-2029

sebagian besar terletak di Kecamatan Sinjai Barat, Kecamatan Sinjai Tengah, Kecamatan Sinjai Borong dan Kecamatan Bulupoddo.

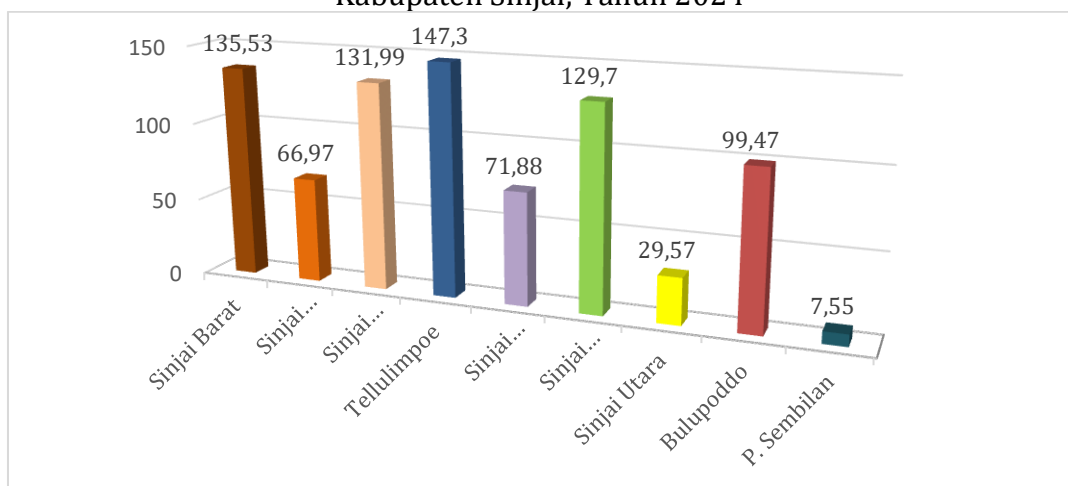
Dari 9 (sembilan) kecamatan yang ada di Kabupaten Sinjai, Kecamatan Tellulimpoe merupakan kecamatan terluas dengan luas 147,30 km² atau 18% dari seluruh wilayah Kabupaten Sinjai. Ketinggian dari permukaan laut wilayah Kabupaten Sinjai bervariasi dari 0–1.000 meter dpl.

Gambar 2.1
Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Sinjai



Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Sinjai

Grafik 2.1
Luas wilayah per Kecamatan
Kabupaten Sinjai, Tahun 2024



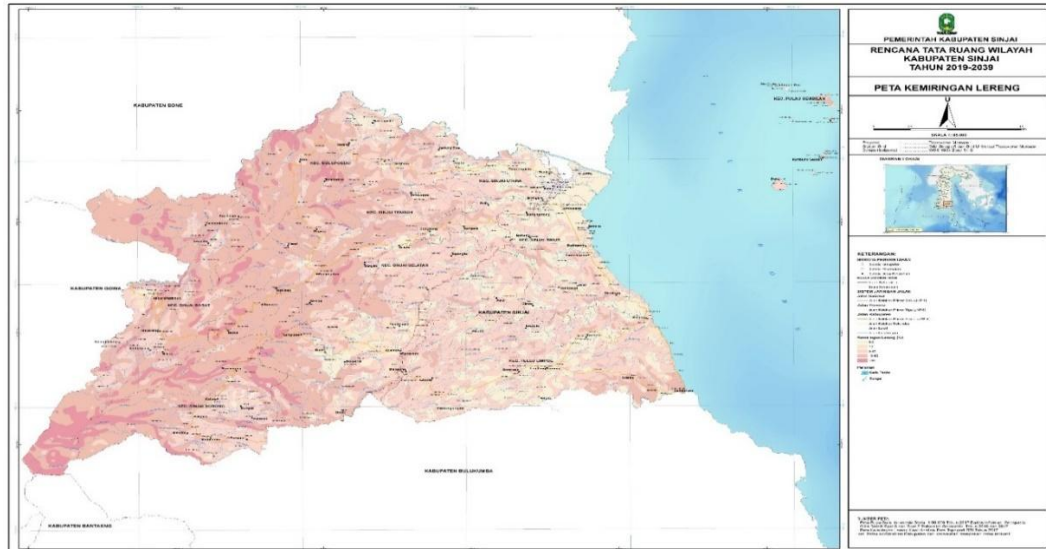
Sumber : Sinjai Dalam Angka 2025

Secara morfologis kemiringan lereng wilayah Kabupaten Sinjai terbagi 4 (empat) kriteria morfologis yaitu datar dengan kemiringan 0-2 % seluas 22.247

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI TAHUN 2025-2029

ha, sangat landai dengan kemiringan 2-5 % seluas 8.407 ha, landai dengan kemiringan 5-15% seluas 56.924 ha, agak curam dengan kemiringan 15-40% seluas 61.417 ha, dan terjal dengan kemiringan > 40% seluas 10.736 ha.

Gambar 2.2
Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Sinjai



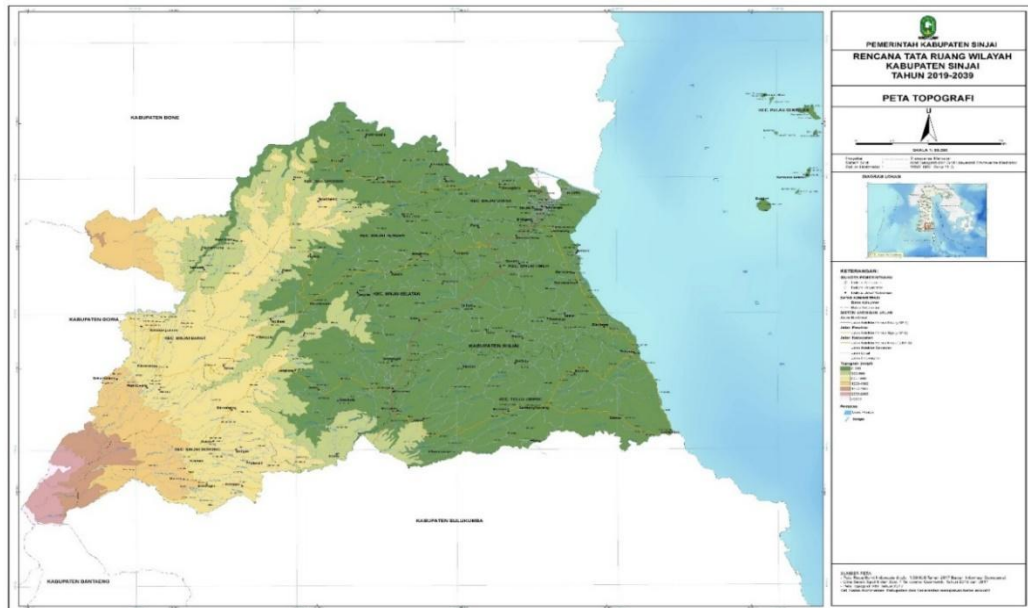
Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Sinjai

Ditinjau dari topografi wilayah Kabupaten Sinjai dibedakan atas 7 (tujuh) klasifikasi ketinggian, yaitu ketinggian 0-300 mdpl seluas 86.474 ha, ketinggian 300-500 mdpl seluas 21.012 ha, ketinggian 500-1.000 mdpl seluas 34.180 ha, ketinggian 1.000-1.500 mdpl seluas 11.536 ha, ketinggian 1.500-2.000 mdpl seluas 3.824 ha, ketinggian 2.000-2.500 mdpl seluas 2.311 Ha, ketinggian >2.500 mdpl seluas 394 Ha.

Berdasarkan klasifikasi menurut ketinggian di atas permukaan laut (dpl). Wilayah Kabupaten Sinjai terbagi ke dalam 5 (lima) klasifikasi ketinggian. dengan rincian luasan sebagai berikut :

- Area ketinggian 0-25 m dpl, seluas 45.41 km²;
- Area ketinggian 25-100 m dpl, seluas 79.83 km²;
- Area ketinggian 100-500 m dpl, seluas 455.35 km²;
- Area ketinggian 500-1.000 m dpl, seluas 173.68 km²;
- Area ketinggian >1.000 m dpl, seluas 65.69km².

Gambar 2.3.
Peta Topografi Kabupaten Sinjai



Sumber : RTRW Kabupaten Sinjai

Secara geologi, persebaran jenis batuan di Kabupaten Sinjai terbagi dalam 5 (lima) kelompok atau golongan yaitu: batuan vulkanik/beku, batuan endapan, batuan mikan atau metamorf, batuan alluvial dan batuan organik.

Secara Hidrologi, terdapat 2 (dua) jenis kategori hidrologi, yaitu 1} jenis air permukaan 2} jenis air tanah dangkal dan air tanah dalam. Kedua jenis air tersebut berasal dari air hujan yang sebagian mengalir di permukaan (*run-off*) dan sebagian lagi meresap ke dalam tanah.

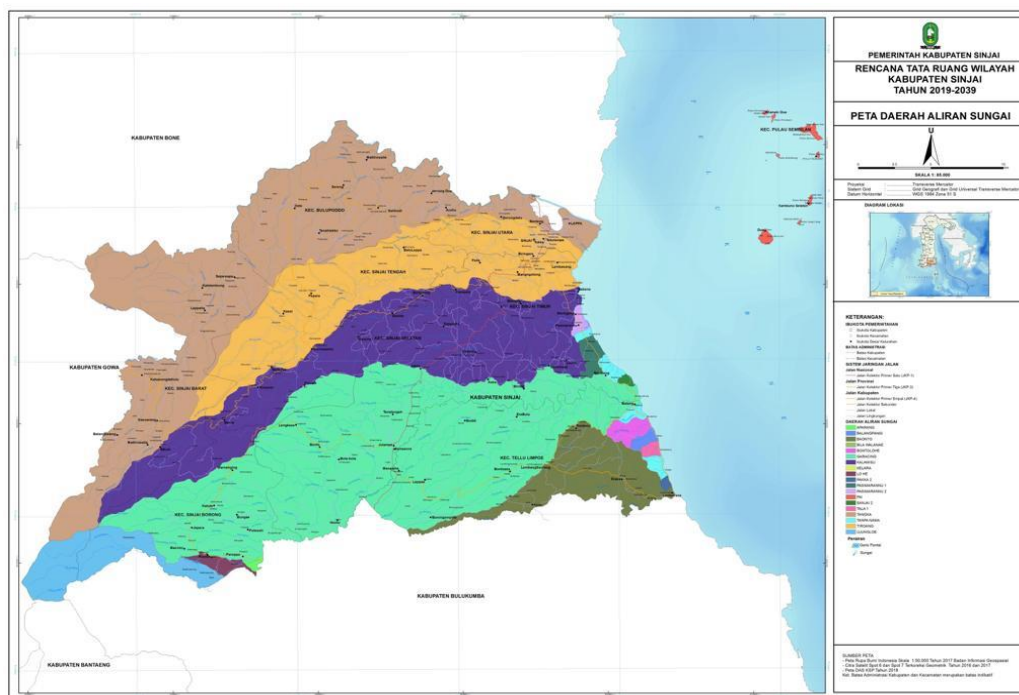
- Berdasarkan penelitian potensi sumber air permukaan (1998) sebesar 15.137.280 m³ atau debit sekitar 3.12 m³/detik dan sebagian besar potensi air tersebut dimanfaatkan untuk keperluan pertanian. Mengenai air tanah dangkal dengan kedalaman sekitar 6 meter berupa sumur gali yang banyak mengandung kapur dan air tanah dalam dengan kedalaman 75–100 meter berupa sumur bor yang banyak dimanfaatkan penduduk.
- Untuk jenis air permukaan, beberapa diantaranya adalah sungai-sungai yang mengalir melalui wilayah ini diantaranya Sungai Tangka, Sungai Mangottong. Sungai Kalamisu, Sungai Bua, Sungai Lolisang, Sungai Balantieng serta beberapa sungai kecil lainnya yang sebagian besar bermuara ke Teluk Bone.

Sungai yang paling besar adalah Sungai Bua dengan panjang sungai 81.45 km. sedangkan sungai yang paling pendek adalah Sungai Balangtieng dengan

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI TAHUN 2025-2029

panjang 20 km. Adapun sungai paling lebar di Kabupaten Sinjai adalah Sungai Tangka dengan lebar 90 meter sedangkan sungai yang sempit adalah Sungai Balangtieng dengan lebar 15 meter.

Gambar 2.4.
Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Sinjai



Sumber : RTRW Kabupaten Sinjai

Musim penghujan di Kabupaten Sinjai pada periode April-Oktober dan musim kemarau berlangsung pada periode Oktober-April. Curah hujan berkisar antara 2.000–4.000 mm/tahun, dengan hari hujan yang bervariasi antara 100–160 hari hujan/tahun. Kelembapan udara rata-rata tercatat berkisar antara 64%–87%. dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 21.2°C–32.4°C.

Selain itu ada 3 (tiga) tipe iklim menurut *Schmidt & Fergusson* yang terjadi dan berlangsung di wilayah ini. yaitu iklim tipe B2, C2, D2 & tipe D3.

- Area/zona dengan iklim tipe B2 dimana bulan basah berlangsung selama 7-9 bulan berturut-turut, sedangkan bulan kering berlangsung 2–4 bulan sepanjang tahun meliputi sebagian besar wilayah Kecamatan Sinjai Timur dan Kecamatan Sinjai Selatan.
- Zona dengan iklim tipe C2 dicirikan dengan adanya bulan basah yang berlangsung antara 5–6 bulan, sedangkan bulan keringnya berlangsung selama 3–5 bulan sepanjang tahun. Penyebarannya meliputi sebagian kecil wilayah

Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Sinjai Selatan dan Kecamatan Sinjai Tengah.

- Zona dengan iklim tipe D2 mengalami bulan basah selama 3–4 bulan dan bulan keringnya berlangsung selama 2–3 bulan. Penyebarannya meliputi wilayah bagian tengah Kabupaten Sinjai, yaitu sebagian kecil wilayah Kecamatan Sinjai Tengah, Kecamatan Sinjai Selatan dan Kecamatan Sinjai Barat.
- Zona dengan iklim tipe D3 dicirikan dengan berlangsungnya bulan basah antara 3–4 bulan dan bulan kering berlangsung antara 3–5 bulan. Penyebarannya meliputi sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat, Kecamatan Sinjai Tengah dan Kecamatan Sinjai Selatan.

2. Potensi Sumber Daya Alam

Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah merupakan wilayah yang dapat dibudidayakan dan difungsikan untuk kepentingan pembangunan dalam bentuk kegiatan usaha berbagai sektor atau sub sektor pembangunan. Kriteria kawasan budidaya adalah ukuran yang meliputi daya dukung, aspek-aspek yang mempengaruhi sinergi antar kegiatan dan kelestarian lingkungan. Penetapan kawasan budidaya dapat dikelompokkan ke dalam dua kriteria, yaitu kriteria sektoral dan kriteria ruang.

Kriteria teknis sektoral kawasan budidaya adalah suatu kegiatan dalam kawasan yang memenuhi ketentuan-ketentuan teknis seperti daya dukung, kesesuaian lahan, bebas bencana, dan lain-lain. Sedangkan kriteria ruang kawasan budidaya menentukan pemanfaatan ruang kegiatan budidaya yang menghasilkan nilai sinergi terbesar untuk kesejahteraan masyarakat dan tidak bertentangan dengan kelestarian lingkungan.

Pengelolaan kawasan budidaya adalah suatu pendekatan dalam mengelola kawasan-kawasan di luar kawasan lindung agar pemanfaatannya dilakukan secara optimal, selaras, dan serasi dengan kawasan lindung dalam mewujudkan pembangunan daerah.

Rencana pengembangan kawasan budidaya di Kabupaten Sinjai, terdiri atas :

- a. Kawasan Hutan Produksi
- b. Kawasan Perkebunan Rakyat

- c. Kawasan Pertanian
- d. Kawasan Perikanan
- e. Kawasan Pertambangan dan Energi
- f. Kawasan Peruntukan Industri
- g. Kawasan Pariwisata
- h. Kawasan Permukiman
- i. Kawasan Pertahanan dan Keamanan

a. Kawasan Hutan Produksi

Berdasarkan jenisnya, hutan produksi yang terdapat di Kabupaten Sinjai adalah merupakan hutan produksi terbatas seluas kurang lebih 6.883 hektar, meliputi :

- a. Kecamatan Bulupoddo, seluas kurang lebih 1.724,41 hektar
- a. Kecamatan Sinjai Barat, seluas kurang lebih 3.842,21 hektar
- b. Kecamatan Sinjai Selatan, seluas kurang lebih 411,08 hektar, dan
- c. Kecamatan Sinjai Tengah, seluas kurang lebih 904,97 hektar

b. Kawasan Perkebunan Rakyat

Perkebunan rakyat adalah perkebunan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 ha, penutupan tajuk tanaman berkayu dan atau jenis lainnya lebih dari 50% atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 tanaman tiap Ha. Artinya perkebunan jenis ini apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mengenai kehutanan termasuk ke dalam perkebunan hak karena lahannya dimiliki oleh sektor privat atau swasta.

Rencana pengembangan perkebunan rakyat di Kabupaten Sinjai, diarahkan seluas kurang lebih 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) hektar, meliputi:

- Kecamatan Bulupoddo, seluas kurang lebih 207,86 hektar
- Kecamatan Pulau Sembilan, seluas kurang lebih 51,77 hektar
- Kecamatan Sinjai Barat, seluas kurang lebih 440.79 hektar
- Kecamatan Sinjai Borong, seluas kurang lebih 536.85 hektar
- Kecamatan Sinjai Selatan, seluas kurang lebih 16,42 hektar, dan
- Kecamatan Sinjai Tengah, seluas kurang lebih 196,40 hektar

c. Kawasan Pertanian

Rencana pengembangan kawasan budidaya pertanian dilakukan berdasarkan kesesuaian lahan dan memperhatikan kondisi penggunaan lahan eksisting. Metoda analisis kesesuaian lahan pertanian menggunakan kerangka sistem *Food and Agriculture Organization* yang dikembangkan oleh Lembaga Penelitian Tanah yang menghasilkan peta Kesesuaian Lahan. Parameter yang dinilai meliputi kedalaman efektif tanah, tekstur tanah, permeabilitas, kesuburan, reaksi tanah, kemiringan lahan (*slope*), relief mikro, drainase, ketersediaan air, erosi dan banjir.

Dari data yang terhimpun dikelompokkan sesuai dengan klasifikasi dalam Kriteria Kesesuaian Lahan Pertanian, kemudian ditumpangtindihkan (*superimpose*) antara klasifikasi parameter tersebut. Hasil akhir diperoleh Unit Kesesuaian Lahan dan dinilai secara kualitatif. Adapun klasifikasi kesesuaian lahan yang digunakan:

- S1 (sangat sesuai) : lahan tidak mempunyai pembatas yang serius untuk menerapkan pengelolaan yang diberikan, atau hanya mempunyai pembatas yang tidak berarti.
- S2 (cukup sesuai) : lahan mempunyai pembatas-pembatas agak serius untuk mempertahankan tingkat pengelolaan yang harus diterapkan. Pembatas ini akan mengurangi produksi dan keuntungan dan meningkatkan masukan yang diperlukan.
- S3 (sesuai marginal) : lahan mempunyai pembatas-pembatas serius untuk mempertahankan tingkat pengelolaan yang harus diterapkan. Pembatas ini akan mengurangi produksi dan keuntungan atau lebih meningkatkan masukan yang diperlukan.
- N1 (tidak sesuai pada saat ini) : lahan mempunyai pembatas yang lebih serius, tetapi masih mempunyai kemungkinan untuk diatasi hanya tidak dapat diperbaiki dengan tingkat pengelolaan dengan modal normal.
- N2 (tidak sesuai permanen) : lahan mempunyai pembatas permanen sehingga mencegah segala kemungkinan penggunaan berkelanjutan pada lahan tersebut.

Jenis pembatas atau macam perbaikan yang harus dijalankan ditunjukkan dengan huruf kecil, misalnya d (drainase), x (salinitasi), t (topografi), dan m

(ketersediaan air). Pemanfaatan ruang kawasan pertanian dikembangkan dalam rangka mencapai tujuan sebagai berikut :

- Tetap terjaga kualitas lingkungan.
- Terciptanya pertumbuhan perekonomian wilayah yang berbasis perekonomian lokal.
- Pengembangan kualitas dan kuantitas produksi pertanian agar dapat mencapai optimal.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka arahan pengembangan pertanian di Kabupaten Sinjai meliputi:

- a. Kawasan pertanian tanaman pangan
- b. Kawasan Pertanian Hortikultura
- c. Kawasan perkebunan
- d. Kawasan peternakan

d. Kawasan Perikanan

Berdasarkan karakteristik wilayah Kabupaten Sinjai yang merupakan daerah pegunungan dan sebagian merupakan daerah pantai dan kepulauan, maka pengembangan usaha perikanan yang dapat dikembangkan adalah merupakan perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

Pengembangan perikanan tangkap sesuai dengan karakteristik wilayahnya, maka arahan pengembangannya, meliputi : Kecamatan Pulau IX , Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Sinjai Utara dan Kecamatan Tellulimpoe

Sedangkan untuk perikanan budidaya, diarahkan pada pengembangan budidaya air tawar, budidaya air payau, serta budidaya perikanan laut. Arahan pengembangannya adalah sebagai berikut:

- a. Kawasan perikanan budidaya air tawar berupa minapolitan, meliputi :
 - Kecamatan Bulupoddo;
 - Kecamatan Sinjai Barat;
 - Kecamatan Sinjai Borong;
 - Kecamatan Sinjai Selatan;
 - Kecamatan Sinjai Tengah;
 - Kecamatan Sinjai Timur;
 - Kecamatan Sinjai Utara; dan
 - Kecamatan Tellulimpoe.

- b. Kawasan perikanan budidaya air payau, seluas kurang lebih 716 hektar, meliputi:
- Kecamatan Sinjai Utara;
 - Kecamatan Sinjai Timur; dan
 - Kecamatan Tellulimpoe.
- c. Kawasan budidaya perikanan laut, meliputi:
- Kecamatan Pulau Sembilan;
 - Kecamatan Sinjai Utara
 - Kecamatan Sinjai Timur; dan
 - Kecamatan Tellulimpoe.

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan yang ada di Kabupaten Sinjai, maka ketersediaan sarana dan prasarana perikanan sangat dibutuhkan, antara lain pelabuhan perikanan, tempat pelelangan ikan dan pengolahan hasil-hasil perikanan. Untuk menunjang hal tersebut, maka direncanakan pengembangan tempat pelelangan ikan (TPI) Lappa di Kecamatan Sinjai Utara, tempat pelelangan ikan (TPI) Tongke-tongke di Kecamatan Sinjai Timur, pelabuhan pendaratan ikan (PPI) Lappa di Kecamatan Sinjai Utara, dan pelabuhan perikanan di Tongke-tongke di Kecamatan Sinjai Timur.

e. Kawasan Pertambangan dan Energi

Sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) memiliki peran penting dalam pembangunan nasional khususnya pembangunan daerah dalam rangka mendukung perekonomian daerah baik melalui sisi fiskal, moneter maupun sektor riil, sekurang-kurangnya terdapat 8 peran penting sektor ESDM, antara lain sebagai sumber penerimaan Negara, penggerak pembangunan daerah, neraca perdagangan, investasi, subsidi, penyediaan energi dan bahan baku domestik, dan kegiatan ESDM yang menimbulkan efek berantai serta menciptakan tenaga kerja.

Pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri masih sangat tergantung kepada sumber energi yang tidak terbarukan seperti minyak bumi, gas bumi, gambut, dan batubara. Minyak bumi, selain digunakan sebagai sumber energi di dalam negeri, juga dapat dimanfaatkan sebagai komoditas ekspor andalan dan penghasil devisa negara. Sumber energi yang terbarukan seperti tenaga air, panas bumi, tenaga angin, biomassa, dan tenaga surya saat ini masih relatif

terbatas pemanfaatannya. Potensi energi terbarukan cukup besar dan dapat ditingkatkan pemanfaatannya, agar dapat menjadi sumber energi alternatif pengganti minyak bumi.

Berdasarkan pada potensi dan jenis sumber daya pertambangan dan energi di Kabupaten Sinjai, dibedakan atas:

- a. Kawasan pertambangan mineral
- b. Kawasan pertambangan batubara
- c. Kawasan panas bumi yang merupakan kawasan panas bumi Kampala di Kecamatan Sinjai Timur

f. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan karakteristik wilayah dan potensi pengembangan kawasan peruntukan industri di Kabupaten Sinjai melalui analisis secara makro yang dilakukan dengan metode location quotient, data mining, dan analisis spasial menunjukkan bahwa sektor industri di Kabupaten Sinjai merupakan sektor yang memiliki potensi dan daya saing yang kuat untuk berkembang di masa mendatang.

Secara detail karakteristik lokasi dan kesesuaian lahan untuk wilayah industri adalah sebagai berikut :

- a. Penggunaan Lahan digunakan untuk melihat daya dukung lahan yaitu untuk mengetahui sejauh mana kemampuan sumber daya lahan untuk suatu penggunaan tertentu, seperti lokasi industri. Lahan yang dimaksud adalah lahan yang tidak berada di wilayah yang padat penduduk.
- b. Geologi yang dimaksud adalah jenis tanah. Karakteristik tanah yang cocok untuk kawasan industri adalah bertekstur sedang sampai kasar.
- c. Hidrologi yang dimaksud adalah ketersediaan sumber air. Wilayah yang mempunyai ketersediaan air tinggi memberikan kemudahan dalam penyediaan air untuk industri, karena air sangat diperlukan untuk proses rangkaian kegiatan industri. Ketersediaan air ini dapat berupa sumber air baku, sumber air sekunder ataupun sumber air mandiri.

- d. Jalan Aksesibilitas yang dimaksud adalah jalur transportasi yang terdapat di daerah terkait. Dalam penelitian ini aksesabilitas jalan dibedakan berdasarkan keadaan jalannya, apakah daerah tersebut telah memiliki akses jalan yang dapat dilalui setiap saat, dalam musim tertentu, cuaca tertentu atau belum tersedia akses jalan dan tidak dapat dilalui sama sekali.
- e. Topografi juga berpengaruh penting terhadap kelancaran proses kegiatan industri. Semakin tinggi lokasi yang akan digunakan semakin menghambat aktivitas industri. Ketinggian tempat menggunakan kriteria yaitu wilayah tersebut mempunyai ketinggian di bawah 100 meter dpl.

Berdasarkan pada hasil analisis di atas, maka rencana pengembangan kawasan peruntukan industri di Kabupaten Sinjai merupakan kawasan peruntukan industri pengolahan perikanan di Kecamatan Sinjai Utara, Sinjai Timur dan Kecamatan Pulau Sembilan.

g. Kawasan Pariwisata

Pariwisata mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan daerah khususnya sebagai penyumbang pembentukan PDRB daerah. Pengembangan pariwisata ini akan berdampak sangat luas dan signifikan dalam pengembangan ekonomi, upaya-upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan serta akan berdampak terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat terutama masyarakat lokal. Pengembangan kawasan wisata mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, membuka peluang usaha dan kesempatan kerja serta sekaligus berfungsi menjaga kelestarian kekayaan alam dan hayati. Pengembangan pariwisata sebagai salah satu sektor pembangunan secara umum menjadi relevan jika pengembangan pariwisata itu sesuai dengan potensi daerah. Dengan demikian maka pembangunan pariwisata harus didasarkan pada kriteria keberlanjutan yang artinya bahwa pembangunan dapat didukung secara ekologis dalam jangka panjang sekaligus layak secara ekonomi adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat.

Berdasarkan pada potensi kepariwisataan di kabupaten Sinjai, maka jenis kepariwisataan yang dapat dikembangkan diarahkan pada:

- a. Kawasan wisata alam, meliputi:
- b. Kawasan wisata sejarah dan budaya
- c. Kawasan wisata minat khusus

- d. Kawasan wisata edukasi dan ekologi
- e. Kawasan wisata buatan

h. Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan (Undang-Undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman). Pada dasarnya pusat permukiman merupakan konsentrasi kegiatan penduduk yang fungsi utamanya merupakan sebagai pengembangan lahan permukiman dan aktivitas penunjangnya. Masing-masing pusat permukiman memiliki susunan fungsi yang berbeda-beda, didasarkan pada klasifikasi dan sistem aktivitas yang dominan pada tiap pusat permukiman.

Dalam pengembangan perumahan yang perlu diperhatikan adalah penyesuaian antara kebutuhan rumah dengan tingkat pelayanan kebutuhan fasilitas perumahan. Disamping itu, juga memperhatikan kaidah-kaidah normatif penyesuaian KLB (Koefisien Lantai Bangunan), KDB (Koefisien Dasar Bangunan), dan GSB (Garis Sempadan Bangunan). Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk permukiman yang aman dari bahaya bencana alam maupun buatan manusia, sehat dan mempunyai akses untuk kesempatan berusaha, seperti:

- Aman terhadap bencana alam (banjir, longsor, gempa, tsunami);
- Kemiringan permukaan tanah $\leq 15\%$;
- Ketersediaan atau kecukupan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih;
- Ketersediaan energi;
- Kecukupan fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti fasilitas; kesehatan, pendidikan dan perbelanjaan (Standar Perumahan dan Permukiman); dan
- Aksesibilitas tinggi atau potensial ditingkatkan tanpa menimbulkan degradasi kualitas lingkungannya.

Secara ruang apabila digunakan untuk kegiatan permukiman akan memberikan manfaat:

- Meningkatkan ketersediaan permukiman dan mendayagunakan prasarana dan sarana permukiman;

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI TAHUN 2025-2029

- Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- Tidak mengganggu fungsi lindung;
- Tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan SDA;
- Meningkatkan pendapatan masyarakat;
- Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
- Menciptakan kesempatan kerja; dan
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kawasan peruntukan permukiman, umumnya meliputi kawasan permukiman perkotaan dan permukiman pedesaan. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang kegiatan utamanya adalah non agraris dan lebih menonjolkan pada kegiatan pemerintahan, pelayanan jasa sosial dan ekonomi. Rencana kawasan peruntukan permukiman perkotaan, meliputi karakteristik:

- Kawasan yang didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri dari sumberdaya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, serta prasarana wilayah perkotaan lainnya; dan
- Bangunan permukiman di tengah kota terutama di PKL dan PPK.

Kawasan pedesaan merupakan kawasan dengan kegiatan utamanya berorientasi pada kegiatan pertanian/agraris, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi pertanian. Rencana kawasan peruntukan permukiman perdesaan, meliputi karakteristik:

- Permukiman yang didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan dan penduduk yang rendah dan kurang intensif dalam pemanfaatan builtup area (daerah terbangun); dan
- Bangunan-bangunan perumahan diarahkan menggunakan nilai kearifan budaya local.
- Adapun arahan pengembangan permukiman di Kabupaten Sinjai berdasarkan karakteristiknya meliputi :
 - a. Kawasan permukiman perkotaan
 - b. Kawasan permukiman perdesaan

Kawasan Lindung

Kawasan Lindung menurut Undang- Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Pengembangan kawasan lindung bertujuan untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya dukung lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem antar wilayah guna mendukung proses pembangunan berkelanjutan.

Rencana pengembangan kawasan peruntukan lindung di Kabupaten Sinjai terdiri atas :

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. Kawasan perlindungan setempat;
- c. Kawasan konservasi;
- d. Kawasan lindung geologi;
- e. Kawasan cagar budaya; dan
- f. Kawasan ekosistem mangrove.

Wilayah Rawan Bencana

Dampak utama bencana seringkali menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak kerusakan non materi maupun psikologis. Pada umumnya bencana alam meliputi bencana akibat fenomena geologi (gerakan tanah dan letusan gunung api), bencana akibat kondisi hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin topan), bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, dan penyakit tanaman/ternak) serta kegagalan teknologi (kecelakaan transportasi). Kompleksitas dari permasalahan bencana tersebut memerlukan suatu penataan dan perencanaan yang matang dalam penanggulangannya, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif, terarah, terpadu dan terkoordinasi. Penanggulangan bencana yang dilakukan selama ini belum didasarkan pada langkah-langkah yang sistematis dan terencana sehingga seringkali terjadi tumpang tindih dan bahkan kadang terdapat langkah upaya penting yang terlewat.

Potensi rawan bencana yang terdapat di Kabupaten Sinjai adalah berupa bencana banjir, bencana longsor dan bencana tsunami. Berdasarkan kondisi fisik

morfologi wilayah Kabupaten Sinjai, wilayah rawan bencana banjir terdapat di 4 (empat) kecamatan, yaitu Kecamatan Sinjai Utara, Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Sinjai Selatan dan Kecamatan Tellulimpoe dengan tingkat resiko bencana rendah, sedang sampai tinggi.

Potensi bencana tanah longsor berdasarkan karakter dan kondisi fisik alam di Kabupaten Sinjai, terdapat beberapa wilayah kecamatan yang sangat peka terhadap gangguan luar, baik yang bersifat alami maupun aktifitas manusia sebagai faktor pemicu gerakan tanah sehingga memiliki resiko tinggi diantaranya berada di Kecamatan Sinjai Barat, Sinjai Borong dan Sinjai Selatan. Sedangkan untuk potensi tanah longsor dengan tingkat resiko rendah sampai sedang menyebar di seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sinjai.

Jenis potensi bencana lain yang ada di Kabupaten Sinjai adalah berupa bencana tsunami. Potensi bencana ini terdapat di sepanjang pantai dalam wilayah Kabupaten Sinjai dengan tingkat resiko rendah, sedang dan tinggi. Potensi bencana tsunami dengan tingkat resiko tinggi berada di Kecamatan Pulau Sembilan. Sedangkan untuk tingkat resiko rendah sampai sedang terdapat di Kecamatan Sinjai Utara dan Sinjai Timur

Potensi ancaman (hazard) bencana alam di wilayah Kabupaten Sinjai sesuai dengan hasil identifikasi dan analisis potensi kebencanaan, maupun mengacu pada Indeks Rawan Bencana Indonesia yang diterbitkan oleh BNPB, maka ditetapkan jenis ancaman bencana di wilayah Kabupaten Sinjai terdiri atas:

a. Kawasan rawan banjir

Perubahan kondisi lahan dari waktu ke waktu membuat ancaman terjadinya banjir semakin besar. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: 1) Daya tampung sungai makin lama makin kecil akibat pendangkalan. 2) Fluktuasi debit air antara musim penghujan dengan musim kering makin tinggi. 3) Terjadi konversi lahan pertanian dan daerah buffer alami ke lahan non pertanian dengan mengakibatkan konservasi sehingga menyebabkan rusaknya daerah tangkapan air (catchment area). 4) Eksploitasi air tanah yang berlebihan menyebabkan lapisan akuife makin dalam sehingga penetrasi air laut lebih jauh ke darat yang berakibat mengganggu keseimbangan hidrologi.

Berdasarkan hasil overlay kemiringan lahan/ lereng, ketinggian, curah hujan, dan penggunaan lahan, maka terdapat beberapa wilayah/kawasan di

Kabupaten Sinjai yang memiliki tingkat kerawanan tinggi dan ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana banjir, yaitu di wilayah Kecamatan Sinjai Utara dan wilayah Kecamatan Sinjai Timur.

b. Kawasan rawan bencana tanah longsor

Berdasarkan pada hasil overlay peta dan analisis terhadap potensi longsor yang terjadi di Kabupaten Sinjai, maka arahan kawasan rawan bencana longsor adalah di Kecamatan Sinjai Barat, Kecamatan Sinjai Borong, Kecamatan Sinjai Selatan, dan Kecamatan Sinjai Tengah.

c. Kawasan rawan bencana tsunami

Sebab tsunami yang paling umum adalah gempa bumi bawah laut, terutama yang terjadi di zona penunjaman dengan kekuatan 7,0 skala magnitudo momen atau lebih. Penyebab lainnya adalah longsor, letusan gunung, dan jatuhnya benda besar seperti meteor ke dalam air.

Berdasarkan pada hasil kajian potensi tsunami yang dilakkan oleh BNPB, maka terdapat sebagian wilayah Kabupaten Sinjai yang memiliki potensi atau rawan bencana tsunami, yaitu pada bagian pesisir Kecamatan Sinjai Utara, Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Tellulimpoe, dan Kecamatan Pulau Sembilan.

d. Kawasan rawan bencana gelombang pasang

Berdasarkan pada hasil kajian kerawanan bencana di Kabupaten Sinjai, maka kawasan rawan bencana gelombang pasang terdapat di kawasan pesisir pantai Kecamatan Sinjai Utara dan Kecamatan Sinjai Timur dan Kecamatan Tellu Limpoe.

e. kawasan rawan bencana abrasi

Berdasarkan hasil interpretasi data citra SRTM menunjukkan bahwa di pesisir Kabupaten Sinjai tersusun atas tiga jenis tipologi pesisir, yaitu tipologi pesisir berbatu, berpasir, dan berlumpur.

Berdasarkan hasil analisis terhadap sebaran ketiga tipolgi wilayah pesisir di Kabupaten Sinjai, maka tipologi yang rentan terhadap abrasi adalah pada tipologi berlumpur. Kerusakan hutan maupun vegetasi mangrove dan bakau menjadi salah satu penyebab tingginya kerawanan abrasi di daerah-daerah pesisir berlumpur. Minimnya pertahanan dan penghalang alami berupa vegetasi khas pesisir berpasir membuat kerawanan abrasi di pesisir bertipologi berpasir meningkat. Kawasan yang teridentifikasi memiliki tingkat kerawanan tinggi

terhadap abrasi adalah di wilayah pesisir Kecamatan Sinjai Timur dan Kecamatan Tellulimpoe.

- f. Sempadan patahan aktif (*activefault*) pada kawasan rawan bencana gempa bumi

Wilayah Kabupaten Sinjai adalah merupakan bagian dari Teluk Bone sehingga patahan Walanae memiliki pengaruh kuat terhadap sebagian wilayah Kabupaten Sinjai. Berdasarkan hasil overlay peta kerawanan gempa di Provinsi Sulawesi Selatan, maka wilayah Kabupaten Sinjai yang teridentifikasi dilalui oleh patahan aktif sesar Walanae adalah pada wilayah Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Sinjai Utara, dan Kecamatan Tellulimpoe.

i. Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu kawasan yang merupakan aset-aset pertahanan dan keamanan/TNI Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas:

- a. Kantor Komando Distrik Militer 1424 Kabupaten Sinjai di Kecamatan Sinjai Utara;
- b. Kantor Komando Rayon Militer di Kecamatan Sinjai Barat, Kecamatan Sinjai Borong, Kecamatan Sinjai Selatan, Kecamatan Tellu Limpoe, Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Sinjai Tengah, Kecamatan Sinjai Utara, Kecamatan Bulupoddo, dan Kecamatan Pulau IX;
- c. Kantor Kepolisian Resort Kabupaten Sinjai di Kecamatan Sinjai Utara; dan
- d. Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Sinjai Barat, Kecamatan Sinjai Borong, Kecamatan Sinjai Selatan, Kecamatan Tellu Limpoe, Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Sinjai Tengah, Kecamatan Sinjai Utara, Kecamatan Bulupoddo, dan Kecamatan Pulau IX.

Rencana pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan Negara meliputi:

- a. mendukung peningkatan prasarana dan sarana di kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
- b. mendukung penataan kawasan pertahanan dan keamanan Negara.

3. Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup

Kemampuan Lahan

Kemampuan lahan, juga dikenal sebagai daya dukung lahan, adalah kapasitas suatu lahan untuk mendukung fungsi dan kegiatan manusia maupun alam dengan cara yang berkelanjutan. Kemampuan lahan mencakup sejauh mana lahan dapat menjalankan fungsi ekologisnya, mempertahankan produktivitas pertanian, dan memenuhi kebutuhan manusia serta masyarakat lokal tanpa menyebabkan degradasi atau kerusakan lingkungan yang signifikan.

Kemampuan lahan merupakan penilaian lahan secara sistematis berdasarkan atas sifat-sifat yang merupakan potensi dan penghambat dalam penggunaannya secara lestari. Kelas kemampuan lahan terbagi atas 8 (delapan) kelas. Dari kelas I s.d. IV dapat digunakan untuk pertanian, sedangkan dari kelas V s.d. VII untuk padang rumput, kelas VIII sebaiknya secara alami sebagai hutan lindung. Masing-masing kelas dibagi lagi menjadi subkelas yaitu subkelas erosi, subkelas genangan air, subkelas solum (penghambat perakaran) dan subkelas iklim. Subkelas dapat diuraikan lagi menjadi beberapa unit. Adapun kriteria penggunaan lahan yang diperkenankan pada setiap kelas kemampuan lahan diperlihatkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Kelas Penggunaan Lahan yang diperkenankan berdasarkan kelas kemampuan lahan

No	Kemampuan Lahan	Penggunaan Lahan yang diperkenankan
1	I	Semua jenis penggunaan Lahan
2	II	Semua jenis penggunaan lahan kecuali Psi
3	III	Semua jenis penggunaan lahan kecuali Psi dan Pi (hanya Psd)
4	IV	Pi, semua jenis pengembalan, semua jenis hutan
5	V	Semua jenis pengembalan, (Pgi, Pgds, Pgt), semua jenis hutan
6	VI	Pgds, Pgt, Semua jenis hutan
7	VII	Pgt, hutan
8	VIII	Cagar alam dan hutan lindung

Sumber : Klimgebiel dan Montgomery (1961), diringkaskan dan Fenton (2014)

Kelas kemampuan lahan didominasi oleh kelas VI sebesar 42.287,93 atau sekitar 48,85 % dengan faktor pembatas utama adalah lereng, khusus kelas Vbs

**RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029**

sebesar 38.038,84 atau sekitar 43,95 % dengan faktor pembatas bebatuan. Untuk kelas kemampuan lahan II dan IV sebesar 1.616,89 ha atau sekitar 1,87 % yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya pertanian dan penggembalaan, khusus untuk kelas II dapat dimanfaatkan sebagai memerlukan pengelolaan yang hati-hati, termasuk di dalamnya tindakantindakan konservasi untuk mencegah kerusakan atau memperbaiki hubungan air dan udara jika tanah diusahakan untuk pertanian tanaman semusim. Lahan yang tidak sesuai untuk budidaya pertanian secara keseluruhan berada dalam kelas VII dan VIII dengan luas sebesar 3.121,74 ha atau sekitar 3,61 % dengan faktor pembatas adalah bebatuan dan tekstur, seperti ditunjukkan pada Tabel di bawah dengan sebaran spasial pada Gambar 3.5.

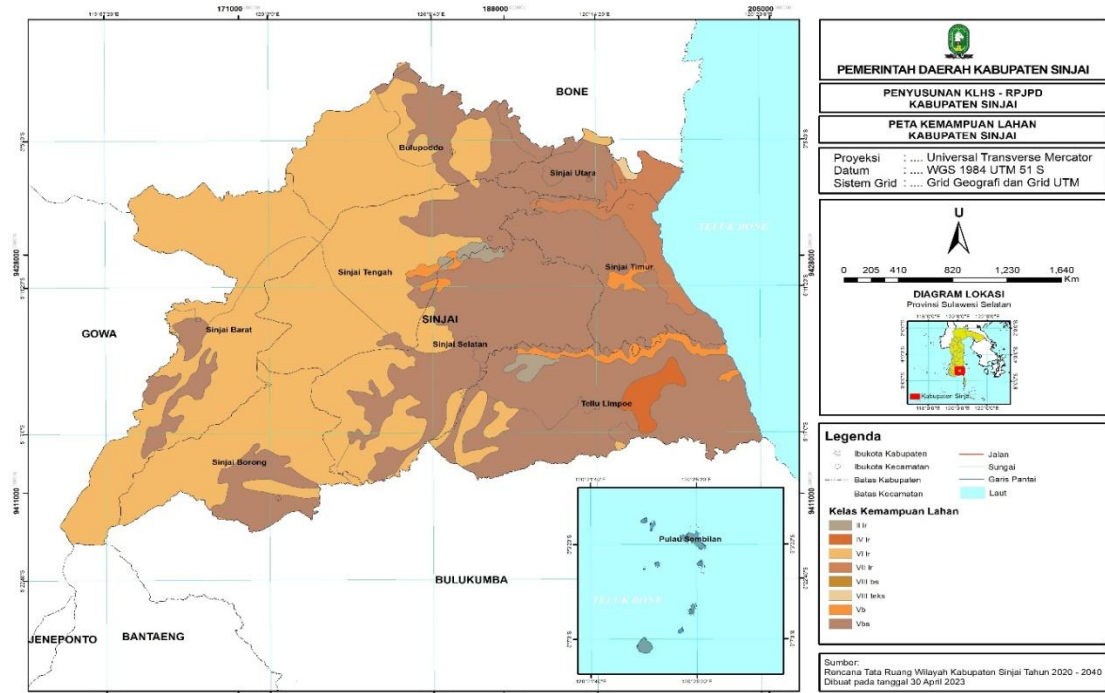
Tabel 2.2.
Kelas Kemampuan Lahan Kabupaten Sinjai

Kecamatan	Kelas Kemampuan Lahan (ha)							
	II lr	IV lr	Vb	Vbs	VI lr	VII lr	VIII bs	VIII teks
Bulupoddo				3,070.30	6,999.56			
Pulau Sembilan							212.82	
Sinjai Barat				1,545.43	13,299.86			
Sinjai Borong				2,204.16	6,915.00			
Sinjai Selatan	182.60		118.30	9,588.78	4,497.33			
Sinjai Tengah	177.17		224.86	2,743.89	9,480.42	28.01		
Sinjai Timur			365.11	5,474.70		1,798.81		
Sinjai Utara				2,103.69	120.44	975.11		106.99
Tellu Limpoe	356.79	900.33	784.52	11,307.89	975.32			
Total	716.56	900.33	1,492.79	38,038.84	42,287.93	2,801.93	212.82	106.99

Sumber: RTRW Kabupaten Sinjai Tahun 2019-2039

Gambar 2.5
Peta Kemampuan Lahan Kabupaten Sinjai

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI TAHUN 2025-2029



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dok. KLHS RPJMD 2025-2029) Kab. Sinjai, Tahun 2024

Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Kajian ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan suatu ekosistem untuk mendukung satu/rangkaian aktivitas dan ambang batas kemampuannya berdasarkan kondisi yang ada. Kepentingan kajian ini terutama adalah untuk menentukan apakah intensitas pembangunan masih dapat dikembangkan atau ditambahkan.

Daya dukung lingkungan merupakan batas kondisi kemampuan dari lingkungan untuk dapat menunjang kehidupan manusia. Penentuan daya dukung lingkungan dapat dijadikan sebagai patokan besarnya kemampuan suatu wilayah dengan kondisi lingkungan tertentu dapat mendukung kegiatan atau aktivitas manusia. Kebijakan pembangunan yang didasarkan dengan pertimbangan daya dukung lingkungan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih ramah terhadap lingkungan sehingga kerusakan lingkungan dapat diminimalkan.

Banyak metode yang telah dikembangkan dalam menentukan daya dukung lingkungan suatu wilayah. Sampai saat ini metode yang kerap digunakan yaitu metode penentuan daya dukung lingkungan yang berbasis pada potensi lingkungan seperti kapasitas bioekologi, kapasitas lahan, air, dan udara dalam menyerap karbondioksida. Selain itu penilaian daya dukung lingkungan juga dapat dilakukan berdasarkan jasa ekosistem.

Penilaian daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem dilakukan dengan mendasarkan pada manfaat yang dapat dihasilkan dari suatu ekosistem. Pendekatan nilai jasa ekosistem dalam perhitungan daya dukung lingkungan didasarkan pada fungsi dari sumberdaya alam dan lingkungan yaitu berbentuk barang (*goods*) dan pelayanan (*services*). Produk berupa barang yang dinilai berupa hasil langsung dari sumberdaya alam dan lingkungan seperti kayu, bahan tambang, minyak, gas, pangan, dan sebagainya. Sedangkan, produk jasa yang dinilai berupa hasil tidak langsung atau disebut pula jasa lingkungan (jasa ekosistem) berupa fungsi lingkungan seperti tata air, iklim, air bersih, biodiversitas, keindahan, kesejukan, dan lain sebagainya. Pendekatan nilai jasa ekosistem yang digunakan dalam perhitungan daya dukung lingkungan dapat dikategorikan dalam empat aspek yaitu :

1. Jasa penyediaan (*provisioning*);
2. Jasa pengaturan (*regulating*);
3. Jasa budaya (*cultural*);

Penilaian daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem secara gamblang dapat memperlihatkan kondisi spasial nilai manfaat dari tiap ruang pada suatu wilayah. Sebaran nilai manfaat dari setiap ruang dapat tergambar dengan jelas sehingga dalam penentuan arahan kebijakan pembangunan dapat langsung dioverlaykan untuk mengetahui kecocokan suatu ruang untuk suatu peruntukan lahan. Disamping itu, penilaian jasa ekosistem ini juga menghasilkan nilai manfaat dari suatu ruang baik secara langsung dan tidak langsung yang dapat digunakan dalam penentuan kebijakan pembangunan suatu wilayah. Penentuan kebijakan pembangunan dengan melihat nilai manfaat suatu ruang secara komprehensif dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tepat guna, efektif, dan efisien sehingga pada akhirnya kebijakan pembangunan tidak hanya berkiblat pada nilai ekonomis saja, tetapi juga aspek lingkungan dan sosial kemasyarakatan juga ikut diperhatikan. Pada laporan ini, kajian daya dukung Kabupaten Sinjai akan disajikan daya dukung yang berbasis potensi dan jasa ekosistem. Untuk berbasis potensi, daya dukung ditentukan pada kemampuan lahan di Kabupaten Sinjai. Sementara untuk jasa ekosistem ditentukan melalui penetapan status ketersediaan air dan pangan di wilayah Kabupaten dengan pendekatan jasa ekosistem.

A. Analisis Daya Dukung Penyediaan Pangan

Analisis daya dukung penyediaan pangan dilakukan berdasarkan Pedoman Teknis Pemodelan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan (Arsad, F., 2022). Untuk perhitungan ketersediaan pangan, data yang digunakan adalah Indeks Jasa Lingkungan dalam sistem grid dan data produksi bahan pangan tiap kabupaten. Pendekatan penghitungan ketersediaan jasa lingkungan penyedia pangan Kabupaten adalah diasumsikan sama dengan total ketersediaan beras di wilayah tersebut. Proyeksi penduduk dihitung menggunakan baseline data mulai tahun 2018 sampai tahun 2030, hasilnya seperti ditunjukkan pada Tabel di bawah.

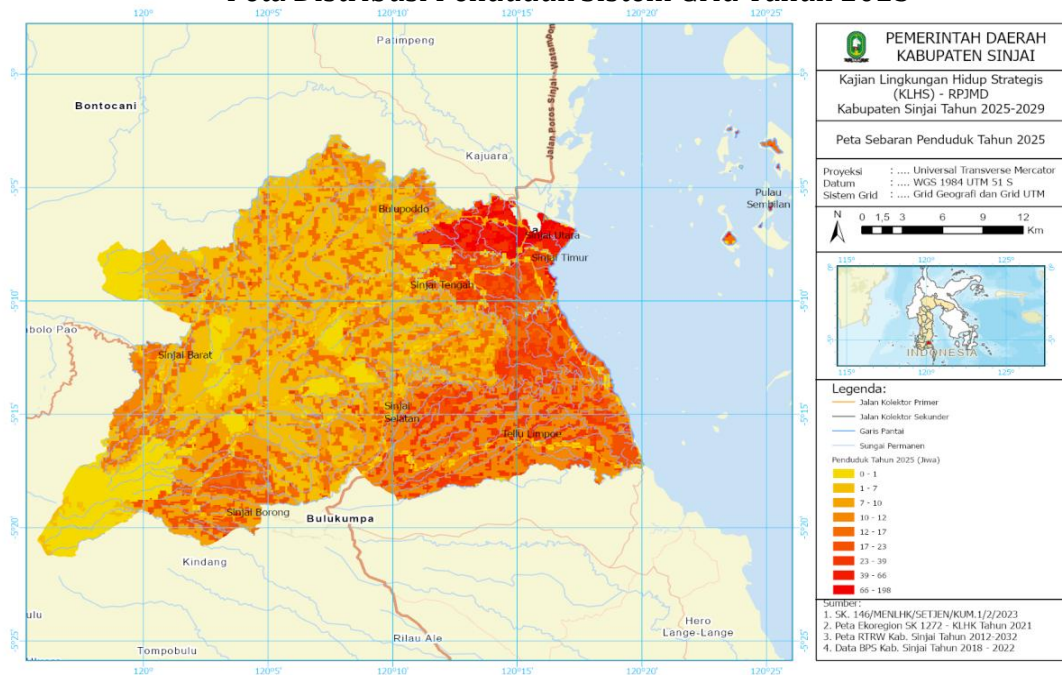
Tabel 2.3
Proyeksi Jumlah Penduduk sampai tahun 2030

Kecamatan	Penduduk Hasil Proyeksi Tahun 2024-2030 (Jiwa)								
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030
Sinjai Borong	16,159	16,185	17,718	17,816	18,405	19,014	19,653	20,313	23,963
Tellu Limpoe	33,496	33,711	37,724	38,204	39,916	41,705	43,605	45,592	56,968
Sinjai Selatan	39,203	39,427	40,473	40,618	41,101	41,590	42,085	42,587	45,187
Sinjai Timur	30,986	31,199	33,765	34,099	35,205	36,346	37,537	38,768	45,550
Sinjai Tengah	27,274	27,410	28,337	28,436	28,834	29,238	29,649	30,066	32,240
Sinjai Barat	24,391	24,538	25,873	26,041	26,615	27,203	27,807	28,424	31,724
Pulau Sembilan	7,616	7,637	7,568	7,546	7,523	7,500	7,477	7,454	7,340
Sinjai Utara	47,530	47,967	50,498	50,983	52,189	53,423	54,693	55,994	62,974
Bulupoddo	16,017	16,051	17,522	17,623	18,193	18,782	19,399	20,037	23,551
Total	242,672	244,125	259,478	261,366	267,982	274,800	281,906	289,234	329,498

Sumber: Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2025-2029

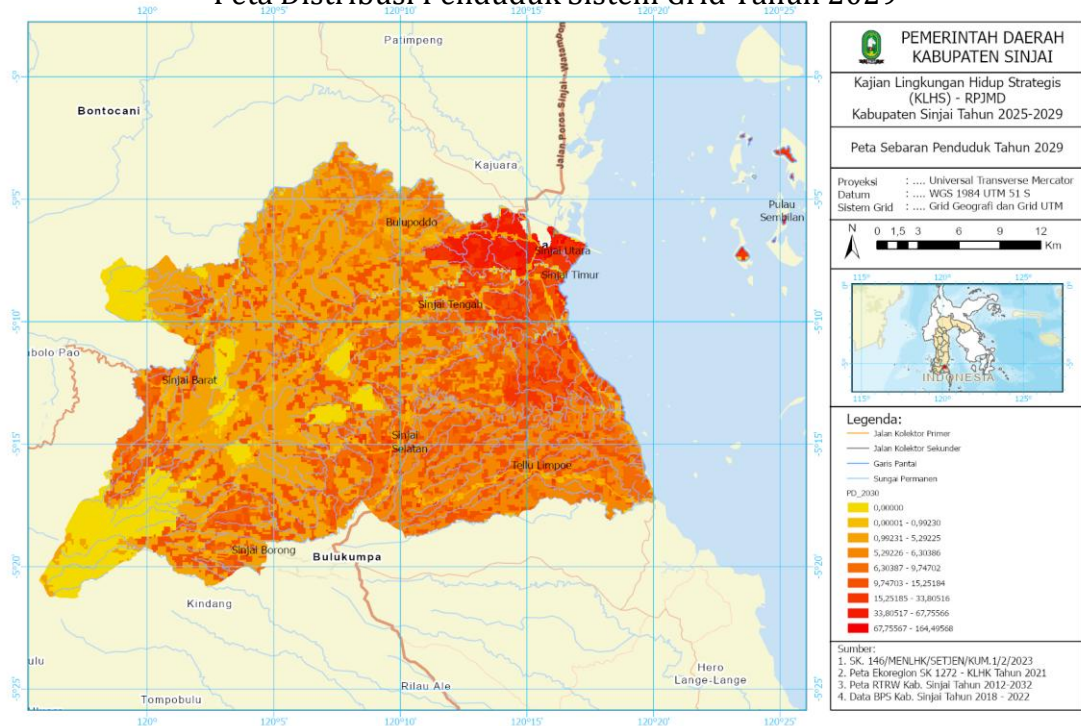
RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI TAHUN 2025-2029

Gambar 2.6
Peta Distribusi Penduduk Sistem Grid Tahun 2025



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dok. KLHS RPJMD 2025-2029) Kab. Sinjai, Tahun 2025

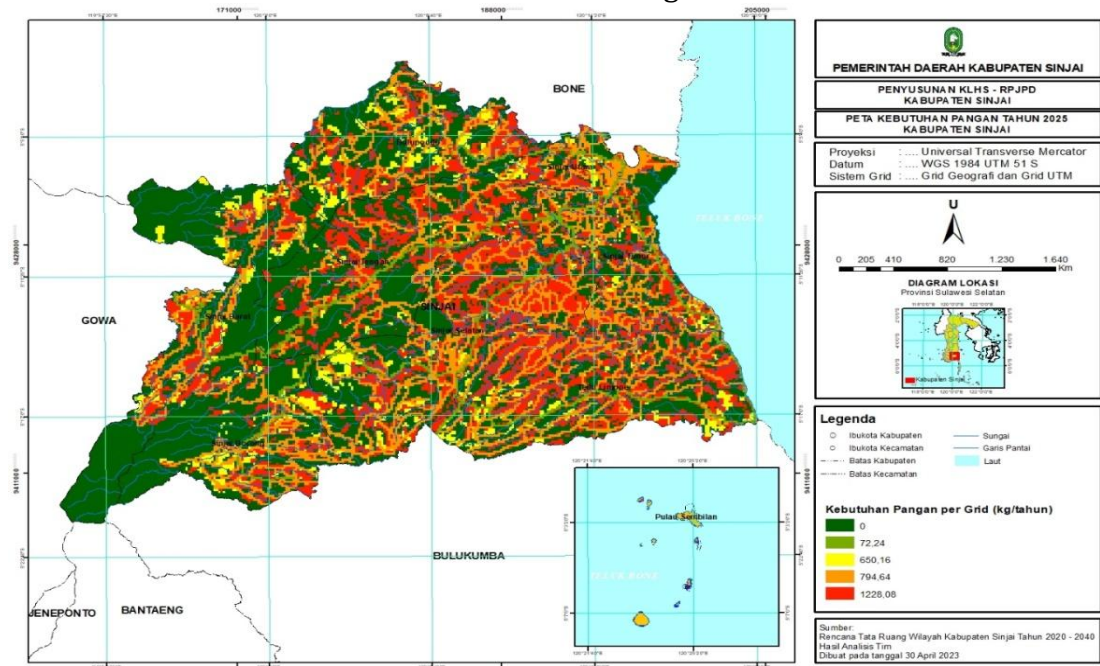
Gambar 2.7
Peta Distribusi Penduduk Sistem Grid Tahun 2029



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dok. KLHS RPJMD 2025-2029) Kab. Sinjai, Tahun 2025

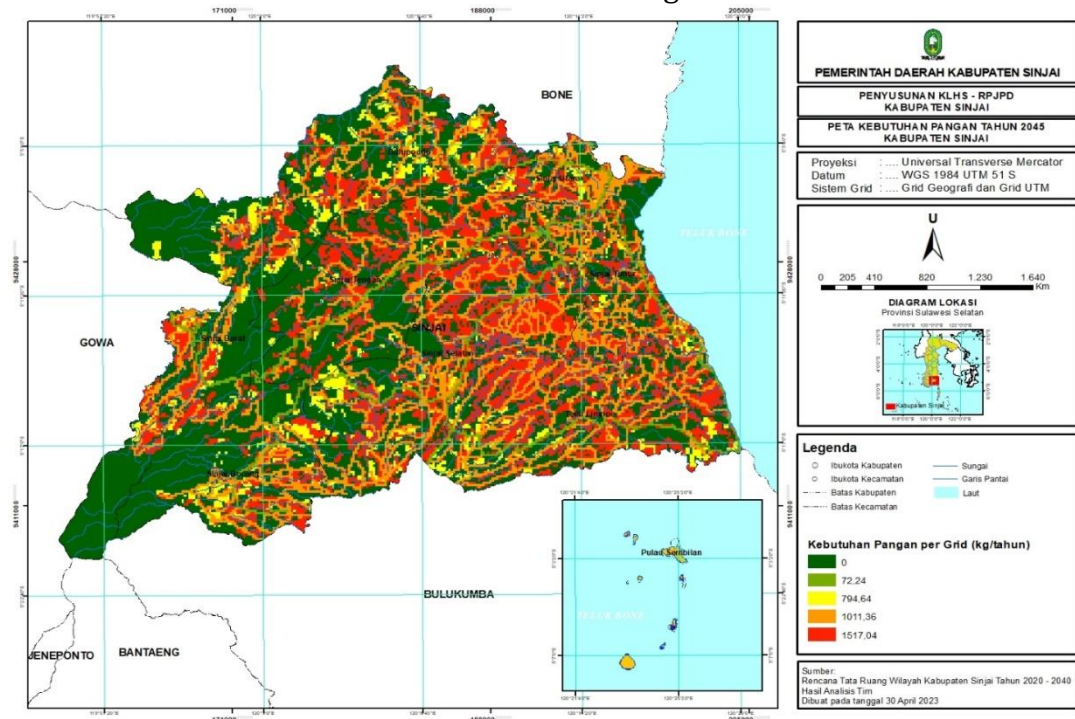
RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI TAHUN 2025-2029

Gambar 2.8
Peta Distribusi Kebutuhan Pangan Tahun 2025



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dok. KLHS RPJMD 2025-2029) Kab. Sinjai, Tahun 2025

Gambar 2.9
Peta Distribusi Kebutuhan Pangan Tahun 2029



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dok. KLHS RPJMD 2025-2029) Kab. Sinjai, Tahun 2025

Tabel 2.4
Profil Proyeksi Daya Dukung Pangan Kabupaten Sinjai Tahun 2025

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa) Tahun 2025	Kebutuhan Pangan Tahun 2025	Ketersediaan Pangan	Status Daya Dukung Pangan Tahun 2025	Belum Terlampaui (ha)	Belum Terlampaui (%)	Sudah Terlampaui (ha)	Sudah Terlampaui (%)
Bulupoddo	20.036	1.389.527,63	6.861.351,75	5.471.824,12	9.860,11	99,95	4,50	0,05
Pulau Sembilan	7.454	516.919,38	224.932,77	-291.986,61	146,14	68,57	67,00	31,43
Sinjai Barat	28.424	1.971.212,94	10.766.812,09	8.795.599,15	14.548,62	99,85	22,50	0,15
Sinjai Borong	20.313	1.408.729,64	6.598.634,53	5.189.904,89	9.418,06	99,35	61,16	0,65
Sinjai Selatan	42.587	2.953.407,57	9.648.386,54	6.694.978,97	14.241,87	98,85	166,15	1,15
Sinjai Tengah	30.066	2.085.088,54	8.544.415,21	6.459.326,67	12.606,75	99,84	20,25	0,16
Sinjai Timur	38.768	2.688.533,66	4.780.391,89	2.091.858,23	6.209,38	82,22	1.342,76	17,78
Sinjai Utara	55.994	3.883.155,17	2.114.553,21	-1.768.601,96	654,37	20,36	2.560,37	79,64
Tellu Limpoe	45.592	3.161.792,44	9.705.476,50	6.543.684,06	13.693,79	93,34	977,50	6,66
Grand Total	289.234	20.058.366,97	59.244.954,49	39.186.587,52	81.379,09	93,97	5.222,19	6,03

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dok. KLHS RPJMD 2025-2029) Kab. Sinjai, Tahun 2025

**RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029**

Tabel 2.5
Profil Proyeksi Daya Dukung Pangan Kabupaten Sinjai Tahun 2029

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa) Tahun 2029	Kebutuhan Pangan Tahun 2029	Ketersediaan Pangan	Status Daya Dukung Pangan Tahun 2029	Belum Terlampaui (ha)	Belum Terlampaui (%)	Sudah Terlampaui (ha)	Sudah Terlampaui (%)
Bulupoddo	23.184	1.607.827,21	6.861.351,75	5.253.524,54	9.623,24	97,55	241,37	2,45
Pulau Sembilan	54.486	3.778.604,36	224.932,77	-3.553.671,59	181,91	85,35	31,23	14,65
Sinjai Barat	44.654	3.096.784,97	10.766.812,09	7.670.027,12	14.465,37	99,27	105,75	0,73
Sinjai Borong	44.105	3.058.678,54	6.598.634,53	3.539.955,99	9.082,60	95,82	396,62	4,18
Sinjai Selatan	31.793	2.204.861,13	9.648.386,54	7.443.525,41	13.332,87	92,54	1.075,15	7,46
Sinjai Tengah	31.035	2.152.254,90	8.544.415,21	6.392.160,31	12.206,25	96,67	420,75	3,33
Sinjai Timur	7.363	510.608,24	4.780.391,89	4.269.783,65	6.739,45	89,24	812,69	10,76
Sinjai Utara	61.511	4.265.803,94	2.114.553,21	-2.151.250,73	2.780,22	86,48	434,52	13,52
Tellu Limpoe	22.802	1.581.324,12	9.705.476,50	8.124.152,38	13.261,19	90,39	1.410,10	9,61
Grand Total	320.501	22.226.775,15	59.244.954,49	37.018.179,34	81.673,10	94,31	4.928,18	5,69

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dok. KLHS RPJMD 2025-2029) Kab. Sinjai, Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 2.4 dan tabel 2.5 Kabupaten Sinjai pada dasarnya ketersediaan pangannya masih berada dalam posisi surplus dan aman kecuali pada Kecamatan Pulau Sembilan yang tidak memiliki lahan persawahan. Kecamatan Sinjai Selatan dan Kecamatan Tellu Limpoe memiliki status kebutuhan paling aman meskipun memiliki jumlah penduduk terbesar dari kecamatan lainnya. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, maka kebutuhan pangan tahun 2029 semakin meningkat sesuai dengan jumlah penduduk yang juga semakin meningkat, berdasarkan status kebutuhan pangan, maka Kecamatan Pulau Sembilan, Kecamatan Sinjai Utara, Kecamatan Sinjai Timur dan Kecamatan Tellu Limpoe berada dalam kondisi perlu mendapat perhatian.

B. Analisis Daya Dukung Ketersediaan Air Bersih

Analisis ambang batas dan status DDLH penyedia air secara kuantitatif dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: (i) perhitungan ketersediaan air, (ii) perhitungan kebutuhan air untuk lahan dan domestik, (iii) perhitungan ambang batas penduduk, dan (iv) penentuan status DDLH penyedia air di setiap grid. Empat tahapan tersebut dilakukan pada sistem grid dengan resolusi 5"x5" ($\pm 150 \text{ m} \times 150 \text{ m}$).

Total ketersediaan air Kabupaten Sinjai bersumber dari SK. No 146 MENLHK 1.2.2023 sebesar 888,788,070.56 m³/tahun. Kemudian dihitung dengan mendistribusikan ketersediaan air di setiap Kecamatan Kabupaten Sinjai dengan menggunakan indeks jasa ekosistem penyedia air (IJEPA) sebagai bobot pendistribusian. Data ketersediaan air di setiap Kecamatan diperoleh berdasarkan administrasi kecamatan dari RTRW Kabupaten Sinjai Tahun 2012 – 2032.

Hasil perhitungan dibuat pendistribusian potensi ketersediaan air ke dalam sistem grid. Hal ini dilakukan dengan mendistribusikan total potensi ketersediaan air Kabupaten ke dalam sistem grid secara proporsional berdasarkan perbandingan antara Nilai Indeks Jasa Lingkungan masing-masing grid dengan jumlah total air yang tersedia setiap tahun di Kabupaten Sinjai.

Dalam perspektif pengembangan wilayah, penggunaan konsep ambang batas pada daya dukung lingkungan hidup (DDLH) bertujuan untuk mempelajari dampak yang terjadi pada lingkungan akibat pengembangan wilayah dan

pertumbuhan penduduk. Selanjutnya, ambang batas ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam membatasi pertumbuhan. DDLH digambarkan melalui perbandingan jumlah sumber daya yang dapat dikelola terhadap jumlah konsumsi penduduk. Artinya, peningkatan jumlah penduduk tanpa ada peningkatan jumlah sumberdaya akan menyebabkan DDLH semakin mendekati ambang batasnya.

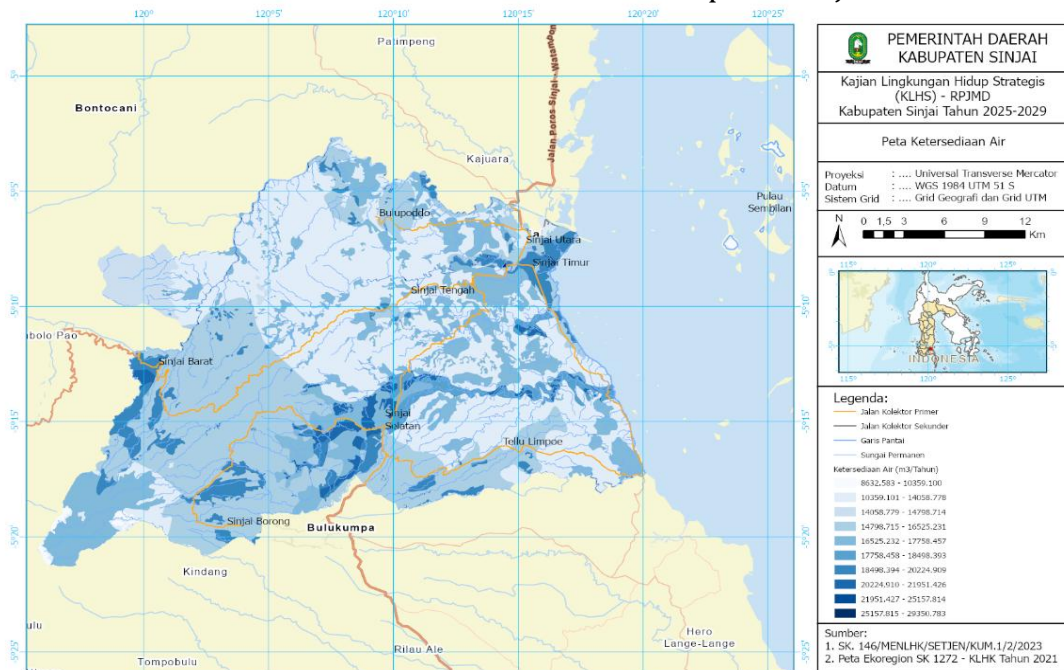
Status daya dukung air dihitung dengan memperkurangkan antara ketersediaan dan kebutuhan, baik itu pada tahun 2025 maupun tahun 2029. Apabila kebutuhan lebih besar dari pada ketersediaan, maka grid tersebut didefinisikan memiliki status DDLH penyedia air “Melampaui”, dan jika sebaliknya maka grid tersebut memiliki status DDLH penyedia air “Belum Melampaui”.

Ketersediaan air Kabupaten Sinjai perlu mendapat perhatian meskipun masih terdapat 77,82% belum terlampaui pada tahun 2025 dan mengalami penurunan menjadi 74,19 % akibat pertambahan jumlah penduduk (Tabel 3.14). Adapun Kecamatan dengan ketersediaan air terbanyak adalah Kecamatan Sinjai Barat sebesar 154,163,438.28 m³/tahun (Gambar 3.14) dengan nilai kebutuhan air hanya sebesar 111,704,005.74 m³/tahun, diperoleh selisih sebesar 42,459,432.54 m³/tahun sehingga memiliki ambang batas 12,282 Jiwa dengan status DDLH penyedia air dominan belum terlampaui.

Berdasarkan formulasi di atas serta dengan memanfaatkan Peta Jasa Lingkungan Penyedia Air, maka diperoleh potensi ketersediaan air sebesar seperti ditunjukkan pada Tabel 2.6. Sebaran secara spasial daya dukung air diperlihatkan pada Gambar 2.10 untuk proyeksi penduduk tahun 2025 dan Gambar 2.11 untuk proyeksi penduduk tahun 2029. Dari gambar tersebut terlihat bahwa terdapat beberapa lokasi yang mengalami defisit, baik pada tahun 2025 maupun tahun 2029, bahkan pada tahun 2029 daerah yang mengalami defisit semakin meluas, terutama di Kecamatan Sinjai Borong dan Kecamatan Sijai Barat. Wilayah yang berpotensi mengalami defisit terdapat pada kawasan dengan bentang lahan berupa Ekoregion Kompleks Pegunungan Vulkanik Malino berdasarkan SK-1272 KLHK, dengan vegetasi alami berupa Vegetasi savanna pegunungan monsun dan tutupan lahan Hutan rimba dengan tutupan lahan Permukiman dan Sawah.

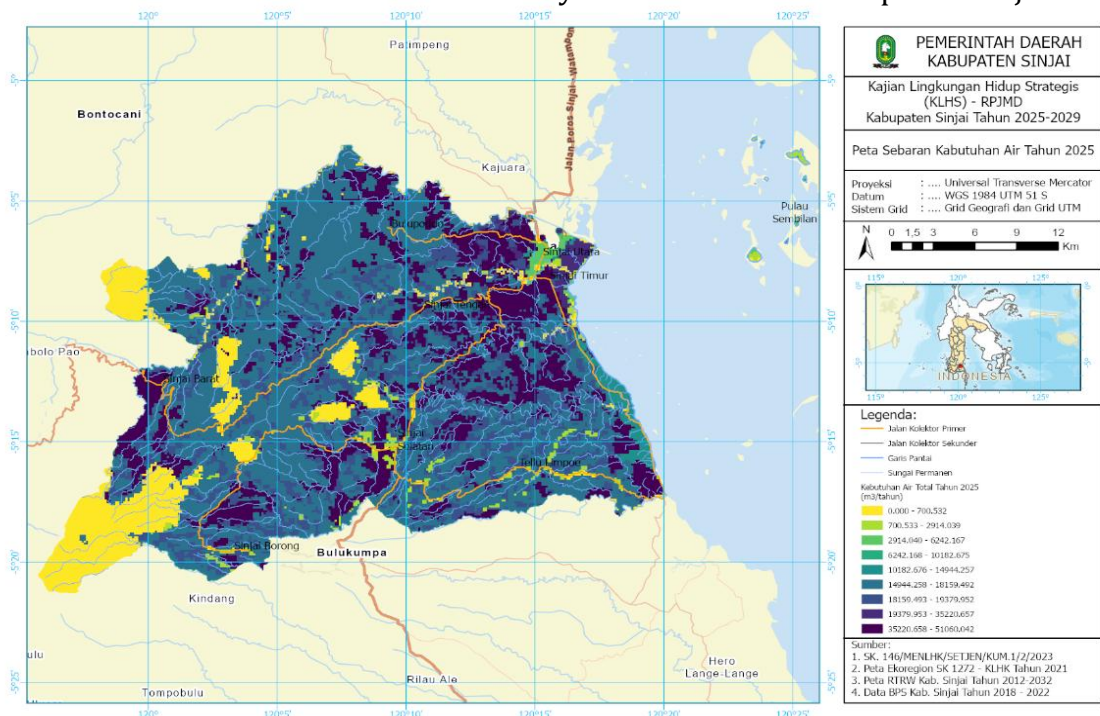
RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI TAHUN 2025-2029

Gambar 2.10
Peta ketersediaan air bersih Kabupaten Sinjai



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dok. KLHS RPJMD 2025-2029) Kab. Sinjai, Tahun 2025

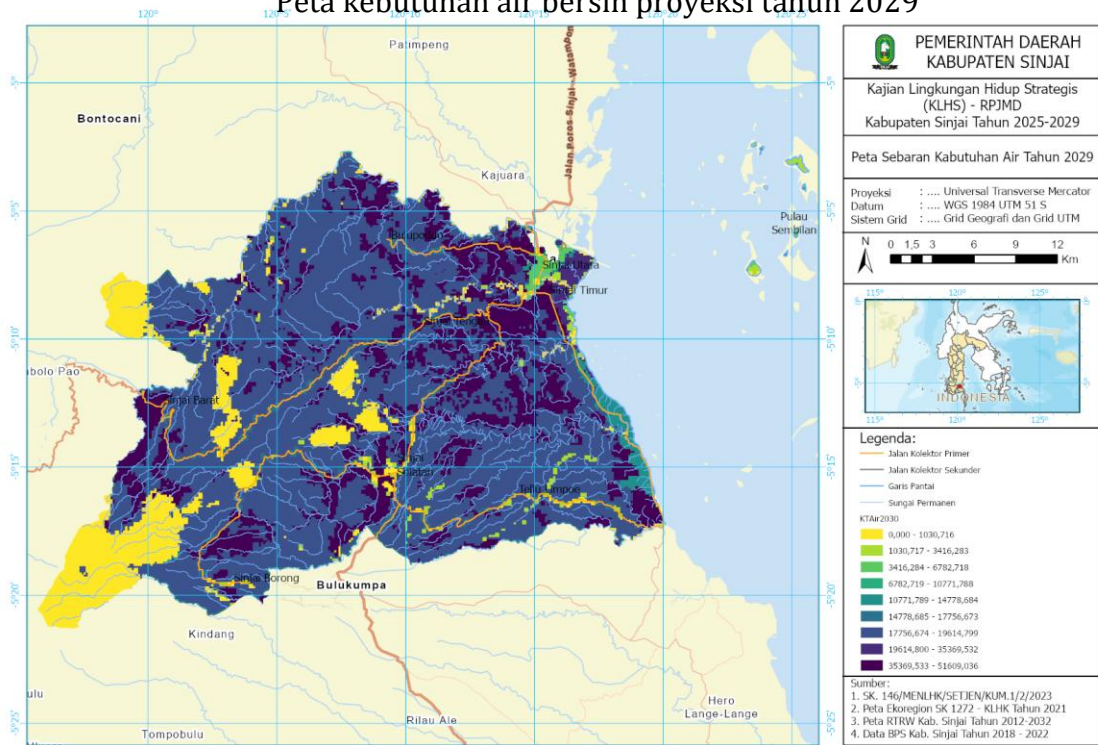
Gambar 2.11
Peta Kebutuhan air bersih Proyeksi Tahun 2025 Kabupaten Sinjai



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dok. KLHS RPJMD 2025-2029) Kab. Sinjai, Tahun 2025

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI TAHUN 2025-2029

Gambar 2.12
Peta kebutuhan air bersih proyeksi tahun 2029



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dok. KLHS RPJMD 2025-2029) Kab. Sinjai, Tahun 2025

**RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029**

Tabel 2.6
Daya Dukung Daya Tampung Ketersediaan Air Tahun 2025

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa) Tahun 2025	Ketersediaan Air (m3/tahun)	Kebutuhan Domestik (m3/tahun) Tahun 2025	Kebutuhan Lahan (m3/tahun)	Total Kebutuhan Air (m3/tahun) Tahun 2025	Status Daya Dukung Air Tahun 2025	Belum Terlampaui (ha)	Belum Terlampaui (%)	Sudah Terlampaui (ha)	Sudah Terlampaui (%)
Bulupoddo	20.036	99.031.652,33	1.731.154,67	103.662.646,56	105.393.801,23	-6.362.148,90	7.640,63	77,46	2.223,91	22,54
Pulau Sembilan	7.454	2.271.871,28	644.005,80	-	644.005,80	1.627.865,48	209,67	98,37	3,47	1,63
Sinjai Barat	28.424	154.163.438,28	2.455.854,55	107.884.576,51	110.340.431,06	43.823.007,22	12.269,61	84,21	2.301,43	15,79
Sinjai Borong	20.313	98.899.343,05	1.755.068,21	66.868.219,01	68.623.287,22	30.276.055,82	8.379,11	88,40	1.100,05	11,60
Sinjai Selatan	42.587	151.535.031,69	3.679.524,67	165.650.896,80	169.330.421,47	-17.795.389,78	9.673,24	67,14	4.734,75	32,86
Sinjai Tengah	30.066	119.825.280,25	2.597.710,96	111.367.872,00	113.965.582,96	5.859.697,30	10.968,75	86,87	1.658,25	13,13
Sinjai Timur	38.768	80.841.013,54	3.349.516,89	97.084.249,10	100.433.766,00	-19.592.752,46	4.235,53	56,08	3.316,61	43,92
Sinjai Utara	55.994	34.950.954,93	4.837.847,54	37.638.626,18	42.476.473,72	-7.525.518,79	1.636,17	50,90	1.578,61	49,10
Tellu Limpoe	45.592	147.269.485,20	3.939.122,52	138.068.870,11	142.007.992,64	5.261.492,57	12.379,47	84,38	2.291,84	15,62
Grand Total	289.234	888.788.070,56	24.989.805,83	828.225.956,27	853.215.762,10	35.572.308,46	67.392,16	77,82	19.208,92	22,18

Sumber: Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kabupaten Sinjai Tahun 2025-2029

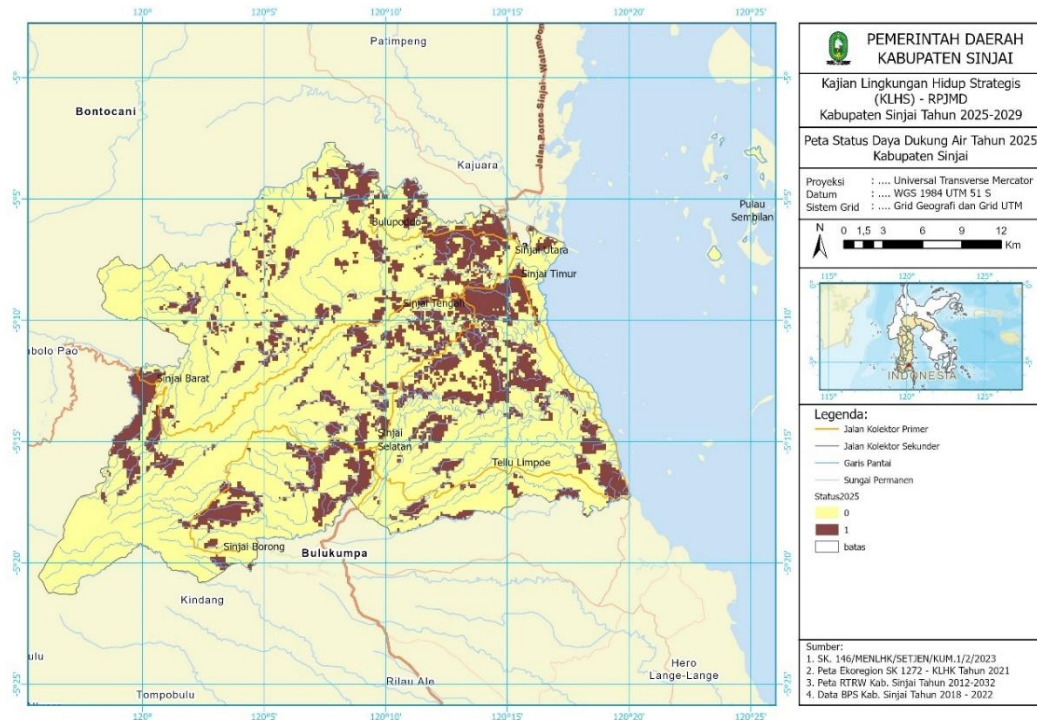
**RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029**

Tabel 2.7.
Daya Dukung Daya Tampung Ketersediaan Air Tahun 2029

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa) Tahun 2029	Ketersediaan Air (m3/tahun)	Kebutuhan Domestik (m3/tahun) Tahun 2029	Kebutuhan Lahan (m3/tahun)	Total Kebutuhan Air (m3/tahun) Tahun 2029	Status Daya Dukung Air Tahun 2029	Belum Terlampaui (ha)	Belum Terlampaui (%)	Sudah Terlampaui (ha)	Sudah Terlampaui (%)
Bulupoddo	23.184	99.031.652,33	2.003.118,54	103.662.646,54	105.665.765,08	-6.634.112,75	7.625,87	77,31	2.238,71	22,69
Pulau Sembilan	54.486	2.271.871,28	4.707.590,73	-	4.707.590,73	-2.435.719,45	209,67	98,36	3,49	1,64
Sinjai Barat	44.654	154.163.438,28	3.858.143,07	107.884.576,54	111.742.719,61	42.420.718,68	12.248,31	84,06	2.322,80	15,94
Sinjai Borong	44.105	98.899.343,05	3.810.668,00	66.868.218,99	70.678.886,99	28.220.456,05	8.371,84	88,32	1.107,33	11,68
Sinjai Selatan	31.793	151.535.031,69	2.746.935,86	165.650.896,81	168.397.832,67	-16.862.800,98	9.673,27	67,14	4.734,75	32,86
Sinjai Tengah	31.035	119.825.280,25	2.681.396,16	111.367.872,00	114.049.268,16	5.776.012,10	10.968,75	86,87	1.658,25	13,13
Sinjai Timur	7.363	80.841.013,54	636.143,50	97.084.249,11	97.720.392,61	-16.879.379,07	4.235,50	56,08	3.316,61	43,92
Sinjai Utara	61.511	34.950.954,93	5.314.570,44	37.638.626,19	42.953.196,63	-8.002.241,70	1.926,50	59,93	1.288,24	40,07
Tellu Limpoe	22.802	147.269.485,20	1.970.099,56	138.068.870,08	140.038.969,64	7.230.515,57	12.335,16	84,08	2.336,14	15,92
Grand Total	320.501	888.788.070,56	27.691.324,77	828.225.956,26	855.917.281,03	32.870.789,53	67.594,87	78,05	19.006,32	21,95

Sumber: Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kabupaten Sinjai Tahun 2025-2029

Gambar 2.13
Peta Daya Dukung Air Kabupaten Sinjai Proyeksi Tahun 2025



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dok. KLHS RPJMD 2025-2029) Kab. Sinjai, Tahun 2025

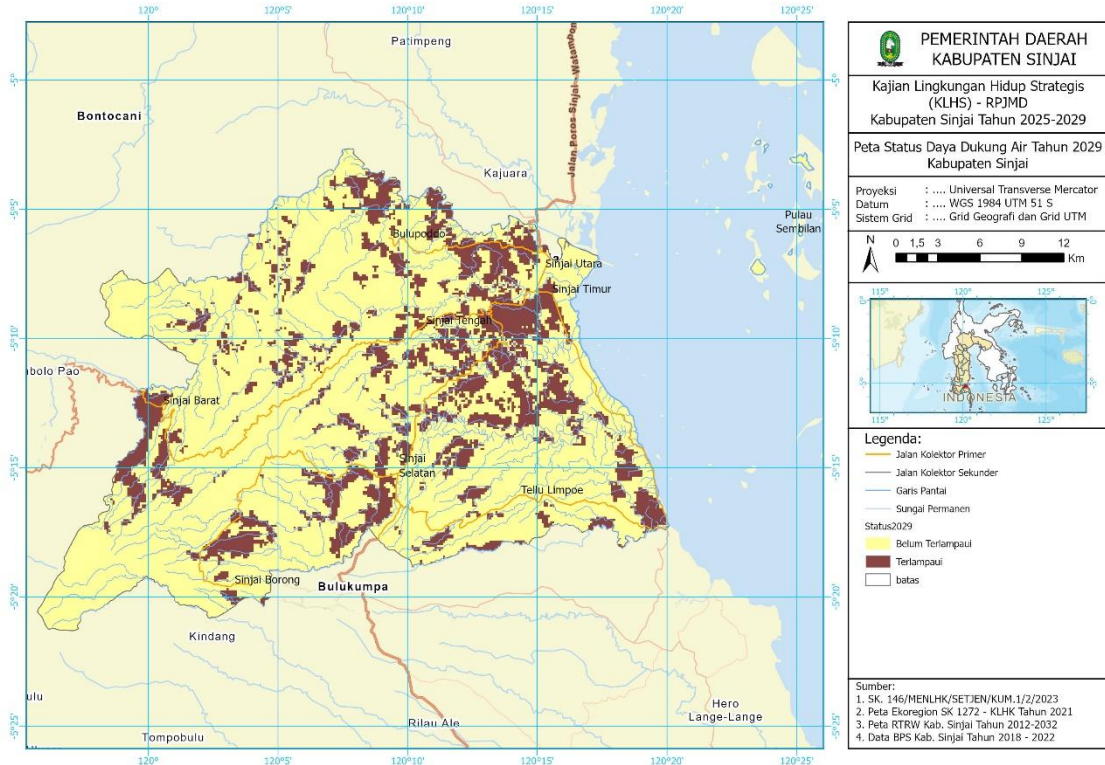
Hasil analisis spasial diperoleh peningkatan kebutuhan air dari tahun 2025 sampai tahun 2029 sebesar 2.701.518,93 m³/tahun. Akibat peningkatan kebutuhan air yang cukup besar sementara asumsi ketersediaan air dianggap tetap, maka di beberapa lokasi yang semula SURPLUS menjadi DEFISIT.

Analisis menyeluruh mengenai sumber daya air yang ada, tingkat konsumsi saat ini, dan proyeksi kebutuhan air di masa depan telah dilakukan dengan penyajian secara kuantitatif seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.5, Tabel 2.6 dan Tabel 2.7, demikian pula sebarannya seperti ditunjukkan pada Gambar 2.10 dan Gambar 2.11. Untuk mencegah DEFISIT yang semakin besar pada masa datang, maka beberapa langkah yang bisa diambil meliputi perbaikan infrastruktur, penggunaan teknologi efisien air, pengelolaan tata air yang baik, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya penghematan air. Jika ketersediaan air dari sumber utama mengalami defisit, dapat dipertimbangkan untuk mencari sumber air alternatif seperti pengumpulan air hujan, desalinasi air laut, atau pengolahan air limbah yang lebih baik untuk menghasilkan air yang dapat digunakan. Mengimplementasikan kebijakan pengelolaan tata air yang

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI TAHUN 2025-2029

berkelanjutan dan menjaga kelestarian daerah aliran sungai sangat penting. Hal ini meliputi perlindungan dan rehabilitasi sumber daya air, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan air, dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengelolaan air. Sektor pertanian dan industri menjadi penyumbang terbesar terhadap konsumsi air perlu diperkenalkan teknik irigasi yang efisien dan teknologi produksi yang ramah lingkungan dapat membantu mengurangi tekanan pada sumber daya air.

Gambar 2.14
Peta Daya Dukung Air Proyeksi Tahun 2029



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dok. KLHS RPJMD 2025-2029) Kab. Sinjai, Tahun 2025

4. Berketahanan Energy, Air Dan Kemandirian Pangan

Ketahanan Energi, Air dan Pangan

Ketahanan Energi

a. Konsumsi Listrik Per Kapita

Capaian ketahanan energi dihitung berdasarkan komponen indeks ketahanan energi berupa konsumsi listrik per kapita yang dihitung berdasarkan jumlah konsumsi listrik rumah tangga per jumlah penduduk. Secara keseluruhan jumlah konsumsi listrik penduduk di Kabupaten Sinjai mengalami peningkatan

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI TAHUN 2025-2029

yang ditandai dengan jumlah kWh yang terpakai. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Pemakaian KWH Listrik Kabupaten Sinjai, Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Total KWH	0	0	0	67.932	78.534.463
Total penduduk	259.478	261.366	261.366	263.827	276.269
Konsumsi listrik	0	0	0	0.26	28,47

Sumber : PLN Kabupaten Sinjai. Tahun 2025

Ketahanan Pangan

Indikator yang digunakan untuk menggambarkan ketahanan pangan Kabupaten Sinjai meliputi :

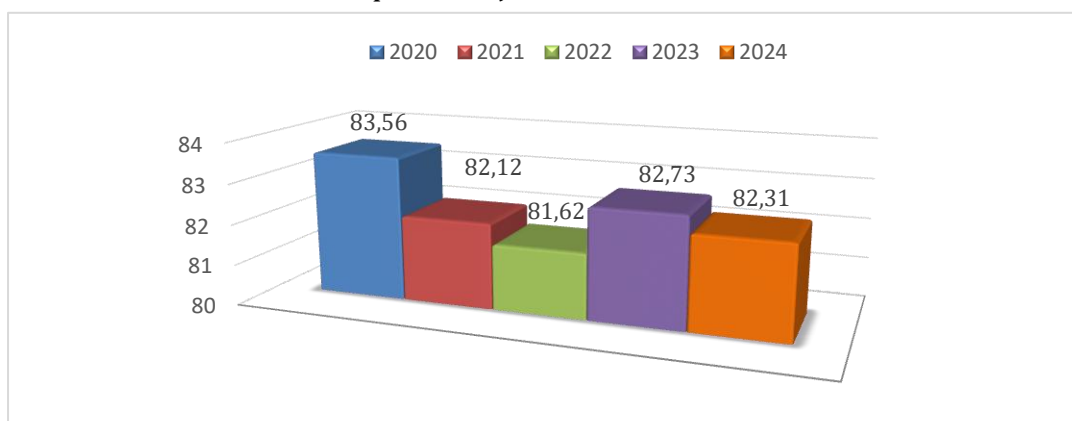
a. Indeks Ketahanan Pangan

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Penyusunan IKP mengadopsi pengukuran indeks global (Global Food Security Index - GFSI) dengan berbagai penyesuaian metodologi sesuai dengan ketersediaan data dan informasi di tingkat wilayah kabupaten/kota dan provinsi.

Indeks Ketahanan Pangan pada tahun 2024 sebesar 82,31 poin mengalami penurunan sebesar 0,42 poin dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 82,73 poin. Penurunan Nilai IKP Kabupaten Sinjai oleh aspek keterjangkauan dan aspek pemanfaatan pangan. Bentuk geografis daerah yang berbukit sehingga menyebabkan distribusi pangan sulit menjangkau sampai ke lokasi yang paling jauh, hal ini dapat berdampak pada harga pangan kurang terjangkau, utamanya bagi penduduk di bawah garis kemiskinan. Selain itu, persentase balita stunting yang masih tinggi juga memperngaruhi nilai dari aspek pemanfaatan pangan yang mana aspek ini memiliki bobot lebih tinggi dibanding aspek lainnya.

Meski demikian, Kabupaten Sinjai selama lima tahun kebelakang masih tergolong dalam Prioritas 6 atau sangat tahan terhadap pangan. Kondisi ini memberikan gambaran di mana semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk kebutuhan mereka agar dapat menjalani kehidupan aktif dan sehat. Nilai IKP selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik 2.2.

Grafik 2.2
Indeks Ketahanan Pangan
Kabupaten Sinjai Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kaupaten Sinjai Tahun 2025

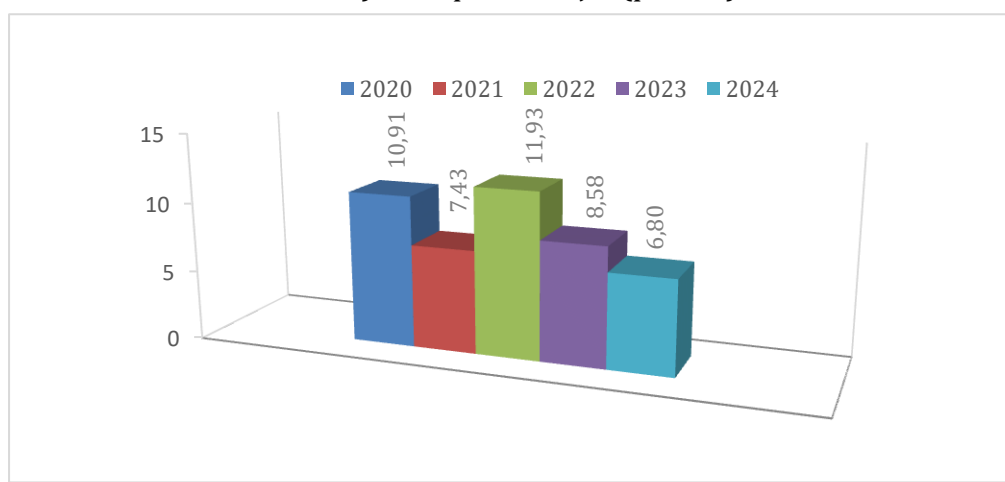
b. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence Of Undemourishmen*)

Ketidakcukupan konsumsi pangan (*undernourishment*) didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang secara regular mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif dan produktif. Pada tahun 2024 sebesar 6,80 persen mengalami penurunan sebesar 1,78 persen dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 8,58 persen. Dengan semakin berkurangnya masyarakat Kabupaten Sinjai yang defisit kalori, ini mengindikasikan bahwa berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan dan akses pangan berpengaruh signifikan menekan ketidakcukupan konsumsi pangan.

Perubahan pola ketidakcukupan konsumsi energi dari makanan dalam suatu populasi dapat disebabkan oleh fluktuasi harga pangan serta beberapa tantangan diantaranya: a) Perubahan iklim yang berdampak pada pergeseran musim tanam, pola tanam, produktivitas, serangan hama dan penyakit serta kebutuhan air; b) Akses terhadap pangan yang masih belum merata akibat faktor

ekonomi dan kondisi fisik; dan c) Jumlah penduduk yang terus bertambah yang membutuhkan kecukupan konsumsi pangan. Dibutuhkan komitmen pemerintah daerah dalam pengembangan dan penyelenggaraan pangan serta regulasi yang mendukung pembangunan ketahanan pangan yang mampu mencukupi kebutuhan konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Sinjai, dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.3
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence Of Undemourishmen) Kabupaten Sinjai (persen). Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Sinjai. Tahun 2025

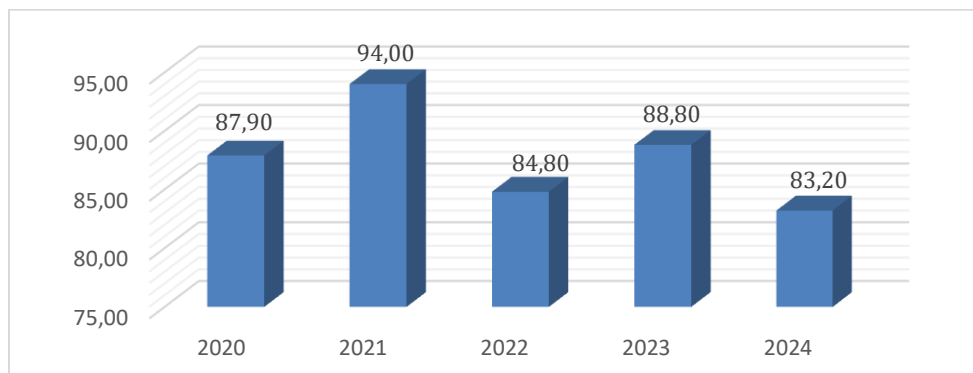
c. Skor Pola Pangan Harapan

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan indikator mutu gizi konsumsi pangan dan keragaman pangan berdasarkan proporsi sumbangan energi yang terdiri dari 9 kelompok yaitu padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah. serta lain-lain. Perkembangan Skor PPH Kabupaten Sinjai ditampilkan pada Grafik 2.4, di mana pencapaian selama lima tahun terkahir fluktuatif. Skor PPH pada Tahun 2024 sebesar 83,20 poin mengalami penurunan sebesar 5,60 poin dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 88,80 poin

Hal ini dipengaruhi oleh kebiasaan konsumsi masyarakat yang masih sangat bergantung pada pangan pokok berbasis beras. Budaya konsumsi ini menghambat upaya diversifikasi pangan menuju konsumsi yang lebih beragam dan bergizi seimbang. Masyarakat cenderung kurang memanfaatkan potensi produk lokal yang kaya akan vitamin, mineral, dan serat, sehingga mengurangi

kualitas gizi yang seharusnya dapat dicapai melalui konsumsi pangan yang lebih bervariasi, dapat dilihat pada grafik berikut .

Grafik 2.4
Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan
Kabupaten Sinjai (Persen), Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Sinjai. Tahun 2025

Ketahanan Air

a. Kapasitas Air Baku

Capaian ketahanan air dihitung berdasarkan kapasitas air baku yang tersedia. Dari 4 (empat) sumber air yang ada dengan kapasitas tersedia yang masih cukup besar menunjukkan pasokan air bersih untuk Kabupaten Sinjai masih cukup untuk terpakai sampai tahun 2045. Capaian rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum kurun waktu 5 tahun terakhir khususnya rumah tangga yang terlayani jaringan perpipaan PDAM dan BPSPM per kecamatan, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9
Kapasitas air Baku Kabupaten Sinjai Tahun 2024

Nama	Jenis	Kapasitas (L/Det)	Total Kapasitas Terpakai (L/DET)
Sungai Tangka	Sungai	1.100	105
Mata air Balangpesoang	Mata Air	50	10
Sungai Apareng	Sungai	200	10
Sungai Balantieng	Sungai	700	110

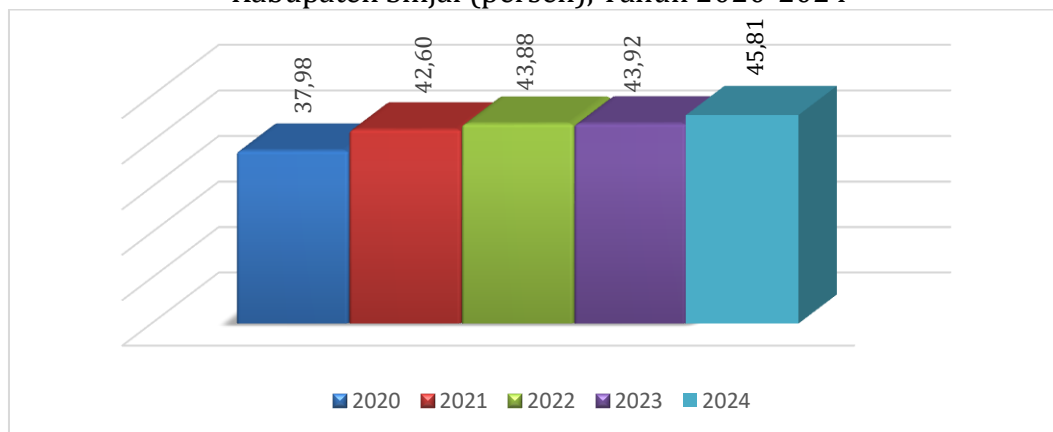
Sumber : PDAM Kabupaten Sinjai, Tahun 2025

b. Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan

Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, pada tahun 2024 sebesar 45,81 persen mengalami peningkatan sebesar 1,89 persen dibandingkan pada tahun

2023 sebesar 43,92 persen. Ini menunjukkan jumlah sambungan rumah tangga yang terlayani air siap minum perpipaan semakin banyak, dapat dilihat pada grafik berikut

Grafik 2.5
Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan
Kabupaten Sinjai (persen), Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai. Tahun 2025

5. Lingkungan Hidup Berkualitas

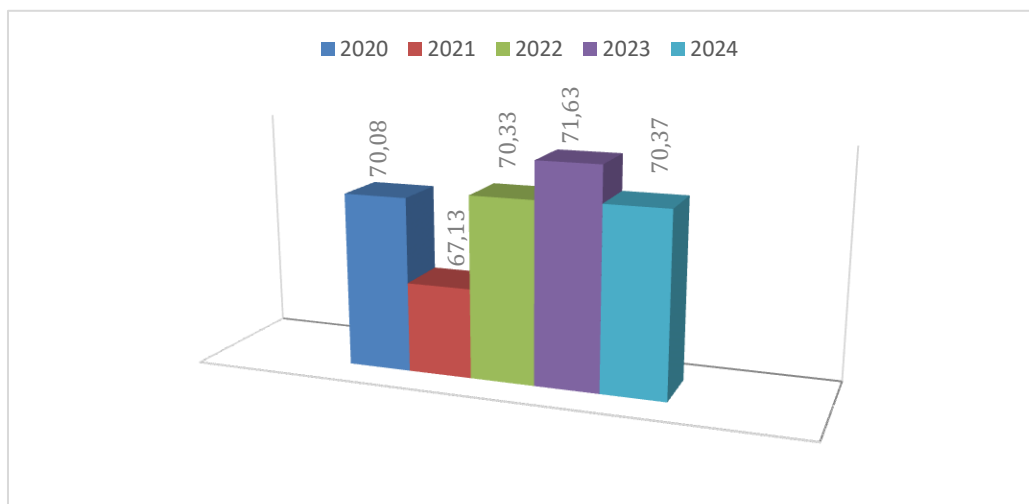
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kuliatas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indeks yang menggambarkan kondisi dari hasil pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sinjai. Laporan ini menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai. Berdasarkan Permen LHK No. 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup terdiri dari tiga komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL).

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2024 sebesar 70,37 persen mengalami penurunan sebesar 1,26 persen dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 71.63 dari target 72 (99.49 persen) atau kategori baik. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kab. Sinjai tahun 2023 berada pada peringkat ke-166 tingkat Nasional dari 514 Kabupaten/Kota dan peringkat 7 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dari 24 Kabupaten/Kota. Namun demikian, perlu menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Sinjai untuk menjaga konsistensi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tetap kategori baik atau dapat meningkat menjadi kategori sangat baik, terhadap ketiga komponen IKLH tersebut yaitu Indeks Kualitas Air

(IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Nilai Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dalam kurun 5 tahun, selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.6
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sinjai (Persen), Tahun 2020-2024

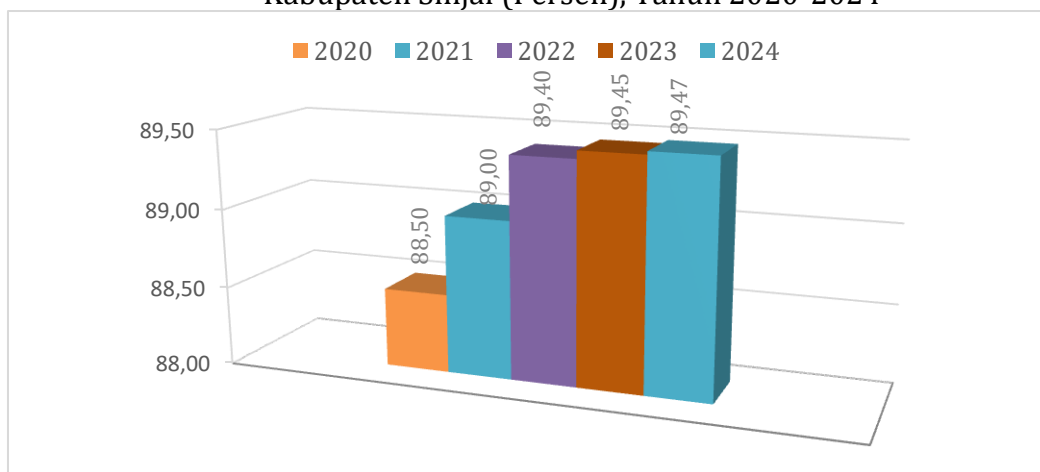


Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai. Tahun 2025

Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Capaian akses sanitasi aman dari rumah tangga yang sistem pengelolaan air limbahnya terlayani SPALD-T dan SPALD-S yang disedot setidaknya 3 – 5 tahun di Kabupaten Sinjai pada tahun 2024 sebesar 80,47 persen mengalami peningkatan sebesar 0,02 persen dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 89,45 persen, dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.7
Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman
Kabupaten Sinjai (Persen), Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai. Tahun 2025

Tabel
Jumlah Rumah Tangga terhubung SPALD, Air Minum Aman
Kabupaten Sinjai, Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah rumah tangga terhubung SPALD	RT	50.167	70.467	73.426	75.066	75.279
2.	Jumlah rumah tangga dgn akses air minum aman	RT	22.930	29.730	30.631	31.633	37.058

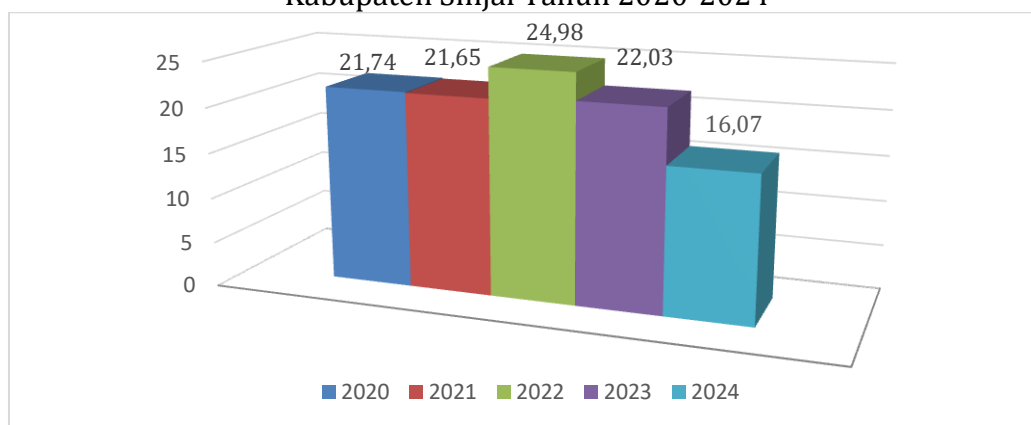
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai. Tahun 2025

Pengelolaan Sampah

a. Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Persentase capaian pengelolaan sampah dari sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah pada tahun 2024 sebesar 16,07 persen mengalami penurunan sebesar 5,96 persen dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 22,03 persen. Namun timbun sampah yang ada masih tergolong besar. Karena kurangnya sarana dan prasarana persampahan yang memadai, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.8
Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah
Kabupaten Sinjai Tahun 2020-2024



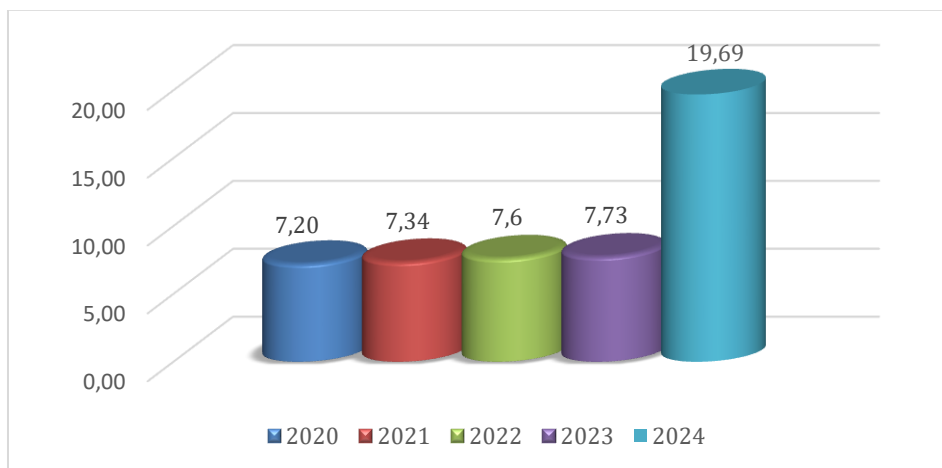
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2025

b. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah di selama periode 2020-2024 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Jumlah layanan pengumpulan sampah pada rumah tangga di Kabupaten Sinjai

cukup baik. Hal ini disebabkan semakin meningkatnya pelayanan pengumpulan sampah yang dilakukan oleh persampahan baik pihak Dinas Lingkungan Hidup maupun oleh pihak kecamatan dan kelurahan. Selain itu sarana bank sampah di setiap kecamatan yang mengumpulkan sampah-sampah rumah tangga cukup memberikan kontribusi yang cukup baik, dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.9
Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah
Kabupaten Sinjai Tahun 2020-2024

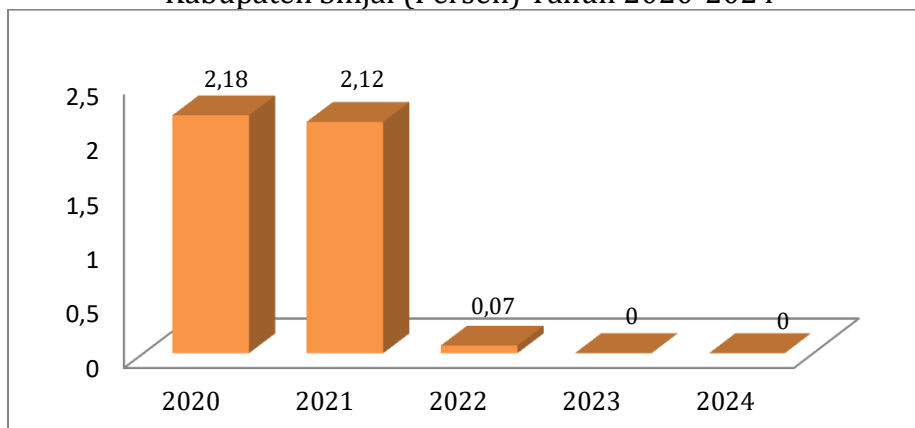


Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Sinjai Tahun 2025

Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik terhadap Pupuk kimia

Pupuk organik dipandang sebagai salah satu pilihan para petani untuk mengembalikan produktivitas tanah dan meningkatkan hasil produksi pertanian. Berdasarkan data alokasi Pupuk bersubsidi di kab. Sinjai, sejak tahun 2022 alokasi subsidi untuk pupuk organik dikurangi bahkan pada tahun 2023 dan 2024 dihilangkan. Sejalan dengan pengembangan ekonomi hijau, masyarakat dianjurkan untuk menggunakan pupuk organik secara mandiri guna mengurangi ketergantungan akan pupuk anorganik. Manfaat lainnya adalah meningkatkan kesuburan lahan dan menjaga kelestarian lingkungan, dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.10
Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Kimia terhadap Pupuk Organik
Kabupaten Sinjai (Persen) Tahun 2020-2024

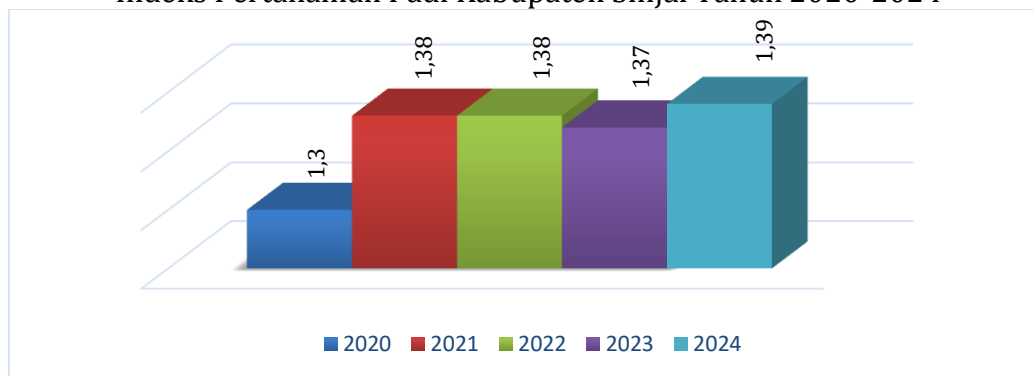


Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab.Sinjai Tahun 2025

Indeks Pertanaman Padi

Indeks Pertanaman (IP) padi adalah rata-rata masa tanam dan panen padi di lahan yang sama dalam satu tahun. IP padi yang tinggi menunjukkan bahwa lahan sawah tersebut dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan produksi padi. Berdasarkan data 5 tahun terakhir, Indeks pertanaman padi di cenderung fluktuatif. Pada tahun 2024 sebesar 1,39 persen mengalami peningkatan sebesar 0,02 persen dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 1,37 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pada sebagian besar lahan-lahan sawah hanya dilakukan penanaman padi sekali setahun, sebagian kecil saja yang dilakukan dua (2) kali tanam. Faktor yang mempengaruhi indeks pertanaman padi antara lain : Ketersediaan air irigasi, Kualitas Lahan, Varietas padi yang digunakan, Penggunaan teknologi pertanian, dan Kemampuan petani dalam mengelola lahan, dapat dilihat pada grafik berikut

Grafik 2.11
Indeks Pertanaman Padi Kabupaten Sinjai Tahun 2020-2024

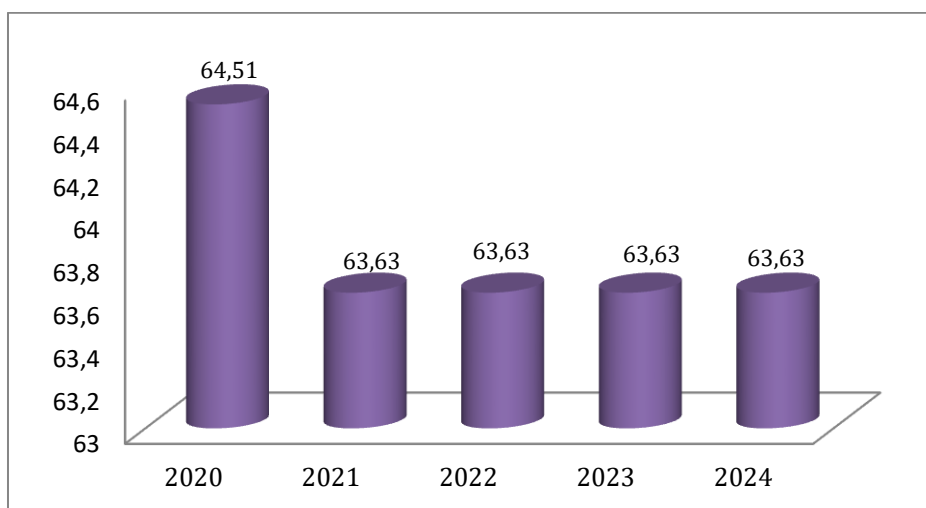


Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab.Sinjai Tahun 2025

Proporsi Sawah Irigasi

Proporsi sawah beririgasi di kabupaten Sinjai rata-rata adalah sebesar 63,63 persen, dimana dari luas baku Lahan Sawah 16.560 Ha, sawah yang beririgasi hanya 10.263 Ha dan lahan sawah tadah hujan sebesar 6.297 Ha. Namun demikian, sebagian besar lahan-lahan sawah yang beririgasi tersebut berupa irigasi setengah teknis dan irigasi desa, dengan tingkat kehilangan air yang cukup besar. Hal ini sangat mempengaruhi indeks pertanaman khususnya padi di kabupaten Sinjai, dapat dilihat pada grafik berikut .

Grafik 2.12
Proporsi Sawah Irigasi Kabupaten Sinjai(Persen) Tahun 2020-2024

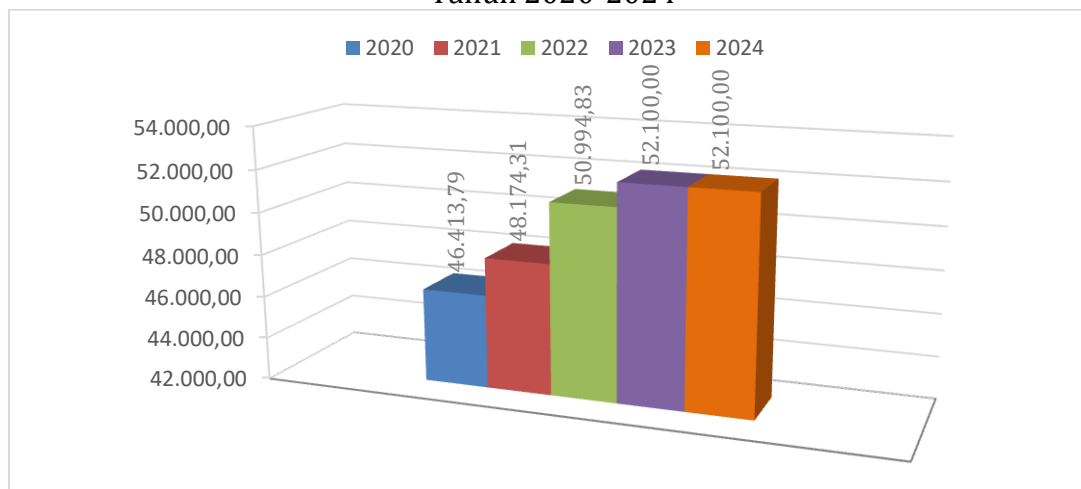


Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab.Sinjai Tahun 2025

Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

Jumlah produksi perikanan budidaya pada tahun 2024 sebanyak 52.100,00 Ton. Hal ini disebabkan potensi budidaya perikanan semakin dioptimalkan khususnya budidaya rumput laut baik di tambak maupun di laut, selain itu akibat harga yang semakin baik menyebabkan banyak pembudidaya yang semakin meningkatkan produksinya, dapat dilihat pada grafik berikut

Grafik 2.13
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Sinjai (Ton),
Tahun 2020-2024

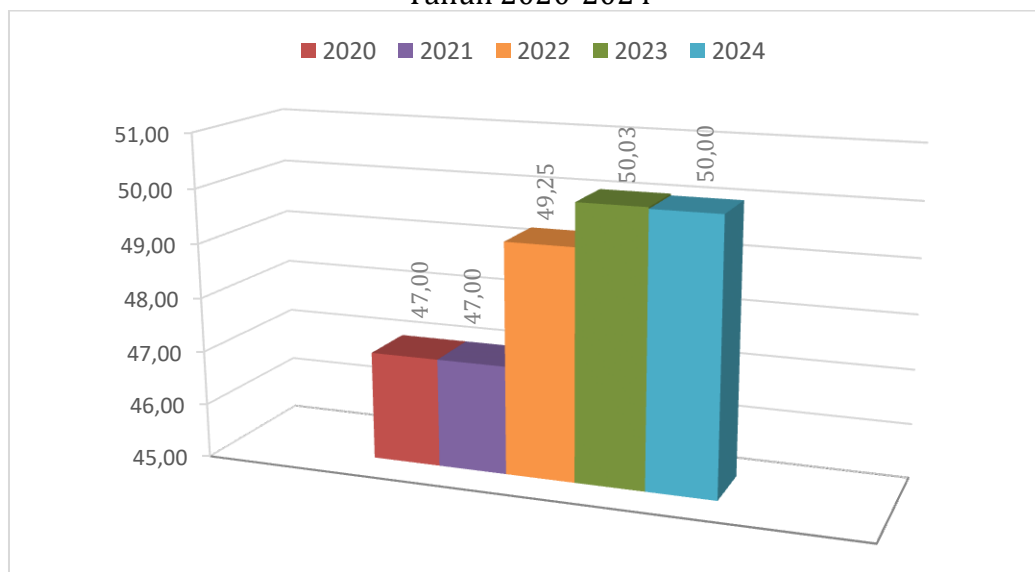


Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai Tahun 2025

Angka Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan menunjukkan tingkat konsumsi ikan suatu daerah yang dilihat dengan semakin tingginya produksi ikan yang ada. Konsumsi ikan Kabupaten Sinjai dari tahun 2024 sebesar 50 kg/tahun mengalami penurunan sebesar 0,03 kg/tahun dibandingkan tahun 2023 sebesar 50,03 kg/tahun, dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.14
Angka Konsumsi Ikan Kabupaten Sinjai (Kg/Tahun),
Tahun 2020-2024



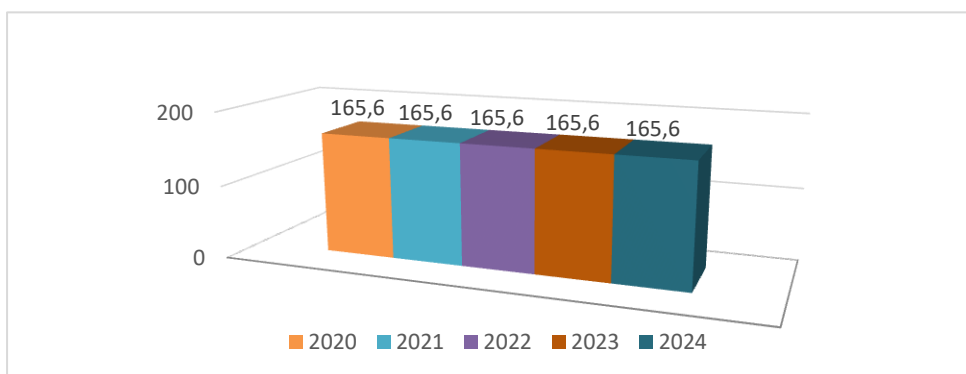
Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai Tahun 2025

6. Resilensi Terhadap Bencana Dan Perubahan Iklim

Indeks Resiko Bencana

Kajian resiko bencana sesuai dengan indeks resiko bencana tahun 2024 Kabupaten Sinjai sesuai dengan perhitungan dari BNPB untuk mendapatkan Nilai Risiko 165.60 dengan kategori tinggi. Upaya kongrit untuk dapat mewujudkan pengurangan resiko bencana dengan berupaya mengintegrasikan disiplin pengurangan resiko bencana yang berkelanjutan serta paradigma pengelolaan resiko menuju resiliensi berkelanjutan (*Sistaineble Ressilience*), dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.15
Indeks Resiko Bencana Kabupaten Sinjai, Tahun 2020-2024

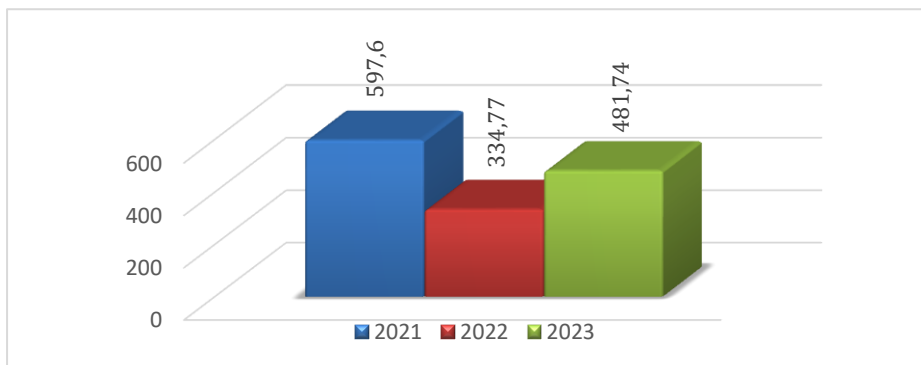


Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Sinjai, Tahun 2025

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) di Kabupaten Sinjai pada tahun 2023 sebesar 481,74 ton mengalami peningkatan sebesar 146,97 ton di bandingkan pada tahun 2022 sektor limbah yaitu sebesar 334,77 ton dari proses pengolahan sampah secara biologis yaitu pengomposan. Dari aktivitas tersebut, maka emisi gas rumah kaca berpotensi menurun, sedangkan pada sektor lain seperti pertanian dan transportasi cenderung meningkat dengan penggunaan pestisida dan pupuk anorganik serta dengan bertambahnya kendaraan yang beroperasi di Kabupaten Sinjai baik roda dua maupun roda empat, dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.16
Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
Kabupaten Sinjai, Tahun 2021-2023



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai. Tahun 2025

7. Demografi

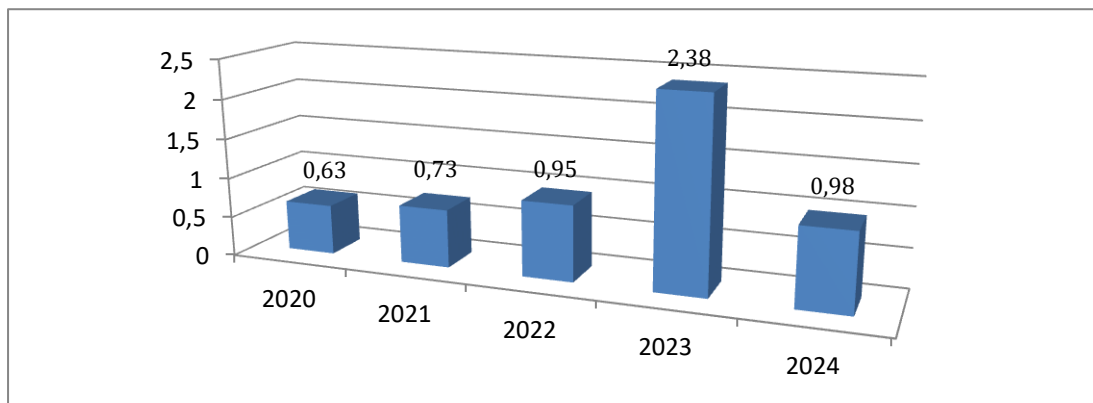
Kondisi demografi merupakan kondisi kependudukan yang meliputi jumlah, persebaran dan komposisi penduduk serta bagaimana ketiga faktor tersebut berubah dari waktu ke waktu. Kondisi kependudukan merupakan hal yang dapat dipengaruhi dan sebaliknya mempengaruhi keberhasilan pembangunan suatu daerah yang berkelanjutan.

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai kondisi kependudukan meliputi laju pertumbuhan, jumlah penduduk menurut rasio jenis kelamin dan umur serta persebaran dan kepadatan penduduk.

Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Sinjai karena apabila pertumbuhan penduduk tidak diawasi dengan baik, maka dalam beberapa tahun ke depan Kabupaten Sinjai akan menjadi kota yang cukup padat. Hal tersebut kemungkinan akan menimbulkan munculnya berbagai masalah sosial dan ekonomi seperti kemiskinan, pertumbuhan kawasan kumuh, meningkatnya kriminalitas dan lain-lain. Laju pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan khususnya di daerah perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kecamatan. Laju pertumbuhan di Kabupaten Sinjai kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami fluktuatif. Laju pertumbuhan pada tahun 2024 sebesar 0,98 persen mengalami penurunan sebesar 1,4 persen dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 2,38 persen, dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.17
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sinjai (Persen), Tahun 2020 – 2024



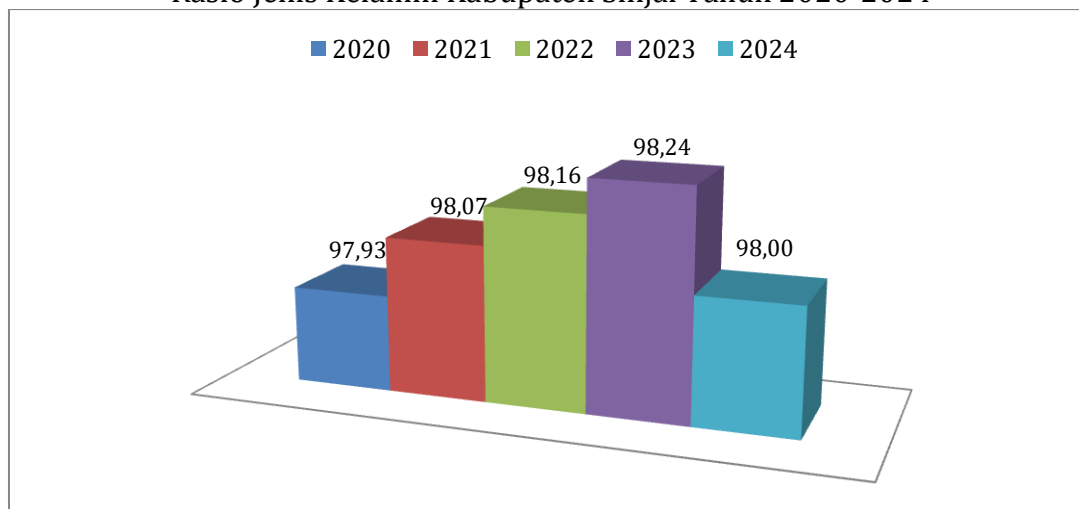
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, Tahun 2025

Rasio Penduduk

a. Rasio Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin di mana pada tahun 2024 sebesar 98,00 mengalami penurunan sebesar 0,24 dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 98,24 persen. Rasio jenis kelamin dijadikan ukuran bagi suatu daerah dalam melihat dan mengukur peran gender dalam pembangunan, dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.18
Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Sinjai Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai, Tahun 2025

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

Jumlah penduduk menunjukkan kelompok umur 20-24 tahun paling terbanyak 25.580 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa usia tersebut merupakan usia produktif, kondisi ini sangat baik di Kabupaten Sinjai apabila dapat dikelola dengan baik dengan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI TAHUN 2025-2029

pendidikan dan Keterampilan. Sedangkan penduduk lanjut usia paling rendah, dan diharapkan dimasa yang akan datang proporsi penduduk lansia meningkat, hal ini dapat terjadi ketika derajat kesehatan meningkat sehingga usia harapan hidup meningkat pula, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.10
Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur
Kabupaten Sinjai (Jiwa), Tahun 2020-2024

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur (Jiwa)	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
0-4	21.420	21.420	21.692	19.239	18.848
5-9	19.324	19.324	19.060	22.127	22.220
10-14	22.917	22.917	21.719	23.381	23.488
15-19	24.586	24.586	24.629	24.109	23.562
20-24	22.293	22.293	22.294	25.602	25.580
25-29	20.704	20.704	20.821	20.944	21.917
30-34	19.603	19.603	19.971	18.025	17.928
34-39	19.164	19.164	19.509	19.208	18.865
40-44	18.927	18.927	19.282	19.789	19.669
45-49	17.269	17.269	17.948	18.546	18.985
50-54	14.455	14.455	15.128	18.151	17.998
55-59	11.853	11.853	12.592	12.998	14.094
60-64	9.554	9.554	10.342	10.409	10.606
65-69	7.060	7.060	7.613	7.605	8.015
70-74	4.881	4.881	5.323	5.283	5.836
75+	5.468	7.356	5.904	8.143	8.658

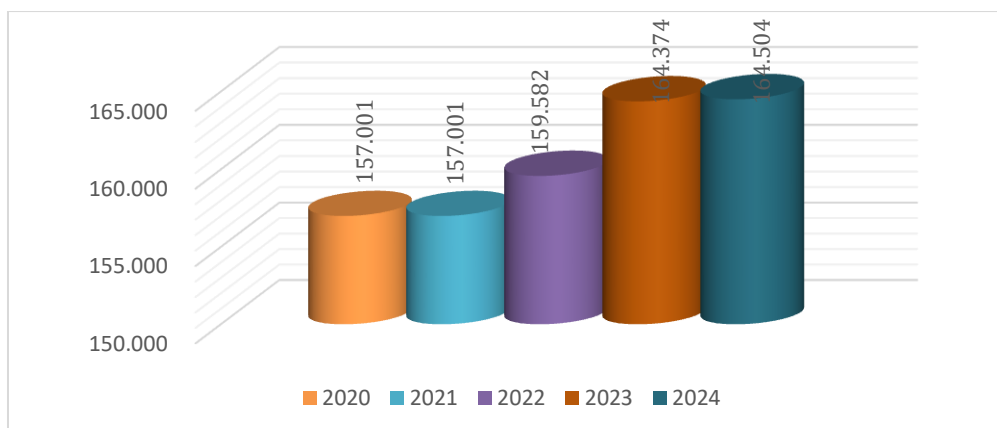
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, Tahun 2025

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur 15-54

Jumlah penduduk umur 15 – 54 tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2020-2024. Pada tahun 2024 sebanyak 64.504 jiwa mengalami peningkatan sebanyak 130 jiwa dibandingkan pada tahun 2023 sebanyak 64.374 jiwa. Penduduk umur 15 – 54 tahun merupakan penduduk yang produktif, dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.19
Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur 15-54
Kabupaten Sinjai (Jiwa) Tahun 2020-2024

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI TAHUN 2025-2029

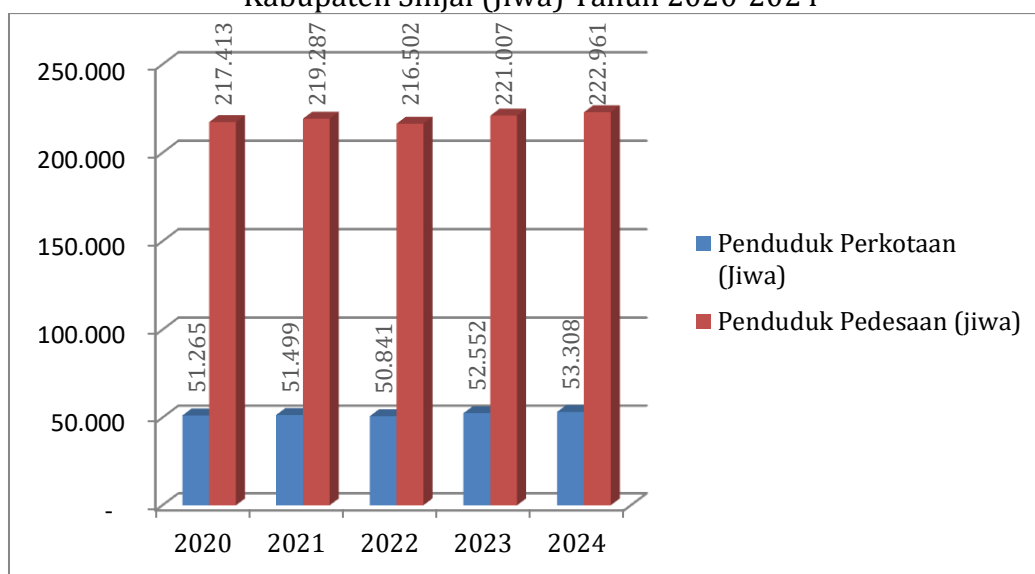


Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2025

Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk berdasarkan jumlah penduduk yang bermukim di wilayah perkotaan dan perdesaan menunjukkan bahwa jumlah penduduk di wilayah perkotaan lebih dominan dibandingkan wilayah perdesaan. Lapangan pekerjaan dan sekolah tinggi yang ada di perkotaan menjadikan penduduk yang bermukim di wilayah perdesaan melakukan perpindahan penduduk ke wilayah perkotaan dimana di Kabupaten Sinjai bidang usaha yang cukup dominan adalah pegawai negeri sipil. Komposisi Penduduk Kabupaten Sinjai Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.20
Komposisi Penduduk
Kabupaten Sinjai (Jiwa) Tahun 2020-2024



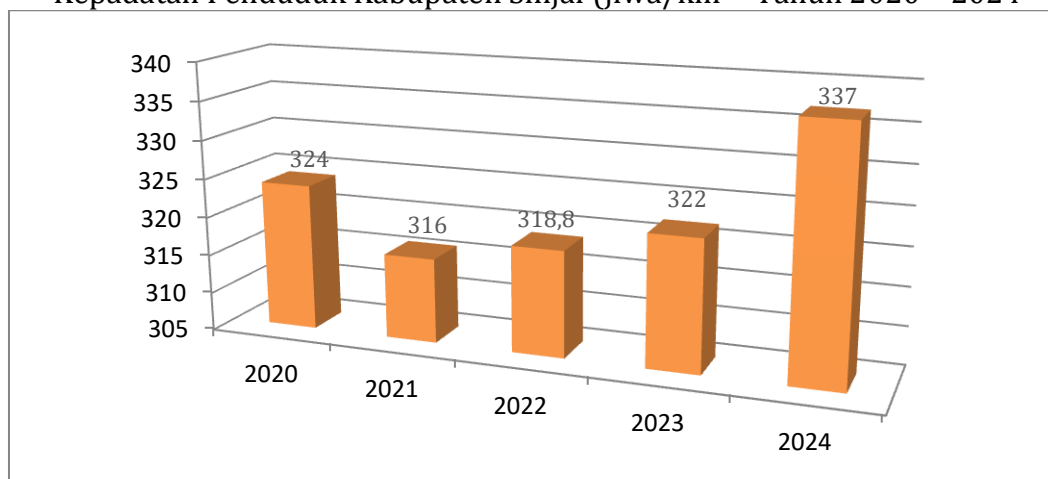
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, Tahun 2025

Jumlah Kepadatan Penduduk

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI TAHUN 2025-2029

Kepadatan penduduk cukup bervariasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Peningkatan yang cukup besar terjadi di tahun 2024 sebanyak 337 jiwa/km² mengalami peningkatan sebanyak 15 jiwa/km² dibandingkan pada tahun 2023 sebanyak 322 jiwa/km², dapat dilihat pada grafik berikut .

Grafik 2.21
Kepadatan Penduduk Kabupaten Sinjai (jiwa/km²), Tahun 2020 – 2024



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai. Tahun 2025

Proyeksi Penduduk Tahun 2025-2029

Kecamatan	Tahun					
	2025	2026	2027	2028	2029	2024
Sinjai Barat						27470
Sinjai Borong						19023
Sinjai Selatan						42349
Tellulimpoe						41084
Sinjai Timur						36506
Sinjai Tengah						29698
Sinjai Utara						53308
Bulupoddo						18703
Pulau Sembilan						8128
Kabupaten Sinjai						276.269

B. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek Kesejahteraan Masyarakat meliputi aspek kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial budaya yang dijelaskan sebagai berikut:

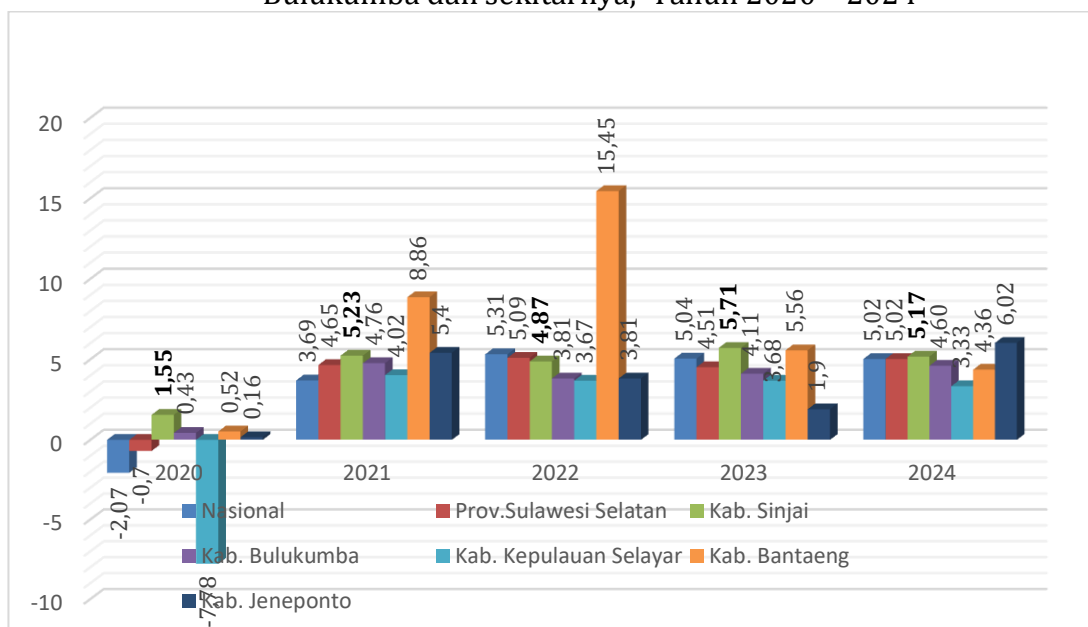
1. Aspek Kesejahteraan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI TAHUN 2025-2029

Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 sebesar 5,17 persen mengalami penurunan sebesar 0,54 persen dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 5,71 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sinjai berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan pertumbuhan ekonomi Nasional. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sinjai lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten sekitarnya, dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.22
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Sinjai dengan Wilayah Setara pada Kawasan Bulukumba dan sekitarnya, Tahun 2020 – 2024

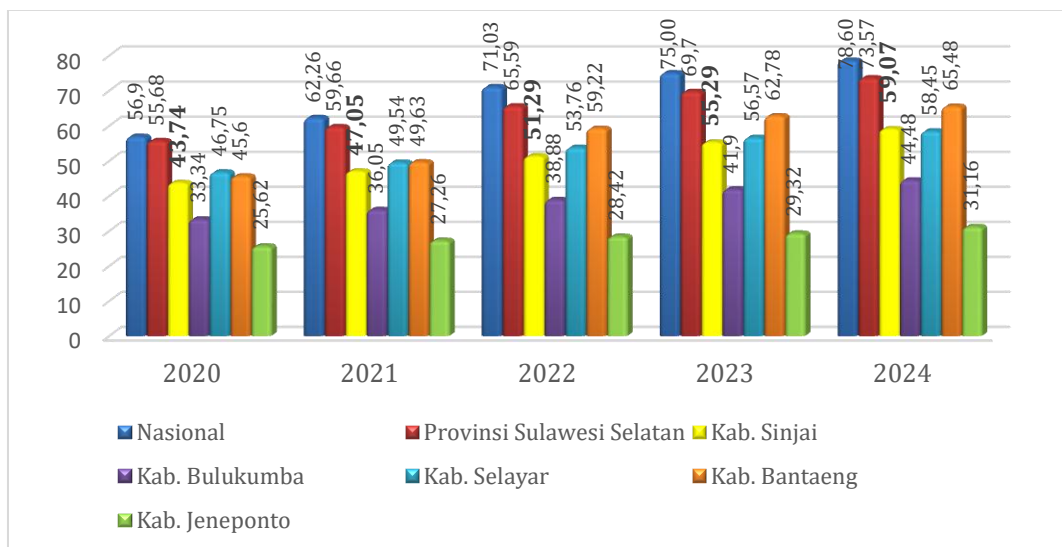


Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Sinjai Tahun 2025

PDRB per Kapita

Nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tahun 2024 sebesar 59,07 menunjukkan kenaikan sebesar 3,78 Juta Rupiah dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 55,29 Juta Rupiah. Hal ini dipengaruhi adanya tingkat pertumbuhan ekonomi, struktur sektor ekonomi, kontribusi pendapatan, produktivitas tenaga kerja, inovasi dan teknologi, infrastruktur yang memadai faktor demografis dan serta stabilitas politik dan hukum. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tahun 2024 sebesar 59,07 Juta Rupiah, dapat diartikan bahwa tiap penduduk di wilayah Sinjai ini mampu memberikan kontribusi nilai tambah secara ekonomi sebesar 59,07 juta rupiah selama tahun 2024. Dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.23
Perbandingan PDRB Per Kapita Nasional,
Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Sinjai dengan wilayah Setara
pada Kawasan Bulukumba dan sekitarnya, Tahun 2020– 2024



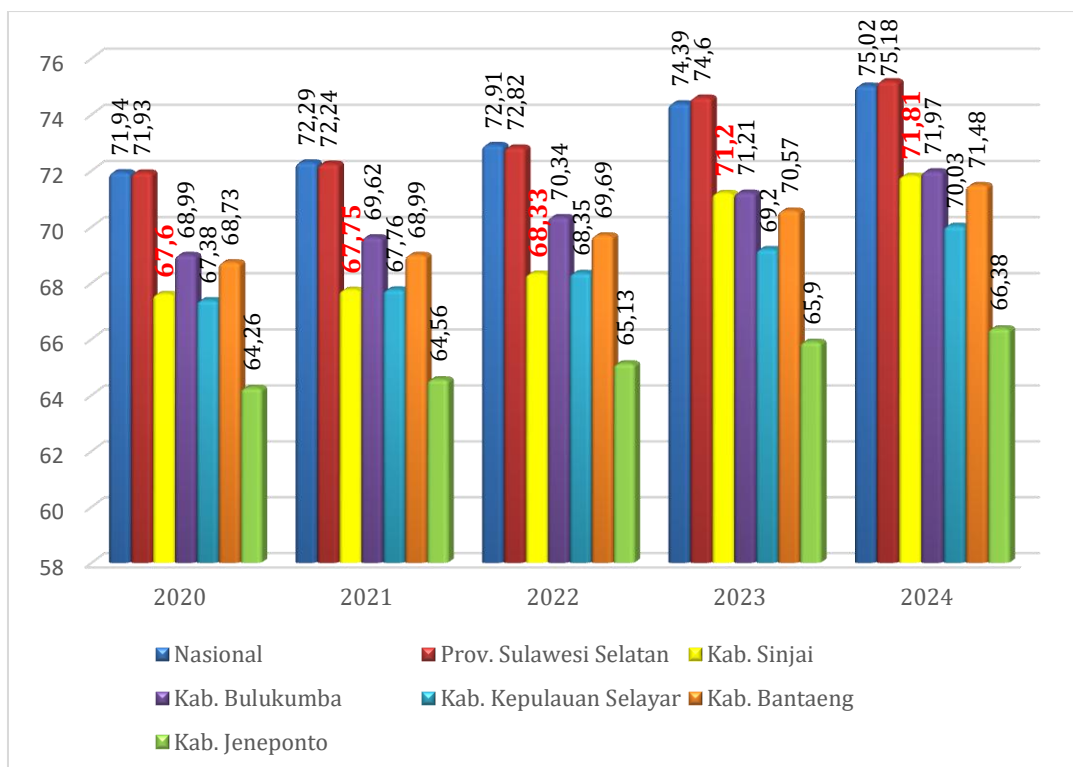
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai, Tahun 2025

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sinjai terus bertumbuh selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, IPM Kabupaten Sinjai masih berstatus tinggi ($70 < \text{IPM} < 79$) yaitu sebesar 71,81, meningkat 0,61 poin dibandingkan tahun 2023. IPM Kabupaten Sinjai masih berada di bawah IPM Provinsi Sulawesi Selatan dan IPM Nasional, Perbandingan IPM dengan kabupaten di sekitarnya, Kabupaten Sinjai lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Bulukumba, tetapi masih lebih tinggi dari Kabupaten Bantaeng, Kepulauan Selayar, dan Kabupaten jeneponto, dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.24
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Nasional, Prov. Sulawesi Selatan,
Kabupaten Sinjai dengan wilayah Setara pada Kawasan Bulukumba dan
sekitarnya (Poin), Tahun 2020 – 2024

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI TAHUN 2025-2029



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai, Tahun 2025

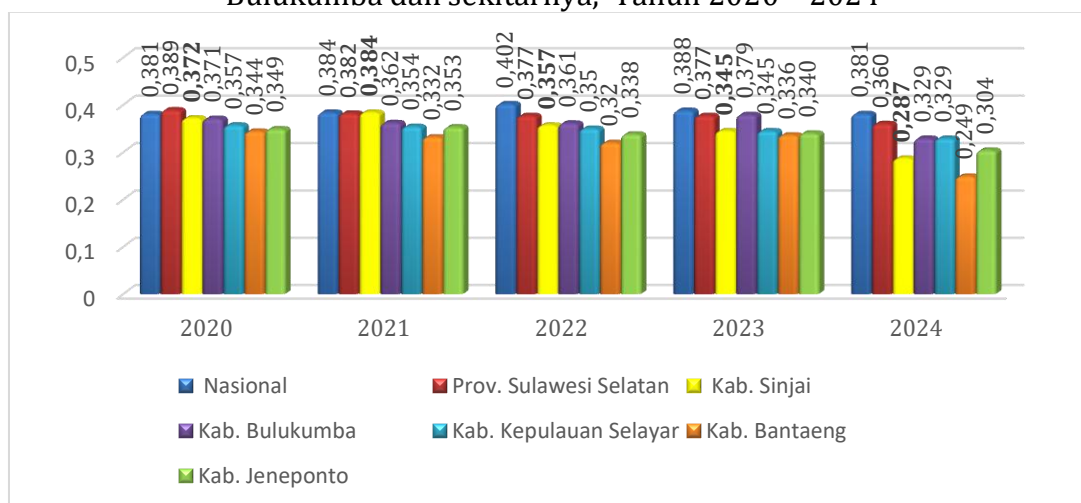
Rasio Gini

Series data menunjukkan bahwa rasio gini pada tahun 2024 sebesar 0,287 mengalami penurunan sebesar 0,06 dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 0,345. Program pro poor masih menjadi perhatian utama untuk mereduksi indeks gini sehingga distribusi pendapatan makin merata. Perbandingan rasio gini dengan Kabupaten Sinjai masih dibawah angka provinsi dan Nasional. Kabupaten Bulukumba dan kepulaun selayar berada pada level yang lebih tinggi, peringkat terendah di Kabupaten Bantaeng yang dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.25
Perbandingan Rasio Gini Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan,

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI TAHUN 2025-2029

Kabupaten Sinjai dengan wilayah Setara pada Kawasan
Bulukumba dan sekitarnya, Tahun 2020 – 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai, Tahun 2025

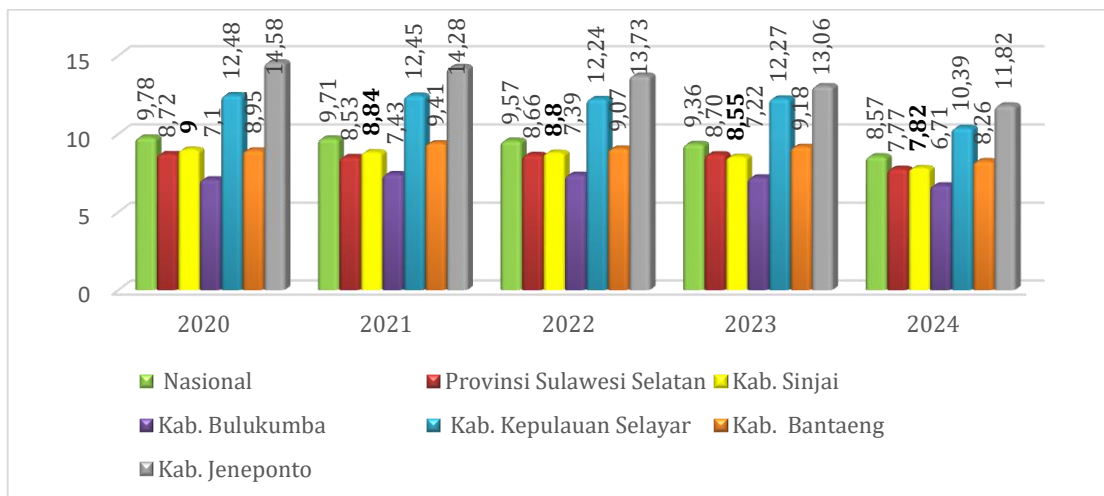
Tingkat Kemiskinan

Pada tahun 2024, Angka Kemiskinan sebesar 7,82 persen atau mengalami penurunan sebesar 0,73 persen dibandingkan pada tahun 2023 yang sebesar 8,55 persen. Persentase tingkat kemiskinan Kabupaten Sinjai tahun 2024 menempati peringkat 14 dari 24 kabupaten/kota. perbandingan tingkat kemiskinan dengan kabupaten di sekitarnya, Kabupaten Jeneponto dengan tingkat kemiskinan tertinggi selanjutnya Kepulauan Selayar dan Bantaeng. Sedangkan tingkat kemiskinan terendah di Kabupaten Bulukumba yang dapat dilihat pada grafik sebagai berikut.

Grafik 2.26

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI TAHUN 2025-2029

Perbandingan Tingkat Kemiskinan Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan,
Kabupaten Sinjai dengan wilayah Setara pada Kawasan
Bulukumba dan sekitarnya (Persen), Tahun 2020 – 2024



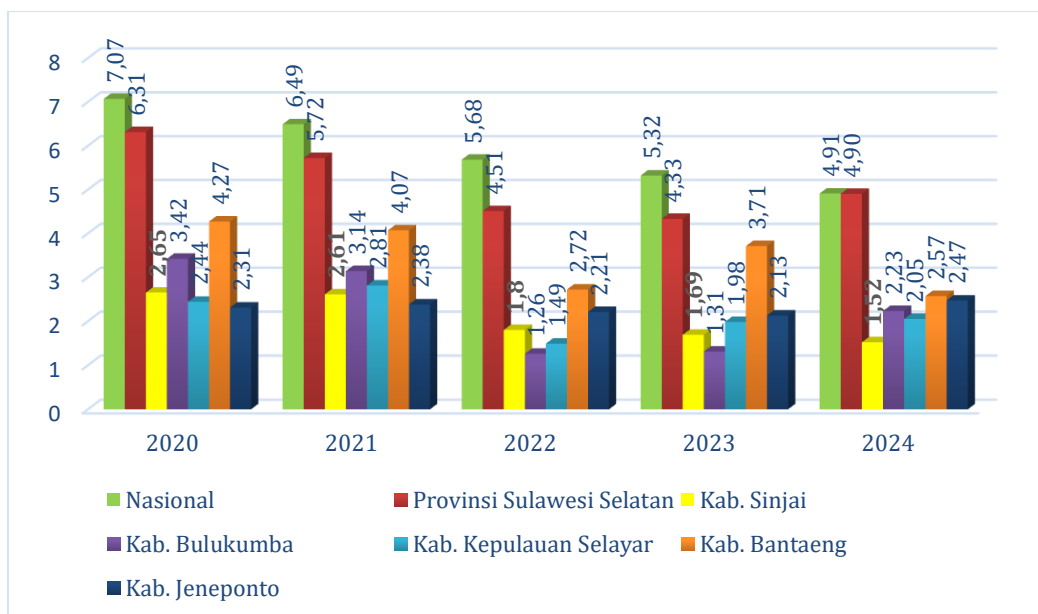
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai, Tahun 2025

Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2023 sebesar 1,69 persen mengalami penurunan sebesar 0,11 persen dibandingkan pada tahun 2022 yang sebesar 1,80 persen dan pada tahun 2024 menurun sebesar 1,52 persen. Banyaknya dunia usaha baik sektor jasa maupun industri yang mulai melakukan aktivitas berdampak pada kebutuhan tenaga kerja sehingga tingkat pengangguran mengalami penurunan. Dibandingkan dengan Kabupaten Bantaeng dan Kepulauan Selayar, angka pengangguran Kabupaten Sinjai lebih rendah namun lebih tinggi bila dibandingkan dengan Kabupaten Bulukumba, dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.27

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Sinjai dengan wilayah Setara pada Kawasan Bulukumba dan sekitarnya (Persen), Tahun 2020 - 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai. Tahun 2025

2. Kesehatan untuk Semua

Usia Harapan Hidup

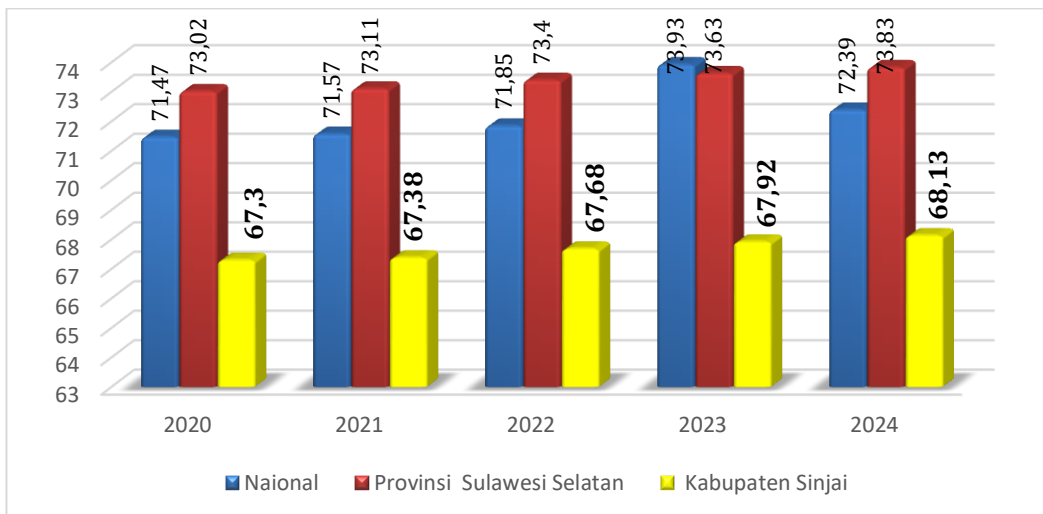
Tren usia harapan hidup dari tahun 2020 – 2024 cenderung stabil di kisaran 66-68 tahun. Kondisi ini menunjukkan harapan bayi yang baru lahir untuk hidup semakin besar karena membaiknya derajat kesehatan masyarakat.

Peningkatan umur harapan hidup ini tidak terlepas dari berbagai aspek pendukung masyarakat seperti peningkatan sarana kesehatan melalui pembangunan dan pemerataan di fasilitas kesehatan di berbagai wilayah Kabupaten Sinjai. Peningkatan pelayanan kesehatan melalui penambahan jumlah tenaga medis yang ditugaskan di seluruh wilayah Kabupaten Sinjai terutama dalam hal pemeriksaan kehamilan dan penolong kelahiran untuk meminimalisasi besarnya angka kematian bayi. Program pemerintah berupa jaminan BPJS PBI dan Jamkesda Plus dalam rangka penjaminan kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati pelayanan kesehatan yang dibutuhkan yang telah digulirkan ke seluruh 80 desa/kelurahan di Kabupaten Sinjai.

Perbandingan usia harapan hidup dengan Kabupaten disekitarnya Kabupaten Sinjai memiliki usia harapan hidup yang lebih rendah dari Kabupaten Bantaeng, Bulukumba dan Selayar tetapi masih lebih tinggi dari Kabupaten Jeneponto. Dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.28

Perbandingan Usia Harapan Hidup Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan,
Kabupaten Sinjai dengan wilayah Setara pada Kawasan
Bulukumba dan sekitarnya Tahun 2020 – 2024



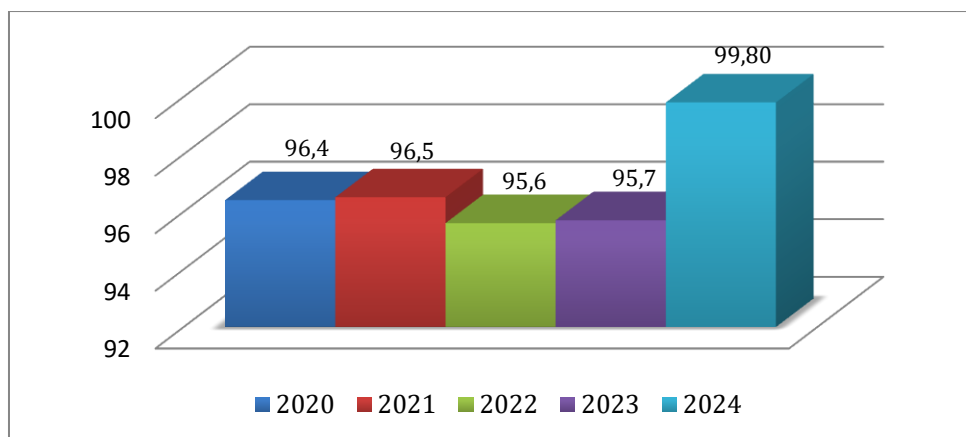
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai. Tahun 2025

Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan

Persentase persalinan di fasilitas kesehatan di Kabupaten Sinjai menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan terutama di tahun 2024 sebesar 99,80 persen meningkat sebesar 4,1 persen dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 95,70 persen. Program home care home visit Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai sangat membantu dalam mengarahkan ibu hamil yang akan melahirkan untuk di proses di fasilitas kesehatan. Namun sejalan dengan bertambahnya sarana dan prasarana yang tersedia diperlukan pemeliharaan dan peremajaan sehingga dapat lebih menambah kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan yang tersedia, dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.29
Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan
Kabupaten Sinjai (Persen) Tahun 2020-2024

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI TAHUN 2025-2029

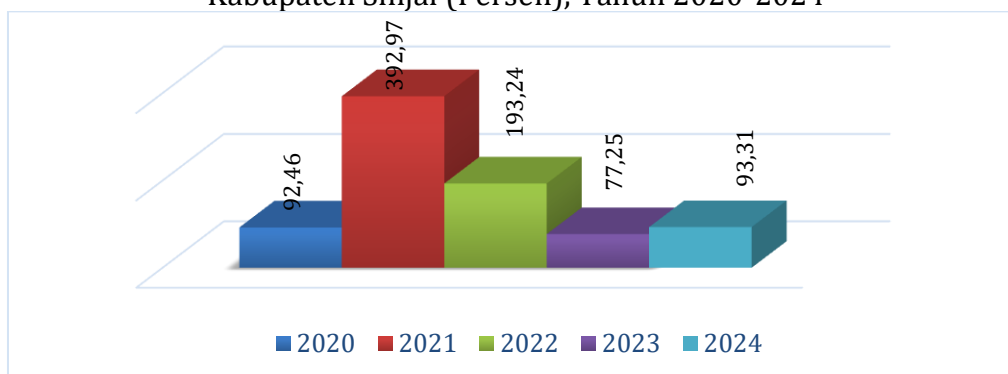


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, Tahun 2025

Angka Kematian Ibu

Angka kematian ibu per 100.000 pada kelahiran hidup setiap tahunnya cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2024 sebesar 93,31 persen mengalami peningkatan sebesar 16,06 persen dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 77,25 persen. Hal ini di pengaruhi hipertensi dalam kehamilan, pendarahan, eklampsia, sesak dan sepsis. Namun dengan adanya kondisi normal yang telah diterapkan pemerintah sehingga petugas cepat melakukan tindakan terhadap tanda bahaya kehamilan sehingga dapat melakukan tindakan lebih lanjut sesuai standar operasional yang berlaku, dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.30
Angka Kematian ibu
Kabupaten Sinjai (Persen), Tahun 2020-2024



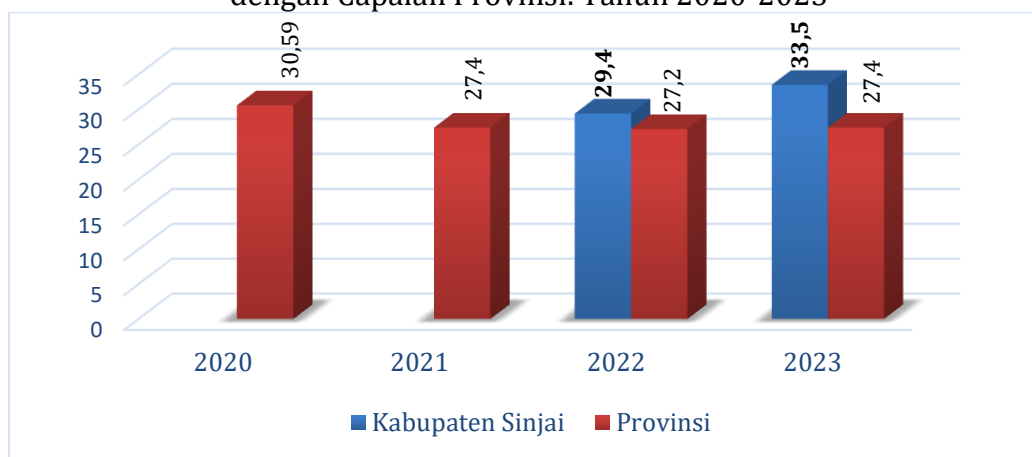
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, Tahun 2025

Prevalensi Stunting

Prevalensi stunting di Kabupaten Sinjai berdasarkan hasil Studi Gizi Indonesia masih berada pada angka 33,5 persen pada tahun 2023 atau

meningkat sebesar 4,1 persen dari tahun 2022, sehingga untuk mengentaskan stunting pemerintah Kabupaten Sinjai telah melakukan intervensi. Salah satu intervensi yang dilakukan adalah penurunan stunting terintegrasi dengan pengukuran data dan publikasi stunting. Beberapa aksi telah dilakukan untuk melakukan intervensi antara lain membuat inovasi Aksi Tali Sepatu bekerjasama dengan TNI dan kepolisian serta memberikan porsi anggaran yang khusus penanganan stunting. Langkah strategis dalam upaya perbaikan gizi masyarakat dengan pendekatan *continuum of care* pada setiap siklus kehidupan terutama sejak 1000 hari pertama kehidupan. Dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.31
Capaian Prevalensi Stunting Kabupaten Sinjai dengan membandingkan
dengan Capaian Provinsi. Tahun 2020-2023

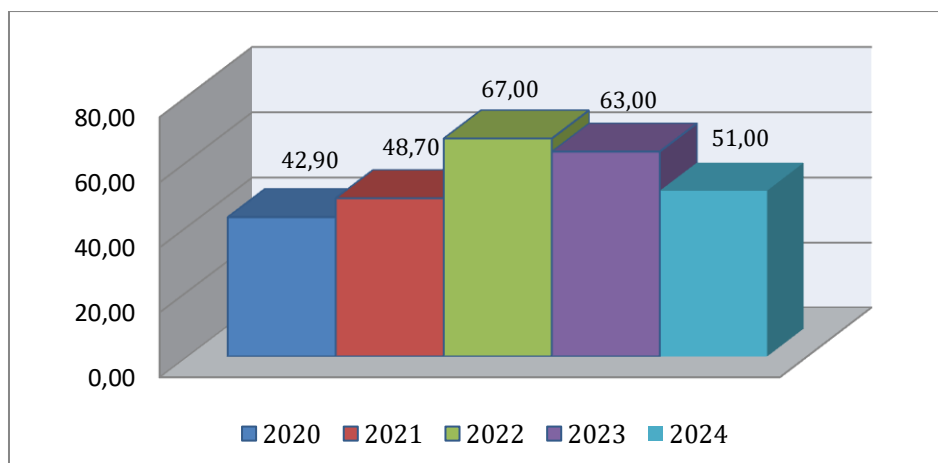


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, Tahun 2025

Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis

Kasus tuberkulosis membutuhkan diagnosa dan penanganan yang cepat dan tepat untuk mencegah terjadinya kasus yang lebih luas. Dari data menunjukkan bahwa penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis di Kabupaten Sinjai cukup fluktuatif. Pada tahun 2024 sebesar 51,00 persen mengalami penurunan sebesar 12,00 persen dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 63,00 persen, dapat dilihat pada tabel berikut.

Grafik 2.32
Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis
Kabupaten Sinjai (Persen), Tahun 2020-2024

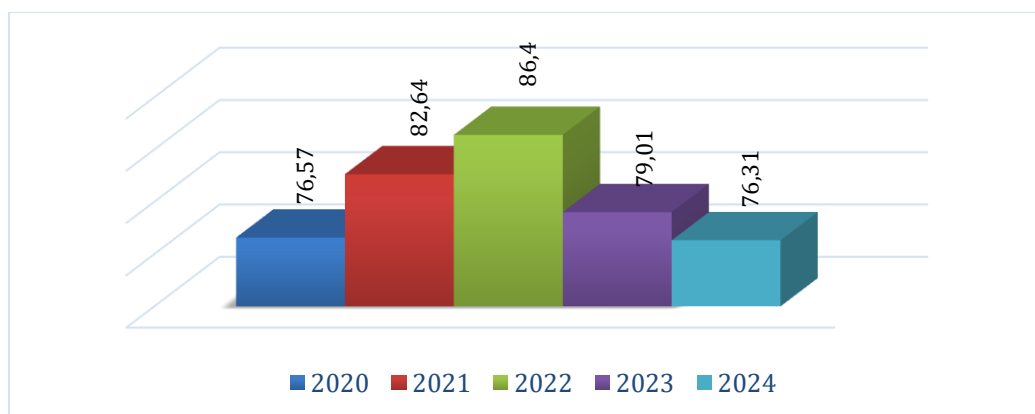


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, Tahun 2025

Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis

Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis pada tahun 2024 sebesar 76,31 persen mengalami penurunan sebesar 2,7 persen dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 79,01 persen. Hal ini disebabkan adanya pelaksanaan program DOTS berjalan sangat optimal sesuai SOTK yang berlaku dengan pemberian obat serta kepatuhan minum obat dari pasien yang ketat sehingga semua kasus yang dilaporkan dapat tertangani dan sembuh 100 persen, dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik. 2.33
Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis
Kabupaten Sinjai (Persen), Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai. Tahun 2025

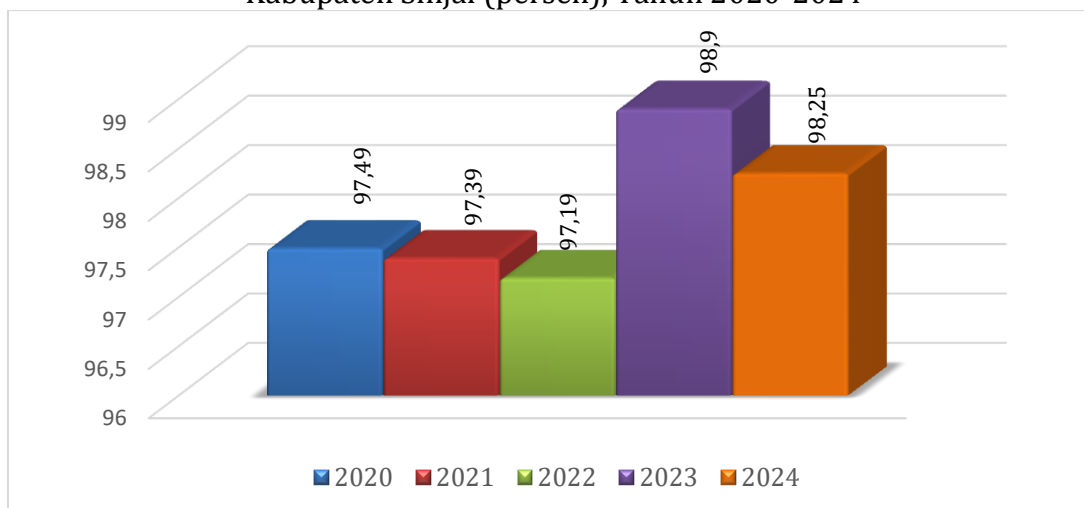
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional Kabupaten Sinjai pada tahun 2024 sebesar 98,25 persen mengalami penurunan sebesar 0,65 persen

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI TAHUN 2025-2029

dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 98,25 persen. Belum tercapaian kepesertaan 100 persen disebabkan karena masih ada warga Kabupaten Sinjai yang masih berada diluar negeri sehingga penjaminan kesehatan ditanggung oleh pemberi kerja diluar negeri tetapi administrasi kependudukannya masih tercatat di Kabupaten Sinjai, dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.34
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
Kabupaten Sinjai (persen), Tahun 2020-2024



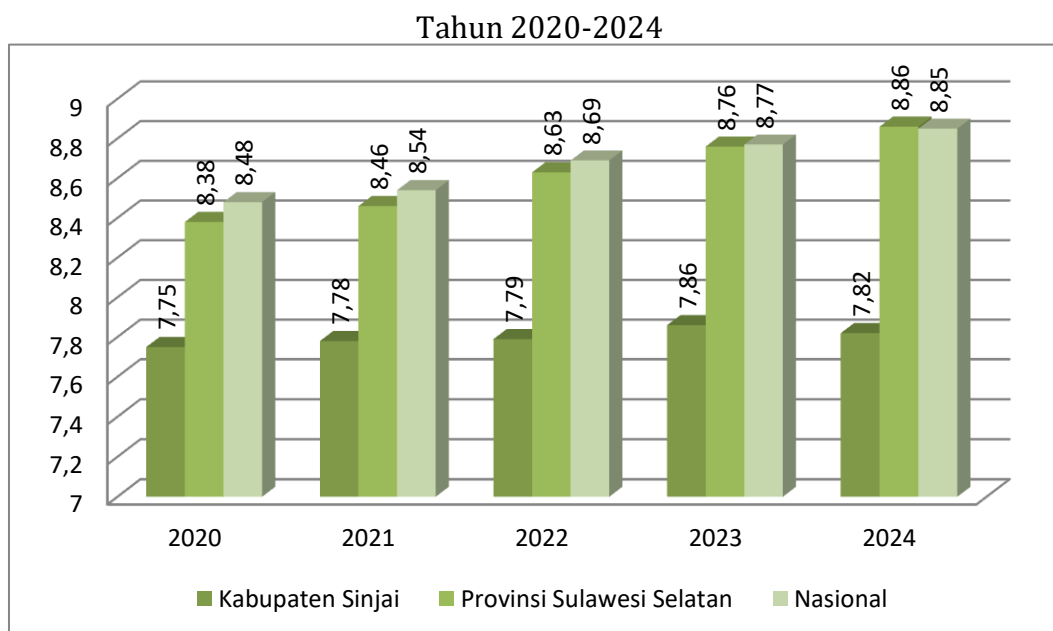
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, Tahun 2025

3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah pada tahun 2024 telah mencapai 7,82 tahun sedangkan pada tahun 2023 telah mencapai 7,86 tahun atau setara dengan kelas VII-VIII. Keberhasilan pembangunan tidak dapat diukur secara instan. Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan informasi dan merasakan program pembangunan pendidikan yang sedang dilaksanakan. Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Sinjai masih lebih rendah dari angka rata-rata lama sekolah Nasional dan Provinsi, dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.35
Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah
Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional (Tahun),

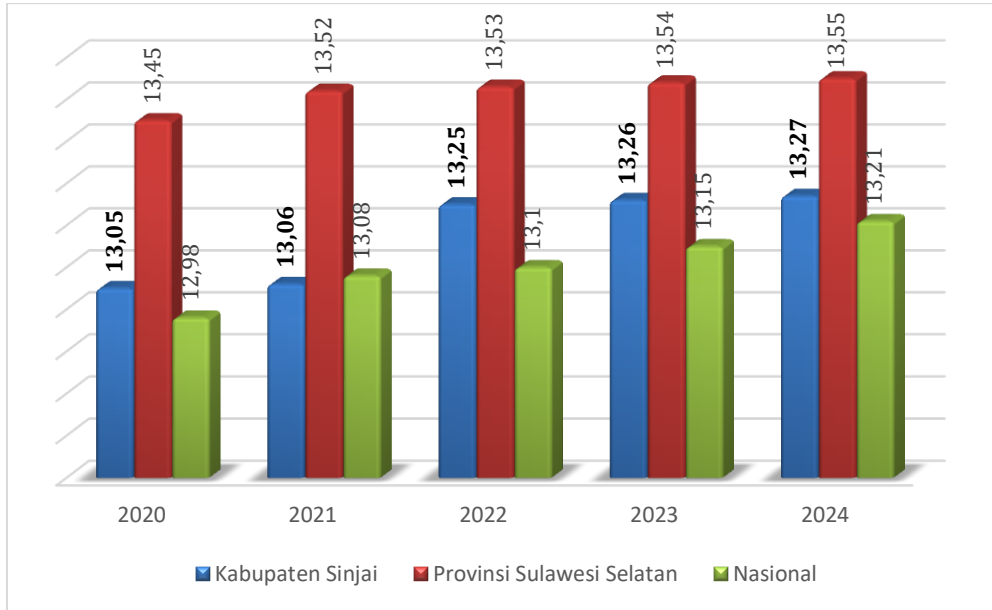


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai. Tahun 2025

Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah dihitung berdasarkan penduduk yang berumur 7 tahun ke atas. Selama kurun waktu 2020-2024. Angka harapan lama sekolah pada tahun 2024 tercatat 13,27 tahun, artinya di Kabupaten Sinjai anak usia 7 tahun yang masuk dunia pendidikan diharapkan akan dapat bersekolah selama 13,27 tahun atau dengan kata lain mencapai pendidikan Diploma I. Angka harapan lama sekolah di Kabupaten Sinjai terus meningkat. Namun harapan lama sekolah tersebut masih dibawah angka provinsi Sulawesi Selatan tetapi masih lebih tinggi dari angka harapan lama sekolah Nasional. Harapan lama sekolah dapat digunakan pula untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan yang tengah berlangsung saat ini yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak, dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.36
Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sinjai
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional (Tahun), Tahun 2020-2024

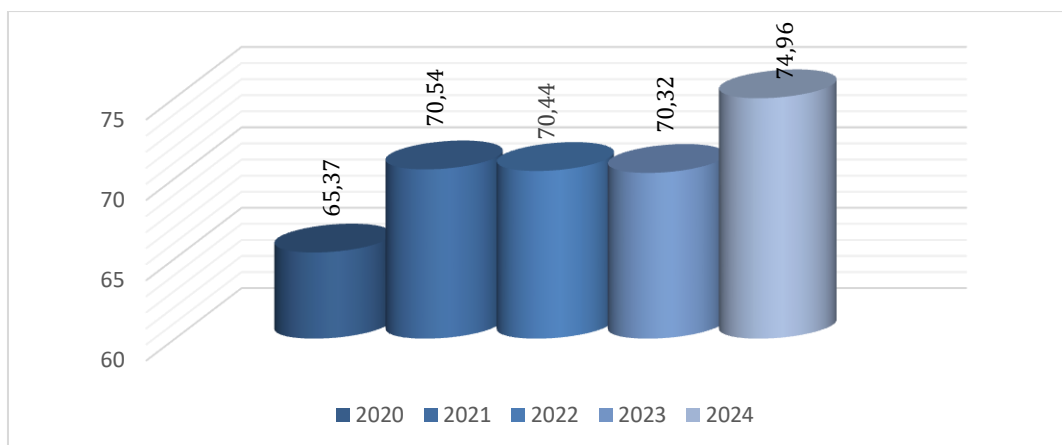


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai. Tahun 2025

Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas berkualifikasi Pendidikan tinggi di Kabupaten Sinjai mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2024 sebesar 74,96 persen mengalami peningkatan sebesar 4,64 persen dibandingkan tahun 2022 sebesar 70,32 persen. Hal ini disebabkan dalam kurun waktu 2020 – 2024 jumlah perguruan tinggi yang bersertifikat terus bertambah sehingga minat penduduk untuk sekolah ke jenjang tinggi di Kabupaten Sinjai semakin tinggi, disamping itu adanya program beasiswa doktor ikut memberikan sumbangsih dalam kualifikasi Pendidikan tinggi, dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.37
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi
Pendidikan Tinggi Kabupaten Sinjai Tahun 2020-2024

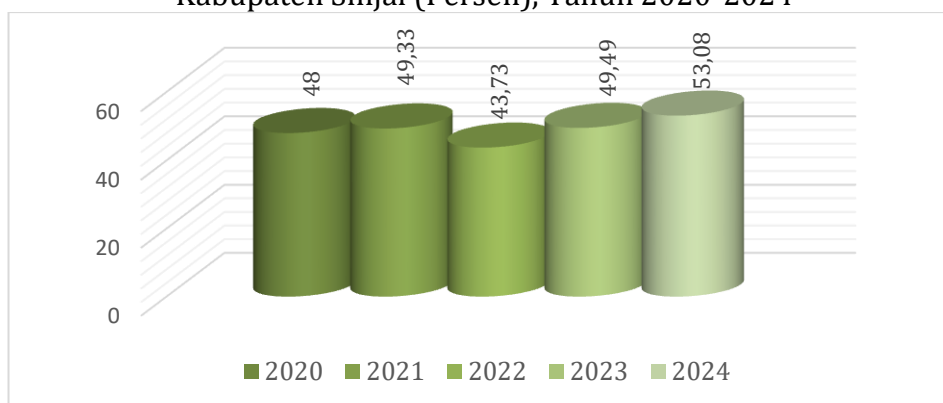


Sumber : Data diolah oleh Bappeda Kabupaten Sinjai Tahun 2025

Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan

Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut Pendidikan tinggi yang ditamatkan di Kabupaten Sinjai mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2024 sebesar 53,08 persen mengalami peningkatan sebesar 3,59 persen dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 49,49 persen,. Hal ini disebabkan jumlah penduduk 15 tahun yang bekerja baik pada sektor formal maupun informal semakin meningkat yang ditandai dengan semakin banyaknya industri kecil dan menengah yang membuka lapangan kerja, dapat dilihat pada grafik berikut

Grafik 2.38
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang bekerja
menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan
Kabupaten Sinjai (Persen), Tahun 2020-2024



Sumber : Data diolah oleh Bappeda Kabupaten Sinjai Tahun 2025

Anak Tidak Sekolah Usia 7-13 Tahun

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI TAHUN 2025-2029

Anak tidak sekolah di Kabupaten Sinjai tahun 2024 masih cukup besar dengan jumlah 2.785 orang dimana anak tidak sekolah tersebut banyak yang pulang dari perantauan ikut dengan orang tua serta anak yang memang tidak minat untuk bersekolah. Salah satu penyebabnya adalah kondisi ekonomi orang tua yang mengharuskan anaknya bekerja untuk membantu orangtua, dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.11
Jumlah Anak Tidak Sekolah Kabupaten Sinjai Tahun 2024

No	Kecamatan	Total
1	Kec. Sinjai Barat	314
2	Kec. Sinjai Borong	314
3	Kec. Sinjai Selatan	485
4	Kec. Tellu Limpoe	488
5	Kec. Sinjai Timur	348
6	Kec. Sinjai Tengah	256
7	Kec. Sinjai Utara	389
8	Kec. Bulupoddo	132
9	Kec. Pulau Sembilan	59
JUMLAH		2.785

Sumber Data : Dinas Pendidikan, tahun 2025

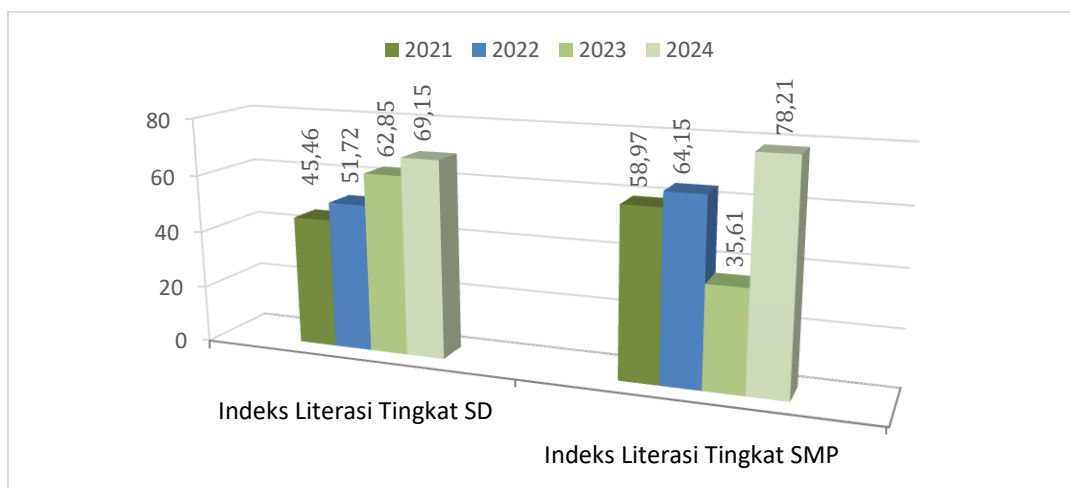
Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional

- Literasi Membaca

Akses terhadap layanan pendidikan sudah dapat dijangkau oleh lapisan masyarakat namun pemerintah belum mampu untuk meningkatkan minat baca atau budaya baca masyarakat meskipun program wajib belajar 9 tahun, namun tingkat pendidikan yang ditamatkan belum mencapai 9 tahun atau setara SMP. Berdasarkan *Survei programme for International Student Assessment*, menunjukkan bahwa kemampuan memahami dan keterampilan menggunakan bahan-bahan bacaan khususnya teks dokumen pada anak-anak Indonesia usia 9–14 tahun berada di peringkat sepuluh terbawah, dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.39
persentase Literasi Membaca Tingkat SD dan SMP

Kabupaten Sinjai (persen), Tahun 2021-2024

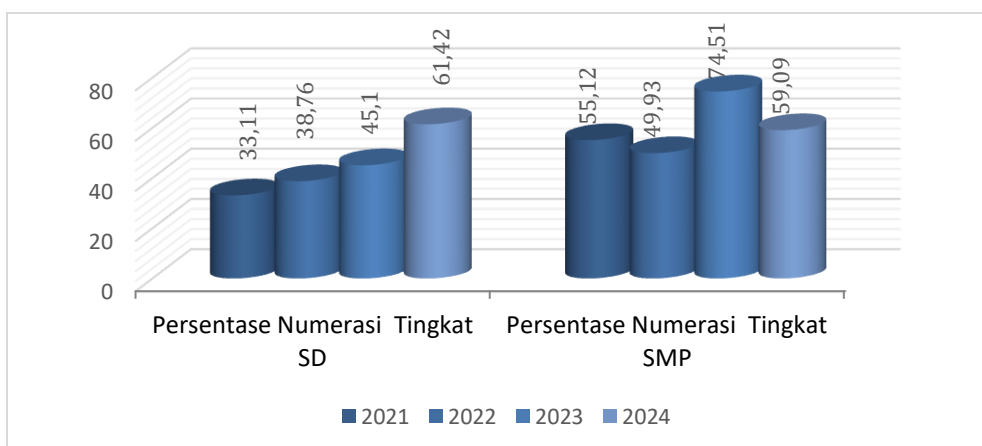


Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai. Tahun 2025

- Numerasi

Persentase Numerasi tingkat SD sebesar 61,42 persen mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 16,32 persen dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 45,10 persen. Sedangkan persentase numerasi tingkat SMP pada tahun 2024 sebesar 59,09 persen mengalami penurunan sebesar 15,42 persen dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 74,51 persen, dapat dilihat pada tabel berikut.

Grafik 2.40
Persentase Numerasi Tingkat SD dan SMP
Kabupaten Sinjai (persen), Tahun 2021-2024



Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai. Tahun 2025

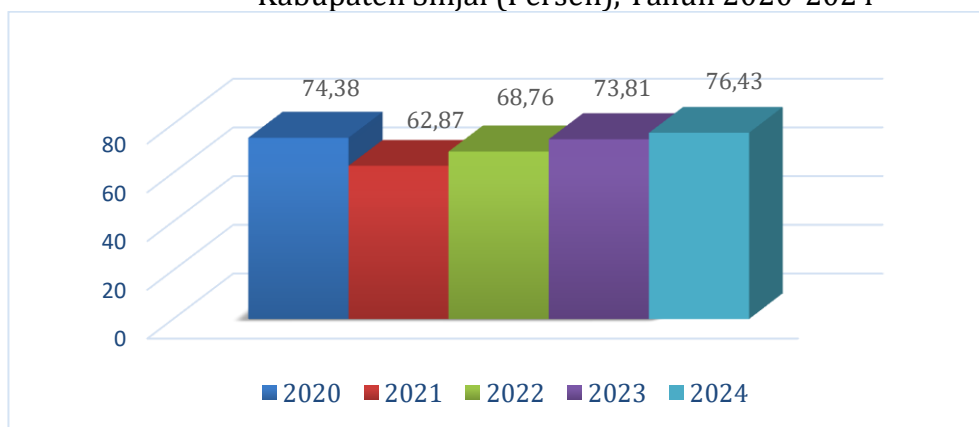
4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Jaminan sosial ketenagakerjaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap risiko yang mungkin dihadapi oleh pekerja seperti kecelakaan kerja, meninggal dunia, persiapan hari tua, pensiun dan pemutusan hubungan kerja. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan mengalami fluktuasi periode 2020 – 2024,

Namun, meskipun jumlah peserta JAMSOSTEK meningkat, proporsi pekerja yang terdaftar dalam program ini mengalami fluktuasi. Pada tahun 2024 sebesar 76,43 persen mengalami peningkatan sebesar 2,62 persen dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 73,81 persen. Tren ini menunjukkan adanya peningkatan kepesertaan JAMSOSTEK seiring bertambahnya jumlah pekerja, meskipun masih ada tantangan dalam memastikan seluruh pekerja mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara optimal, dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.41
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Kabupaten Sinjai (Persen), Tahun 2020-2024



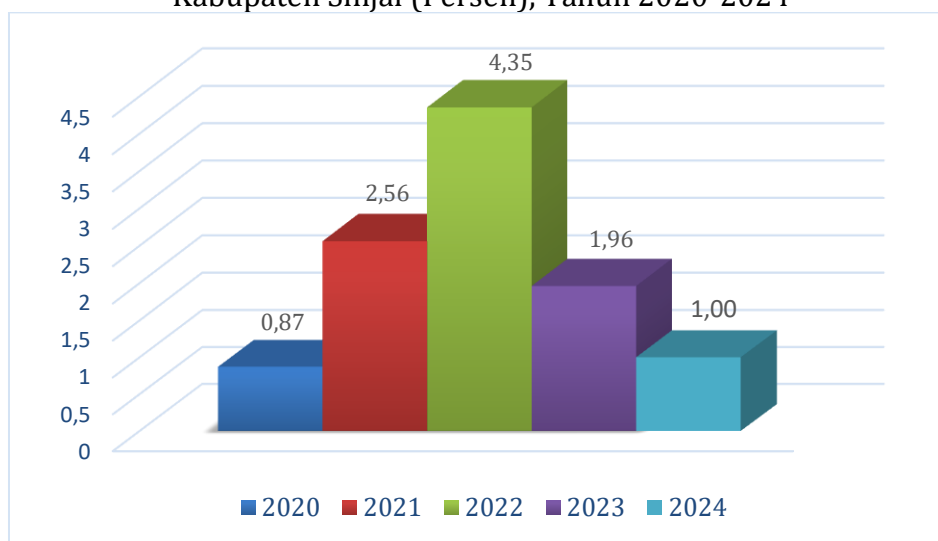
Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun 2025

Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal

Undang-undang No. 13 Tahun 2013 bahkan memuat secara jelas hak-hak disabilitas. Pasal 11 secara spesifik menyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau swasta tanpa diskriminasi. Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling

sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal di Kabupaten Sinjai pada tahun kurun waktu 2020-2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2024 sebesar 1,00 persen mengalami penurunan sebesar 0,96 persen dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 1,96 persen, dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.42
Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal
Kabupaten Sinjai (Persen), Tahun 2020-2024



Dinas : Dinas Sosial Kabupaten Sinjai Tahun 2025

5. Beragama Maslabat dan Berkebudayaan Maju

Indeks Pembangunan Kebudayaan

Cagar Budaya

Benda bangunan struktur dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi di Kabupaten Sinjai dari 58 (lima puluh delapan) situs cagar budaya yang telah dilakukan pendaftaran baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah baru 18 (delapan belas) situs cagar budaya yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.12

**RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029**

Cagar Budaya Kabupaten Sinjai, Tahun 2024

NO.	NAMA CAGAR BUDAYA	SK PENETAPAN	TANGGAL PENETAPAN	YANG MENETAPKAN
1	Struktur Batu Pake Gojeng	240/M/1999 & 848	4 Mei 1999 & 22 Desember 2023	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dan ditetapkan kembali oleh Bupati Sinjai
2	Benteng Balangnipa	240/M/1999 & 847	4 Oktober 1999 & 22 Desember 2023	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dan ditetapkan kembali oleh Bupati Sinjai
3	Makam Tua Caropo	681	13 Agustus 2018	Bupati Sinjai
4	Situs Perjanjian Topekkong	682	13 Agustus 2018	Bupati Sinjai
5	Kawasan Adat Karampuang	683	13 Agustus 2018	Bupati Sinjai
6	Kompleks Makam Bulu-Bulu	684	13 Agustus 2018	Bupati Sinjai
7	Masjid Raya "NUR" Balangnipa	878	27 November 2019	Bupati Sinjai
8	Saoraja Ri Linrung	879	27 November 2019	Bupati Sinjai
9	Kompleks Makam Bonto Salama	880	27 November 2019	Bupati Sinjai
10	Mesjid Tua Aruhu (Al-Mujahidin)	881	27 November 2019	Bupati Sinjai
11	Bangunan Sekolah Rakyat'	450	6 April 2021	Bupati Sinjai
12	Rumah Adat Arung Lappa	467	20 April 2021	Bupati Sinjai
13	Makam Syekh Malik Ibrahim Barat Al - Haq Khutbah Bulu-Bulu	823	7 Desember 2022	Bupati Sinjai
14	Saoraja Tondong	822	7 Desember 2022	Bupati Sinjai
15	Saoraja Bikeru	821	7 Desember 2022	Bupati Sinjai
16	Struktur Makam Labolong Dg. Maketti	849	22 Desember 2023	Bupati Sinjai
17	Struktur Makan Gella Dohung	850	22 Desember 2023	Bupati Sinjai
18	Batu Berlubang Bulu-Bulu	851	22 Desember 2023	Bupati Sinjai

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun 2025

Indeks Kerukunan Umat Beragama

Persentase kegiatan keagamaan di Kabupaten Sinjai yang mendapatkan dukungan atau fasilitasi sebesar 100 persen. Hal ini terlihat dari adanya rasa

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI TAHUN 2025-2029

aman bagi pelaksanaan kegiatan keagamaan di Kabupaten Sinjai baik bagi pemeluk agama Islam maupun bagi pemeluk agama lainnya. Hal tersebut juga terlihat dari pelaksanaan kegiatan keagamaan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat umum di berikan fasilitas serta kemudahan dan rasa aman. Adanya tempat-tempat yang mendukung ibadah seperti masjid, musholla, pesantren, rumah-rumah tahfidz dan rumah alquran menunjukkan adanya dukungan / fasilitasi keagamaan di Kabupaten Sinjai.

Tabel 2.13
Jenis Bantuan Keagamaan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Imam Masjid /Desa /Kelurahan	Orang	793	793	795	795	802
2.	Guru Mengaji	Orang	791	791	800	800	806
3.	Bantuan Masjid		50	26	44	41	11
4.	Bantuan Rehabilitasi Pesantren		8	7	9	7	7
5.	Tahfidz Al-Quran		1	2	3	3	3

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2025

6. Keluarga berkualitas, Kesetaraan Cenderdan Masyarakat Inklusif

Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Penghitungan indeks pembangunan kualitas keluarga merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi pemerintah dalam rangka mengidentifikasi permasalahan keluarga dan selanjutnya mempersiapkan penyusunan intervensi kebijakan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta ukuran keberhasilan pembangunan kualitas keluarga di Indonesia dan menjadi tolok ukur basis perencanaan dan indikator keberhasilan pembangunan kualitas keluarga. Indeks pembangunan kualitas keluarga di Kabupaten Sinjai belum dilakukan penilaian untuk periode 2020 – 2024 sehingga tidak ada data yang di sajikan.

Indeks Perlindungan Anak

Untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak dari tindak kekerasan, pelecehan, eksploitasi dan gangguan lainnya, maka pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya sehingga anak-anak dapat hidup, tumbuh

berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

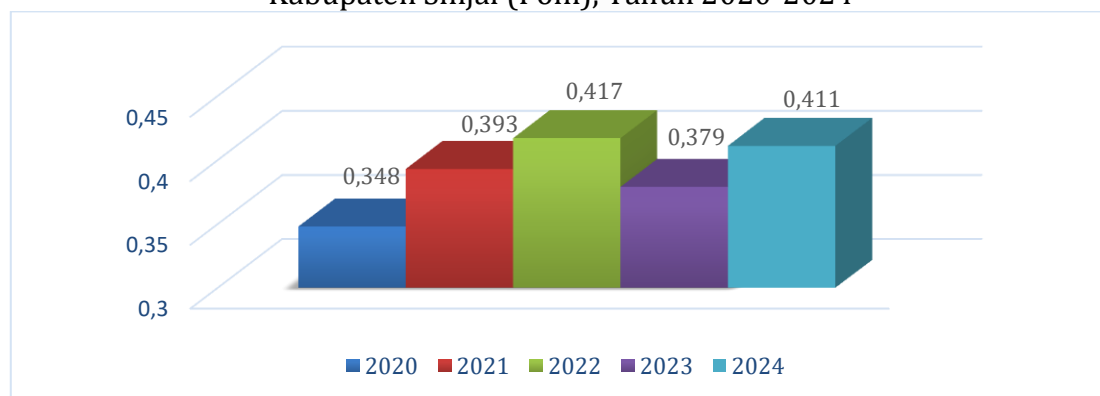
Indeks perlindungan anak di Kabupaten Sinjai belum dilakukan penilaian sehingga belum ada data yang dapat di sajikan.

Indeks Ketimpangan Gender

Ketimpangan gender masih menjadi permasalahan yang cukup tinggi di suatu wilayah. Sehingga perlu adanya kebijakan yang berupaya untuk mengurangi kesenjangan gender atau untuk mencapai kesetaraan gender. Salah satu indikator yang menjadi alat pengukuran kesenjangan gender adalah pencapaian antara perempuan dan laki-laki dalam tiga dimensi yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja.

Indeks ketimpangan gender di Kabupaten Sinjai cukup bervariasi sejak tahun 2020 – 2024, dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.43
Indeks Ketimpangan Gender
Kabupaten Sinjai (Poin), Tahun 2020-2024



Sumber Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai Tahun 2025

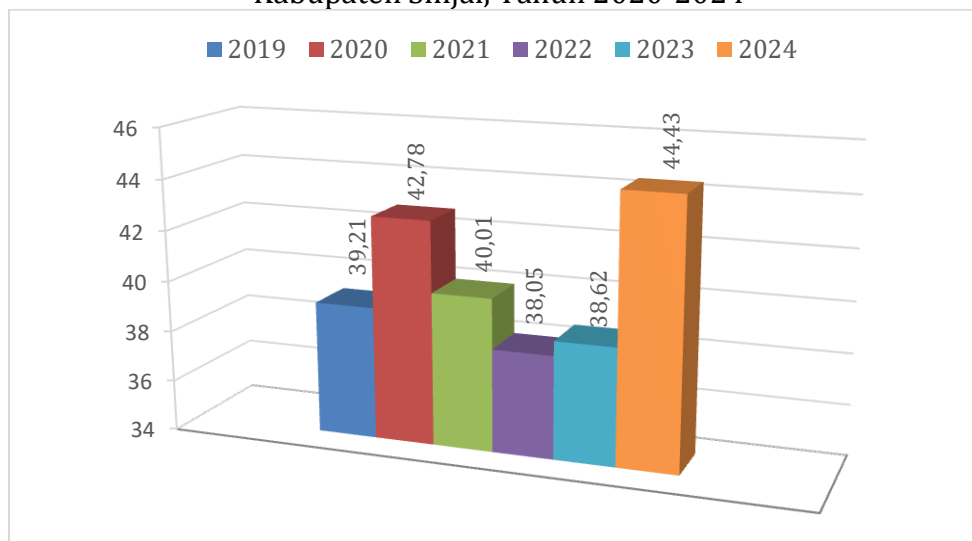
A. ASPEK DAYA SAING DAERAH

1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan Kabupaten Sinjai selama periode 2020 – 2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2024 sebesar 44,43 persen mengalami peningkatan sebesar 5,81 persen dibandingkan tahun 2023 sebesar 38,62 persen. Berarti bahwa kurun waktu tersebut jumlah penduduk produktif semakin banyak, dapat dilihat pada grafik berikut:

**Grafik 2.44
Rasio Ketergantungan
Kabupaten Sinjai, Tahun 2020-2024**



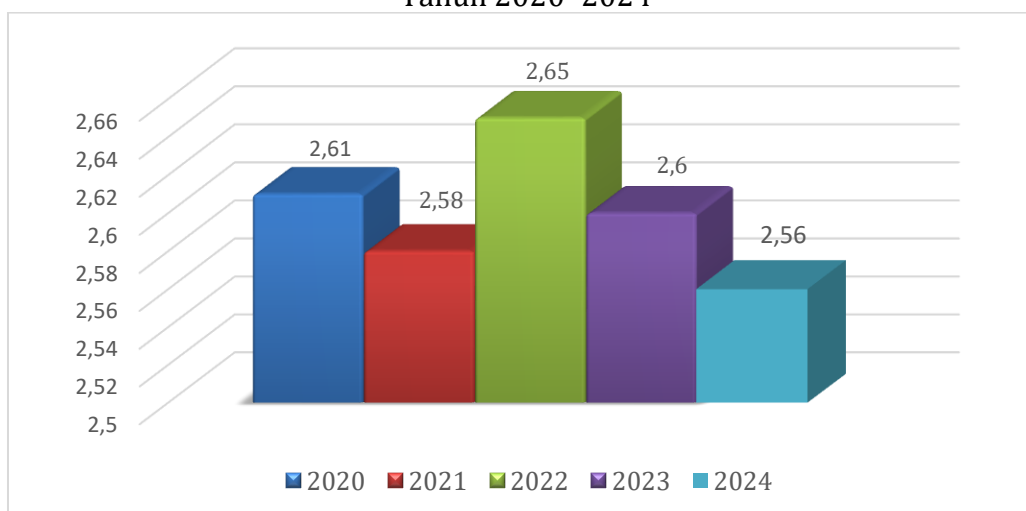
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai Tahun 2025

2. Iptek, Inovasi,dan Produktivitas Ekonomi

Rasio PDRB Industri Pengolahan

Industri pengolahan memberikan kontribusi yang cukup besar di Kabupaten Sinjai. Rasio PDRB industri pengolahan di Kabupaten Sinjai fluktuatif dikisaran 2,5-2,7 persen. Kontribusi terbesar masih banyak didominasi oleh pengolahan makanan, dapat dilihat pada grafik berikut :

**Grafik 2.45
Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Sinjai (Persen),
Tahun 2020-2024**

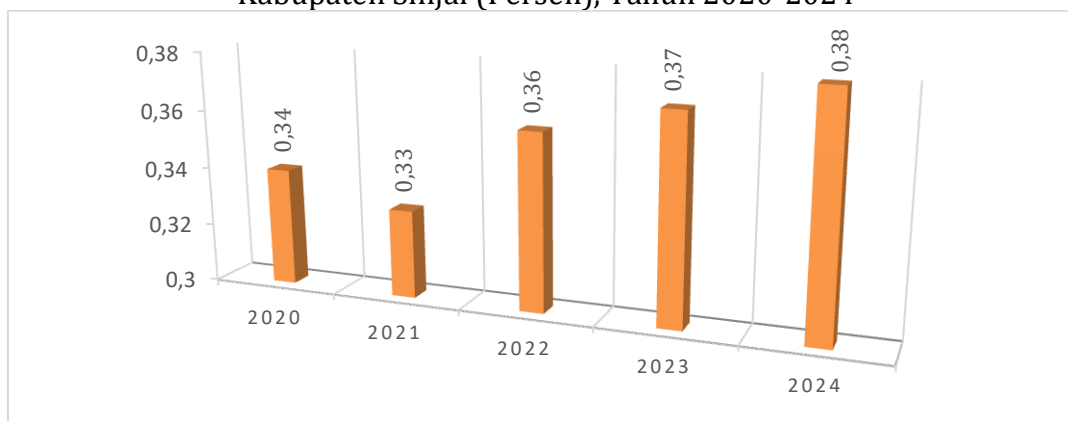


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai Tahun 2025

Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum

Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2024 sebesar 0,38 persen mengalami peningkatan sebesar 0,01 persen dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 0,37. Hal ini disebabkan karena sudah terdapat banyak akomodasi, makan dan minum di lokasi wisata namun belum terkelola secara baik dan belum di koordinir oleh lembaga sehingga tempat-tempat akomodasi, makan dan minum kadang beroperasi dan tidak beroperasi.

Grafik 2.46
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum
Kabupaten Sinjai (Persen), Tahun 2020-2024

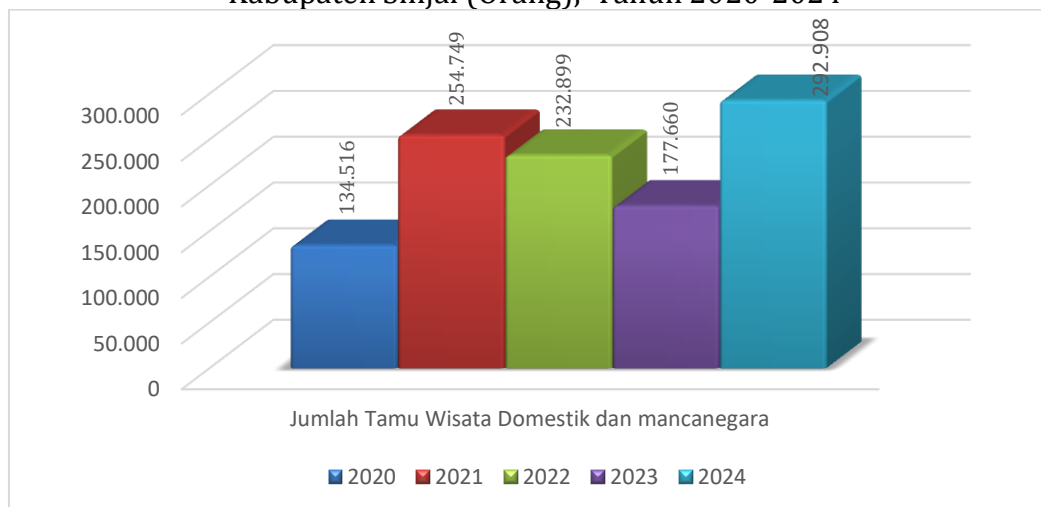


Sumber : Dinas Parawisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai. Tahun 2025

Jumlah Tamu Wisata Domestik dan Mancanegara

Kunjungan wisata pada suatu daerah dapat memberikan kontribusi bagi daerah maupun bagi masyarakat. Jumlah tamu wisata domestik dan mancanegara Pada tahun 2024 sebanyak 292.908 orang mengalami peningkatan sebanyak 115.248 orang 2023 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 177.660 orang. Hal ini disebabkan event-event yang dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya cukup menjadikan tamu wisata domestik dan mancanegara banyak yang berkunjung ke Kabupaten Sinjai. Selain itu tempat-tempat wisata yang baru dan menarik turut memberikan kontribusi kunjungan tamu wisata, dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.47
Jumlah Tamu Wisata Domestik dan Mancanegara
Kabupaten Sinjai (Orang), Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai, Tahun 2025

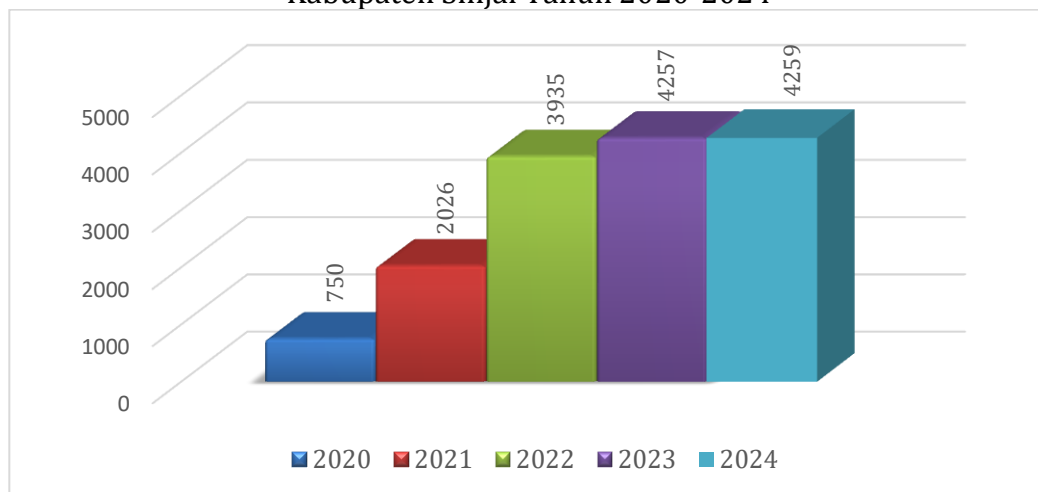
Jumlah Industri Ekonomi Kreatif

Industri Kreatif Kabupaten Sinjai pada tahun 2020-2023 belum terukur capaian kinerjanya, karena jumlah industri kreatif di Kabupaten Sinjai belum terdata secara optimal. Hal ini karena pembagian antara industri kreatif dengan industri kecil dan menengah belum terpilah secara spesifik, dan pada tahun 2024 sudah bisa dihitung jumlah industri ekonomi kreatif sebanyak 514 industri ekonomi, namun tetap di rencanakan untuk perhitungan capaian kinerjanya pada periode tahun 2025-2029.

Jumlah Industri Kecil dan Menengah

Jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten Sinjai mengalami peningkatan yang cukup signifikan sejak tahun 2020-2024. Jumlah IKM Tahun 2024 sebanyak 4259 industri mengalami peningkatan sebanyak 2 industri dibandingkan pada tahun 2023 sebanyak 4257 industri. Pertumbuhan industri kecil dan menengah di Kabupaten Sinjai dibarengi dengan sarana dan prasarana yang memadai sehingga minat berusaha dari masyarakat menjadi besar, selain itu banyaknya kemudahan pinjaman dari lembaga keuangan dengan cicilan yang rendah menjadi pemicu pertumbuhan industri kecil dan menengah. Distribusi dan pasar yang semakin besar baik secara offline maupun online terus di kembangkan baik oleh pemerintah maupun swasta turut memberikan andil dalam perkembangan industri kecil dan menengah di Kabupaten Sinjai, dapat dilihat pada grafik berikut .

Grafik 2.48
Jumlah Industri Kecil dan Menengah
Kabupaten Sinjai Tahun 2020-2024



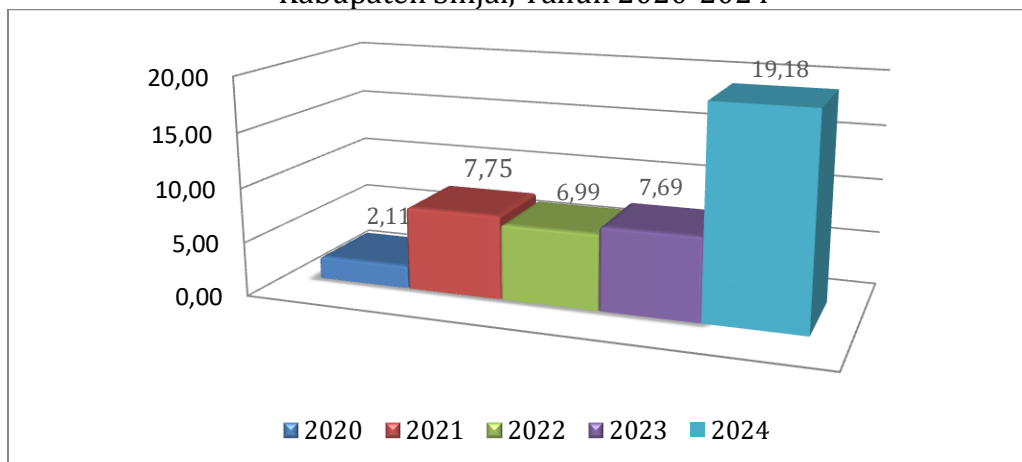
Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral Kab.Sinjai Tahun 2025

Persentase Koperasi Sehat

Persentase koperasi sehat mulai dari tahun 2020 sampai 2023 terlihat cukup stabil Peningkatannya yakni hanya satu atau dua tingkat kenaikannya, hal ini disebabkan oleh karena interval waktu tersebut yang dihitung adalah peningkatan koperasi yang tidak aktif menjadi aktif yang menggunakan parameter yakni melaksanakan RAT, usaha berjalan serta aktif kelembagaannya sehingga kenaikan koperasi aktif tidak terlalu tinggi.

Selanjutnya untuk Tahun 2024 terlihat mengalami lompatan kenaikan yang cukup tinggi diakibatkan oleh perhitungan yang dilakukan adalah koperasi Sehat bukan koperasi aktif , dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.49
Persentase Koperasi Sehat
Kabupaten Sinjai, Tahun 2020-2024

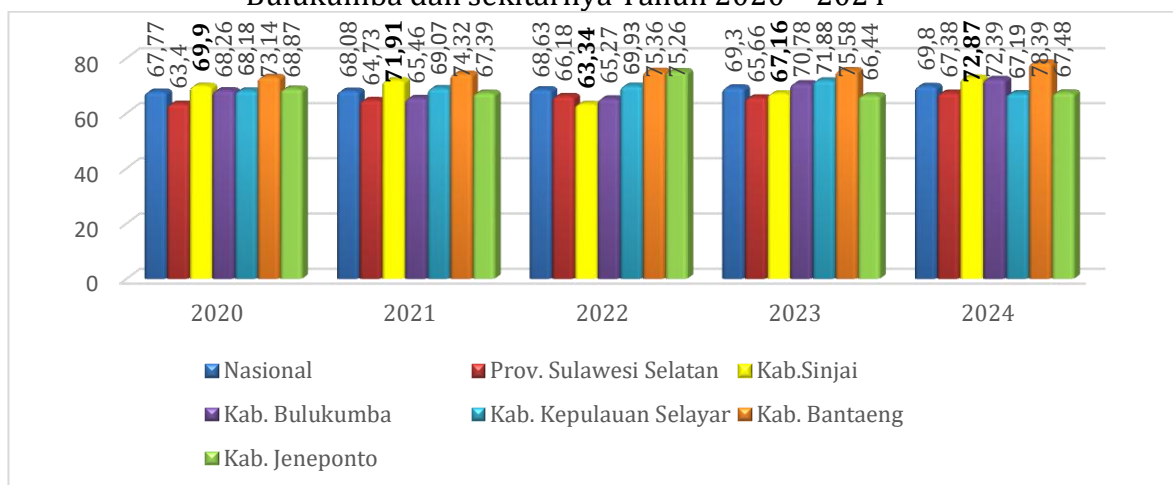


Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun 2025

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Persentase tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2020 – 2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2024 sebesar 72,87 persen mengalami peningkatan sebesar 5,71 persen dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 67,16 persen. Salah satu faktor utama adalah pertumbuhan penduduk usia produktif, terutama kelompok usia muda yang semakin besar. Bonus demografi ini mendorong lebih banyak individu untuk masuk ke pasar kerja. Selain itu, perluasan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja juga menjadi faktor penting. Berbagai program pelatihan kerja, baik yang difasilitasi oleh pemerintah daerah maupun lembaga pelatihan kerja swasta, sehingga hal tersebut memberikan bekal keterampilan bagi pencari kerja, hal yang lain yang juga tidak kalah penting adalah kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Sinjai, seperti pelatihan kewirausahaan, penyaluran bantuan modal usaha, dan penempatan tenaga kerja, telah memberikan dukungan langsung kepada masyarakat usia kerja. sehingga meningkatkan kesiapan mereka untuk masuk ke dunia kerja. Dibandingkan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Sinjai masih lebih tinggi. Sedangkan dengan kabupaten sekitarnya tingkat partisipasi angkatan kerja paling tinggi di Kabupaten Bantaeng dan terendah di Kabupaten Kepulauan Selayar, dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.50
Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Sinjai dengan wilayah Setara pada Kawasan Bulukumba dan sekitarnya Tahun 2020 – 2024

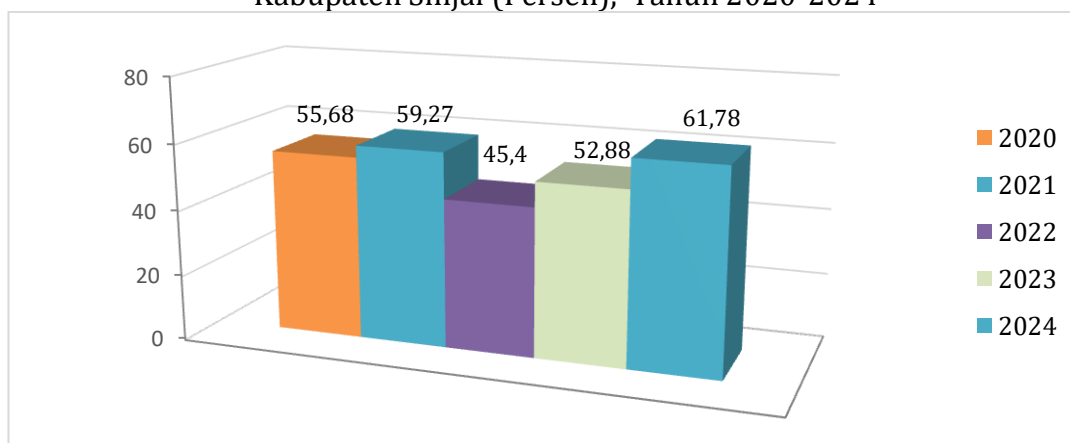


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai. Tahun 2025

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural, kultural, dan ekonomi yang saling berkaitan. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan pada tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2024 sebesar 61,78 persen mengalami peningkatan sebesar 8,9 persen dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 52,88 persen. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain: peningkatan tingkat pendidikan perempuan, akses pendidikan yang lebih merata, terutama di tingkat menengah dan tinggi, telah mendorong perempuan untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan di pasar kerja, selain itu perkembangan sektor ekonomi lokal, terutama di sektor pertanian, perdagangan, jasa, dan UMKM, telah membuka lebih banyak peluang kerja yang dapat diakses oleh perempuan, serta yang tak kalah penting adanya program-program pelatihan yang banyak mengikutsertakan kelompok perempuan hal tersebut turut mendukung terciptanya iklim kerja yang inklusif dan angkatan kerja perempuan cenderung dapat berkontribusi secara optimal didalam pasar kerja, dapat dilihat pada grafik berikut .

Grafik 2.51
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Kabupaten Sinjai (Persen), Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai Tahun 2025

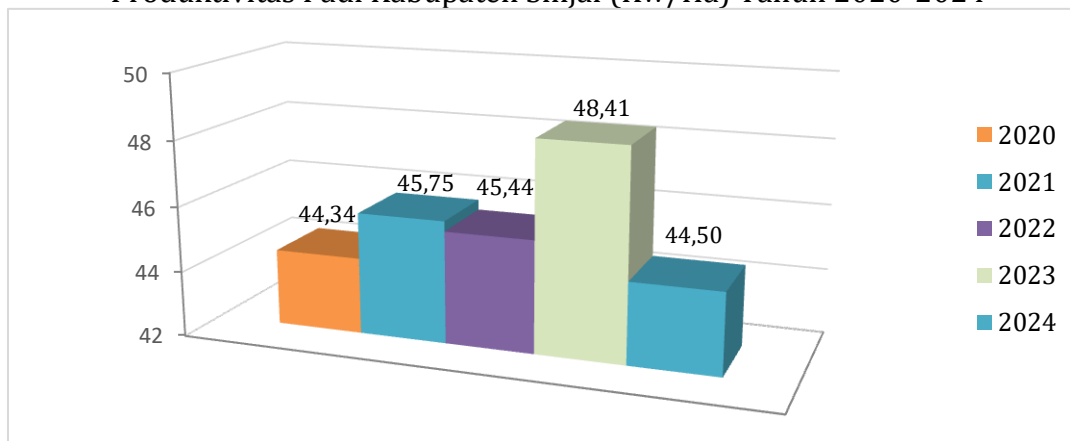
Produktivitas Padi

Produktivitas padi cenderung fluktuatif. Produktivitas pada tahun 2024 sebesar 44,50 kw/ha mengalami penurunan sebesar 3,91 kw/ha dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 48,41 kw/ha. Hal ini disebabkan terutama Dampak

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI TAHUN 2025-2029

Perubahan Iklim dimana kondisi kekeringan yang berkepanjangan akibat fenomena El Nino sehingga gagal tanam dan gagal panen terjadi di wilayah Kab. Sinjai. Produktivitas padi di Kabupaten Sinjai juga dipengaruhi oleh luas panen, penggunaan sarana pertanian yang bermutu terutama benih dan pupuk serta kapasitas petani dalam pengelolaan lahan pertaniannya, dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.52
Produktivitas Padi Kabupaten Sinjai (Kw/Ha) Tahun 2020-2024

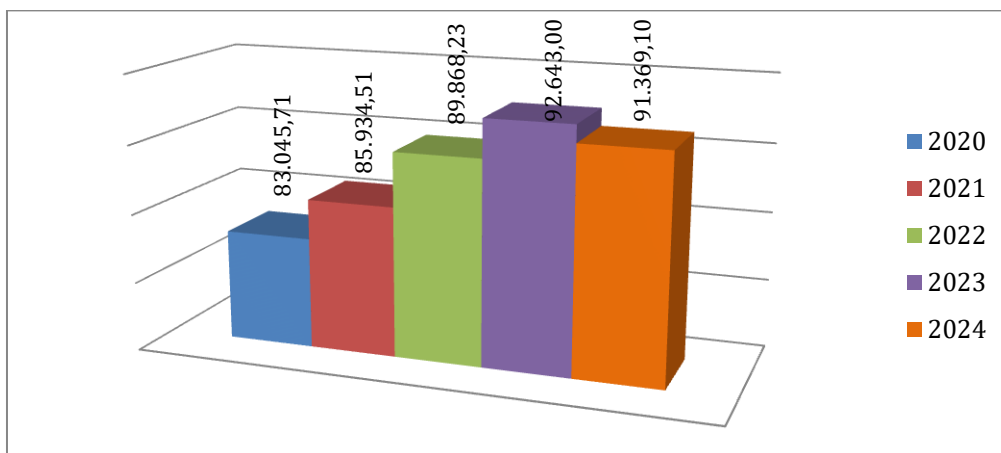


Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab.Sinjai Tahun 2025

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

Produksi perikanan pada tahun 2024 sebanyak 91.369,10 ton mengalami penurunan sebanyak 1.273,90 ton dibandingkan pada tahun 2023 sebanyak 92.643,00 ton. Hal ini disebabkan kurang tersedianya sarana dan prasarana penangkapan dan budidaya ikan yang semakin banyak dan modern, namun disisi lain, peningkatan produksi dan ketersediaan sarana dan prasarana tersebut berdampak pada eksploitasi yang berlebihan dan pencemaran laut sehingga perlu adanya pengendalian penangkapan dengan penggunaan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan., dapat dilihat pada tabel berikut :

Grafik 2.53
Jumlah Produksi Perikanan
Kabupaten Sinjai (Ton), Tahun 2020-2024

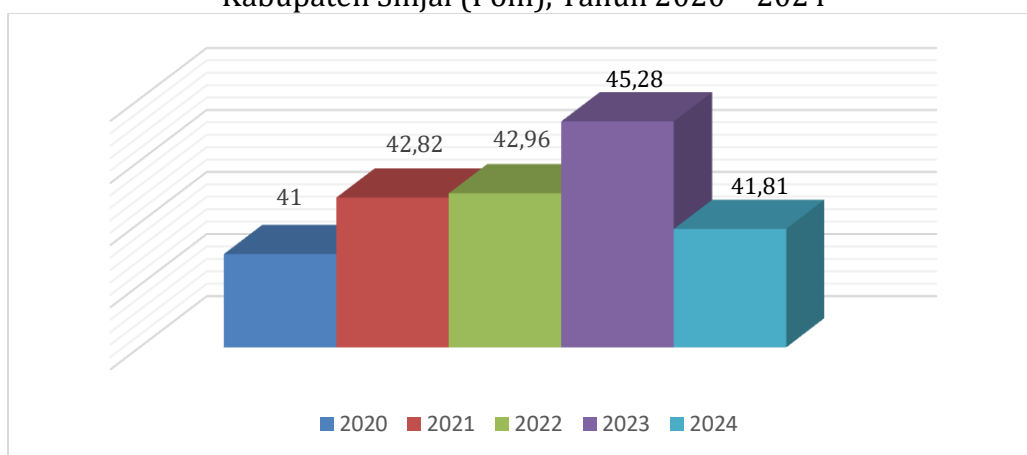


Sumber : Dinas Perikanan Kab.Sinjai Tahun 2025

Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah merupakan sejumlah inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penilaian dan Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (Indeks Inovasi Daerah) diberikan kepada daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah berhasil melakukan inovasi daerah dalam bentuk inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan inovasi daerah lainnya. nilai Indeks Inovasi tahun 2024 sebanyak 41,81 poin mengalami penurunan sebanyak 3,47 poin dibandingkan pada tahun 2023 sebanyak 45,28 poin, dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.54
Indeks Inovasi Daerah
Kabupaten Sinjai (Poin), Tahun 2020 – 2024



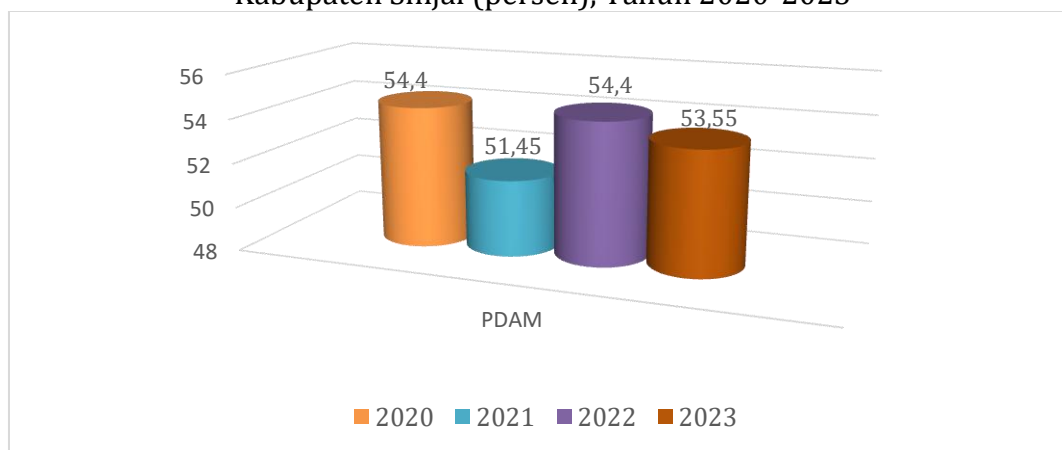
Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai, 2025

Return on Aset (ROA) BUMD

RoA (Return on Assets) BUMD mencerminkan seberapa baik aset yang dimiliki BUMD digunakan untuk menghasilkan laba. RoA BUMD menghitung seberapa efektif BUMD dalam menghasilkan keuntungan (laba bersih) dari total aset yang dimilikinya. RoA yang lebih tinggi menunjukkan bahwa BUMD lebih efisien dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. RoA yang lebih rendah bisa mengindikasikan bahwa BUMD mungkin perlu melakukan penyesuaian strategi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan aset. Penurunan nilai kinerja disebabkan aspek operasional pada indikator produktivitas pemanfaatan instalasi produksi dan sumber daya manusia. Secara umum kinerja BUMD menunjukkan kondisi sehat. Jumlah BUMD di Kabupaten sinjai terdiri dari PDAM Titra Sinjai Bersatu.

Pada tahun 2023 sebesar 53,55 persen atau dengan kualifikasi cukup mengalami penurunan sebesar 0,85 persen dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 54,40 persen, dapat dilihat pada grafik.

Grafik 2.55
Persentase Kinerja Perumda Air Minum
Kabupaten Sinjai (persen), Tahun 2020-2023



Sumber : PDAM Kabupaten Sinjai Tahun 2025

3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Indeks Ekonomi Hijau

Koefisien antar waktu adalah perbandingan simpangan baku pada tahun N terhadap harga rata-rata pertahun pada tahun N (simpangan baku adalah persentase selisih harga real dengan harga rata-rata per komoditi. Harga rata rata adalah harga rata rata per komoditi. Komoditi berupa: Beras, Gula pasir,

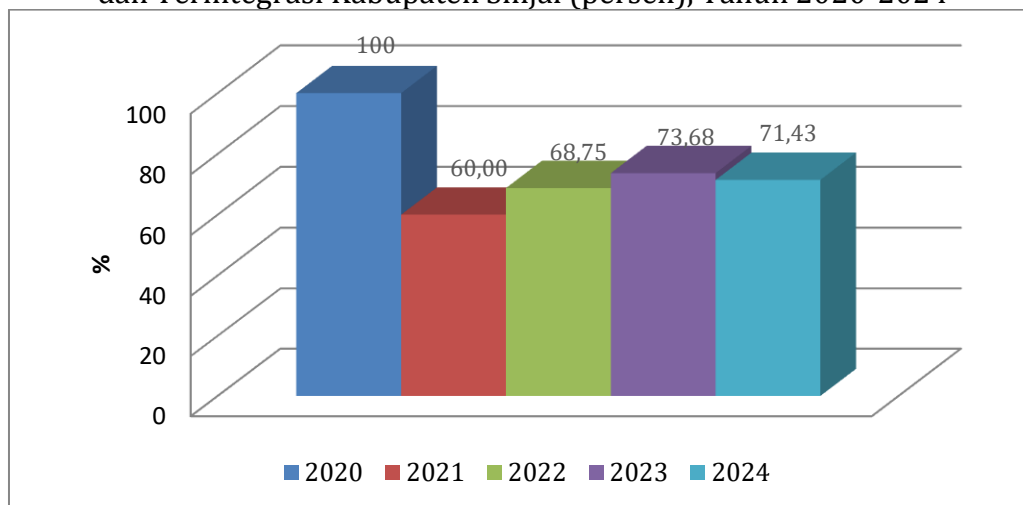
Minyak goreng, Tepung terigu, Daging Sapi, Daging ayam broiler, Daging ayam kampung, Telur ayam broiler, Telur ayam kampung, Telur itik, Cabe merah, Cabe rawit, Cabe hijau, Bawang Merah, Bawang putih, Susu bubuk, Susu kental manis, Gas LPG, Mie instan, Kacang tanah, Kacang hijau, Ikan asin teri, Ketela pohon, Jagung pipilan, Kacang kedele, Garam). Persentase koefisien harga di Kabupaten Sinjai belum dapat dilakukan perhitungan kinerja dikarenakan belum tersedia data yang dapat dihitung, akan tetapi akan dilakukan pada tahun-tahun yang akan datang.

4. Transformasi Digital

Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi

Untuk indikator berdasarkan Permendagri 18 Tahun 2020, realisasi indikator pada tahun awal penilaian, tahun 2020 telah mencapai angka yang cukup tinggi. Dimana pada indikator persentase OPD yang terhubung dengan akses internet pada tahun 2024 sebesar 71,43 persen mengalami penurunan sebesar 2,25 persen dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 73,68 persen yang mana layanan publik terdapat dua kategori yaitu layanan publik internal semua Perangkat Daerah bisa menggunakan sedangkan Eksternal pelayanan untuk masyarakat, dan jumlah layanan publik sebanyak 21 layanan dan yang terintegrasi sebanyak 15 layanan publik. serta indikator persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah juga bisa mencapai target, yang merupakan komitmen Diskominfo untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola dan mendistribusikan informasi bagi pelayanan publik demi mewujudkan reformasi sektor publik menuju e-Government yang didambakan oleh masyarakat.

Grafik 2.56
Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi Kabupaten Sinjai (persen), Tahun 2020-2024



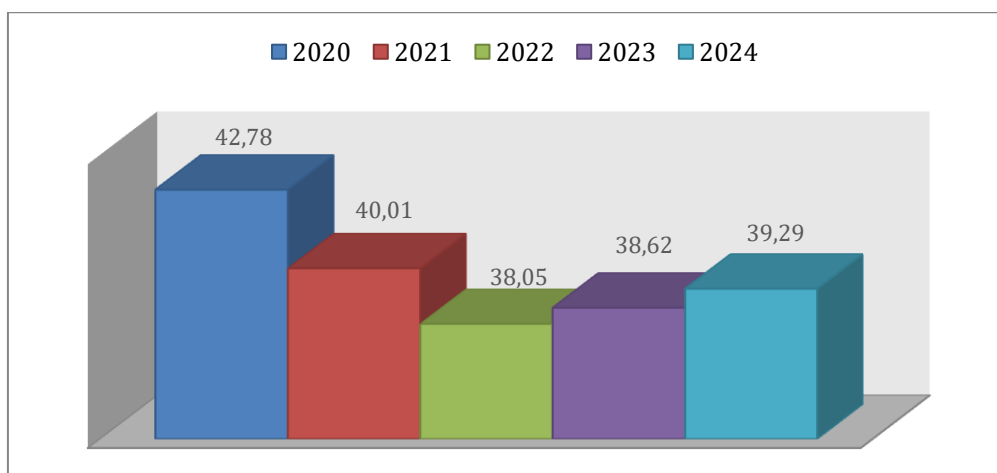
Sumber Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Sinjai Tahun 2025

5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan modal tetap bruto merupakan pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi yang mengukur nilai aset tetap yang diperoleh atau diproduksi dalam periode tertentu baik oleh sektor publik maupun swasta. Pembentukan Modal Tetap Bruto pada tahun 2024 sebesar 39,29 persen mengalami peningkatan sebesar 0,67 persen dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 38,62 persen, dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.57
Pembentukan Modal Tetap Bruto
Kabupaten Sinjai (persen), Tahun 2020-2024

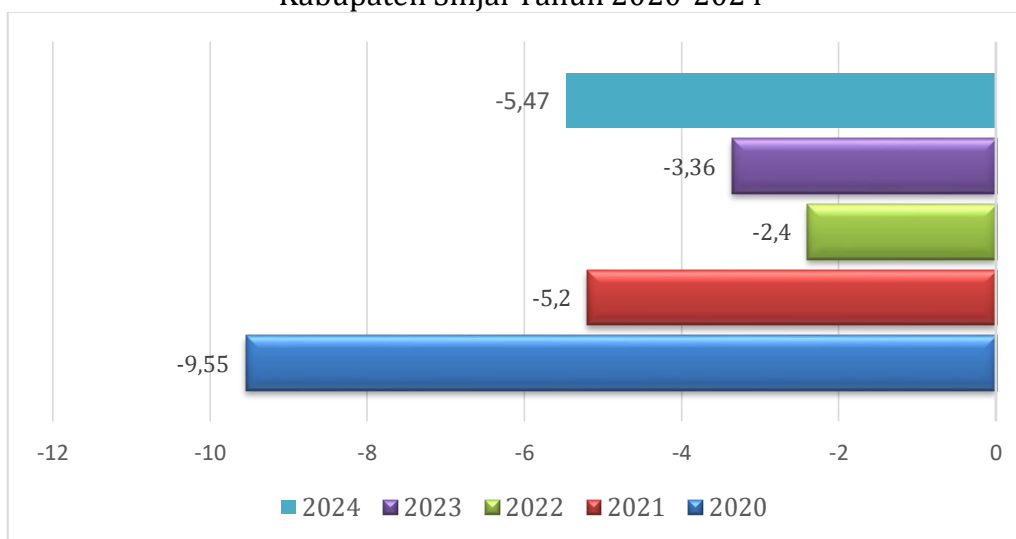


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai Tahun 2025

Net Ekspor Barang dan Jasa

Pendapatan Domestik Regional Bruto suatu daerah merupakan ukuran barang dan jasa yang dihasilkan dalam periode tertentu. Ekspor barang dan jasa mencerminkan nilai yang dicapai oleh Kabupaten Sinjai dalam perdagangan internasional. Data ekspor barang dan jasa pada tahun 2022-2024 mengalami peningkatan, dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2.58
Net Ekspor Barang dan Jasa
Kabupaten Sinjai Tahun 2020-2024



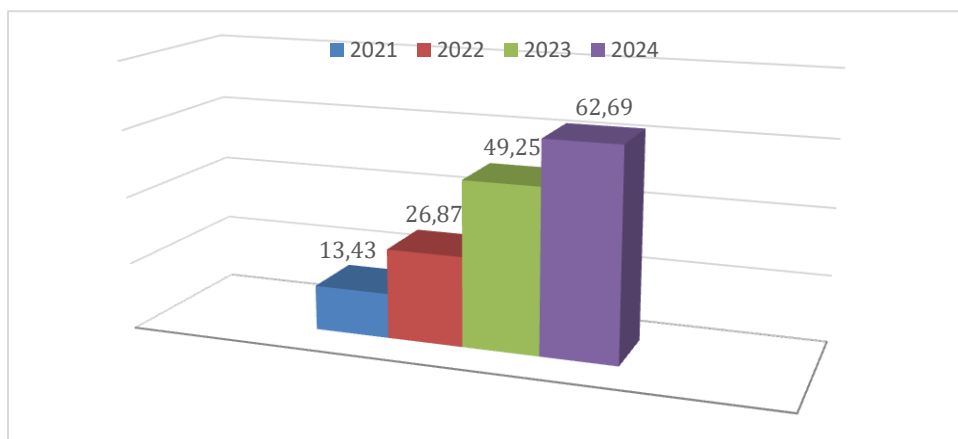
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai Tahun 2025

6. Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Desa Mandiri

Desa mandiri merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencakup infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Persentase desa mandiri pada tahun 2024 di Kabupaten Sinjai mengalami peningkatan sebesar 13,44 persen atau 42 desa dari 67 desa yang pada tahun 2023 baru 33 desa, dapat dilihat pada grafik berikut

Grafik 2.59
Persentase Desa Mandiri Kabupaten Sinjai, Tahun 2021-2024

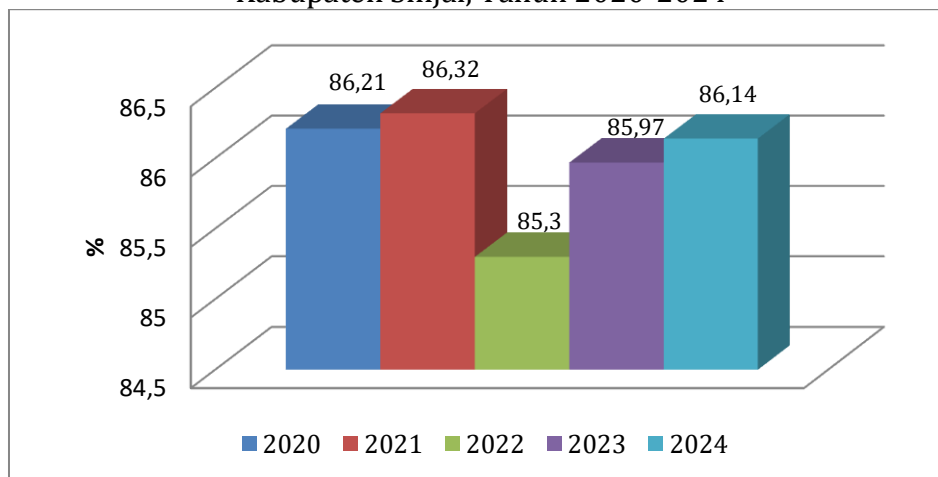


Sumber Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Sinjai Tahun 2025

Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak Terjangkau dan Berkelanjutan

Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak Terjangkau dan Berkelanjutan pada tahun 2024 mencapai 86,14 persen. Capaian ini meningkat 0,26 persen dibandingkan pada tahun 2023. Tren peningkatan ini mengindikasikan adanya upaya yang cukup signifikan dari Pemerintah Daerah Kab. Sinjai dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Peningkatan jumlah rumah layak huni ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi perumahan di Kabupaten Sinjai, yang mana hal ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program hunian layak terjangkau dan berkelanjutan di Kabupaten Sinjai cukup intens dilaksanakan setiap tahunnya melalui kegiatan bedah rumah, dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.60
Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak Terjangkau dan Berkelanjutan Kabupaten Sinjai, Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai, Tahun 2025

Indeks Layanan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian integral pembangunan daerah dan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu pembangunan infrastruktur diyakini sebagai motor pembangunan suatu kawasan. Irigasi, layanan air minum dan sanitasi secara luas dan merata serta pengelolaan sumberdaya air yang berkelanjutan turut menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menyediakan fasilitas dan layanan infrastruktur yang berkualitas, baik dalam bentuk pengaturan dengan kerangka regulasi maupun kerangka investasi melalui rehabilitasi dan peningkatan kapasitas fasilitas infrastruktur yang rusak serta pembangunan baru. Kerangka kebijakan regulasi dan investasi diharapkan akan meningkatkan ketersediaan fasilitas dan layanan infrastruktur.

Pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 74,33 persen mengalami penurunan sebesar 1,00 persen dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 75,33 persen khususnya kemantapan jalan, hal ini disebabkan oleh kondisi jalan yang rusak sedang mengalami peningkatan sehingga berupa menjadi rusak berat dan kurangnya kinerja pemeliharaan jalan. Penanganan Sampah mengalami penurunan karena kondisi sarana dan prasarana yang tidak memadai. Ketersediaan layanan infrastruktur secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.14
Indeks Layanan Infrastruktur
Kabupaten Sinjai, Tahun 2020-2024

INDIKATOR	SATUAN	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Kemantapan jalan	%	52,6	56,94	57,21	58,53	57,48
Irigasi Kondisi baik	%	68,73	69,36	76,96	76,21	76,74
Air Minum Layak	%	75,64	84,64	86,34	86,64	86,65
Sanitasi Layak	%	88,5	89	89,4	89,45	89,47
Rumah Layak Huni	%	86,21	86,32	85,3	85,97	86,14
Penanganan Sampah	%	75,06	76,44	67,28	55,15	49,51
Indeks Layanan Infrastruktur	%	74,46	77,12	77,08	75,33	74,33

Sumber : PUPR, PERKIM dan DLHK Kab. Sinjai. Tahun 2025

7.Stabilitas Ekonomi Makro

Pertumbuhan Investasi Daerah

Pertumbuhan investasi daerah cukup berfluktuatif sejak tahun 2020-2024. Pada tahun 2024 sebesar -1,92 persen mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar -75,25 persen dibandingkan pada tahun 2023 sebesar - 77,17 persen, hal ini disebabkan capaian persentase pertumbuhan investasi dipengaruhi oleh capaian tahun penilaian dengan tahunsebelum penilaian, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.15
Pertumbuhan Investasi Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2020-2024

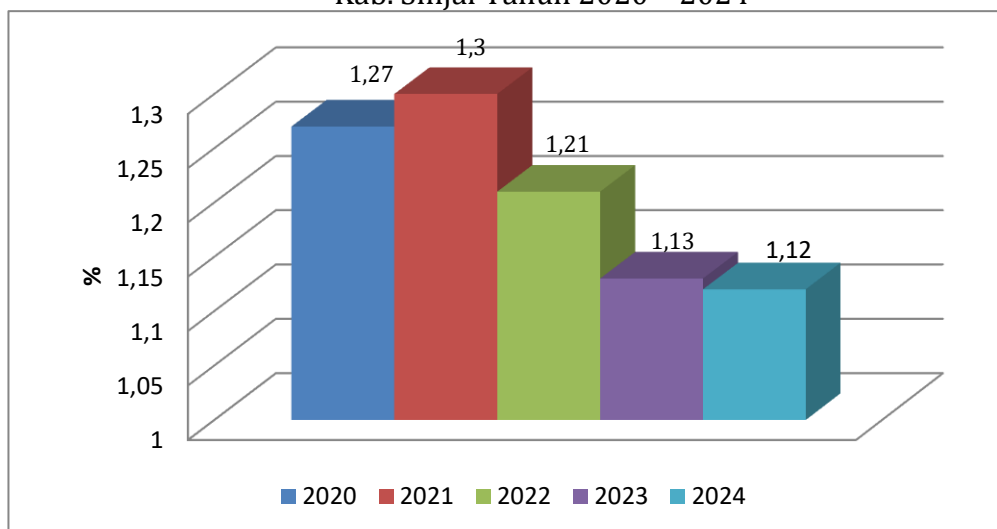
Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Investasi Daerah	%	12,05	12,1	31,85	-77,17	-1,92

Sumber Data ; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Sinjai Tahun 2025

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah ukuran nilai ekonomi dari suatu wilayah baik itu provinsi, kabupaten/kota atau wilayah geografis lainnya. PDRB mencakup seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh unit-unit ekonomi di dalam wilayah tersebut dalam suatu periode tertentu. PDRB umumnya diukur dalam satuan mata uang seperti rupiah. Selain itu Rasio Pajak Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah ukuran yang mencerminkan sejauh mana pendapatan pajak daerah berkontribusi terhadap nilai ekonomi suatu wilayah. Rasio pajak daerah terhadap PDRB pada tahun 2024 sebesar 1,12 persen mengalami penurunan sebesar 0,01 persen dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 1,13 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian terhadap BDPR masih sangat rendah, dapat dilihat pada grafik berikut

Grafik 2.61
Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB
Kab. Sinjai Tahun 2020 – 2024



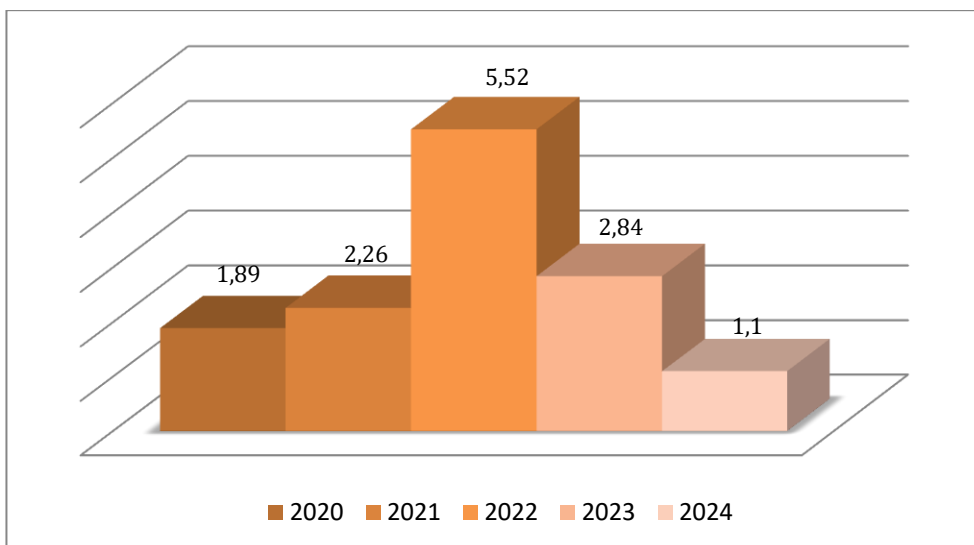
Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai. Tahun 2025

Tingkat Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian Kabupaten Sinjai merupakan salah satu kabupaten yang mengalami kenaikan harga barang dan jasa sehingga menyebabkan terjadinya inflasi. Kabupaten Sinjai tidak termasuk dalam kabupaten sampel perhitungan inflasi sehingga menggunakan Kabupaten Bone sebagai sister city dengan pertimbangan bahwa mayoritas arus barang dan jasa keluar-masuk melalui Kabupaten Bone.

Pada tahun 2024 sebesar 1,1 persen mengalami penurunan sebesar 1,74 persen dibandingkan pada tahun 2024 sebesar 2,84 persen, hal ini disebabkan karena pengendalian dan penanganan cukup intends dimana banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencegah tingginya inflasi, antara lain Pemantauan dan pengendalian harga, pasar murah TPID, Gerakan pangan murah (GPM), Pemantauan dan penyebaran informasi perkembangan harian harga bahan pokok , kios pangan, dapat dilihat pada grafik berikut

Grafik 2.62
Tingkat Inflasi Kabupaten Sinjai Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai Tahun 2025

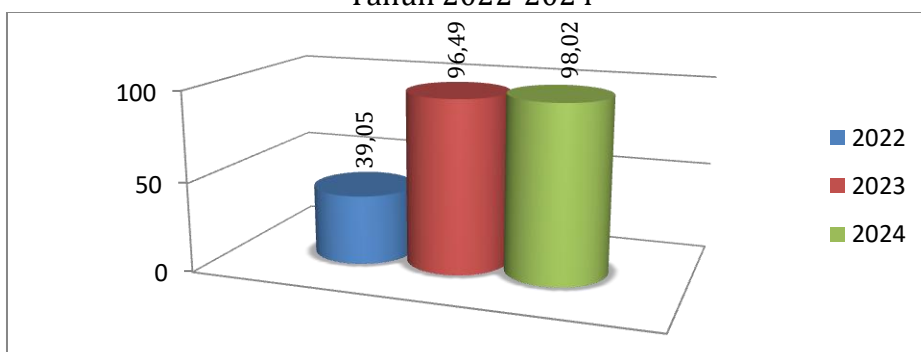
D.ASPEK PELAYANAN UMUM

1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Indeks Reformasi Hukum

Indeks reformasi hukum mulai di nilai sejak tahun 2022 – 2024. Dari data yang diperoleh menunjukkan pada saat penilaian awal nilai Indeks Reformasi Hukum sangat rendah pada tahun 2022 sebesar 39,05 poin namun meningkat sangat tinggi di tahun 2023 sebesar 96,49 poin dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 1,53 poin atau 98,02 poin, dapat dilihat pada grafik berikut

Grafik 2.63
Capaian Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Sinjai (Poin)
Tahun 2022-2024

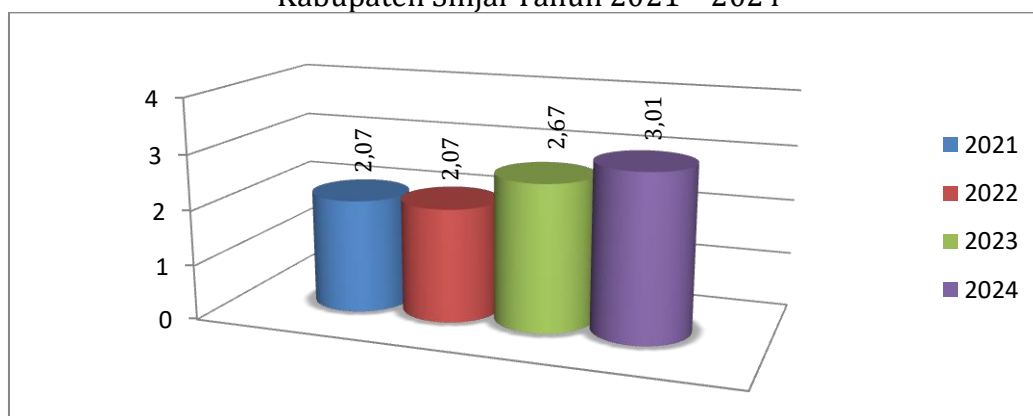


Sumber : Bagian Hukum Setdakab Sinja, Tahun 2025

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dilakukan untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Indeks SPBE Kabupaten Sinjai menunjukkan peningkatan setiap tahun dan pada tahun 2023 dan 2024 sudah berada pada kategori “Baik”. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan kepada pengguna SPBE semakin meningkat, dapat dilihat pada grafik berikut

Grafik 2.64
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Kabupaten Sinjai Tahun 2021 – 2024

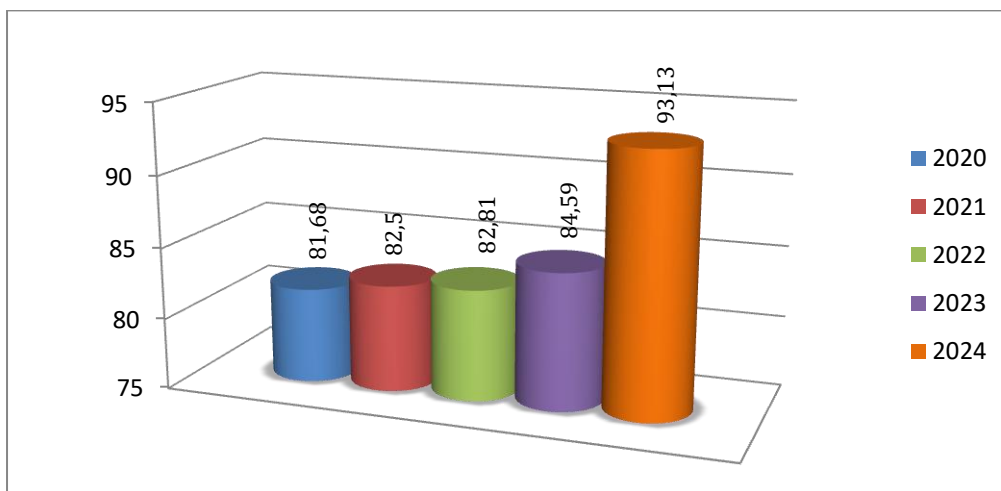


Sumber: Kementerian PANRB

Indeks Pelayanan Publik

Indeks kepuasan masyarakat merupakan salah satu indikator dalam menentukan suatu pelayanan yang telah sesuai standar operasional prosedur. Untuk pelayanan kepada masyarakat diukur dari tingkat kepuasan masyarakat penerima manfaat pelayanan. Selain menggunakan IKM, mengukur tingkat kepuasan juga dengan menggunakan indeks pelayanan publik sebagaimana yang diatur pada peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang pedoman penilaian kinerja unit penyelenggaraan pelayanan publik. Nilai rata-rata Indeks pelayanan publik terhadap kinerja pelayanan Pemerintah Kabupaten Sinjai mengalami peningkatan sebesar 8,54 point dari 84,59 pada tahun 2023 menjadi kategori A (93,13) pada tahun 2024. Adapun capaian kinerja Kabupaten Sinjai sebagaimana pada grafik berikut.

Grafik 2.65
Indeks Pelayanan Publik
Kabupaten Sinjai (Poin), Tahun 2020-2024

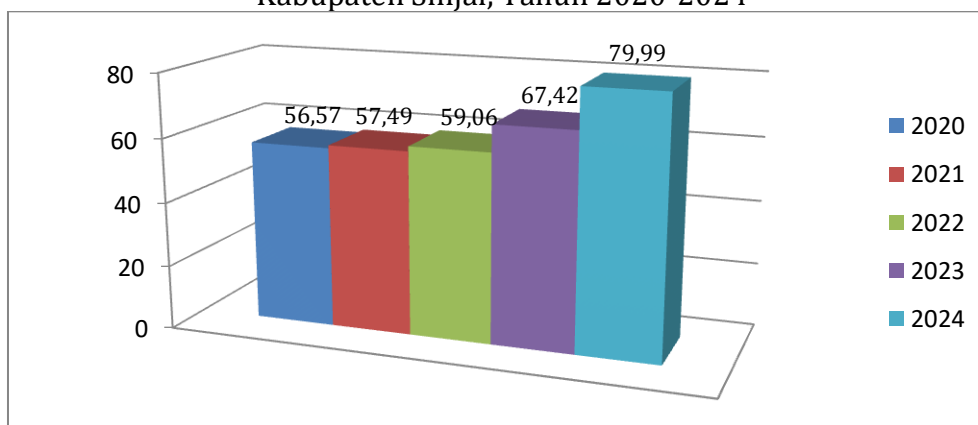


Sumber : Sekrtariat Daerah Kabupaten Sinjai, Tahun 2025

Indeks Reformasi Birokrasi

Penerapan Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Sinjai pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 8,36 point dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini disebabkan karena penerapan reformasi birokrasi pada tingkat perangkat daerah sudah mulai merata pada perangkat daerah dan sudah berjalan optimal, perangkat daerah belum menyusun rencana aksi reformasi birokrasi yang menggambarkan hasil/sasaran yang akan diwujudkan beserta dengan ukuran keberhasilan, sehingga belum mampu menunjukkan hasil dalam menggerakkan perubahan pada lingkup organisasi, dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.66
Indeks Reformasi Birokrasi
Kabupaten Sinjai, Tahun 2020-2024

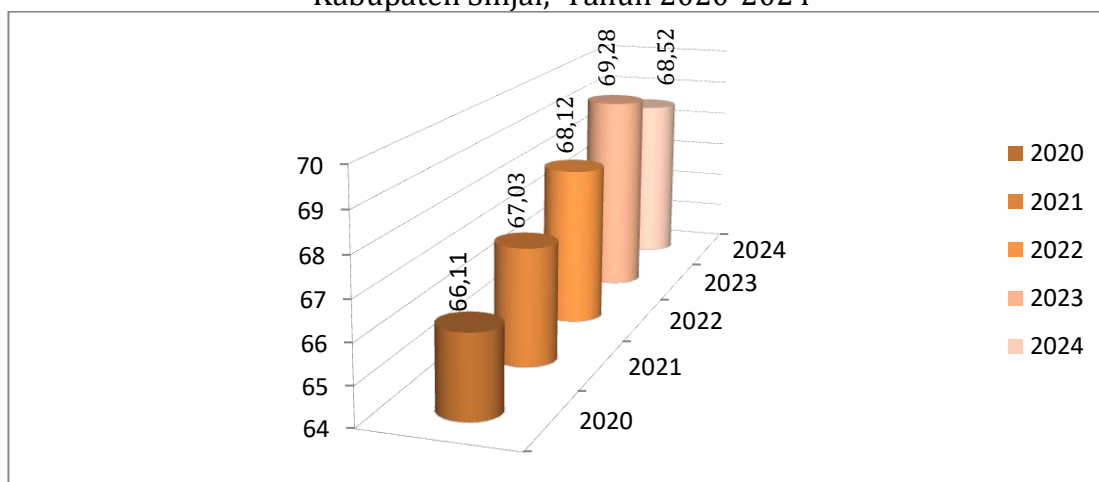


Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai, Tahun 2025

Capaian Nilai Akuntabilitas Pemerintah Daerah (SAKIP)

Nilai Akuntabilitas pemerintah sebagai bentuk penilaian akuntabilitas pemerintah daerah oleh Kemenpan. Kabupaten Sinjai kurun waktu empat tahun mengalami peningkatan Nilai SAKIP secara signifikan dan pada tahun 2020-2024 nilai SAKIP sudah mendapatkan nilai “B”. Kabupaten Sinjai dan pada tahun 2024 mendapatkan angka 68,52 persen. Dapat dilihat pada grafik berikut

Grafik 2.67
Capaian Nilai Akuntabilitas Pemerintah Daerah {SAKIP}
Kabupaten Sinjai, Tahun 2020-2024

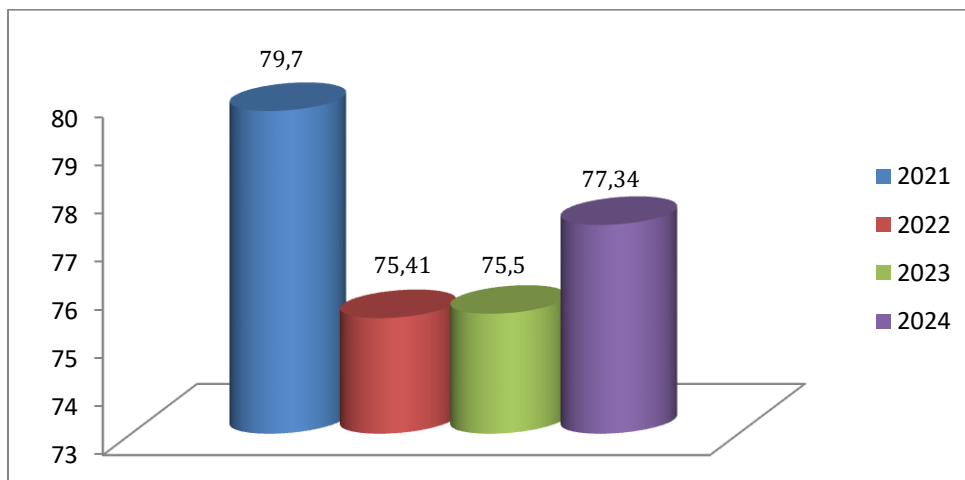


Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai, Tahun 2025

Indeks Survey Penilaian Integritas

Upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan akuntabel dan terintegrasi terus diupayakan untuk pemberantasan korupsi, maka dilakukan survey penilaian integritas pada internal pemerintah daerah. Indeks Survei Penilaian Integritas Kabupaten Sinjai mengalami fluktuasi sejak tahun 2021 – 2024 dengan kategori penilai baik, dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik. 2.68
Indeks survey penilaian integritas
Kabupaten Sinjai (Poin), Tahun 2021 – 2024

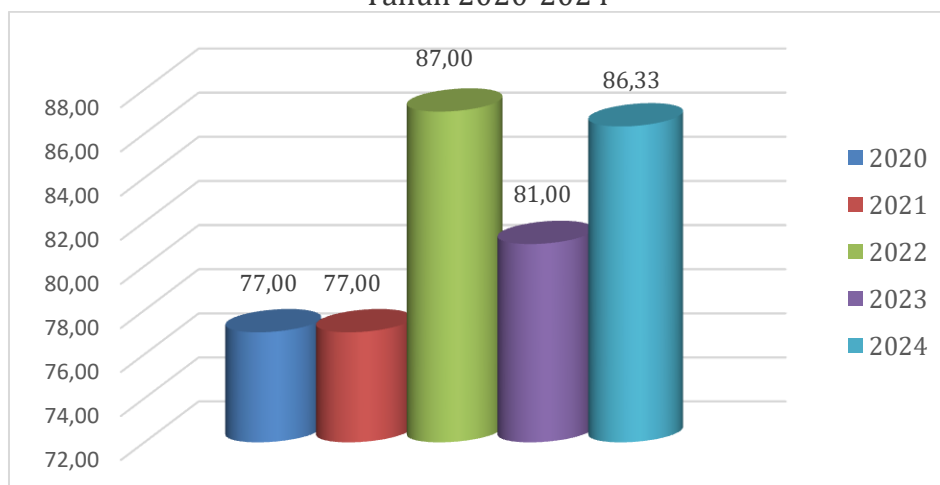


Sumber : Inspektorat Kabupaten Sinjai Tahun 2025

Nilai MCP KPK

Nilai MCP KPK merupakan indikator penilaian KPK dalam mendorong percepatan pencegahan korupsi di pemerintah daerah. Indikator tersebut menjadi penilaian untuk pemberantasan korupsi skala kecil khususnya pada level pemerintah daerah. Kabupaten Sinjai memiliki nilai MCP yang mengalami peningkatan tiap tahun. Hal ini disebabkan tindak pencegahan yang dilakukan baik dengan sosialisasi maupun dengan pemeriksaan awal pekerjaan pengadaan pemerintah daerah, dapat dilihat pada Grafik berikut :

Grafik 2.69
Nilai MCP KPK Kabupaten Sinjai
Tahun 2020-2024



Sumber : Inspektorat Kabupaten Sinjai Tahun 2025

Indeks Maturitas SPIP

Indeks maturitas merupakan tingkat kepatuhan instansi pemerintah dalam penerapan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku. Penilaian maturitas dilakukan oleh BPKP dalam menilai kepatuhan pemerintah melaksanakan tata kelola pemerintah. Indeks maturitas Kabupaten Sinjai periode 2020– 2024 mengalami peningkatan dengan kategori baik, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.16
Indeks Maturitas Kabupaten Sinjai Tahun 2020 – 2024

INDIKATOR	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Maturitas SPIP	level 2	level 2	level 2	level 3	level 3

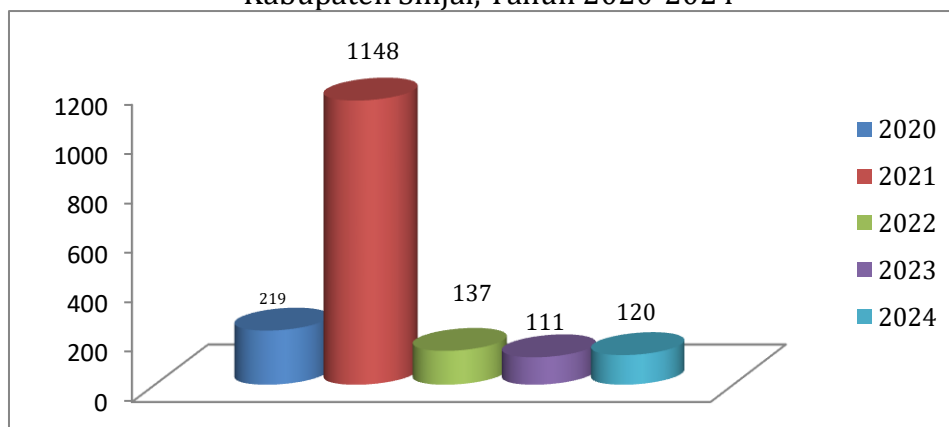
Sumber : Inspektorat Kabupaten Sinjai Tahun 2025

2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah

Penegakan hukum peraturan daerah di Kabupaten Sinjai cukup baik, terlihat dari banyaknya peraturan daerah yang dilaksanakan dan ditegakkan. Selama periode tahun 2020 – 2024 semua kasus penegakan perda dapat tertangani dengan baik (100%). Hal ini disebabkan kesigapan aparat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan penertiban dan penegakan peraturan daerah, dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.70
Jumlah Kasus Penegakan Peraturan Daerah yang Tertangani
Kabupaten Sinjai, Tahun 2020-2024

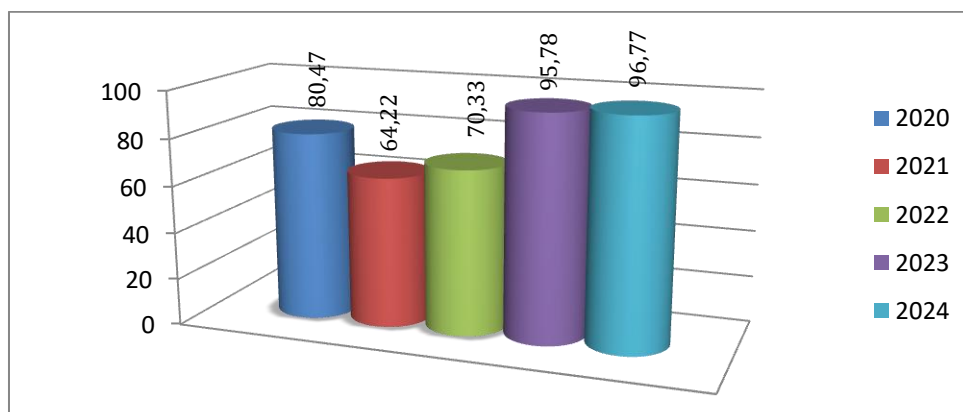


Sumber :Dinas Satuan Polisi Pomong Praja dan Damkar Kab.Sinjai Tahun 2025

Persentase Tindak Kriminal Yang Ditangani

Kejadian tindak kriminal merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat stabilitas keamanan yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat. Selain stabilitas politik, aspek keamanan juga merupakan salah satu indikator penting bagi investor untuk berinvestasi pada suatu wilayah tertentu. Data tindak kriminal yang ditangani di Kabupaten Sinjai tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan terjadinya peningkatan terhadap jumlah kasus kejahatan yang ditangani. Kondisi ini sangat mendukung iklim yang kondusif untuk pengembangan investasi di Kabupaten Sinjai, dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.71
Persentase Tindak Kriminal Yang Ditangani
Kabupaten Sinjai. Tahun 2020-2024

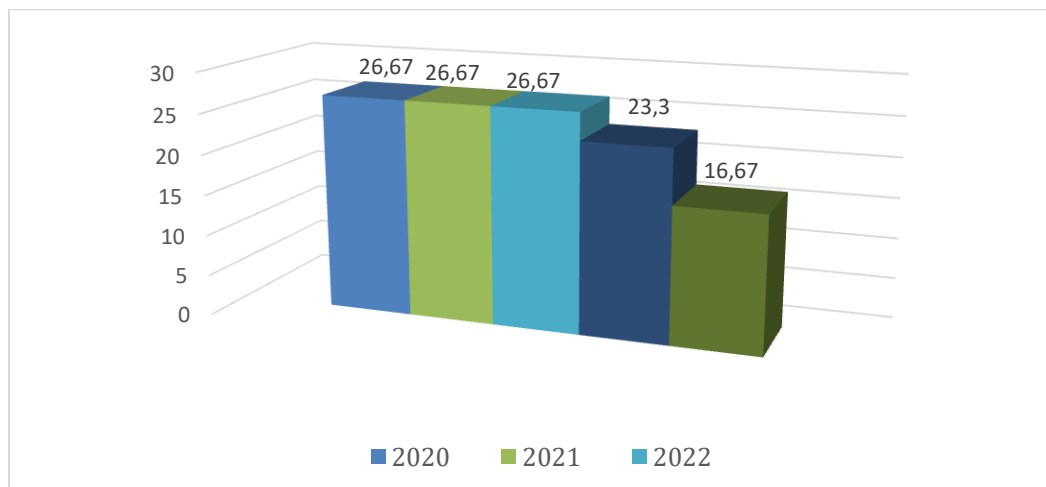


Sumber : Polres Kabupaten Sinjai. Tahun 2025

Persentase Perempuan Terpilih Terhadap Total Anggota DPRD

Persentase perempuan terpilih di Kabupaten Sinjai menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan khususnya pada tahun 2020 – 2022 dan menurun pada tahun 2023 karena adanya Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Perempuan ke Anggota DPRD Laki-laki. Pada pemilu tahun 2024, anggota DPRD Perempuan yang terpilih mengalami penurunan dari periode sebelumnya (2020-2024) yang sebanyak 7 orang menjadi hanya 5 orang untuk periode 2024-2029., dapat dilihat pada grafik berikut

Grafik 2.72
Persentase Perempuan Terpilih Terhadap Total Anggota DPRD
Kabupaten Sinjai (Persen), Tahun 2020-2024

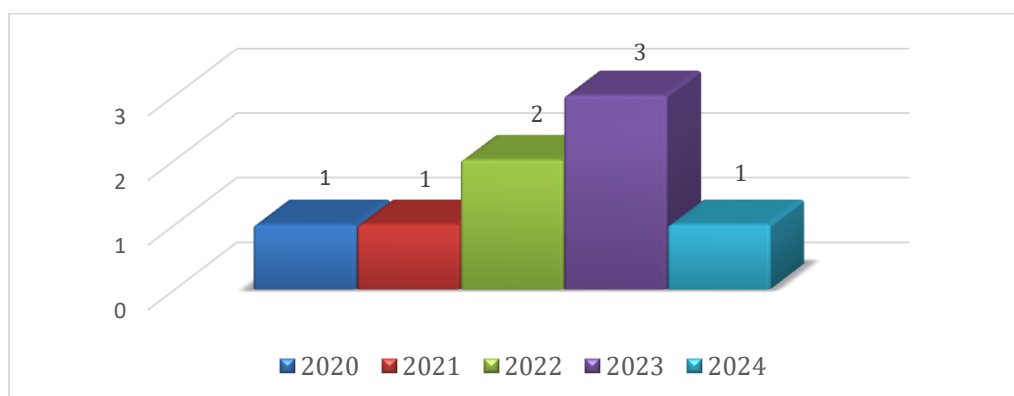


Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sinjai Tahun 2025

Perda yang Merupakan Inisiatif DPRD

DPRD sebagai mitra eksekutif membantu pemerintah dalam menginisiasi dan mengajukan peraturan daerah yang menjadi kebutuhan di masyarakat. Dalam usaha memperbaiki dan mengatur kebijakan-kebijakan tertentu yang tidak diatur dalam peraturan daerah yang diajukan oleh pemerintah daerah DPRD mengajukan peraturan daerah yang merupakan inisiatif DPRD. Selama kurun waktu tahun 2020 – 2024 DPRD Kabupaten Sinjai telah menyusun peraturan daerah inisiatif DPRD. Pada tahun 2024 sebanyak 1 Perda mengalami penurunan sebanyak 2 Perda dibandingkan pada tahun 2023 sebanyak 3 perda , dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.73
Perda yang Merupakan Inisiatif DPRD
Kabupaten Sinjai Tahun 2020-2024

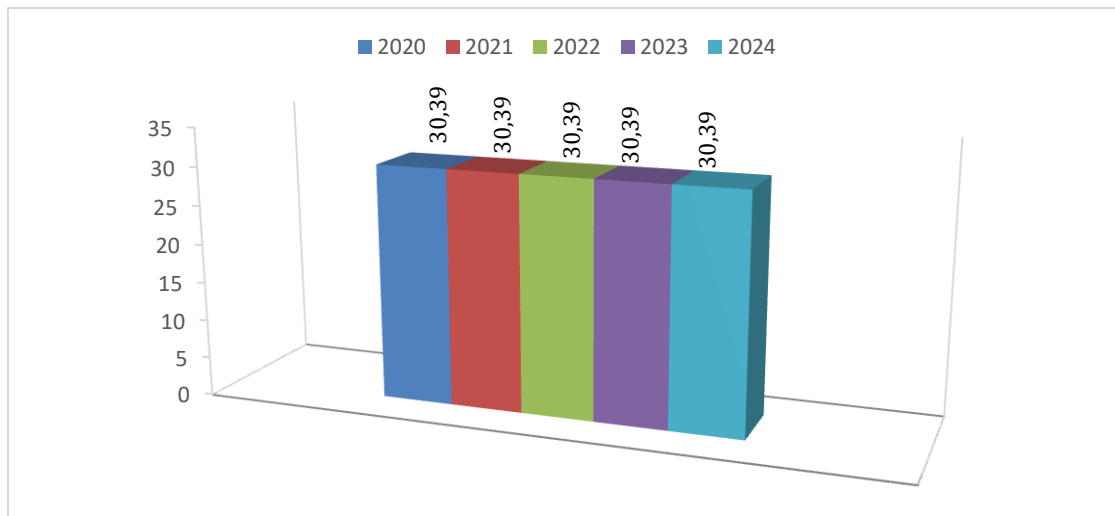


Sumber : Sekretariat DPRD Kab.Sinjai Tahun 2025

Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik

Perempuan pengurus partai politik di Kabupaten Sinjai mengalami peningkatan. Keaktifan perempuan dalam partai politik menjadi bukti bahwa partai politik memberikan rasa aman bagi perempuan. Minat perempuan menjadi pengurus partai politik yang cukup besar memberikan kontribusi dalam stabilitas perpolitikan dan keamanan di Kabupaten Sinjai, dapat dilihat pada tabel berikut:

Grafik 2.74
Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik
Kabupaten Sinjai Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Sinjai Tahun 2025

Tabel 2.17
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah
Kabupaten Sinjai Tahun 2020-2024

NO	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERA	Satuan	TAHUN				
			2021	2022	2023	2023	2024
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9
	ASPEK KESEJAHTRAAN MASYARAKAT						
	KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI						
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	1,55	5,23	4,87	5,71	5,17
2	Inflasi	%	1,89	1,91	0,6	3,77	1,1
3	PDRB per kapita (Juta/Tahun)	Rp Juta	46,15	47,05	51,29	55,29	59,07
4	Rasio Gini	Indeks	0,372	0,384	0,357	0,35	0,379
5	Indeks Ketimpangan Williamson	Poin	0,182	0,182	0,173	0,288	
6	Tingkat Kemiskinan	%	9	8,84	8,8	8,55	7,82
7	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	8,98	8,27	10,26	10,32	9,94
8	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9	Prosentase dari cadangan pangan wajib daerah 100 Ton	%	24	24	24	24	16,18
10	Kontribusi Sektor Pertanian/ Perkebunan terhadap PDRB	%	43,06	44,38	45,69	45,81	45,45
11	Kontribusi Sektor Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura) terhadap PDRB	%	15,11	14,73	14,51	15,49	13,81

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

NO	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERA	Satuan	TAHUN				
			2021	2022	2023	2023	2024
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9
12	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB	%	7,8	8	8,36	8,69	9,10
13	Kontribusi Produksi Kelompok Tani	%	83,74	78,75	78,79	79,54	79,64
14	Kontribusi sektor Pertambangan dalam PDRB	%	2,74	2,61	2,3	2,34	2,37
15	Kontribusi sektor kelautan & perikanan terhadap PDRB	%	18,58	20,6	19,17	19,44	
16	Kontribusi sektor Perdagangan dalam PDRB	%	12,64	12,52	12,76	12,89	13,30
17	Kontribusi sektor Industri dalam PDRB	%	2,61	2,58	2,63	2,6	2,56
KESEJAHTERAAN SOSIAL							
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Point	67,6	67,75	68,33	71,20	71,81
2	Rata-rata lama sekolah Kab. Sinjai	%	7,75	7,78	7,79	7,8	7,82
3	Harapan lama sekolah (HLS)	%	13,05	13,06	13,25	13,26	13,27
4	Umur harapan hidup	%	67,3	67,38	67,68	67,92	73,04
5	Persentase balita gizi buruk	%	0,03	0,03	0,015	0,03	0,05
6	Prevalensi balita gizi kurang	%	2,89	18,01	4,31	3,07	4,29
7	Cakupan desa siaga aktif	%	100	100	100	100	100
8	Angka partisipasi angkatan kerja	%	69,9	57,79	59,23	67,15	72,87
9	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	82,44	71,91	63,33	74,59	80,87

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

NO	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERA	Satuan	TAHUN				
			2021	2022	2023	2023	2024
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9
10	Tingkat pengangguran terbuka	%	2,65	2,61	1,8	1,69	1,52
11	Rasio penduduk yang bekerja		0,97	0,97	0,98	0,98	0,98
12	Pencapaian skor pola pangan harapan	Angka	88,7	87,1	93,8	89,05	89,60
13	Indeks reformasi birokrasi	Angka	56,57	57,47	59,06	67,42	79,99
14	SAKIP	Huruf	B	B	B	B	68,52
15	Indeks pelayanan publik	Poin	81,68	82,5	82,8	85,03	86,56
16	IPG	%	98,02	97,81	98,13	98,21	98,3
17	IDG	%	72,48	73,46	73,78	71,09	
ASPEK PELAYANAN UMUM							
PELAYANAN URUSAN WAJIB DASAR							
PENDIDIKAN							
1	Pendidikan Anak Usia Dini	%	82,86	95,7	96,95	96,55	92,81
2	Angka Partisipasi Kasar						
	SD/MI/Sederajat :	%	107,7	113,63	108,43	113,49	110,74
	SMP/MTS/Sederajat:	%	78,77	117,6	89,2	117,77	112,07
3	Persentase Angka Pendidikan yang Ditamatkan						

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

NO	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERA	Satuan	TAHUN				
			2021	2022	2023	2023	2024
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9
	Persentase SD/MI/Sederajat	%	90,83	105,55	105,67	108,46	99,68
	Persentase SMP/MTS/Sederajat	%	82,41	89,57	95,3	98,23	91,95
4	Angka Partisipasi Murni (APM)						
	SD/MI/Sederajat :	%	99,36	99,98	99,99	99,18	99,97
	SMP/MTS/Sederajat:	%	95,2	99,97	99,98	99,92	99,98
5	Angka Partisipasi Sekolah						
	Angka partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	99,87	113,63	113,89	113,49	103,88
	Angka partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	99,54	117,60	118,52	117,98	102,8
6	Angka Putus Sekolah						
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,02	0,0003	0,012	0,16	0
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,23	0,051	0,017	0,38	0
7	Angka Kelulusan						
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	99,01	99,54	98,54	108,46	99,44
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	99,14	99,68	98,19	98,72	99,48
8	Angka Melanjutkan (AM);						
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	114,91	87,29	89,12	98,82	96,95
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA /SMK/MA	%	-	-	-	-	-

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

NO	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERA	Satuan	TAHUN				
			2021	2022	2023	2023	2024
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9
9	Fasilitasi Pendidikan	%					
	Peresentase Sekolah Pendidikan SD/MI	%	86,86	86,86	94,89	97,45	97,82
	Prosentase Sekolah Pendidikan SMP/MTs & SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik	%	86,21	86,21	91,95	96,59	96,59
10	Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar						
	Rasio SD/MI		0,01	0,009	0,009	0,01	0,01
	Rasio SMP/MTS		0,007	0,005	0,005	0,006	0,006
11	Rasio Guru/Murid Jenjang Pendidikan Dasar		0,09	0,117	0,096	0,098	0,083
12	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun Perempuan & Laki-laki	%	31,83	40,59	49,84	39,95	39,87
13	Penduduk yang Berusia > 15 Tahun Melek Huruf (tidak buta aksara)	%	99,27	99,62	99,57	99,61	98,39
14	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV						
	Rasio SD/MI		0,92	91,64	96,33	93,12	96,93
	Rasio SMP/MTs		0,93	96,23	98,63	98,9	99,94
	KESEHATAN						
1	Angka Kematiaan Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran hidup	Bayi	12,71	5,8	19,6	24,7	14,6
2	Angka kelangsungan hidup bayi	bayi	983	4.104	4.235	3,883	3215

**RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029**

NO	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERA	Satuan	TAHUN				
			2021	2022	2023	2023	2024
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9
3	Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	balita	20,8	2,4	3,1	2,3	3,1
4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	bayi	0,86	16,1	13,5	15,9	12,1
5	Angka Kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	Ibu Hamil	0,92	393	193,24	77,2	93,31
6	Rasio posyandu persatuan balita		0,02	0,02	0,02	19,9	21,7
7	Rasio Puskesmas Persatuan		0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	Rasio poliklinik persatuan		0,022	0,02	0,02	0,04	0,04
	Rasio pustu persatuan penduduk		0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
8	Rasio dokter persatuan penduduk		0,14	43,1	0,38	0,32	0,33
9	Rasio tenaga medis per satuan penduduk		0,002	0,008	0,008	7,63	7,74
10	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	72,48	286,9	250	100	100
11	Cakupan desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	51,25	100	100	100	66,25
12	Cakup balita Gizi buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100
13	Cakupan Balita pnemonia yang ditangani	%	0,32	5,5	26,3	33	21,75
14	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	23,14	79,1	66	60,98	41,56
15	Tingkat prevalensi tuberkulosis per 100.000 penduduk	%	64,48	64,48	194,13	193,01	212,47
16	Tingkat kematian karena tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Per 100.000 Penduduk	5,6	7	11,5	19,73	25,34

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

NO	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERA	Satuan	TAHUN				
			2021	2022	2023	2023	2024
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9
17	Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	100	105,71	110,67	183	41,55
18	Proporsi kasus tuberkulosis yang di obati dan sembuh dalam program DOTS	%	31,52	100	100	100	63,89
19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100
20	Rasio Angka kejadian malaria	%	5,21	40,7	0,1	10,23	0,007
21	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	0,007	0,012	0,021	0,012	0,13
22	Proporsi jumlah penduduk 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	%	8,97	8,97	100	5,63	21,14
23	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	49,26	48,45	99,88	74,66	100
24	Cakupan Kunjungan bayi	%	99,35	95,4	100	98,35	99,93
25	Cakupan pembantu puskesmas	%	77,5	77,5	77,5	78,75	77,5
26	Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4	%	88,15	82,6	77,69	75,2	80,7
27	Cakupan pelayanan nifas	%	96,47	92,7	99,9	98,1	99,81
28	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang tangani	%	55,56	100	68,2	100	100
29	Cakupan Pelayanan anak balita	%	44,26	74	92,8	91,32	80,61
30	cakupan pemberian makanan pendapatan ASI pada anak usia 6 -24 bulankeluarga miskin	%	100	100	82,7	82,7	100
31	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	%	33,5	73,5	100	100	100
32	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat	%	49,25	48,45	100,12	74,66	100

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

NO	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERA	Satuan	TAHUN				
			2021	2022	2023	2023	2024
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9
	miskin						
33	Cakupan desa kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi , 24 jam	%	100	100	100	100	100
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
1	Proporsi jalan dalam kondisi baik	%	43,31	41,55	43,76	43,68	40,65
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Km/ jumlah penduduk	0,0047	0,0046	0,0047	0,0046	0,0045
3	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	88,5	89	89,4	89,45	89,47
4	Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar	%	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
5	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik /Pembuangan Aliran Air	%	81,43	81,43	74,62	62,88	50,12
6	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	%	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
7	Persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	72,81	73,6	74,41	75.19	75,78
8	Rasio jaringan irigasi	Mater/Ha	24,55	25,01	27,1	27.37	27,61
9	Persentase penduduk berakses air minum	%	75,65	84,64	86,34	86,64	
10	Proporsi rumah terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	%	75,64	84,64	86,34	86,64	86,65
11	Persentase areal kawasan kumuh	%	0,12	0,196	0,194	0.165	0,161
12	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk		0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
13	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk		0,003	0,002	0,002	0,002	0,002

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

NO	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERA	Satuan	TAHUN				
			2021	2022	2023	2023	2024
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9
14	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB		3,4	3,4	3,47	3,47	3,47
15	Luasan RTH Public sebesar 20 % dari luas wilayah kota/kawasan	%	176,16	176,16	51,23	51,23	51,23
16	Rasio bangunan ber IMB		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
17	Ketaatan terhadap RTRW	%	100	100	100	100	100
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
1	Rasio rumah layak huni		0,18	0,18	0,19	0,19	0,19
2	Rasio Permukiman Layak Huni		0,47	85,73	89,23	89,27	0,89
3	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	86,21	86,32	85,3	85,97	86,23
4	Persentase Pemukiman yang Tertata	%	15,23	17,011	21,29	21,39	21,4
5	Persentase Lingkungan Permukiman Kumah	%	0,122	0,196	0,194	0.165	0,161
6	Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	%	46,79	29,7	31,17	54,24	55,39
7	Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan	%	1,58	3,4	0,38	0.19	0,19
8	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	0,28	0,28	0,56	1.13	1,13
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
1	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	100	100	100	100	100

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

NO	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERA	Satuan	TAHUN				
			2021	2022	2023	2023	2024
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9
2	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	%	27,73	27,73	27,73	27,73	27,73
3	Persentase Jumlah kasus kebakaran di WMKyg tertangani dalam waktu maksimal 15 Menit	%	100	100	100	79	25
4	Persentase Penegakan PERDA	%	100	100	100	100	100
SOSIAL							
1	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	28,99	44,24	82,41	89,45	63,35
2	Persentase PMKS yang Tertangani	%	28,99	44,24	82,41	89,45	6335
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	98,2	98,62	100	100	100
4	persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	100	100	100	100	100
5	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	100	60	100	100	100
ASPEK PELAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR							
TENAGA KERJA							
1	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	97,94	97,94	86,44	82,13	72,55
2	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	74,36	82,87	68,76	73,81	76,43
3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	79,45	97,9	97,85	89,7	89,47

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

NO	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERA	Satuan	TAHUN				
			2021	2022	2023	2023	2024
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9
4	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	66,67	80	66,67	-	86,74
5	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	64	76,92	92,31	-	97,07
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	39,03	65,59	64,14	90,72	66,62
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	60,97	34.40.00	35,87	9,28	33,38
4	Rasio KDRT		0,0012	0,0028	0,0089	0,007	0,014
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	95,67	96,83	96,9	79,57	97,91
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	-	100	100	100	100
8	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	-	12,91	100	25	100
9	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kekerasan terhadap perempuan dan	%	100	100	100	57,14	133,3

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

NO	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERA	Satuan	TAHUN				
			2021	2022	2023	2023	2024
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9
	anak						
10	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	8,11	100	100	100	100
11	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	8,11	2,8	49,05	100	23,33
12	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	3,34	75	100	214,29
PANGAN							
1	Ketersediaan pangan utama	%	22,62	23,11	26,69	38,08	48,84
2	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	100	-	25	75	100
PERTANAHAN							
1	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	88,43	58,23	62,98	63,09	60,62
LINGKUNGAN HIDUP							
1	Tersedianya Dokumen RPPLH	Ada / Tidak Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Tersedianya Dokumen RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kabupaten	Ada / Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Tersedianya Dokumen KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Provinsi	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

NO	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERA	Satuan	TAHUN				
			2021	2022	2023	2023	2024
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9
4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas air	%	83,75	63,33	67,89	66.13	66,63
5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas udara	%	90,94	90,65	92,18	91.99	96,74
6	Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)	Point	42,86	30,14	34,11	43.43	38,34
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Point	70,08	67,13	70,33	71.63	70,73
8	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung- jawab usaha /atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap PPLH, PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	%	28,57	21.21	40	66.66	66,66
9	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	Ada / Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
10	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	85.71	100
11	Persentase timbulan Sampah yang ditangani	%	75,06	76,44	67,28	55.15	49,51
12	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	100	98,5	98,03	100	100
13	Persentase cakupan area pelayanan	%	20,34	20,23	20,33	18.56	14,53
14	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	75,06	76,44	67,28	55.15	49,51
15	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten	Nilai	≥ 72	≥ 72	52,46	71,4	-
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							

**RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029**

NO	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERA	Satuan	TAHUN				
			2021	2022	2023	2023	2024
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9
1	Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk		0,99	0,99	0,98	0,99	0,99
2	Rasio Bayi Berakte Kelahiran		100	100	100	0,99	0,99
3	Rasio Pasangan Berakte Nikah		0,28	00.34	0,35	0,41	0,45
4	Ketersediannya data base kependudukan skala Provinsi	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
5	Penerapan KTP berbasis NIK	Sudah / Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
6	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	99,52	99.31.00	98,44	98,8	99,08
7	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran	%	100	100	100	100	100
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
1	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	%	97,01	94,02	97,01	88,06	94,02
2	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan	Klp	1	1	1	1	1
3	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	Klp	70,14	70,25	70,25	100	68,5
4	Persentase LSM aktif	%	11,25	7,5	6,25	1,25	1,25
5	Persentase LPM Berprestasi	%	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
6	Persentase PKK Aktif	%	100	100	100	100	100
7	Persentase Posyandu Aktif	%	100	100	100	100	100
8	Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	%	1,76	75	75,3	75,46	75,91

**RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029**

NO	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERA	Satuan	TAHUN				
			2021	2022	2023	2023	2024
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
1	Persentase Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	80,95	80,95	80,95	80,95	80,95
2	Rasio Akseptor KB	%	74,23	65,99	0,52	0,66	64,9
3	Angka pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49 tahun	%	74,23	65,99	73,01	98,88	98,01
4	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15 –19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	%	-	-	98,96	89,81	89,51
	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun	%	-	17,22	23,75	73,2	0,52
5	Cakupan Pasangan Usia Subur (ingin ber-KB tidak terpenuhi PUS) yang	%	21,06	22,87	23,39	11,87	7,60
6	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	24,03	31,74	23,39	22,95	29,00
7	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	%	34,71	49,14	52,22	57,7	30,06
8	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB	%	55,6	83,24	73,01	93,89	79,45
9	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR)	%	45,89	57,05	69,12	68,04	47,91
10	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber - KB	%	4,88	62.10.00	68,17	48,91	16,26
11	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	11,11	11,11	11,11	11,11	111,11
12	Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja / mahasiswa	%	8,22	6,11	6,11	6,67	7

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

NO	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERA	Satuan	TAHUN				
			2021	2022	2023	2023	2024
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9
13	Cakupan PKB/PLKB yang di dayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan & Pelaksanaan Pembangu nan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk	%	100	100	100	100	100
14	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber –KB Mandiri	%	52,98	52,41	70,2	91,46	40,64
15	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa /Kelurahan	%	100	100	100	100	100
16	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	3,28	2,14	59,34	39,42	27,71
17	Persentase Faskes dan jejaringannya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan atandarnisasi pelayanan	%	100	100	100	100	100
18	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	100	100	100	100	100
PERHUBUNGAN							
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	204.300	248.110	232.09	230.195	429.825
2	Rasio Ijin Trayek		0,005	0.001	0,0002	0.022	0
3	Jumlah uji kir angkutan umum	%	100	1.445	100	100	100
4	Jumlah pelabuhan laut	Pelabuhan	2	2	2	2	2
5	Jumlah terminal bis	Terminal	1	1	1	10	10

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

NO	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERA	Satuan	TAHUN				
			2021	2022	2023	2023	2024
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9
6	Persentase layanan angkutan darat	%	2,54	2,36	0,58	0,64	0,26
7	Persentase pemasangan rambu-rambu	%	-	-	-	-	89,89
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan		0,018	0,18	0,17	0,024	0,024
9	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	Orang	867.15.00	163.745	41,953	269.212	429.825
10	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	Ton	8.150.100	8.421.607	2.526.482	6.029.446	3.775.570
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat Kecamatan	%	90	90	90	90	90
2	Cakupan layanan telekomunikasi	%	93,05	94,15	94,39	105,37	108,66
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon	%	33,89	34,17	79,35	, 82,75	-
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet		0,008	1,14	49,22	0,54	-
5	Proporsi rumah tangga yang memiliki computer pribadi		0,25	24	79,35	0,82	-
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH							
1	Persentase Koperasi Aktif	%	67,14	67,83	46,15	56,85	46,85
2	Persentase UKM non BPR / LKM Aktif	%	93,9	2,88	2,83	-	100

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

NO	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERA	Satuan	TAHUN				
			2021	2022	2023	2023	2024
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9
3	Persentase BPR/LKM Aktif	%	-	-	-	-	-
4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	93,9	99,99	99,98	99,98	99,99
	PENANAMAN MODAL						
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	PMDN	1	2	551	4.429	3,321
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp Juta)						
	Persetujuan Nilai Investasi	Proyek	9	2	551	5.775	4,153
		Milyar					236.273.309.388
	Realisasi Nilai Investasi	Proyek	9	2	551	5.775	4,153
		Milyar					236.273.309.388
3	Rasio daya serap tenaga kerja		2,71	1,04	3,45	2,69	2,82
4	Persentase Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	%	6,91	-15,78	31,85	-77,17	-1,92
	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA						
1	Persentase wirausaha muda	%	8,53	08.51	8,51	8,51	2,90
2	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	94,1	91,89	91,89	100	94,90
3	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	%	40,2	40,2	40,2	40,2	66,70

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

NO	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERA	Satuan	TAHUN				
			2021	2022	2023	2023	2024
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9
4	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	100	100	100	100	100
5	Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun	Atlit	-	5	9	3	19
6	Jumlah prestasi cabang olahraga yang di menangkan dalam 1 Tahun	Medali	-	2	9	7	4
	STATISTIK						
1	Tersedia Sistem Data Statistik yang Terintegrasi	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Buku PDRB	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	PERSANDIAN						
1	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100
	KEBUDAYAAN						
1	Jumlah Penyelenggaraan Festival seni dan budaya	Festival	1	3	2	9	6
2	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	91,71	100	100	100	9,63
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	unit	9	12	15	20	20

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

NO	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERA	Satuan	TAHUN				
			2021	2022	2023	2023	2024
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	unit	108	108	109	111	18
	PERPUSTAKAAN						
1	Rasio pengunjung perpustakaan per tahun		0,13	9	8	0,14	0,1
2	Koleksi buku yang tersedia di dalam perpustakaan daerah	%	0,5	0,66	0,66	0,55	0,59
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk		0,004	0,003	0,003	0,004	0,004
4	Rata-rata pengunjung perpustakaan	Orang	2,089	1.244	1,925	2.742	2.412
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	judul	13,672	12.426	16,215	13.885	17.966
	KEARSIPAN						
1	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	%	62,5	40	12,5	0,5	0,5
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kali	-	7	-	-	-
	ASPEK LAYANAN URUSAN PILIHAN						
	PARIWISATA						
1	Kunjungan Wisata	%	144,29	188	170,71	129,43	121,04
2	Lama Kunjungan Wisata	Kunjungan	134,516	254.749	232,787	177.660	292,908

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

NO	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERA	Satuan	TAHUN				
			2021	2022	2023	2023	2024
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9
	PERTANIAN						
1	Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan Terhadap PDRB	%	43,06	44,38	45,69	45,81	45,45
2	Kontribusi sektor pertanian (tanaman pangan dan hortikultura) terhadap PDRB	%	15,11	14,73	14,51	15,49	13,81
3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	7,8	8	8,36	8,69	9,1
4	Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	83,72	78,75	78,79	79,54	79,64
5	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	%	44,34	45,75	45,57	48,41	44,5
6	Cakupan bina kelompok petani	%	39,53	42,7	37,28	67,37	33,8
	PETERNAKAN						
1	Ternak Unggas	Ekor	1,636,603	1,891,674	1,934,121	1.949.355	1.781.667
2	Ternak Besar	Ekor	123,167	125,2	127,748	70.588	72.066
3	Ternak Kecil	Ekor	28,55	29,546	30,234	28.838	22.110
4	Susu	Liter	2,835	5,309	1,35	1.481	445
5	Daging	Kg	1,506,420.52	1,778,343,15	1,767,851.35	1.657.751,05	1.963.009,87
6	Telur	Kg	908,965.01	1,354,379.08	1,405,323.65	1.401.495.03	1.445.947,27
7	Jumlah kasus penyakit hewan menular	Ekor	74	63	673	179	62

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

NO	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERA	Satuan	TAHUN				
			2021	2022	2023	2023	2024
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9
	PERDAGANGAN						
1	Cakupan bina usaha informal / pedagang	%	-	100	100	100	
	PERINDUSTRIAN						
1	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	%	-	50	50,7	60,23	61,11
	KELAUTAN DAN PERIKANAN						
1	Produksi perikanan	%	1,01	1	101,6	100,62	116,64
2	Konsumsi ikan	%	100	100	102,6	104,23	102
3	Cakupan bina kelompok nelayan	%	3,01	26,82	34,74	20,72	14,41
4	Produksi perikanan kelompok nelayan	%	9,96	9,96	23,99	25,02	26,22
	Jumlah Produksi perikanan tangkap	Ton	36.632,12	37.760,20	38.873,40	40.543	39.269,10
	Nilai Produksi perikanan tangkap	Rp	498.437.410.000	545.494.975.000	819.016.910.000	709.502.500.000	888.542.179
	Jumlah Produksi perikanan Budidaya	Ton	46.413,79	48.174,31	50.994,83	52.100	52.100
	Nilai Produksi perikanan Budidaya	Rp	41.072.875.000	44.340.038.000	54.914.414.000	84.932.000.000	52.533.545
	ASPEK PENUNJANG URUSAN						
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN						

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

NO	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERA	Satuan	TAHUN				
			2021	2022	2023	2023	2024
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA /PERKADA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	%	99,58	93,51	88,24	82,08	-
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	%	104,98	100,44	100	104,79	97,14
7	Kesesuai Rencana Pembangunan dengan RTRW	%	100	100	100	100	100
KEUANGAN							
1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase SILPA	%	7,34	6,23	7,83	4,29	1,94
3	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	%	28,58	29,23	30,28	32,33	31,42
4	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	%	18,21	27,02	22,02	21,78	25,18
5	Bagi Hasil Kabupaten / Kota dan Desa	%	0,19	0,21	0,26	0,26	0,29
6	Penetapan APBD	Tepat waktu / tidak tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

NO	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERA	Satuan	TAHUN				
			2021	2022	2023	2023	2024
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9
KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							
1	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	%	0,95	2,14	2,72	1,96	1,38
2	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	%	-	-	8,67	0	0,38
3	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	Jabatan	38	38	38	38	38
4	Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah	Jabatan	833	1.483	1,544	1.258	1.243
5	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah	Pemangku Jabatan	3,063	3.060	3,726	3.752	4.092
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							
1	Persentase implementasi rencana Kelitbangan	%	100	50	33,33	79	33,33
2	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	%	50	100	100	100	50,00
3	Persentase Perangkat Daerah yang di Fasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	%	69,05	100	100	100	21,00
4	Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	%	100	100	100	100	44,00
PENGAWASAN							
1	Persentase tindak lanjut temuan	%	71,28	71,39	66,66	89,24	88,72
2	Persentase Pelanggaran Pegawai	%	0,24	0,07	1	0,24	0,11

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

NO	ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERA	Satuan	TAHUN				
			2021	2022	2023	2023	2024
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9
3	Jumlah Temuan BPK	Temuan	10	5	-	19	
SEKETARIAT DEWAN							
1	Tersedia rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Provinsi / Kab. / Kota	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersusun dan Terintegritas program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi - fungsi pengawasan , fungsi pembentukan Perda dan fungsi RPJMD dan RKPD	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Terintegritas program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan , pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan Dokumen Setwan DPRD	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rupiah	477.076	563.420	479.148	507.793	577984
2	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita	Rupiah	429,489	524,603	460.544		453777
3	Indeks Layanan Infrastruktur	%	74,46	77,12	77,08	75,33	74,33
4	Rasio Ketergantungan	Per 100 penduduk produktif	47.82	46.69	45.50	45.53	44,43

**RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029**

Tabel 2.18
Standar Pelayanan Minimal
Kabupaten Sinjai Tahun 2020-2024

Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	4	5	6	7	8
Pendidikan						
Pendidikan Dasar						
Prosentase Jumlah warga Megara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100%	99,58	99,98	99,99	99,55	99,98
Pendidikan Menengah						
Persentase jumlah warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	73,12	83,06	88,04	99,09	67,56
Pendidikan Paud						
Jumlah warga Megara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	95,51	100	100	100	100
Kesehatan						
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
Persentase Jumlah ibu hamil yang mendapat layanan kesehatan	100%	90,79	82,16	77,69	75,23	80,05
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						
Persentase jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	97,13	92,7	95,63	95,73	99,80
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						
Persentase jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	104	101,27	100	98,35	97,90
Pelayanan Kesehatan Balita						
Persentase jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	19,46	67,7	48,13	98,63	99,90
Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar						
Persentase jumlah warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	33,5	83	100	100	100
Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						
Persentase jumlah warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100	40,1	66,06	72,07	78,30
Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						

**RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029**

Persentase jumlah warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	62,39	64,74	78,39	100	93,70
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						
Persentase jumlah warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	6,81	18,03	30,67	32,22	48
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						
Persentase jumlah warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	60,25	129	100	100	107,70
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
Persentase jumlah warga Negara usia pendiidkan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	79,24	87,94	100	100	92,90
Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
Persentase jumlah warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	20,42	32,24	69,72	99,26	72,80
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia						
Prosentase jumlah warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia yang mendapat kan layanan kesehatan	100%	4,87	74,37	100	100	104,30
Pekerjaan Umum						
Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari						
Persentase jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	75,65	84,64	86,34	86,64	86,65
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik						
Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	88,5	89	89,4	89,45	89,47
Perumahan Rakyat						
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kab/Kota						
Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100	100	100	100	100
Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten						
Jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	100	100	100	0	0

**RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029**

Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
Pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum						
Prosentase Jumlah pelanggaran K3 yg di laporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP	100%	100	100	100	100	100
Pelayanan Informasi Rawan Bencana						
Prosentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	89,66	240.908	95	98	100
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana						
Prosentase Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	86,66	96,66	97	98	99
Pelayanan Penyelamat dan Evakuasi Korban Bencana						
Prosentase Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi bencana	100%	100	100	100	100	100
Pelayanan Penyelamatan dan Evaluasi Bencana Kebakaran						
Prosentase Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi bencana Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran (WMK)	100%	27,73	27,73	27,73	27,73	27,73
Sosial						
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti						
Persentase penyandang disabilitas terlantar yang tertangani	100%	19,79	59,64	100	100	100
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti						
Persentase anak terlantar yang tertangani	100%	73,75	73,65	100	100	100
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti						
Persentase lanjut usia terlantar yang tertangani	100%	56,43	33,67	100	100	100
Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis diluar Panti						
Persentase gelandangan dan pengemis yang tertangani	100%	100	100	100	100	100
Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat Tanggap dan Paska Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten						
Persentase korban alam dan sosial yang tertangani	100%	100	100	100	100	100

Sumber : Perangkat Daerah yang ada SPM nya

E. GAMBARAN UMUM DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Ruang lingkup Keuangan Daerah meliputi: a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan kepada pihak ketiga; c. Penerimaan Daerah; d. Pengeluaran Daerah; e. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Analisis pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Untuk memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, maka perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

Pengelolaan keuangan daerah berkaitan erat dengan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dengan ruang lingkup meliputi kebijakan keuangan daerah pada pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan belanja daerah dan pengelolaan pembiayaan daerah sehingga dapat membiayai program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi kepala daerah.

1. REALISASI KEUANGAN APBD TAHUN 2020-2024

Realisasi keuangan menggambarkan performa keuangan Daerah selama periode 5 (lima) tahun sebelumnya. Analisisnya mencakup berbagai aspek dari laporan keuangan Daerah yang digunakan untuk mengevaluasi kesehatan finansial dan realisasi entitas keuangan Daerah. Realisasi keuangan dievaluasi dengan menganalisis data-data historis seperti laporan realisasi keuangan, neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas.

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI TAHUN 2025-2029

Pengelolaan Pendapatan Daerah dilakukan dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Artinya perlu dilakukan peningkatan PAD dan mengupayakan secara optimal Pendapatan Transfer yang bersumber dari Dana Perimbangan, agar bagian daerah dapat diperoleh secara proporsional. Untuk itu, ditempuh berbagai upaya seperti peningkatan pengawasan, koordinasi dan penyederhanaan proses administrasi. Selain itu, untuk peningkatan pendapatan daerah juga memerlukan Kebijakan Pendapatan Daerah guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan fiskal, serta meningkatkan ruang fiskal daerah.

Realisasi keuangan daerah diukur dari kinerja pelaksanaan APBD. Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengacu pada sejauh mana pemerintah daerah berhasil menjalankan anggaran yang telah disetujui dalam APBD. Kinerja ini dapat dinilai dari beberapa aspek, termasuk efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam penggunaan dana publik. Kinerja pelaksanaan APBD yang baik menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan manajerial yang baik dalam mengelola keuangan publik, serta mampu memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara efektif dan efisien. Untuk itu realisasi pelaksanaan APBD Kabupaten Sinjai akan dilihat dari realisasi Pendapatan Daerah, realisasi Belanja Daerah, dan realisasi Pembiayaan Daerah.

Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Realisasi keuangan APBD Kabupaten Sinjai selama periode 2020-2024 secara garis besar disajikan berdasarkan tingkat ketersediaan data berupa data realisasi APBD yang telah melalui proses audit dan pertanggungjawaban APBD.

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

TABEL 2.19
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2020-2024

No.	Uraian	TAHUN				
		2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
1	PENDAPATAN					
	A. Pendapatan Asli Daerah					
	Pajak Daerah	14.336.813.933,00	15.942.368.733,00	16.339.217.451,00	16.651.119.285,00	17.942.448.098,00
	Retribusi Daerah	8.209.764.795,00	7.861.977.002,00	10.366.514.245,37	11.646.031.346,00	13.112.405.676,00
	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	4.335.457.725,00	4.226.678.359,00	5.245.374.631,00	5.190.435.808,00	5.235.474.376,00
	Lain-lain PAD yang sah	71.720.175.948,02	67.571.014.341,60	80.067.049.223,66	83.322.865.590,29	72.104.090.103,51
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	98.602.212.401,02	95.602.038.435,60	112.018.155.550,00	116.810.452.029,29	108.394.418.253,51
	B. Pendapatan Transfer					
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	0	945.168.073.000,00	925.636.913.000,03	0	0
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN					
	Dana Bagi Hasil Pajak	820.634.784.868,00	23.760.241.326,00	23.780.272.674,00	16.645.750.838,00	13.784.289.360,00
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA					
	Dana Alokasi Umum	0	541.941.442.000,00	541.617.372.252,00	564.679.932.000,00	605.664.962.180,00
	Dana Alokasi Khusus - Fisik	0	229.206.838.194,00	159.275.056.419,00	141.244.062.442,00	88.092.492.757,00
	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	0	113.838.326.110,00	137.518.851.276,00	150.852.903.045,00	146.421.825.035,00

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

No.	Uraian	TAHUN				
		2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
	Dana Bagi Hasil					
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	820.634.784.868,00	908.746.847.630,00	862.191.552.621,00	873.422.648.325,00	853.963.569.332,00
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA					
	Dana Insentif Daerah (DID)	0	19.096.547.000,00	13.192.300.000,00	13.957.880.000,00	0
	Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	73.027.701.000,00	63.693.673.000,00	62.931.678.000,00	63.399.716.000,00
	Dana Otonomi Khusus - LRA	0	0	0	0	0
	Dana Penyesuaian - LRA	94.247.488.591,00	0	0	0	0
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	94.247.488.591,00	92.124.248.000,00	76.885.973.000,00	76.889.558.000,00	0
	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH					
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	66.916.356.567,88	39.382.219.423,00	50.547.220.961,00	59.094.165.665,04	42.770.858.884,00
	Bantuan Keuangan	0	3.494.922.000,00	14.641.251.000,00	4.906.892.000,00	4.914.135.000,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	66.916.356.567,88	42.877.141.423,00	65.188.471.961,00	64.001.057.665,04	47.684.993.884,00
	Total Pendapatan Transfer	981.798.630.026,88	1.043.748.237.053,00	1.004.265.997.582,00	1.014.313.263.990,04	965.048.279.216,00
	C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
	Pendapatan Hibah	40.134.080.000,00	24.527.870.000,00	3.000.000.000,00	0	0
	Dana Darurat	0	0	0	0	0

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

No.	Uraian	TAHUN				
		2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	0	33.647.252.000,00	0	0	17.601.753.841,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	40.134.080.000 ,00	58.175.122.000,00	3.000.000.000,00	0	17.601.753.841,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.120.534.922.427,90	1.197.525.397.488,60	1.119.284.153.133,03	1.131.123.716.019,33	1.091.044.451.310,51
2.	BELANJA					
	A. Belanja Operasi					
	Belanja Pegawai	449.769.277.948,00	459.933.314.929,00	454.432.988.639,00	474.821.320.975,00	526.502.931.494,69
	Belanja Barang dan Jasa	267.287.413.010,00	286.677.126.181,77	297.702.450.340,99	277.872.133.216,02	257.871.812.827,20
	Belanja Bunga	6.706.860.938,00	3.697.487.390,00	106.250.000,00	0	0
	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
	Belanja Hibah	25.626.661.180,00	41.499.347.119,00	38.436.786.116,65	37.575.939.637,00	70.735.918.412,20
	Belanja Bantuan Sosial	0,00	1.180.000.000,00	4.142.073.000,00	3.236.809.300,00	451.896.000,00
	Jumlah Belanja Operasi	749.390.213.076,00	792.987.275.619,77	794.820.548.096,64	793.506.203.128,02	855.562.558.734,09
	B. Belanja Modal					
	Belanja Tanah	140.679.100,00	0	0	221.318.106.590,76	304.100.164,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.328.919.690,00	72.362.574.606,79	38.796.496.323,41	25.704.244.485,00	22.968.080.995,00
	Belanja Modal gedung dan Bangunan	73.601.826.978,96	117.140.327.341,81	38.652.373.221,88	74.575.049.323,81	38.108.368.339,30
	Belanja Modal jalan, Jaringan dan Irigasi	194.268.726.525,00	86.468.150.359,00	94.442.147.312,00	115.749.029.026,95	43.537.963.591,00

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

No.	Uraian	TAHUN				
		2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
	Belanja Modal Aset Tetap lainnya	2.849.435.820,00	1.943.230.200,00	1.618.607.600,00	5.289.783.755,00	4.777.194.160,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	77.841.500,00	0	0	0	205.163.265,00
	Jumlah Belanja Modal	308.267.429.613,96	277.914.282.506,00	173.509.624.457,29	221.318.106.590,76	109.900.870.514,30
	C. Belanja Tidak Terduga					
	Belanja Tidak Terduga	10.600.699.203,00	6.670.473.875,00	273.465.840,00	1.408.845.112,00	1.332.309.000,00
	Jumlah Belanja Tak Terduga	10.600.699.203,00	6.670.473.875,00	273.465.840,00	1.408.845.112,00	1.332.309.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.068.258.341.892,96	1.077.572.032.000,77	968.603.638.393,93	1.016.233.154.830,78	966.795.738.248,39
	D. Belanja Transfer					
	Belanja Bagi Hasil	1.585.885.388,46	1.583.278.493,00	1.820.173.586,00	1.750.965.000,00	2.000.667.315,00
	Belanja Bantuan Keuangan	0	940.348.480,00	1.190.941.589,00	1.264.049.935,00	0
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah					
	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah					
	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	638.020.935,00	0	0	0	1.412.117.670,00
	Transfer Bagi Hasil Pajak					
	Jumlah Transfer/Bagi Hasil Pendapatan	2.223.906.323,46	2.523.626.973,00	3.011.115.175,00	3.015.014.935,00	3.412.784.985,00
	BELANJA TRANSFER BANTUAN KEUANGAN					

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

No.	Uraian	TAHUN				
		2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
	Transfer Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0
	Transfer Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Desa	127.263.150.591,00	127.762.187.100,00	119.465.966.899,00	115.425.230.891,00	131.027.970.109,52
	Transfer Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Ke Daerah Provinsi	0	538.250.000,00	0	0	0
	Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0	0	0
	Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa	0	0	0	0	0
	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0	0	0	0	0
	Transfer Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0
	Jumlah Transfer Bantuan Keuangan	127.263.150.591,00	128.300.437.100,00	119.465.966.899,00	0	131.027.970.109,52
	Jumlah Belanja Transfer	129.487.056.914,46	130.824.064.073,00	122.477.082.074,00	118.440.245.826,00	134.440.755.094,52
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.197.745.398.807,42	1.208.396.096.075,37	1.091.080.720.467,93	1.134.673.400.656,78	1.101.236.493.342,91
	SURPLUS/DEFISIT	-77.210.476.379,52	-10.870.698.586,77	28.203.432.665,10	-3.549.684.637,45	-10.192.042.032,40
3.	PEMBIAYAAN					
	A. Penerimaan Pembiayaan		87.878.065.810,93	75.258.552.030,16	85.466.086.664,26	

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

No.	Uraian	TAHUN				
		2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
	Penggunaan SILPA	142.838.542.190,45	87.878.065.810,93	75.258.552.030,16	85.466.086.664,26	52.338.471.008,81
	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat	0	0	0	0	0
	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain	0	0	0	0	0
	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank	0	0	0	0	0
	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0	24.437.293.887,00	0	0	0
	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)	0	0	0	0	0
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	1.750.000,00	0	0
	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0	0	0	0	0
	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	70.000.000.000,00	0	0	0	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	212.838.542.190,45	112.315.359.697,93	75.260.302.030,16	85.466.086.664,26	52.338.471.008,81
	B. Pengeluaran Pembiayaan					
	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0

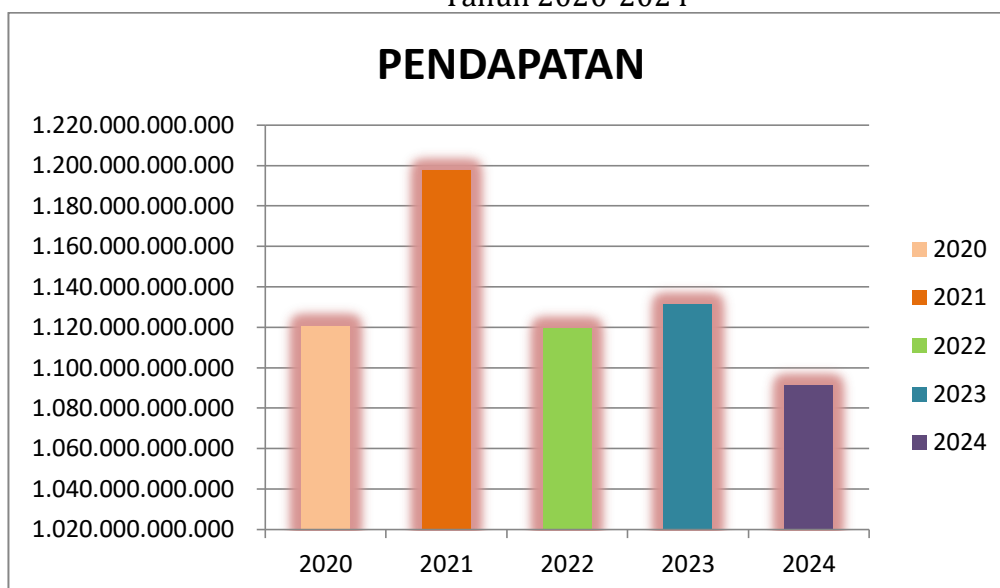
RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

No.	Uraian	TAHUN				
		2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
	Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah	1.500.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0	0
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dari Pemerintah Pusat	0	0	0	0	0
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dari Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0	0	0
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dari Lembaga Keuangan Bank	0	23.186.109.081,00	15.000.000.000,00	0	0
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	0	0	0	29.577.939.018,00	19.429.786.320,00
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dari Masyarakat (Obligasi)	0	0	0	0	0
	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0	0	0	0	0
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	46.250.000.000,00	0	0	0	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	47.750.000.000,00	26.186.109.081,00	18.000.000.000,00	29.577.939.018,00	19.429.786.320,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	165.088.542.190,45	86.129.250.616,93	57.260.302.030,16	55.888.147.646,26	32.908.684.688,81
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	87.878.065.810,93	75.258.552.030,16	85.463.734.695,26	52.338.463.008,81	22.716.642.656,41

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI TAHUN 2025-2029

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 2.19 untuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan Kabupaten Sinjai dari tahun 2020 hingga 2024, terdapat beberapa pola dan tren yang dapat dianalisis. Dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir perkembangan Pendapatan Kabupaten Sinjai mengalami kontraksi di mana Pendapatan tahun 2020 mencapai Rp. 1.120 Triliun lebih menjadi Rp. 1.091 Triliun lebih di tahun 2024 atau secara rata rata mengalami penurunan 0,54%.

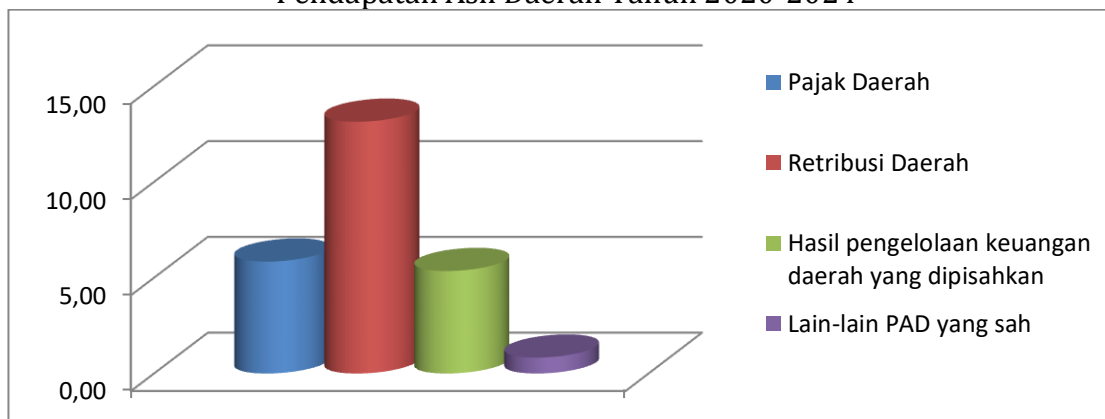
Grafik 2.75
Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan
Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab.Sinjai Tahun 2025

Jika dilihat lebih dalam pada komponen Pendapatan Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024), terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami fluktuatif setiap tahunnya, mengalami penurunan pertumbuhan secara signifikan pada dua tahun terakhir dengan rata-rata tumbuh sebesar -7,20% pertahun dari Rp. 116,810 miliar menjadi Rp. 108,394 miliar.

Grafik 2.76
Rata-Rata Pertumbuhan
Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab.Sinjai Tahun 2025

Pendapatan pajak mengalami tren positif dari tahun ke tahun dan kedepan berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (UU HKPD), yang berakibat adanya penambahan item pajak yang akan beralih menjadi komponen Pendapatan Asli Daerah sehingga akan mengalami kenaikan target kedepan.

Pendapatan retribusi di Kabupaten Sinjai mengalami tren positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13,14% dari Rp. 8,209 miliar (2020) menjadi Rp. 13,112 miliar (2024). dan tetap melakukan optimalisasi dengan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber retribusi pada Pemerintah Kabupaten Sinjai.

Perkembangan pendapatan dari Hasil Pengelolaan keuangan daerah yang yang Dipisahkan mengalami tren positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,35% dari Rp. 4,335 miliar (2020) menjadi Rp. 5,235 miliar (2024). Pertumbuhan ini berasal dari deviden Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada lembaga keuangan dan bidang air minum di kabupaten Sinjai.

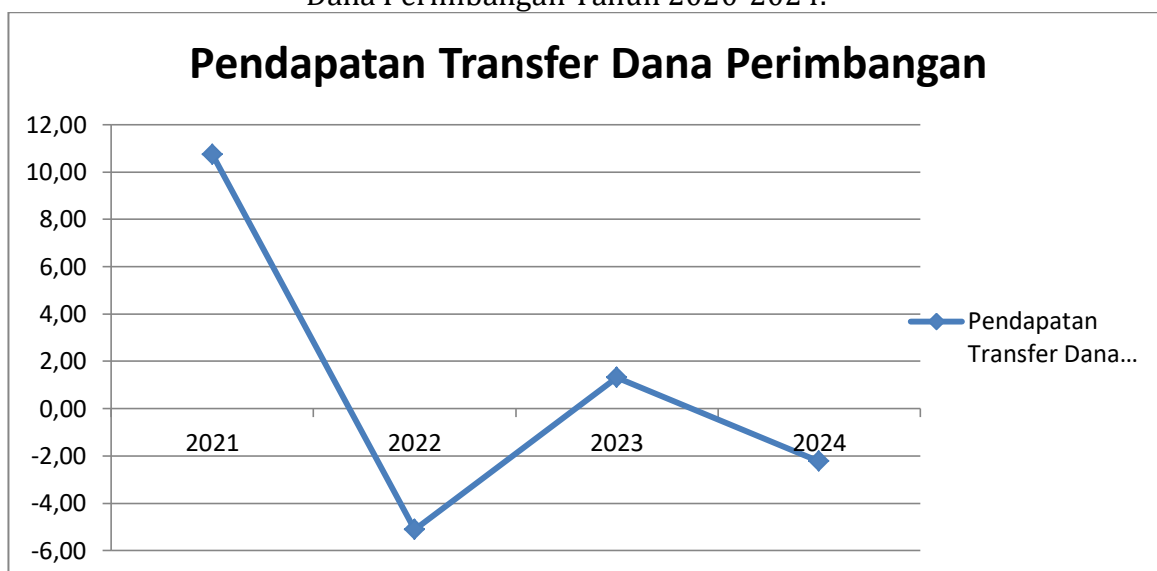
Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam 5 (lima) tahun terakhir juga mengalami tren fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,83% dari Rp. 71,720 miliar (2020) menjadi Rp. 72,104 miliar (2024). Tumbuhnya Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diantaranya didorong oleh Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga Bank, Pendapatan BLUD, dll.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir pendapatan transfer dana perimbangan untuk Kabupaten Sinjai mengalami tren fluktuatif namun tetap terjadi kenaikan

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI TAHUN 2025-2029

dengan rata-rata sebesar 6,89% dari Rp. 820,634 miliar (2020) menjadi Rp. 853,963 miliar (2024). Pendapatan transfer tertinggi diterima pada tahun 2021 sebesar Rp. 908,746 karena relatif tingginya Dana Perimbangan dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada tahun tersebut dibandingkan tahun lainnya. Jika dilihat rata-rata kontribusinya maka rata-rata 0,33% Pendapatan Transfer disumbang oleh Transfer Pemerintah Pusat. Jika melihat komponen utama pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam 5 (lima) tahun terakhir maka rata-rata 1,17% nya adalah disumbang oleh Dana Perimbangan sisanya dari transfer pemerintah pusat lainnya dari pos Dana Penyesuaian.

Grafik 2.77
Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Transfer
Dana Perimbangan Tahun 2020-2024.



Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Sinjai Tahun 2025

Dari komponen Dana Perimbangan itu sendiri, pada rincian item memang terdapat ada terjadi penurunan dan ada kenaikan seperti Dana Bagi Hasil Pajak (DBH) (36,05%), Dana Alokasi Umum (DAU) 2,86%, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (19,87%).

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

Grafik 2.78
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah



Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab.Sinjai Tahun 2025

Dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) perkembangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami fluktuasi dengan nilai rata-rata yang menurun sebesar (23,71%) pertahun dari Rp. 40,134 miliar (2020) menjadi Rp. 17,601 miliar (2024). Pencapaian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tertinggi diperoleh pada tahun 2021 yang sebesar Rp. 58,175 miliar. Jika dilihat dalam 5 (lima) tahun terakhir Sebagian besar sumber Lain-lain pendapatan daerah yang sah diperoleh dari pendapatan hibah yang nilainya menurun drastis dari Rp. 40,134 milyar (2020) menjadi nihil (2024). Sementara sumber pendapatan lainnya yaitu sebesar 33,647 milyar di tahun 2021 dan tahun 2024 sebesar Rp. 17.601 milyar. hal ini karena adanya penyesuaian komponen pendapatan dana BOS dari pendapatan hibah menjadi DAK non fisik sehingga masuk Pada komponen pendapatan dana perimbangan.

Neraca Daerah

Perkembangan neraca daerah, menguraikan pelaporan keseimbangan umum daerah, yakni keseimbangan antara aset daerah dengan kewajiban dan ekuitas dana daerah. Perkembangan neraca daerah Kabupaten Sinjai selama periode pencatatan 2019-2023, ditunjukkan pada tabel berikut ini.

**RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029**

Tabel 2.20
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2020-2024

No.	Uraian	TAHUN				
		2020 (Juta)	2021 (Juta)	2022 (Juta)	2023 (Juta)	2024 (Juta)
1.	ASET					
	Aset Lancar	122.250.785.406,99	123.601.817.057,88	139.531.566.863,04	108.666.127.386,48	93.606.912.021,73
	Aset Tetap	2.066.638.152.147,58	2.181.276.375.572,77	2.253.768.708.050,76	2.211.489.288.628,19	2.154.895.048.865,09
	Aset Lainnya	25.844.605.291,46	2.381.874.408.510,89	35.304.205.791,00	94.987.257.734,04	81.327.344.416,15
	Investasi Jangka Panjang	45.746.679.415,12	52.136.879.774,87	51.218.557.948,64	63.023.357.809,65	61.836.989.962,49
	Properti Investasi	0	0	0	10.855.740.750,46	8.858.351.622,26
	JUMLAH ASET	2.260.480.222.261,15	4.738.889.480.916,41	2.479.823.038.653,44	2.489.021.772.308,82	2.400.524.646.887,72
2.	KEWAJIBAN					
	Kewajiban Jangka Pendek	86.842.668.265,61	57.171.193.993,46	57.103.924.579,28	72.642.459.074,75	56.796.453.132,58
	Kewajiban Jangka Panjang	70.000.000.000,00	83.366.581.853,00	63.936.795.527,00	45.429.568.549,00	25.999.782.229,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	156.842.668.265,61	140.537.775.846,46	121.040.720.106,28	118.072.027.623,75	82.796.235.361,58
3.	EKUITAS DANA	2.103.637.553.995,54	2.241.336.632.664,43	2.358.782.318.547,16	2.370.949.744.685,07	2.317.728.411.526,14
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.260.480.222.261,15	2.381.874.408.510,89	2.479.823.038.653,44	2.489.021.772.308,82	2.400.524.646.887,72

Sumber : BKAD Kabupaten Sinjai, 2024, Diolah

2. PROYEKSI KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026-2030

Kerangka Pendanaan adalah bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja pemerintah. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan RPJMD hingga tahun 2029. Dalam konteks kemandirian fiskal, kemungkinan besar penerimaan dana transfer akan semakin berkurang. Oleh karena itu penggunaan ruang fiskal daerah kedepan harus lebih mengedepankan azas efektifitas dan efisiensi.

Pada bagian kerangka pendanaan ini akan diberikan gambaran tentang proyeksi pendapatan, Proyeksi Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan Proyeksi belanja wajib dan mengikat yang kemudian akan dihitung seberapa besar kapasitas riil daerah untuk pendanaan indikatif pada tahun 2026 - 2030.

Proyeksi Pendapatan Daerah

Komponen Pendapatan diproyeksikan berdasarkan data pendapatan dari masing-masing Perangkat Daerah yang menghasilkan Pendapatan Daerah. Data tersebut ditabulasi dan diproyeksi dengan beberapa asumsi:

1. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang semakin inovatif dan modern, membuat kemandirian fiskal Pemerintah Kabupaten Sinjai meningkat dalam memenuhi kebutuhan alokasi belanja prioritas pembangunan daerah. Hal tersebut terlihat pada proporsi PAD terhadap total Pendapatan Daerah selama tahun 2025-2029 diproyeksikan rata-rata sebesar 11 persen dibandingkan proporsi dari dana transfer yang mencapai rata-rata 88 persen. Pada kelompok PAD selama tahun 2025-2029 kontribusi terbesar bersumber dari retribusi Daerah dengan rata-rata mencapai 7 persen.

Dalam Proyeksi Target Pendapatan Daerah Tahun 2026-2029 dapat dijelaskan bahwa perhitungan proyeksi Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah dengan memperhatikan karakteristik Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi, seperti:

**RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029**

- a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), merupakan pajak langsung bersifat periodikal (masa pajak selama satu tahun) dihitung berdasarkan potensi objek pajak pada akhir tahun 2023 dan rata-rata pertumbuhan kendaraan baru selama 3 tahun terakhir. Prediksi perubahan jumlah objek tersebut hingga tahun 2029 dilakukan dengan memperhatikan beberapa faktor sebagai berikut:
- Besaran tarif PKB sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai;
 - Prediksi jumlah wajib pajak yang tidak melaksanakan pendaftaran ulang (tunggakan) setiap tahunnya;
 - Prediksi pertumbuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dari trend realisasi beberapa tahun terakhir;
 - Prediksi pertumbuhan kendaraan baru;
 - Prediksi objek mutasi masuk dan mutasi keluar yang jumlahnya tidak terlalu signifikan;
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), merupakan pajak tidak langsung sifatnya non periodikal, dipungut apabila terjadi peralihan kepemilikan kendaraan bermotor, proyeksinya dihitung berdasarkan perkiraan penjualan kendaraan baru dan sesuai dengan Undang-undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dihitung berdasarkan potensi perkiraan penyaluran Bahan Bakar Minyak oleh penyedia di wilayah Kabupaten Sinjai dan perkiraan harga jual bahan bakar minyak oleh Pemerintah yang nilainya selalu berubah mengikuti perkembangan harga jual minyak mentah dunia dan nilai tukar mata uang asing, dengan memperhatikan trend realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor beberapa tahun terakhir;
- d) Pajak Rokok, dihitung berdasarkan prediksi jumlah cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan memperhatikan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi serta proporsi jumlah penduduk Kabupaten Sinjai terhadap total jumlah penduduk nasional. Selain itu hal yang sangat berpengaruh adalah komitmen untuk mengalokasikan sebesar 50 persen penerimaan dari Dana Bagi Hasil Pajak Rokok terhadap

pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, yang apabila tidak dilaksanakan akan dipotong langsung oleh Pemerintah Pusat.

2. Pendapatan daerah yang berasal dari dana transfer diproyeksikan meningkat setiap tahun. Kontribusi DAU dan DAK terhadap dana transfer pusat sangat dominan. Proyeksi tingkat pertumbuhan dana transfer ditentukan dengan mempertimbangkan realisasi pertumbuhannya terhadap pertumbuhan kondisi ekonomi makro nasional.
3. Guna memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur, pemerintah mengoptimalkan alternatif pembiayaan infrastruktur dan terus mensosialisasikan secara intensif inovasi pembiayaan tersebut kepada pemerintah daerah antara lain Hibah dan Pinjaman melalui Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, Pemerintah, ataupun Lembaga. Berbagai sumber-sumber pendanaan alternative strategis diatas, menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan pendanaan yang dapat mendukung

Proyeksi Belanja Daerah

Belanja daerah mengacu pada pendekatan yang direncanakan dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah untuk mengelola anggaran belanja dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas serta asas kepatutan dan kewajaran. Untuk itu pemerintah daerah harus memiliki rencana anggaran yang matang yang mencakup identifikasi kebutuhan, prioritas, dan alokasi dana yang tepat untuk setiap program pembangunan. Diharapkan dapat menjamin seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang dialokasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kebijakan pengalokasian belanja daerah yang pertama adalah menetapkan pada belanja yang wajib diluar Pagu OPD antara lain belanja transfer, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia (penerimaan) dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Adapun kebijakan perencanaan pagu indikatif OPD diarahkan pada:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sinjai yang terdiri dari

urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

2. Belanja penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
3. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
4. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah yaitu :
 - a. Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan tugas pokok fungsi OPD.
 - b. Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan OPD dan program/kegiatan prioritas yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Sinjai
5. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Sinjai akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Kabupaten Sinjai, termasuk investasi bidang pendidikan, keuangan persewaan & jasa perusahaan, perdagangan, hotel & restoran.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk meningkatkan kualitas belanja publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah khususnya dari sisi PAD, maka proporsi belanja modal khususnya yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan investasi akan ditingkatkan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan jenis belanja lainnya terus ditekan atau diminimalkan.

Proyeksi Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan pembiayaan daerah pada proyeksi pembiayaan Kabupaten Sinjai tahun 2026-2030 adalah dengan menekan dan menurunkan SiLPA sebagai sumber penerimaan Daerah sekaligus menekan seluruh bentuk pengeluaran pembiayaan. Hasil yang ingin dicapai adalah bagaimana menciptakan pembiayaan netto bernilai positif agar dapat menutup defisit anggaran yang ada.

Secara keseluruhan terdapat beberapa arah kebijakan pembiayaan terkait kondisi surplus atau defisit anggaran. Kebijakan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

1. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam keadaan surplus maka akan dilakukan pemberdayaan kas sebagai investasi jangka pendek dalam bentuk deposito sehingga akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari pendapatan bunga deposito
2. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam keadaan defisit maka akan dilakukan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya untuk menutup defisit. Untuk menutup defisit maka akan dilakukan rasionalisasi belanja program dan kegiatan yang diusulkan oleh OPD.

Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pengelolaan SiLPA dan pinjaman daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. Perencanaan penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya.

1. Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan antara lain untuk :

- a) Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran berjalan, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional
- b) SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran;

2. Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan antara lain untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo yang pada Tahun 2025 diproyeksikan Rp. 19,429,786,326 dan Tahun 2029 Rp. 2.000.000.000.

3. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

Pemerintah Provinsi akan melakukan pengendalian batas maksimal defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Proyeksi Kerangka Pendanaan Daerah Tahun 2026-2030 dapat dilihat pada Tabel berikut :

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

Tabel 2.21
Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030

NO	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	PENDAPATAN						
	A. Pendapatan Asli Daerah	108.394.418.253,51	125.870.411.085	126.776.678.045	127.689.470.127	128.608.834.312	129.534.817.918,42
	B. Pendapatan Transfer	965.048.279.216	1.020.841.006.657	1.028.191.061.905	1.035.594.037.551	1.043.050.314.621	1.050.560.276.887
	C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	17.601.753.841	19.032.067.315	19.169.098.200	19.307.115.707	19.446.126.940	19.586.139.054
	JUMLAH PENDAPATAN	1.091.044.451.310,51	1.165.743.485.057	1.074.136.838.150	1.182.590.623.385	1.191.105.275.873,	1.199.681.233.858,90
2	BELANJA						
	A. Belanja Operasi	855.562.558.734,09	913.405.416.677	918.489.690.980	924.542.499.311	930.926.493.763	938.144.956.408
	B. Belanja Modal	109.900.870.514,30	115.871.769.529	119.347.922.614	122.928.360.293	126.616.211.102	130.414.697.435
	C. Belanja Tidak Terduga	1.332.309.000,00	6.070.317.669	6.114.023.957	6.158.044.929	6.202.382.853	6.388.454.338
	D. Belanja Transfer	134.440.755.094,52	132.960.909.673	133.918.228.222	230.339.352.542	231.997.795.881	238.957.729.757
	TOTAL BELANJA	1.101.236.493.342,91	1.168.308.413.548	1.177.869.865.774	1.283.968.257.075	1.295.742.883.598	1.313.905.837.938
	SURPLUS/DEFISIT	-10.192.042.032,40					
3	PEMBIAYAAN						

**RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029**

NO	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
	A. Penerimaan Pembiayaan	52.338.471.008,81	10.359.786.326	10.359.786.326	10.359.786.326	2.000.000.000	2.000.000.000
	B. Pengeluaran Pembiayaan	19.429.786.320,00	10.359.786.326	10.359.786.326	10.359.786.326	2.000.000.000	2.000.000.000
	Jumlah Pembiayaan Netto	32.908.684.688,81	0	0	0	0	-
	Sisa lebih pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	22.716.642.656,41					

F. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan atau kesenjangan antara realisasi kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan target pembangunan (harapan) yang telah direncanakan. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan / kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu untuk menentukan langkah yang tepat dimasa depan. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan atau mempengaruhi pencapaian visi-misi RPJMD. Untuk menentukan prioritas tersebut maka perlu dilakukan penelaahan dan pengakajian data dan informasi di Bab II serta menelaah permasalahan pembangunan dalam konteks kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

1.1. Permasalahan Pencapaian Misi

Dalam rangka akselerasi pelaksanaan **Pencapaian Misi**, faktor penentu keberhasilan harus mampu teridentifikasi secara jelas. Untuk itu akar masalah prioritas pada tiap-tiap pokok permasalahan harus dapat dirumuskan secara tepat karena berpengaruh pada pilihan program dan kegiatan prioritas apa yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Sinjai secara efektif dan efisien. Adapun identifikasi akar masalah masih-masing pokok permasalahan pada masing – masing Misi sebagai berikut :

Tabel 2.22
Hasil Identifikasi dan Analisis Permasalahan Pembangunan
Berdasarkan Pencapaian Misi

Masalah utama	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas			
Meningkatkan Daya saing sumber Daya Manusia			

**RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029**

Masalah utama	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
	Masih rendahnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Masih adanya kematian ibu dan bayi	Belum optimalnya Kualitas Layanan Kesehatan
		Masih tingginya prevalensi kasus gizi buruk dan gizi kurang pada bayi dan balita	Rendahnya cakupan pelayanan kesehatan balita
		Meningkatnya prevalensi kasus kematian akibat penyakit tidak menular	Rendahnya cakupan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif
		Masih tinggi prevalensi penyakit menular	Rendahnya cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit menular (Tuberkulosis, HIV)
	Masih rendahnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Angka Partisipasi sekolah belum optimal	
		Angka partisipasi kasar belum optimal	
		Angka Partisipasi murni belum optimal	
		Nilai Indeks Kegemaran membaca masyarakat belum optimal	
		Nilai Indeks Pembangunan Literasi masyarakat belum optimal	
		Masih Rendahnya Prestasi Keolahragaan	
Misi 2 : Menerapkan teknologi informasi dan Komunikasi, hasil riset dan inovasi untuk meningkatkan daya saing Daerah (Maju), Misi 3 : Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel (Maju)			
Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan			

**RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029**

Masalah utama	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
	Belum Optimalnya Kinerja Pelayanan Publik		Masih rendahnya nilai keterbukaan informasi publik
		Belum Optimalnya Dukungan Iptek Dan Inovasi Dalam Pelaksanaan Keberlanjutan Pembangunan	Masih rendahnya indeks pembangunan statistik
			Belum optimalnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
			Masih kurangnya inovasi dalam peningkatan pelayanan publik
			Manajemen Layanan MPP Belum Terintegrasi
			Ketersediaan Data dan Informasi yang dibutuhkan dalam Pelayanan Publik masih rendah dan kurang berkualitas
			Kualitas Layanan Administrasi kependudukan dan pencatatan Sipil masih kurang optimal
			Belum Optimalnya Kemandirian Desa
		Profesionalisme ASN masih perlu ditingkatkan	Tingkat Kedisiplinan ASN masih kurang
			Rendahnya Kinerja aparatur
		Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan belum	Perencanaan (PPD) : Pemenuhan seluruh Aspek Perencanaan

**RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029**

Masalah utama	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
		optimal	Pembangunan Daerah
			masih rendahnya nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
			Masih belum optimalnya kinerja pengelolaan keuangan daerah
			Belum optimalnya pengelolaan pendapatan daerah
Misi 4: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan potensi daerah berbasis agrobisnis,agroindustri, pariwisata,pemberdayaan UMKM dan ramah investasi			
Pertumbuhan Ekonomi masih lebih rendah dari target pertumbuhan ekonomi nasional			
	Produktifitas Pertanian dan ketersediaan pangan belum Optimal	Belum Optimalnya Produksi Perikanan Tangkap/Budidaya	
		Belum Optimalnya Produktivitas Pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	
		Belum Optimalnya Produksi Peternakan	
		Ketersediaan Pangan Belum Optimal	Belum Optimalnya Konsumsi Pangan Masyarakat
			Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan masih rawan cemaran pestisida/bahan kimia
			Masih banyaknya Wilayah yang tergolong Prioritas 3 (Agak

**RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029**

Masalah utama	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
			Rentan Pangan)
	Belum Optimalnya daya saing produktivitas daerah	belum optimalnya daya saing produktivitas Koperasi dan UMKM	Masih rendahnya persentase koperasi sehat
			Masih kurangnya UMKM yang memenuhi standarisasi dan sertifikasi produk usaha
		Masih kurangnya sertifikasi legalitas industri lokal	Belum optimalnya pengendalian stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
			Masih rendahnya Penyediaan energi baru terbarukan dan panas bumi
	Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja	Rendahnya kompetensi Usia Produktif	
	stabilitas ekonomi makro daerah belum maksimal	Belum diterapkannya hasil-hasil Riset dalam rangka meningkatkan daya saing daerah	
		Promosi Potensi Investasi Belum Memadai	
	Persentase Ekspor barang dan jasa terhadap PDRB masih belum maksimal	Tingkat kunjungan wisatawan masih rendah	Pengelolaan destinasi dan Industri Pariwisata belum optimal
			Belum optimalnya kebudayaan sebagai pendukung Pariwisata
Misi 5: Mewujudkan ketahanan Keluarga, sosial budaya berlandaskan nilai religius dan kearifan local			

**RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029**

Masalah utama	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Tingkat kesejahteraan masyarakat masih rendah (persentase masyarakat miskin)			
	Terwujudnya kerukunan umat beragama dan pemajuan kebudayaan		
	Belum optimalnya kualitas hidup perempuan dan keluarga, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif	Rendahnya kompetensi Usia Produktif	Belum optimalnya kesetaraan gender
			Belum optimalnya Perlindungan Anak
			Belum optimalnya peningkatan kepesertaan KB dalam menekan dampak laju pertumbuhan penduduk
	masih rendahnya perlindungan sosial yang adaptif	Belum optimalnya fungsi sosial masyarakat	PSKS peseorangan, keluarga dan kelembagaan belum diberdayakan secara maksimal
			Penanganan PPKS dan rehabilitasi sosial disabilitas, anak terlantar dan lanjut usia belum maksimal
			Perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin belum maksimal
			Masyarakat/gelandangan khususnya korban tindak kekerasan belum tertangani dengan maksimal

**RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029**

Masalah utama	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Misi 6 : Melestarikan Sumber Daya Alam, lingkungan hidup dan Kehutanan secara berkelanjutan			
Pengelolaan, Pengendalian dan Pengawasan Pencemaran Lingkungan Hidup belum efektif			
	(Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup)	Masih adanya pencemaran kualitas air, lahan dan udara	masih rendahnya ketaatan pelaku usaha dan atau kegiatan terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Pengelolaan Sampah yang belum optimal	
Misi 7 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang merata dan berkeadilan			
Belum terpenuhinya infrastuktur wilayah sesuai standar			
	Belum terpenuhinya Infrastruktur yang Berkualitas	Belum meratanya sarana prasarana infrastruktur	Masih rendahnya Kemantapan Jalan
			Masih rendahnya akses Layanan Air Minum
			Masih rendahnya akses masyarakat terhadap layanan sanitasi
			Belum optimalnya layanan irigasi
			Belum optimalnya penanganan masalah pertanian

**RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029**

Masalah utama	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
			Belum Optimalnya Penanganan Lingkungan Permukiman Kumuh
		Kualitas sarana prasarana transportasi belum optimal	Layanan Keselamatan Berkendara belum Optimal
			Layanan Angkutan Transportasi belum Optimal
Misi 7 : Mewujudkan masyarakat yang taat hukum, tertib, aman dan tangguh bencana			
Belum optimalnya Ketaatan terhadap Hukum, Ketertiban dan Keamanan, pencegahan risiko bencana dan Demokrasi Berkeadilan			
	Rendahnya Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan, serta Demokrasi Substansial	Masih perlunya peningkatan penyelesaian kejadian K3 (Belum optimalnya Ketaatan terhadap Hukum, Ketertiban dan Keamanan dan Demokrasi Berkeadilan)	Tingkat Penyelesaian Penegakan Perda belum optimal
		Belum optimalnya partisipasi politik	Kurangnya pendidikan karakter politik masyarakat
	belum optimalnya mitigasi bencana	belum optimalnya mitigasi bencana (Belum optimalnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim)	Belum optimalnya jangkauan wilayah manajemen kebakaran dan penyelamatan
			Layanan Pembinaan Pencegahan dan Kesiapsiagaan

**RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029**

Masalah utama	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
			Terhadap Bencana Belum Optimal

1.2. Permasalahan Berdasarkan Urusan

1) Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a. Urusan Pendidikan

- Masih Rendahnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Di Kabupaten Sinjai, Hal ini tercermin sampai dengan tahun 2024 rata-rata lama sekolah Kabupaten Sinjai baru mencapai 7,82 tahun atau setara dengan kelas VII- VIII , ini berarti Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Sinjai masih lebih rendah disbanding angka rata-rata lama sekolah Nasional yang mencapai 8,86 dan rata rata lama sekolah Provinsi mencapai 8,85 sementara Angka harapan lama sekolah di Kabupaten Sinjai terus meningkat. Namun harapan lama sekolah tersebut masih dibawah angka provinsi Sulawesi Selatan tetapi masih lebih tinggi dari angka harapan lama sekolah Nasional.
- Angka Partisipasi Sekolah Belum Opimal
Permasalahan angka partisipasi sekolah di kabupaten Sinjai disebabkan karena kondisi geografis daerah yang terpencil, keadaan ekonomi keluarga yang tidak mampu membiayai kebutuhan sekolah serta faktor budaya yang menyebabkan angka partisipasi sekolah yang belum maksimal, Capaian Angka Partisipasi Sekolah untuk tingkat SD/MI masih fluakuatif tahun 2022 telah mencapai 113,89 persen mengalami penurunan sebesar 0,4 persen pada tahun 2023 menjadi 113,49 persen dan Untuk tingkat SMP/MTs pada tahun 2023 sebesar 117,98 mengalami penurunan sebesar 0,54 persen di banding pada tahun 2022 mencapai 118,52 persen.
- Angka partisipasi kasar belum optimal
Terbatasnya akses terhadap fasilitas pendidikan seperti sekolah ,guru dan bahan ajar yang menyebabkan kesenjangan akses pendidikan menjadi salah satu permasalahan yang menyebabkan angka partisipasi kasar

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI TAHUN 2025-2029

belum optimal di kabupaten sinjai karena berdasarkan data Angka Partisipasi Kasar untuk SD/MI mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 5,06 persen atau sebesar 113,49 persen dibandingkan pada tahun 2021 sebesar 108,43 persen. Angka Partisipasi Kasar untuk SMP pada tahun 2023 juga mengalami peningkatan sebesar 28.57 persen dibandingkan pada tahun 2022

- Angka Partisipasi murni belum optimal

Permasalahan angka partisipasi murni di kabupaten sinjai disebabkan oleh beberapa factor diantaranya tingkat kemiskinan, kesenjangan akses, social budaya dan kualitas pendidikan itulah mengapa permasalahan APM di daerah merupakan masalah kompleks yang membutuhkan solusi multidimensi , di kabupaten Sinjai tahun 2023 angka partisipasi murni SD/SMP/ sederajat mengalami penurunan sebesar 0,81 persen dibandingkan pada tahun 2022, angka partisipasi murni SD/MI/ sederajat sebesar 99,98 persen, artinya sekitar 99 persen penduduk di Kabupaten Sinjai yang berusia 7-12 tahun bersekolah tepat waktu di jenjang tersebut. Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ sederajat di Kabupaten Sinjai pada tahun 2023 sebesar 99,92 persen mengalami penurunan sebesar 0,06 persen dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 99,98 persen artinya sekitar 99 persen penduduk di Kabupaten Sinjai yang berusia 13-14 tahun bersekolah tepat waktu di jenjang tersebut

b. Urusan Kesehatan

- Data tahun 2024 menunjukkan Usia Harapan Hidup Kabupaten Sinjai 73,04 berada pada urutan ke 22 terendah dari 24 kabupaten/kota, dibandingkan dengan kabupaten bulukumba capaian UHH 74,18 tahun (urutan 10) dan kabupaten Bone 73,46 tahun (urutan 20) Capaian UHH Provinsi 73,83 tahun rendahnya usia harapan hidup disebabkan oleh Angka Kematian Ibu. Untuk angka kematian ibu di Kabupaten Sinjai 3 kasus sedangkan Kabupaten Bulukumba 5 kasus, Kabupaten Bone 22 kasus. Sulawesi Selatan 172 kasus, Angka Kematian Bayi dan Balita untuk Kabupaten Sinjai 48 kasus, Kabupaten Bulukumba 50 kasus, Kabupaten Bone 83 kasus.

**RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029**

- Untuk kasus gizi buruk tertinggi di Pulau Harapan sebanyak 2 kasus. Prevalensi wasting (gizi buruk dan gizi kurang) berada di Desa Padaelo sebanyak .
 - Prevalensi gizi buruk dan gizi kurang penanganannya masih belum optimal, Data kabupaten sinjai 4.7 %, Kabupaten Bone 2.8% kabupaten Bulukumba 5.2%. sedangkan Provinsi Sulawesi selatan 3.8%
 - Meningkatnya kasus kematian akibat penyakit menular kabupaten sinjai sebanyak 25,88 per 100.000 penduduk. Kabupaten Bulukumba 3,53 per 100.000 penduduk. Kabupaten Bone 5,21 per 100.000 penduduk. Provinsi Sulawesi Selatan 5,44 per 100.000 Penduduk
- c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Belum terpenuhinya infrastuktur wilayah sesuai standar
- Tahun 2024 target kemantapan jalan 58,80% sedangkan realisasi 57,48% sehingga capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 97,76%. Terdapat selisih antara target dan realisasi sebesar 1,32%. Realisasi tidak mampu mencapai target yang telah ditetapkan disebabkan karena beberapa faktor seperti adanya penurunan kondisi jalan
 - Masih rendahnya akses Layanan Air Minum karena terbatasnya layanan air minum berkualitas secara merata. Hingga tahun 2024 persentase penduduk berakses air minum berkualitas baru mencapai 86,65%.
 - Masih rendahnya akses masyarakat terhadap layanan sanitasi, Cakupan layanan limbah rumah tangga kurang maksimal. Meskipun akses sanitasi ditahun 2024 sudah mencapai 89,47%
 - Belum optimalnya layanan irigasi, Cakupan layanan irigasi berkualitas tidak menjangkau seluruh wilayah. Dari 75,78% jaringan irigasi , hanya 27,37 % yang kondisinya baik ditahun 2024.
- d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- Belum optimalnya penanganan masalah pertanahan, persentase luas lahan bersertifikat tahun 2024 mencapai 60,62% dari luas tanah pemda sebesar 3.148941m²
 - Belum Optimalnya Penanganan Lingkungan Permukiman Kumuh, Tahun 2024 luas kawasan kumuh yang tertangani 73,25 Ha dan masih tersisa 132,24 Ha yang belum tertangani

- e. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - i. Masih perlunya peningkatan penyelesaian kejadian K3, Tingkat Penyelesaian Penegakan Perda masih perlu dimaksimalkan dengan adanya peningkatan kasus dari 111 kasus pelanggaran perda ditahun 2023 meningkat menjadi 120 kasus di tahun 2024.
 - ii. Layanan Pembinaan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Belum Optimal, di mana cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten persentasenya Pada Tahun 2024 baru 27,72%
 - iii. Persentase Jumlah kasus kebakaran di WMK yg tertangani dalam waktu maksimal 15 Menit yang Sesuai Standar Belum Maksimal ditahun 2024 hanya 25 % kasus yang tertangani sesuai standard
- f. Urusan Sosial

2) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

- g. Urusan Tenaga Kerja
 - Rendahnya Kompetensi Tenaga Kerja/Pencari Kerja menyebabkan tingginya Jumlah penganggur dikabupaten Sinjai dikabupaten sinjai
 - Rendahnya Kesadaran Pengusaha/Perusahaan untk mengikutkan pekerjanya dalam kepesertaan jaminan social tenaga kerja sehingga kepesertaan jaminan social bagi tenaga kerja di kabupaten sinjai masih rendah tahun 2024
- h. Urusan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak

Indeks ketimpangan gender masih menjadi permasalahan , Belum optimalnya perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan di mana Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit mengalami peningkatan sebanyak 42 orang dibandingkan pada tahun 2023 sebanyak 15 orang, hal ini disebabkan karena tingginya kasus kekerasan fisik, psikis, kekerasan verbal, Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan kasus kekerasan berbasis gender sehingga kasus KtP/A sangat mempengaruhi kesehatan korban, selain itu Ketersediaan dan kualitas data gender dan anak kurang optimal di mana ditahun 2024 dari 48 OPD baru 35 % OPD yang menyediakan data gender dan anak

i. **Urusan Pangan**

Indeks ketahanan pangan berpotensi menurun disebabkan masih terkendala pendistribusian pupuk bersubsidi dan infrastruktur pertanian yang belum memadai dengan tidak adanya bendungan sebagai sumber pengairan utama sehingga sebagian masih mengandalkan perairan tadah hujan, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU) mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 3,25 persen. Perubahan pola ketidakcukupan konsumsi energi dari makanan dalam suatu populasi dapat disebabkan oleh fluktuasi harga pangan serta beberapa tantangan diantaranya: a) Perubahan iklim yang berdampak pada pergeseran musim tanam, pola tanam, produktivitas, serangan hama dan penyakit serta kebutuhan air; b) Akses terhadap pangan yang masih belum merata akibat faktor ekonomi dan kondisi fisik; dan c) Jumlah penduduk yang terus bertambah yang membutuhkan kecukupan konsumsi pangan, pencapaian ketersediaan pangan utama tahun 2024 sebesar 48,84% mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 38,08%

j. **Urusan Pertanian**

- Belum optimalnya penanganan masalah pertanian, persentase luas lahan bersertifikat tahun 2024 mencapai 60,62% dari luas tanah pemda sebesar 3.148941m²

k. **Urusan Lingkungan Hidup**

Persentase sampah yang tertangani belum tercapai sesuai target yang telah ditetapkan pada dokumen kebijakan dan strategi daerah Kabupaten Sinjai dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yaitu pada tahun 2024 sampah tertangani 71 % dan terealisasi 49.18 %, ini dapat memiliki berbagai implikasi yang dapat mempengaruhi kesehatan lingkungan, kualitas hidup masyarakat perkotaan maupun perdesaan, dan pembangunan berkelanjutan. Sampah yang tidak tertangani dengan benar dapat mencemari lingkungan. Limbah yang mencemari dapat mengancam ekosistem air dan tanah, serta merusak keanekaragaman hayati di daerah perkotaan. Kesulitan dalam penanganan sampah dapat mengakibatkan ketidaksetaraan akses layanan

di antara berbagai komunitas perkotaan. Daerah-daerah miskin atau pinggiran kota mungkin memiliki akses yang lebih terbatas terhadap layanan pengelolaan sampah yang baik.

l. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kualitas Layanan pendaftaran penduduk masyarakat kurang optimal di mana hingga tahun 2024 belum semua penduduk/anak memiliki KK, KTP-Elektronik dan KIA. Kepemilikan KTP-Elektronik 95,84%, Kepemilikan KK 99,67 % dan kepemilikan KIA 77,06 %. Kualitas Layanan pencatatan sipil kepada masyarakat kurang optimal di mana hingga tahun 2024 belum semua penduduk memiliki akta kelahiran (67,46%) dan 100% penduduk yang meninggal diterbitkan akta kematian

m. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Cakupan kerjasama desa dalam pengentasan desa tertinggal menjadi desa mandiri belum optimal di mana ditahun 2024 baru 42 desa mandiri dari 67 desa yang melakukan kerjasama pengentasan desa tertinggal

n. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB Mandiri belum optimal di mana Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB Mandiri tahun 2023 yang sudah mencapai 91,46 % dari pasangan usia subur (PUS) dan khusus menurun dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 40,64% di tahun 2024.

o. Urusan Perhubungan

Layanan keselamatan berkendara belum optimal di mana hingga tahun 2024 kebutuhan kelengkapan rambu lalu lintas penunjang keselamatan yang terpenuhi baru mencapai 41,95%. Selain itu untuk kebutuhan lampu penerangan jalan umum baru terpenuhi 59,82%.

p. Urusan Komunikasi dan Informatika

Layanan Publik yang terintegrasi dan dapat diakses secara online mencapai 80% ditahun 2024. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk pemerintahan yang efektif dan efisien tahun 2024 mencapai 78,57% kebutuhan TIK yang terpenuhi , Penyebarluasan Informasi tentang pelayanan publik mencapai 92,46% masyarakat yang mengakses informasi

publik ditahun 2024

q. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- Masih kurangnya Koperasi Aktif (melaksanakan RAT) terbukti dengan jumlah kopersai yang ada di kabupaten sinjai sebanyak 146 unit koperasi dan yang aktif hanya 67 unit atau hanya 4,85%
- Masih rendahnya kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di mana KUKM yang bermitra ditahun 2024 hanya sebesar 0,33% Peningkatan skala usaha UMKM kurang maksimal di mana ditahun 2024 belum ada usaha mikro yang meningkat skala usahanya
- Masih ada KSP/USP yang kondisi koperasinya tidak sehat di mana ditahun 2024 persentase koperasi sehat hanya mencapai 19,8% dan jika digabungkan dengan jumlah koperasi cukup sehat rasionya menjadi%.
- Masih kurangnya kemitraan perkoperasian di mana koperasi yang bermitra ditahun 2024 hanya sebesar 2,05%

r. Urusan Penanaman Modal

Potensi obyek investasi kurang terpetakan dan terprofilkan dengan baik di mana hingga tahun 2024 belum dibuat profil potensi obyek investasi, Kurang maksimalnya strategi promosi untuk menarik calon investor berkomitmen di mana baru 2 calon investor yang berkomitmen dari 5 calon investor , Kualitas pelayanan modal belum optimal terlihat dari IKM yang baru mencapai 96,65 sehingga masih bisa dan perlu untuk ditingkatkan, Belum semua perusahaan mematuhi ketentuan perizinan yang berlaku baru% perusahaan ditahun 2024 yang berizin, Data profil peluang investasi belum *up to date* sehingga kurang termanfaatkan di mana baru% data profil yang update dan termanfaatkan.

s. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Produktifitas pemuda dalam organisasi belum optimal di mana hingga tahun 2024 rasio pemuda yang aktif berorganisasi hanya mencapai 13,02% dari total pemuda yang ada, Kualitas pengembangan olah raga belum optimal di mana persentase cabang olah raga yang dibina baru mencapai 94,9 % dari total cabang olah raga yang ada.

t. Urusan Statistik

Peningkatan keamanan informasi terus mengalami peningkatan,

khususnya pada indikator Sistem Manajemen Keamanan informasi (SMKI) mendapatkan nilai 4 pada domain kebijakan SPBE, sedangkan penilaian mandiri pada Indeks Keamanan Informasi dengan nilai $609/645 = 94,41\%$ Upaya pengamanan informasi terus dilakukan dengan menerbitkan Perbup Nomor 49 tahun 2023 Tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilingkup pemerintah kab.sinjai dan Surat Keputusan Bupati Nomor 789 tahun 2024 tentang Pembentukan Tim CSIRT Pemkab Sinjai. Upaya ini kita lakukan dalam rangka meningkatkan sistem keamanan manajemen informasi pemkab Sinjai.

u. Uruasan Persandian

Terpublikasinya data informasi statistik yang akurat dan meta data Kabupaten Sinjai dengan capaian kinerja yaitu 100% dari target 100% yang telah ditetapkan. Dimana indikatot Terpublikasinya data informasi statistik yang akurat dan meta data Kabupaten Sinjai terlaksanan dengan terkumpulnya Data Statistik Sektoral, penginputa Data Statistik Sektoral pada Aplikasi SISTIK, dan terpublikasinya melalui website sinjaikab.go.id dan aplikasi <http://apps.sinjaikab.go.id> SISTIK (Sistem Informasi Data Statistik).

v. Urusan Kebudayaan

Banyak kebudayaan lokal yang tidak dikelola dan dikembangkan dengan baik di mana tahun 2024 baru 33,9% kebudayaan dan tradisi yang dikembangkan, pelestarian Cagar Budaya belum maksimal di mana baru 31,03% di tahun 2024, banyak potensi kesenian lokal tidak dikelola dan dikembangkan dengan baik dimana tahun 2024 baru 40% seni dan kesenian lokal yang mendapat pembinaan

w. Urusan Perpustakaan

Tingkat literasi masyarakat Kabupaten Sinjai sudah tergolong tinggi tetapi, peningkatan sapaian pertahun masih kurang optimal . Hal ini tercermin dari tingkat kegemaran membaca masyarakat yang baru mencapai 77,70 % ditahun 2024. Selain itu indeks pembangunan literasi masyarakat kabupaten Sinjai Tahun 2024 mencapai 92,29 %

x. Urusan Kearsipan

Belum optimalnya pengelolaan Arsip penting daerah khususnya arsip keuangan dan asset di mana nilai Laporan Audit Kinerja Eksternal (LAKE) tahun 2024 baru mencapai 74,26 %

3) Urusan Pemerintahan pilihan

y. Urusan Kelautan dan Perikanan

- Belum optimalnya produksi perikanan tangkap, Tahun 2024 sebanyak 91.369,10 ton mengalami penurunan sebanyak 1.273,90 ton dibandingkan pada tahun 2023 sebanyak 92.643,00 ton. Hal ini disebabkan kurang tersedianya sarana dan prasarana penangkap, selain itu Praktek penangkapan ikan ilegal di PUD (Menggunkan racun dan Listrik/setrum) masih marak. Dari 27 lokasi penangkapan hanya 3 lokasi yang bebsar dari penangkapan ikan illegal.
- Belum optimalnya produksi perikanan budidaya. Tidak mengalami peningkatan nilai produksi terakhir ditahun 2024 baru mencapai 52,100 Ton, Belum optimalnya kemanfaatan pengolahan hasil perikanan. Nilai produksi pengolahan hasil perikanan tahun 2024 sama dengan tahun 2023 sebesar 52,100 Ton ini menunjukkan tidaka ada progress dari tahun sebelumnya.

z. Urusan Pariwisata

Tingkat kunjungn wisatawan masih rendah, Destinasi tujuan wisata (DTW) kurang dioptimalkan/dikembangkan/terkelola. Meskipun pada tahun 2024 jumlah tamu wista domestic dan mancanegara mengalami peningkatan sebesar 115.248 orang dari tahun sebelumnya Tahun 2023 hanya 177.660 menjadi 292.908 orang pada Tahun 2024 namun Pembinaan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif belum maksimal karena sampai Tahun 2024 industri ekonomi kretif belum terukur capaian kinerjanya, karena jumlah industri kreatif di Kabupaten Sinja belum terdata secara optimal. Hal ini kerena pembagian antara industri kreatif dengan industri kecil dan menengah belum terpilah secara spesifik.

aa. Urusan Pertanian

Produksi pertanian dan peternakan masih perlu dioptimalkan. Ditahun 2024 produksi daging baru mencapai ton, telur mencapai 10.760 ton dan susu 0,604 ton. Sedangkan produktifitas padi baru 6,25 ton/ha, jagung 6,69 ton/ha, kedelai 1,07 ton/ha, ketela pohon 18,37 ton/ha, ketela rambat 8,03

ton/ha, kacang tanah 1,3 ton/ha, kacang hijau 1,2 ton/ha, kelapa 0,79 ton/ha, cengkeh 0,08 ton/ha, the 0,24 ton/ha, Kurangnya antisipasi penanggulangan bencana pertanian di mana ditahun 2020 baru 89,90% area yang bebas dari serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), Pengawasan produksi hasil peternakan yang aman dan sehat belum optimal. Dari total populasi ternak ditahun 2024 baru 31,37% yang terkendali status kesehatannya, Kualitas kelembagaan kelompok tani belum optimal di mana baru 2 kelompok yang meningkat statusnya dari pemula jadi maju/mandiri.

bb. Urusan Perdagangan

Belum optimalnya pengendalian stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting ditandai dengan rendahnya kualitas dan/standarisasi pasar serta pengelolaannya. Hal ini tergambar dari persentase pasar dalam kondisi baik baru mencapai 16,6% dari total 24 Pasar yang ada, jumlah pedagang pasar di 24 Pasar rakyat sebanyak 4910 orang, masih terdapat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang tidak terlayani pelayanan tera, tera ulang. Pada tahun 2024 persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) terealisasi 72,66% atau sebanyak 1616 unit alat UTTP pedagang yang telah ditera, tera ulang, pengendalian harga barang kurang maksimal dimana tahun 2024 hanya dilakukan 19 kali kegiatan pasar murah atau 1 kali tiap kecamatan 1 kali pasar murah tiap tahun.

cc. Urusan Perindustrian

Pengembangan sektor industri adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas produksi industri, baik kuantitas maupun kualitasnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan. Tantangan pengembangan industri Infrastruktur yang belum memadai, Keterbatasan sumber daya manusia, Rendahnya tingkat inovasi, Pemasaran Produk, Persaingan ketat, Kualitas produk yang belum memenuhi. Pengembangan Sektor Industri dan Pemasaran produk di Kabupaten Sinjai belum maksimal yang terbatas di sebabkan oleh beberapa faktor di antaranya masih rendahnya sertifikasi legalitas produk, dimana sertifikasi Produk IKM masih sangat rendah, hal ini dapat di lihat dari Data IKM sebanyak 4257 IKM baru sebanyak 147 IKM yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan 141 yang tersertifikasi PIRT serta masih rendahnya IKM

yang Terdaftar dalam SIINas Tahun 2022 – 2024 baru sebanyak 88 IKM atau sebesar 2.07 %

4) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

dd. Sekretariat Daerah

Fasilitasi peningkatan pelayanan publik belum optimal di mana rata-rata IKM kecamatan baru mencapai, Maturitas UKPBJ belum optimal di mana tahun 2024 baru mencapai level, Standarisasi LPSE belum merata di mana baru% tingkat standarisasi LPSE yang terpenuhi.

ee. Sekretariat DPRD

Terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsinya ke dalam dokumen sekwan dari tahun 2019 – 2024. Tercapainya program-program DPRD didukung oleh kegiatan dan anggaran kedalam dokumen Sekretariat DPRD itu sendiri, sehingga fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda dan fungsi anggaran akan terlaksana secara maksimal.

5) Pemerintahan

ff. Unsur Perencanaan

Belum maksimalnya kualitas proses penyusunan dokumen perencanaan dan sinkronisasi penganggaran. Meskipun seluruh dokumen perencanaan telah disusun sesuai tahapan namun masih terdapat subtansi yang perlu disempurnakan seperti ketepatan indikator, dan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah yang belum 100%, Manajemen kinerja dan sistem pengendalian internal OPD belum efektif di mana tingkat kesesuaian rencana dan realisasi terakhir baru mencapai 92,8%.

gg. Unsur Keuangan

- Masih belum Optimalnya kinerja pengelolaan keuangan daerah ditandai dengan pengalokasian anggran belanja belum sesuai pedoman penyusunan APBD, Laporan pertanggungn jawaban APBD yang belum sesuai SAP, belum optimalnya serapan belanja serta Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah Yang belum Akurat

- Pungutan pajak belum optimal di mana tahun 2024 kontribusi pajak terhadap PAD baru 16,69%. Belum Optimalnya Pengelolaan Barang Milik Daerah di mana hingga tahun 2024 baru% OPD yang mengelola BMD dengan baik dan benar.

hh. Unsur Kepegawaian

Tingkat kedisiplinan ASN masih kurang di mana ditahun 2024 masih ada 0,11% ASN yang mendapat hukuman disiplin, Jabatan struktural/jabatan fungsional (non guru non kesehatan) belum terisi secara maksimal berdasarkan kompetensinya di mana persentase jabatan struktural yang diisi sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi baru mencapai 22,29 % serta persentase jabatan fungsional yang diisi sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi baru mencapai 77,13%.

ii. Unsur Pendidikan dan Pelatihan

Masih banyak ASN yang belum mengikuti pelatihan teknis 20 jam/tahun baru sekitar 15,22% ASN yang telah mengikuti diklat 20 jam dalam setahun, Masih banyak ASN yang belum mengikuti seminar/*workshop*/sejenis sesuai dengan tupoksi jabatan baru sekitar 84,77% ASN yang telah mengikuti seminar/*workshop*/sejenis sesuai dengan tupoksi jabatan.

jj. Unsur Penelitian dan Pengembangan

Pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan inovasi yang dapat mendukung secara langsung pelaksanaan berbagai sektor pembangunan daerah belum optimal. Tahun 2020 hanya 58,64 hasil kelitbangan yang dapat dimanfaatkan dan terintegrasi sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan

6) Unsur Pengawasan

Tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI perlu ditingkatkan di mana tahun 2024 baru mencapai 88,72 % penyelesaian tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK, Tindak lanjut hasil APIP perlu dioptimalkan di mana tahun 2024 baru mencapai 47 % temuan yang ditindaklanjuti dan terselesaikan, Predikat WBK/WBBM berdasarkan penilaian internal belum optimal di mana baru sekitar% unit kerja yang ditetapkan menuju WBK/WBBM.

7) Unsur Kewilayahan (Kecamatan)

8) Unsur Pemerintahan Umum (Kesbangpol)

Pembinaan Masyarakat Terhadap Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan masih kurang di mana presentase masyarakat yang memahami Idiologi Pancasila dan karakter kebangsaan baru mencapai 20%, Pembinaan terhadap ormas yang terdaftar melalui kemendagri dan kemenkumham sampai tahun 2024 sebanyak 369 Ormas yang kepengurusannya masih aktif sampai tahun 2024 sebanyak 16 ormas, sehingga pembinaan ormas baru mencapai sekitar 23%.

Gangguan Kamtibmas terdeteksi secara optimal yang menyebabkan tidak terjadinya Konflik di mana pada tahun 2024 jumlah konflik Nihil hal ini disebabkan karena adanya fungsi Penanganan Konflik yang berjalan secara optimal

4.2. ISU STRATEGIS DAERAH

Isu strategi adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah ataupun panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang. Dalam Perumusannya isu strategis Daerah dianalisis berdasarkan gambaran kondisi daerah dan permasalahan perangkat Daerah.

Rumusan isu strategis melibatkan identifikasi isu internasional, isu nasional, dan isu regional yang saling terkait dan terintegrasi. Dengan demikian, kita dapat memahami kompleksitas isu-isu tersebut dan merancang strategi yang holistik untuk menghadapinya. Dengan mengakui pentingnya isu-isu strategis, kita dapat meminimalkan risiko kegagalan dan mendorong kemajuan yang berkelanjutan dalam pembangunan daerah.

4.2.1 Isu Strategis Internasional

Isu strategis internasional merupakan isu global yang penting dalam pembangunan nasional pada jangka menengah yang dapat memberikan pengaruh pada pembangunan Kabupaten Sinjai. Isu strategis internasional merujuk pada isu global pada Rancangan Teknokratik RPJMN yang dijabarkan sebagai berikut.

1. Cuaca Ekstrem

Cuaca ekstrem di Kabupaten Sinjai dapat mempengaruhi pembangunan nasional secara signifikan, terutama dalam hal ketahanan infrastruktur dan keberlanjutan proyek pembangunan. Ketika cuaca ekstrem menyebabkan kerusakan pada infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bangunan, hal ini tidak hanya menambah beban biaya pemeliharaan dan perbaikan tetapi juga mengganggu kelancaran proyek pembangunan dan distribusi barang. Dampak ini dapat menghambat implementasi rencana pembangunan nasional yang dirancang untuk meningkatkan konektivitas dan memacu pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi efisiensi dan efektivitas proyek-proyek yang sedang berjalan.

Selain itu, dampak cuaca ekstrem pada sektor pertanian dan perikanan di Sinjai dapat mengganggu ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi regional, yang pada gilirannya berpotensi mempengaruhi keseimbangan ekonomi nasional. Ketidakpastian hasil panen dan tangkapan ikan dapat memperburuk fluktuasi harga pangan dan merugikan pendapatan petani dan nelayan, yang pada akhirnya berdampak pada konsumsi domestik dan stabilitas pasar. Dengan meningkatnya frekuensi dan intensitas cuaca ekstrem, pemerintah perlu memperhatikan integrasi strategi mitigasi perubahan iklim dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional untuk memastikan keberlanjutan dan ketahanan proyek-proyek pembangunan serta kesejahteraan masyarakat secara umum.

2. Perubahan kritikal terhadap ekosistem

Perubahan kritikal terhadap ekosistem di Kabupaten Sinjai, seperti deforestasi, kerusakan habitat, dan penurunan biodiversitas, dapat memiliki dampak besar pada pembangunan nasional. Ekosistem yang terganggu dapat mengurangi kemampuan tanah untuk mendukung pertanian dan menyebabkan penurunan kualitas air, yang berdampak pada ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat. Jika ekosistem mengalami kerusakan parah, seperti kehilangan hutan mangrove atau terumbu karang, hal ini dapat mengakibatkan penurunan layanan ekosistem penting seperti perlindungan pesisir dan penyaringan air, yang mempengaruhi kualitas hidup serta infrastruktur yang bergantung pada ekosistem tersebut.

Dampak jangka panjang dari perubahan ekosistem ini juga dapat mempengaruhi kebijakan pembangunan nasional dengan meningkatkan risiko bencana alam, seperti banjir dan erosi tanah, serta memperburuk dampak perubahan iklim. Kerusakan lingkungan dapat mempengaruhi daya dukung wilayah, menghambat proyek-proyek pembangunan, dan meningkatkan biaya pemulihan serta adaptasi. Oleh karena itu, penting untuk memasukkan prinsip-prinsip keberlanjutan dan konservasi lingkungan dalam perencanaan dan implementasi proyek pembangunan nasional, guna menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

3. Biodiversity loss dan gangguan ekosistem

Kehilangan biodiversitas dan gangguan ekosistem di Kabupaten Sinjai memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan nasional dengan mengancam stabilitas ekosistem yang mendukung berbagai sektor ekonomi dan sosial. Biodiversitas yang menurun dapat mengurangi produktivitas sektor pertanian dan perikanan yang bergantung pada spesies lokal untuk keberhasilan panen dan tangkapan. Kehilangan spesies tanaman dan hewan yang penting dapat menyebabkan ketidakstabilan rantai makanan dan mengurangi kualitas tanah serta sumber daya air, yang pada gilirannya dapat mengganggu ketahanan pangan dan meningkatkan ketergantungan pada impor. Ini tidak hanya mempengaruhi perekonomian lokal tetapi juga mempengaruhi target-target pembangunan nasional yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya alam.

Gangguan ekosistem juga dapat berdampak pada pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam. Misalnya, kerusakan pada hutan mangrove dan terumbu karang dapat mengurangi perlindungan alami terhadap bencana alam seperti banjir dan erosi pesisir, mempengaruhi keberlanjutan proyek-proyek pembangunan di daerah pesisir. Selain itu, gangguan pada ekosistem dapat mempengaruhi kualitas lingkungan yang menjadi dasar bagi berbagai sektor industri dan aktivitas ekonomi, menambah biaya pemulihan dan perbaikan, serta mengurangi daya tarik investasi. Oleh karena itu, integrasi strategi konservasi biodiversitas dan pemulihan ekosistem dalam perencanaan pembangunan nasional sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan efisiensi proyek-proyek pembangunan serta melindungi kesejahteraan masyarakat dan ekosistem.

4. Krisis sumber daya alam

Krisis sumber daya alam di Kabupaten Sinjai dapat berdampak besar pada pembangunan nasional dengan mengganggu keberlanjutan berbagai sektor ekonomi dan memperburuk ketergantungan pada sumber daya eksternal. Penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya alam, seperti air, tanah, dan mineral, dapat menghambat produksi pertanian dan perikanan yang merupakan komponen kunci dalam ketahanan pangan dan ekonomi lokal. Krisis ini dapat menyebabkan peningkatan biaya produksi, penurunan hasil panen, dan konflik

dalam pengelolaan sumber daya, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi stabilitas harga pangan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Dampak ini berpotensi menghambat pencapaian target-target pembangunan nasional yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Selain itu, krisis sumber daya alam juga dapat mengganggu rencana pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek besar yang memerlukan bahan baku dan energi. Kekurangan sumber daya dapat menyebabkan penundaan atau pembatalan proyek, serta meningkatkan biaya dan risiko investasi. Hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional dan nasional, serta memperburuk ketergantungan pada sumber daya luar negeri. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan strategi manajemen sumber daya yang lebih baik, inovasi dalam penggunaan teknologi yang efisien, dan kebijakan perlindungan lingkungan yang dapat memastikan keberlanjutan sumber daya alam dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

5. Mis informasi dan disinformasi

Misinformasi dan disinformasi di Kabupaten Sinjai dapat memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan nasional dengan merusak kepercayaan publik dan menghambat implementasi kebijakan serta program pembangunan. Informasi yang salah atau menyesatkan tentang proyek-proyek pembangunan atau kebijakan pemerintah dapat menyebabkan ketidakpastian, penolakan, dan bahkan protes dari masyarakat. Misalnya, disinformasi mengenai dampak lingkungan suatu proyek dapat menimbulkan kekhawatiran yang tidak berdasar, sehingga menghambat pelaksanaan proyek tersebut atau menyebabkan penundaan. Ini dapat memperlambat kemajuan dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional dan mengurangi efisiensi alokasi sumber daya.

Di sisi lain, misinformasi juga dapat mempengaruhi keputusan investasi dan partisipasi publik. Ketika masyarakat terpapar informasi yang tidak akurat, masyarakat mungkin tidak mendukung inisiatif pembangunan atau tidak terlibat dalam program-program pemerintah, yang mengurangi efektivitas upaya pembangunan. Hal ini bisa memperburuk masalah ketimpangan sosial dan ekonomi, serta mengurangi efektivitas kebijakan nasional. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan transparansi, memperbaiki komunikasi publik, dan melakukan edukasi tentang

literasi media agar masyarakat dapat membedakan informasi yang valid dan tidak valid.

6. Dampak Buruk Teknologi AI

Dampak buruk teknologi AI di Kabupaten Sinjai dapat mengancam pembangunan nasional dengan menciptakan ketimpangan dan tantangan dalam dunia kerja. Implementasi teknologi AI yang tidak terkelola dengan baik bisa menyebabkan hilangnya lapangan pekerjaan, terutama bagi pekerja di sektor-sektor yang tidak siap beradaptasi dengan otomatisasi. Sebagai contoh,

pekerjaan manual dan rutinitas yang bisa digantikan oleh mesin AI mungkin berisiko kehilangan keberlanjutannya, sementara pekerja yang kurang terampil atau tidak memiliki akses untuk pelatihan ulang akan kesulitan mencari pekerjaan baru. Hal ini bisa memperburuk ketimpangan ekonomi dan sosial, mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan tantangan bagi kebijakan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu, dampak buruk teknologi AI juga dapat meliputi masalah privasi dan keamanan data. Penggunaan AI yang melibatkan pengumpulan dan analisis data pribadi dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan informasi atau pelanggaran privasi jika tidak diatur dengan ketat. Dalam konteks pembangunan nasional, kekhawatiran ini bisa mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi, serta menghambat partisipasi masyarakat dalam berbagai program pembangunan. Oleh karena itu, penting untuk mengimplementasikan regulasi yang ketat terkait penggunaan teknologi AI, memastikan transparansi, dan melindungi hak privasi serta keamanan data untuk memitigasi dampak negatif dan mendukung integrasi teknologi AI yang bermanfaat bagi pembangunan nasional.

7. Involuntary migration

Involuntary migration di Kabupaten Sinjai, yang sering disebabkan oleh bencana alam, perubahan iklim, atau konflik sosial, dapat memiliki dampak besar pada pembangunan nasional dengan menambah beban pada sistem infrastruktur dan pelayanan publik. Ketika masyarakat terpaksa pindah dari tempat tinggal masyarakat akibat kondisi yang tidak dapat dikendalikan, seperti banjir atau kekeringan, masyarakat sering kali membutuhkan tempat tinggal baru, layanan

kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Peningkatan kebutuhan ini dapat menekan kapasitas infrastruktur dan pelayanan yang ada, memerlukan alokasi tambahan sumber daya dan anggaran untuk memenuhi kebutuhan para migran. Ini dapat menghambat pelaksanaan proyek pembangunan nasional dan menambah tantangan dalam mencapai target-target pembangunan yang sudah ada.

Di sisi lain, involuntary migration juga dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi. Penambahan populasi migran ke daerah yang sudah padat atau kekurangan sumber daya dapat menyebabkan ketegangan sosial dan konflik antara penduduk lokal dan migran. Hal ini dapat memperburuk ketimpangan sosial dan meningkatkan ketidakstabilan ekonomi, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional dan nasional. Untuk mengatasi dampak ini, penting untuk merancang kebijakan yang mendukung integrasi migran secara efektif, termasuk program dukungan sosial dan ekonomi, serta memastikan bahwa perencanaan dan pengelolaan pembangunan memperhitungkan dinamika migrasi dan kebutuhan masyarakat yang berpindah.

8. Cyber insecurity

Cyber insecurity di Kabupaten Sinjai dapat memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan nasional dengan mengancam integritas sistem informasi dan layanan publik. Serangan siber, seperti peretasan atau malware, dapat mengakibatkan gangguan pada sistem administrasi pemerintah, layanan kesehatan, dan infrastruktur kritis lainnya. Ketika data penting terancam atau terkompromikan, hal ini dapat menyebabkan penundaan dalam pelaksanaan proyek pembangunan, mengganggu penyampaian layanan publik, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi. Dampak ini bisa memperlambat kemajuan dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional dan menambah biaya pemulihan serta penguatan sistem keamanan siber.

Di sisi lain, cyber insecurity juga dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dengan meningkatkan risiko kerugian finansial dan merusak reputasi bisnis. Serangan siber yang menargetkan sektor-sektor vital, seperti perbankan atau sektor industri, dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan dan mengurangi daya tarik investasi. Keamanan siber yang lemah dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan inovasi, serta mempengaruhi penciptaan lapangan

kerja. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi pemerintah dan sektor swasta di Kabupaten Sinjai untuk memperkuat kebijakan dan praktik keamanan siber, termasuk pelatihan untuk staf, penerapan teknologi perlindungan, dan strategi pemulihan yang efektif untuk meminimalkan risiko dan dampak dari serangan siber.

9. Polarisasi Sosial

Polarisasi sosial di Kabupaten Sinjai dapat berdampak signifikan terhadap pembangunan nasional dengan menghambat upaya integrasi sosial dan menciptakan ketegangan yang dapat memengaruhi stabilitas politik dan sosial. Ketika masyarakat terbagi menjadi kelompok-kelompok yang saling bertentangan berdasarkan identitas, pendapat politik, atau kepentingan ekonomi, hal ini dapat mengganggu kolaborasi dan partisipasi dalam program-program pembangunan. Konflik antar kelompok dapat menimbulkan ketidakstabilan dan mempersulit implementasi kebijakan serta proyek pembangunan yang membutuhkan dukungan dari berbagai segmen masyarakat. Polarisasi yang tinggi juga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi, yang pada akhirnya dapat memengaruhi efektivitas dan legitimasi kebijakan nasional.

Selain itu, polarisasi sosial dapat memperburuk ketimpangan ekonomi dan sosial dengan menciptakan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan peluang. Ketika kelompok tertentu merasa terpinggirkan atau tidak mendapatkan manfaat yang setara dari program pembangunan, hal ini dapat memperburuk ketidaksetaraan dan memperkuat perpecahan sosial. Dampak ini dapat mengurangi efektivitas program-program pembangunan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan secara merata. Untuk mengatasi isu ini, penting untuk mendorong dialog sosial, inklusi, dan partisipasi yang adil dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta mengimplementasikan kebijakan yang memperkuat kohesi sosial dan mengurangi ketegangan antar kelompok.

10. Polusi

Polusi di Kabupaten Sinjai dapat berdampak besar terhadap pembangunan nasional dengan mengganggu kesehatan masyarakat dan mengurangi kualitas hidup. Polusi udara, air, dan tanah dapat menyebabkan

berbagai masalah kesehatan, seperti penyakit pernapasan, gangguan sistem pencernaan, dan penyakit kulit. Dampak kesehatan ini tidak hanya menambah beban pada sistem kesehatan lokal, tetapi juga dapat menurunkan produktivitas tenaga kerja dan meningkatkan biaya pengobatan. Akibatnya, hal ini dapat mempengaruhi efisiensi ekonomi dan menciptakan tantangan tambahan dalam pencapaian target pembangunan nasional yang berfokus pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, polusi dapat merusak lingkungan dan infrastruktur, yang pada akhirnya memengaruhi proyek-proyek pembangunan dan keberlanjutan ekonomi. Kontaminasi air dan tanah dapat menurunkan kualitas sumber daya alam yang penting untuk pertanian dan perikanan, sementara polusi udara dapat memperburuk kerusakan infrastruktur dan memperpendek umur pakai fasilitas umum. Kerusakan ini dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan yang berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan dan pengelolaan sumber daya. Untuk memitigasi dampak ini, diperlukan implementasi regulasi lingkungan yang ketat, peningkatan teknologi bersih, dan promosi kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat serta industri, guna memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan ekosistem.

2.2 Isu Strategis Nasional

Isu-isu strategis nasional merupakan isu-isu yang memiliki potensi untuk menghambat pembangunan nasional sehingga perlu adanya antisipasi khusus dalam menghadapinya. Masih adanya isu-isu strategis nasional yang belum terselesaikan menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah untuk berusaha lebih keras dalam menyelesaikannya. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika isu strategis nasional belum terselesaikan dan muncul isu strategis baru yang tentu saja perlu adanya treatment khusus dalam mengantisipasinya. Isu jangka menengah Nasional yang tertuang dalam RPJMN Teknokratik dijabarkan sebagai berikut.

1 Dampak hilirisasi mulai terlihat positif bagi perekonomian Indonesia

Dampak positif dari hilirisasi terhadap perekonomian Indonesia mulai terlihat di Kabupaten Sinjai, dan ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional. Hilirisasi, yaitu proses pengolahan bahan mentah menjadi produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi, telah membuka peluang

baru dalam sektor industri dan menciptakan lapangan kerja di daerah tersebut. Di Sinjai, peningkatan investasi dalam fasilitas pengolahan pertanian dan perikanan lokal tidak hanya meningkatkan pendapatan petani dan nelayan tetapi juga mendorong pengembangan industri kecil dan menengah. Peningkatan produk olahan ini berkontribusi pada diversifikasi ekonomi dan penguatan struktur ekonomi lokal, serta memberikan dorongan positif bagi perekonomian nasional melalui ekspor produk bernilai tambah yang lebih tinggi.

Selain itu, hilirisasi berpotensi meningkatkan efisiensi dan daya saing industri lokal, yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam hal pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk lokal, Sinjai dapat menarik lebih banyak investasi dan memperluas pasar, baik domestik maupun internasional. Hal ini juga berdampak pada peningkatan pendapatan daerah dan pemerataan pembangunan, yang membantu mengurangi ketimpangan ekonomi dan mempercepat perkembangan infrastruktur. Oleh karena itu, keberhasilan hilirisasi di Sinjai mencerminkan potensi manfaat jangka panjang bagi perekonomian nasional dan memperkuat peran daerah dalam pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

2. Sinkronisasi Kebijakan Makro dan Sektoral

Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral di Kabupaten Sinjai memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan nasional dengan memastikan bahwa strategi dan rencana pembangunan di tingkat lokal sejalan dengan tujuan dan kebijakan nasional. Ketika kebijakan makro, seperti kebijakan ekonomi dan fiskal nasional, terintegrasi dengan kebijakan sektoral daerah, seperti pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam, dapat tercipta sinergi yang meningkatkan efektivitas implementasi program-program pembangunan. Di Sinjai, sinkronisasi ini dapat mengurangi tumpang tindih kebijakan, meminimalkan konflik kepentingan, dan memastikan bahwa alokasi sumber daya sesuai dengan prioritas nasional, sehingga mempercepat pencapaian target-target pembangunan dan meningkatkan hasil ekonomi lokal serta regional.

Di sisi lain, ketidaksinkronan antara kebijakan makro dan sektoral dapat menyebabkan pemborosan sumber daya, inefisiensi, dan penghambatan dalam

pelaksanaan proyek-proyek pembangunan. Misalnya, jika kebijakan nasional tidak sesuai dengan kebutuhan lokal atau sebaliknya, hal ini dapat mengakibatkan proyek yang tidak relevan atau tidak efektif, serta mengurangi dampak positif dari upaya pembangunan. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan. Dengan demikian, sinkronisasi yang baik dapat meningkatkan keberhasilan program pembangunan dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

3. Penerapan Standar Sustainability yang tinggi di level Global

Penerapan standar sustainability yang tinggi di level global di Kabupaten Sinjai dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pembangunan nasional dengan mendorong praktik-praktik ramah lingkungan dan keberlanjutan yang lebih baik. Implementasi standar ini, seperti standar lingkungan dan sosial internasional, mendorong perusahaan dan proyek di Sinjai untuk mengadopsi teknologi bersih, efisiensi energi, dan metode

pengelolaan sumber daya yang lebih berkelanjutan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas lingkungan lokal dengan mengurangi polusi dan kerusakan ekologis, tetapi juga meningkatkan daya tarik investasi dari perusahaan global yang mengutamakan keberlanjutan dalam operasionalnya. Penerapan standar ini mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional yang berfokus pada pembangunan yang ramah lingkungan dan pengelolaan sumber daya yang bijaksana.

Namun, penerapan standar sustainability yang tinggi juga dapat menimbulkan tantangan, seperti biaya tambahan untuk mematuhi regulasi yang ketat dan kebutuhan untuk teknologi serta pelatihan baru. Ini dapat menjadi beban bagi usaha kecil dan menengah di Kabupaten Sinjai yang mungkin kurang memiliki kapasitas untuk memenuhi standar tersebut. Untuk mengatasi hal ini, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk menyediakan dukungan teknis dan finansial yang diperlukan, serta menyusun kebijakan yang memfasilitasi transisi menuju praktik berkelanjutan tanpa membebani pelaku usaha secara berlebihan. Dengan pendekatan yang tepat, penerapan standar

sustainability dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan sejalan dengan visi pembangunan nasional yang lebih luas.

4. Transisi Energi untuk mendorong pemerataan

Transisi energi di Kabupaten Sinjai, yang melibatkan pergeseran dari sumber energi fosil ke energi terbarukan, dapat memberikan dampak positif signifikan terhadap pemerataan pembangunan nasional. Dengan mengadopsi teknologi energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, atau biomassa, Kabupaten Sinjai dapat meningkatkan akses energi yang bersih dan terjangkau bagi komunitas yang sebelumnya kurang terlayani. Hal ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil yang sering kali mahal dan tidak stabil, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru melalui pengembangan proyek energi lokal. Peningkatan akses energi yang terbarukan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi lokal, mendorong investasi dalam infrastruktur, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat, yang mendukung pencapaian tujuan pemerataan pembangunan di tingkat nasional.

Namun, transisi energi juga menghadapi tantangan, seperti kebutuhan investasi awal yang tinggi dan kebutuhan untuk pelatihan serta pengembangan kapasitas lokal. Kabupaten Sinjai perlu menghadapi biaya instalasi teknologi baru dan memastikan bahwa infrastruktur serta keahlian lokal siap untuk mendukung transisi ini. Selain itu, penting untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung, termasuk insentif untuk investasi dalam energi terbarukan dan program pelatihan untuk tenaga kerja. Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan investasi yang memadai, transisi energi dapat membantu mengurangi ketimpangan regional dan mempercepat distribusi manfaat pembangunan secara lebih merata di seluruh wilayah, termasuk daerah-daerah yang lebih terpencil atau kurang berkembang.

5. Aging Population negara maju

Meskipun Kabupaten Sinjai adalah daerah yang secara relatif masih berkembang, dampak dari aging population (penuaan populasi) di negara maju dapat memiliki implikasi tidak langsung yang signifikan terhadap pembangunan nasional Indonesia, termasuk di Sinjai. Negara maju dengan populasi yang menua cenderung mengalami penurunan tenaga kerja produktif dan peningkatan kebutuhan akan layanan kesehatan dan sosial. Hal ini dapat mempengaruhi pasar

global dan ekonomi Indonesia, termasuk Kabupaten Sinjai, karena permintaan terhadap produk dan layanan tertentu dapat berubah. Misalnya, negara-negara maju mungkin mengurangi impor barang-barang konsumen atau bahan mentah dari negara berkembang, yang dapat berdampak pada sektor-sektor ekonomi di Sinjai yang bergantung pada ekspor.

Selain itu, penuaan populasi di negara maju dapat menciptakan peluang bagi Kabupaten Sinjai dalam bentuk investasi dan kerjasama internasional. Negara-negara dengan populasi menua mungkin mencari solusi dan investasi di sektor-sektor seperti perawatan kesehatan, teknologi asistif, dan produk yang mendukung gaya hidup senior. Kabupaten Sinjai dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan berfokus pada pengembangan industri terkait, seperti perawatan kesehatan dan produk-produk yang ramah usia, untuk menarik investasi dan kerjasama internasional. Dengan demikian, sementara aging population di negara maju dapat membawa tantangan, ia juga menawarkan peluang bagi Kabupaten Sinjai untuk beradaptasi dan mengembangkan sektor-sektor yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan kontribusi pada pembangunan nasional secara lebih luas.

2.3. Isu Strategis Daerah

2.3.1. Isu Strategis Provinsi Sulawesi Selatan

1. Perubahan Iklim dan Risiko Bencana.

Perubahan iklim ditandai oleh pemanasan bumi yang terjadi secara global serta kondisi cuaca yang tidak terprediksi. Pada suatu kondisi terjadi El-Nino, kondisi kekeringan yang berkepanjangan tidak hanya menyebabkan gangguan terhadap produksi pertanian, tetapi membawa krisis air minum, hingga gangguan suplai listrik. Pada kondisi yang terjadi sebaliknya La-Nina, kondisi hujan yang berkepanjangan tidak hanya menyebabkan genangan pertanaman sehingga produksi pertanian menurun, tetapi lebih dari itu ia menyebabkan bencana banjir di pedesaan hingga perkotaan.

Perubahan iklim sangat berdampak di kehidupan masyarakat pada semua daerah, termasuk Sulawesi Selatan sebagai salah satu sentra produksi pangan di Indonesia. Dampaknya tidak hanya mengancam sistem nafkah rumah tangga produk tersebut, tetapi juga mengancam suplai pangan bagi kebutuhan masyarakat secara luas. Di sisi lain, bencana dalam bentuk banjir, banjir bandang,

angin puting beliung, abrasi pantai, juga membawa kerentanan pada berbagai aspek kehidupan.

Tingkat risiko bencana di Sulawesi Selatan dengan kelas risiko tinggi adalah banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan lahan, kekeringan dan tanah longsor. Selain itu, perubahan iklim juga mendorong peningkatan kasus penyakit yang ditularkan oleh vector melalui air dan peningkatan suhu sehingga diperlukan langkah preventif bagi pemerintah dan masyarakat untuk meminimalkan dampak dan resiko tersebut. Oleh karena itu,

penguatan kapasitas pada level lokal hingga daerah dalam beradaptasi dan memitigasi dampak perubahan iklim dan kebencanaan lainnya yang inklusif merupakan keniscayaan.

2. Pengelolaan Pusat-pusat Pertumbuhan

Kebijakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mengatasi ketimpangan antar wilayah dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan baru di luar pulau jawa dan khususnya pada Kawasan Indonesia Timur (KIT) merupakan peluang besar bagi pembangunan dan kemajuan daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan ditetapkan sejumlah Kawasan Strategis Nasional (KSN) sebagai pusat-pusat pertumbuhan baru akan melahirkan sejumlah peluang baru dan berkelanjutan bagi pembangunan Sulawesi Selatan dalam jangka panjang.

Perekonomian Sulawesi Selatan diharapkan akan semakin memainkan peran penting dalam akselerasi dan penguatan perekonomian nasional Indonesia. Magnetnya, pengelolaan sumber daya alam untuk peningkatan nilai tambah ekonomi dan dengan dukungan iklim investasi yang ditandai dengan kemudahan investasi pada pengelolaan sumber daya alam, mulai dari hulu hingga hilir akan menempatkan Sulawesi Selatan sebagai daerah paling strategis dan siap untuk memanfaatkan segenap peluang yang tersedia. Percepatan realisasi pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) akan memberi peluang dan tantangan baru bagi Sulawesi Selatan dengan *endowment factor* dan letak geografisnya akan menjadi pusat pertumbuhan baru perekonomian nasional Indonesia.

Perekonomian wilayah Sulawesi Selatan memiliki dua momentum penting yang harus dimanfaatkan guna menciptakan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi wilayah yang semakin inklusif. Pertama, momentum percepatan realisasi investasi pengelolaan sumber daya alam untuk hilirisasi industri. Kedua, momentum pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) dan sejumlah Kawasan Strategis Nasional (KSN) sebagai pusat pertumbuhan baru, menempatkan Sulawesi Selatan yang secara geografis paling strategis untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru Indonesia, bukan hanya untuk IKN & KSN terkait, bahkan harus menjadi solusi untuk mengatasi ketimpangan wilayah, Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Pembangunan IKN, dan pengembangan KSN sebagai salah satu pusat pertumbuhan baru, harus mampu dimanfaatkan oleh Sulawesi Selatan, bukan hanya lahirnya KSN yang sejenis di Sulawesi Selatan. Secara berkesinambungan dalam jangka panjang akan membuka peluang bagi seluruh daerah di Sulawesi Selatan untuk tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan baru melalui pengembangan dan pengelolaan sumberdaya unggulan daerah sebagai dampak *backward and forward linkage* dari pembangunan IKN dan pusat-pusat pertumbuhan KSN tersebut.

Selain itu, perlu dioptimalkan pengembangan wilayah Sulawesi Selatan berdasarkan pendekatan koridor pertumbuhan yang diarahkan pada peran kabupaten/kota sebagai pusat-pusat pertumbuhan dengan basis keunggulan wilayah yang berperan sebagai pusat produksi, pusat pengolahan sumber daya alam; pusat perdagangan dan industri kepelabuhanan; serta pusat pengembangan jasa pariwisata, pusat pelayanan jasa dan perdagangan. Perlu dioptimalkan pula

pengembangan wilayah berdasarkan koridor pemerataan yang diarahkan pada fungsi kabupaten sebagai kawasan penyangga bagi pusat pertumbuhan yang berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal.

Pengembangan wilayah Sulawesi Selatan meliputi poros pengembangan Selatan-Selatan, Poros pengembangan Selatan – Bagian Tengah, Poros pengembangan Selatan – Utara, Poros pengembangan Utara – Utara, dan Poros Pengembangan Utara – bagian Tengah, menjadi tantangan sekaligus peluang tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan yang lebih merata di Sulawesi Selatan.

Poros pengembangan Selatan – Selatan yang membentang dari Kawasan Perkotaan Mamminasata yang berperan sebagai pusat pertumbuhan nasional sampai Kawasan Bulukumba yang merupakan bagian dari Kawasan Andalan Bulukumba-Watampone dan Kawasan Andalan Laut Singkarrang-Takabonerate sebagai pusat pertumbuhan ekonomi local yang berperan sebagai kawasan penyangga pusat pertumbuhan dengan sector unggulan pariwisata, industry, pertanian, perikanan, perdagangan, dan pertambangan serta agro dan mina industri. Kawasan ini berperan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) sekaligus Pusat Kegiatan Nasional Mamminasata; sebagai bagian dari Daerah Pariwisata Prioritas (DPP) Selayar-Makassar-Toraja dan sebagai Kawasan Industri Prioritas Nasional yaitu KI Sinjai dan KI Takalar;

Poros pengembangan Selatan – Bagian Tengah yang menghubungkan Kawasan Bulukumba – Kawasan Watampone yang merupakan Kawasan Andalan Bulukumba-Watampone dan bagian dari Kawasan Andalan Laut Teluk Bone sebagai kawasan penyangga pusat pertumbuhan yang berperan sebagai pusat produksi pertanian dan perikanan yang didukung oleh industry pengolahan sumberdaya pertanian dan perikanan dengan sector unggulan perikanan, pertambangan, pertanian, perkebunan, pariwisata, serta agro dan mina industri;

Poros pengembangan Selatan – Utara yang menghubungkan Kawasan Perkotaan Mamminasata dengan Kawasan Perkotaan Parepare, sebagai pusat pertumbuhan nasional yang juga merupakan bagian dari Kawasan Andalan Laut Kapoposang dan Kawasan Andalan Laut Selat Makassar yang akan berperan sebagai pendukung Ibukota Nusantara (IKN) dengan sector unggulan pariwisata, industry, pertanian, perikanan, pertambangan, agro dan mina industry serta minyak dan gas bumi. Kawasan ini berperan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) sekaligus Pusat Kegiatan Nasional Mamminasata; KSN Parepare; sebagai bagian dari Daerah Pariwisata Prioritas (DPP) Selayar-Makassar-Toraja dan sebagai bagian dari Kawasan Geopark Maros-Pangkep. Selain itu, kawasan ini juga ditopang oleh Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang menjadi aset perhubungan penting di Kawasan Timur Indonesia sebagai pusat distribusi, perdagangan dan pelayaran internasional;

Poros pengembangan Utara – Utara yang menghubungkan Kawasan Parepare sebagai dengan Kawasan Palopo, sebagai pusat pertumbuhan nasional

yang juga merupakan bagian dari Kawasan Andalan Laut Selat Makassar dengan sector unggulan pariwisata, industry, pertanian, perikanan, pertambangan, agro dan mina industry serta minyak dan gas bumi. Kawasan ini berperan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) Parepare dan Kawasan Strategis Nasional Sorowako serta KSN Toraja yang juga berperan sebagai Kawasan Strategis, Pariwisata Nasional (KSPN) Toraja sekaligus bagian dari Daerah Pariwisata Prioritas (DPP) Selayar-Makassar-Toraja; dan

Poros Pengembangan Utara – bagian Tengah yang menghubungkan Kawasan Palopo sebagai pusat pertumbuhan dengan Kawasan Watampone, sebagai kawasan penyangga pusat pertumbuhan yang juga merupakan bagian dari Kawasan Andalan Laut Teluk Bone dengan sector unggulan perikanan, pertambangan, pertanian, perkebunan, pariwisata, serta agro dan mina industri.

3. Sistem Logistik dan Pemenuhan Pangan Nasional.

Kebijakan nasional dalam penguatan sistem logistik nasional, salah satunya ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan pangan secara nasional yang terjangkau untuk semua wilayah. Fokus pemenuhan pangan nasional, Sulawesi Selatan sebagai salah sentra produk pangan nasional memiliki peran strategis dalam mewujudkan terciptanya swasembada pangan nasional. Dalam sistem logistik nasional, pemenuhan kebutuhan pangan yang menjangkau seluruh wilayah mendorong penggunaan sistem transportasi dan pergudangan akan sangat penting untuk mendekatkan daerah-daerah penghasil pangan dengan pusat-pusat konsumsi pangan. Menghubungkan pusat-pusat produksi pangan tertentu di Kawasan Timur Indonesia (KTI) untuk cepat terjangkau pada wilayah lainnya, misalnya pada Kawasan Barat Indonesia (KBI). Dalam konteks ini, Sulawesi Selatan memiliki posisi strategis, selain sebagai daerah penghasil utama pangan nasional, juga menjadi penghubung dan lalu lintas utama transportasi logistik yang menjangkau semua wilayah di Indonesia. Artinya, secara geografis dan substansial Sulawesi Selatan sangat strategis dan penting dalam pengembangan wilayah di Indonesia, sebagai pintu gerbang utama Indonesia di Kawasan Timur serta penghubung dan lalu lintas utama pelayaran dan penerbangan antara KTI dan KBI, ada begitu banyak potensi dan peluang yang dapat dimanfaatkan sehingga Sulawesi Selatan tidak hanya berkontribusi

secara nasional, tetapi juga mampu mendorong kemajuan wilayahnya untuk terciptanya masyarakat Sulawesi Selatan yang sejahtera.

4. Pemanfaatan Bonus Demografi.

Sulawesi Selatan ke depan akan mengalami perubahan demografi yang cepat, di mana jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) terus meningkat dan mencapai puncak pada sekitar tahun 2030. Dalam periode tersebut, Sulawesi Selatan menjadi salah satu wilayah dengan angkatan kerja yang banyak. Namun pada saat yang sama, angka ketergantungan mengalami peningkatan karena jumlah penduduk usia tua (usia 65+ tahun) meningkat. Kondisi demografi tersebut memberi kesempatan yang terbuka untuk mengoptimalkan penduduk usia produktif sebagai pendorong utama pembangunan dan memanfaatkan usia produktif secara efektif. Bonus demografi akan semakin berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan apabila kualitas, produktivitas, dan inovasi usia produktif terus ditingkatkan mulai periode awal pembangunan jangka panjang ke depan.

Proporsi demografi yang mengarah pada bertambahnya kelompok penduduk usia tua (*aging population*) dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan berimplikasi pada tantangan untuk mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam kewajiban perlindungan sosial, akselerasi pemenuhan hak anak, pembukaan lapangan kerja, pemberdayaan dan perlindungan lansia, tanpa mengabaikan

penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Transisi demografi sangat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat, mulai dari meningkatnya mobilitas penduduk, urbanisasi yang bermuara pada aglomerasi penduduk di perkotaan, transisi epidemiologi, pergeseran nilai yang berpotensi menurunkan kualitas ketahanan keluarga, rentannya perlindungan terhadap anak. Dibutuhkan intervensi dari hulu sampai hilir untuk mengoptimalkan bonus demografi agar dapat mencetak generasi digital dengan talenta dan daya saing global, namun tetap menjunjung nilai-nilai lokal dan budaya masyarakat yang positif.

5. Ekosistem Transformasi Digital.

Perkembangan teknologi telah mengubah hal-hal fundamental kehidupan manusia pada berbagai bidang. Pemanfaatan teknologi digital dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Namun, inovasi digital juga berisiko menimbulkan disrupsi serta memunculkan tantangan baru bagi pihak-pihak yang tidak siap. Disrupsi teknologi dan transformasi digital tersebut akan membawa peluang sekaligus ancaman dalam pembangunan jangka panjang daerah ke depan.

Dalam perekonomian, perkembangan teknologi mendorong berkembangnya pertanian presisi berbasis *drone* dan satelit untuk pemetaan lahan, aplikasi mobil untuk akses informasi cuaca dan harga komoditi, ataupun perkembangan *e-commerce* produk pertanian. Perkembangan yang dipengaruhi teknologi digital seperti itu akan berlaku pada industri manufaktur, dunia perbankan, layanan kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, sistem pemerintahan, dan sebagainya. Transformasi digital merupakan peluang bagi individu dan kelompok masyarakat yang cepat beradaptasi dengannya, sebaliknya akan menjadi ancaman bagi individu ataupun kelompok yang tidak bisa mengakses dan memanfaatkannya. Diperlukan kebijakan pemerintah daerah untuk meminimalkan risiko yang ditimbulkan bagi kegiatan ekonomi masyarakat secara keseluruhan, dan pada saat yang sama mengoptimalkan tantangan dan peluang dalam mendorong penciptaan nilai tambah yang lebih besar dari transformasi digital yang sedang dan terus berlangsung.

6. Daya Dukung DayaTampung dan Kerusakan Lingkungan.

Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup salah satunya akibat luasan tutupan hutan yang terus menurun. Hal ini diindikasikan dengan menurunnya distribusi luas jasa lingkungan antara lain jasa lingkungan penyedia air dengan kategori rendah - sangat rendah hingga mencapai 65,32 persen. Meningkatnya luas jasa lingkungan pengaturan mitigasi bencana banjir kategori rendah-sangat rendah menjadi sebesar 67,01 persen. Penurunan lingkungan pendukung habitat dan keanekaragaman hayati menurun sebesar 54,58 persen. Selain itu, daya dukung air menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Walau secara umum sebagian besar wilayah Sulawesi Selatan dalam kategori belum terlampaui, tetapi seluruh wilayah yang masuk kategori

terlampaui dan melewati ambang batas antara ketersediaan dan kebutuhan tersebut adalah wilayah dengan jumlah penduduk terbesar dan merupakan pusat-pusat aktivitas wilayah.

Penurunan kualitas lingkungan hidup di Sulawesi Selatan juga ditandai dengan tingginya timbulan sampah dan tinja. Tingginya timbulan sampah disebabkan oleh masih rendahnya pemilahan sejak dari sumber, belum seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah, serta belum terpadunya pengelolaan sampah. Sementara timbulan tinja disebabkan belum

optimalnya eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) melalui perubahan perilaku masyarakat; belum meratanya penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman; dan belum optimalnya pemenuhan penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T), khususnya di wilayah perkotaan. Kondisi ini merupakan tantangan yang tidak ringan, dan harus menjadi prioritas untuk diatasi dalam pembangunan jangka panjang seluruh daerah di Sulawesi Selatan.

7. *Hilirisasi.*

Hilirisasi sumber daya alam bermakna sebagai upaya dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya alam melalui pengolahan dalam suatu industri manufaktur serta mewujudkan rantai nilai yang berkeadilan yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, Sulawesi Selatan merupakan provinsi memiliki potensi sumber daya alam yang beragam dan tersebar pada setiap wilayah, sumber daya alam tersebut berasal dari sektor unggulan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan dan energi terbarukan. Ketersediaan sumber daya alam serta posisi kuat Sulawesi Selatan sebagai pintu gerbang Indonesia Timur dan sebagai penyangga pangan IKN dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang kondusif dalam jangka panjang.

Potensi sumber daya alam yang tersedia akan menjadikan Sulawesi Selatan sebagai tujuan investasi yang potensial terutama dalam hilirisasi komoditas unggulan. Kondisi tersebut memberikan tantangan terhadap penyediaan infrastruktur dan kemudahan investasi dalam mendorong hilirisasi, serta dukungan pembinaan dan permodalan bagi pengembangan hilirisasi oleh industri pengolahan kecil ditingkat masyarakat, koperasi dan UMKM. Akan tetapi, di sisi

lain, beragamnya potensi di masing-masing daerah untuk dilakukan peningkatan nilai tambah oleh masyarakat menjadi potensi yang baik agar dapat mendiversifikasi sumber penghidupan masyarakat dan sektor unggulan daerah.

Dukungan pemerintah daerah di Sulawesi Selatan terhadap kebijakan nasional dan tuntutan peningkatan nilai tambah ekonomi melalui kebijakan hilirisasi ini bukan hanya sekedar pada ketersediaan SDA, tetapi juga penyiapan daya dukung sumber daya manusia serta sarana prasarana dan infrastruktur wilayahnya. Sulawesi Selatan sejatinya mengambil peran sebagai pusat pengembangan SDM Indonesia dalam mendukung hilirisasi tersebut. Pengembangan SDM menjadi fokus perhatian pada setiap daerah dengan berbasis pada pemenuhan kompetensi sesuai dengan potensi SDA yang akan dikelola pada setiap daerah. Pemenuhan kebutuhan kompetensi SDM untuk pengembangan IPTEKIN harus sejalan dengan potensi SDA yang dimiliki setiap daerah di Sulawesi Selatan.

8. *Penguatan Kelembagaan dan Kemandirian Fiskal*

Kelembagaan adalah aturan main di dalam suatu tujuan bersama yang dianggap penting secara jangka panjang, baik melalui suatu aransemen organisasi maupun tanpa adanya struktur organisasi. Salah satu tantangan kelembagaan dalam pembangunan adalah bagaimana mewujudkan prinsip pemerintahan yang baik yakni efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan ketaatan hukum sebagai perilaku terpola di kalangan ASN. Dalam konteks ini, struktur birokrasi perlu semakin mendorong pelebagaan prinsip-prinsip tersebut

sehingga penyelenggaraan pelayan public semakin memuaskan masyarakat. Selain itu, penguatan masyarakat sipil diperlukan agar partisipasi mereka dalam program pemerintah semakin signifikan serta dapat mendorong keberdayaan masyarakat secara umum untuk pemecahan masalah dalam lokalitasnya.

Tantangan lain adalah kemandirian fiskal. Sebagian besar pembiayaan untuk pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat masih bergantung pada alokasi dana dari pusat. Pendapatan asli daerah belum mampu memenuhi kebutuhan pemerintah daerah. Karena itu, aktivitas perekonomian daerah harus semakin didorong melalui *autonomous investment*

maupun *induced investment* sehingga sumber pendapatan daerah dalam bentuk pajak dan retribusi dapat dimaksimalkan. Selain itu, pemanfaatan anggaran belanja daerah perlu dikelola dengan baik sehingga lebih efektif dalam menstimulasi perekonomian daerah serta memperbaiki kualitas pelayanan publik.

2.3.2 Isu Strategis Kabupaten Sinjai

Isu strategis dirumuskan berdasarkan pada permasalahan pembangunan yang perumusannya mempertimbangkan permasalahan masing – masing Perangkat Daerah, termasuk didalamnya telaah tentang norma dan standar, juga proses dan prosedur yang harus diikuti serta kriteria (terutama mengacu dalam lampiran permendagri 86 Tahun 2017), serta memperhatikan dokumen rencana pembangunan lainnya. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, dan isu strategi satuan perangkat Daerah.

2.3.2.1. Pemanfaatan Bonus Demografi

Fenomena Bonus demografi yaitu kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif (15- 64 tahun keatas) lebih besar dibanding penduduk usia tidak produktif (kurang dari 15 tahun dan 64 tahun keatas). Saat ini dunia termasuk Indonesia sedang memasuki masa bonus demografi dan kondisi ini memberikan dampak baik bagi ekonomi berupa percepatan pertumbuhan ekonomi, karena menurunnya rasio ketergantungan. Bonus demografi menjadi peluang strategis bagi daerah untuk melakukan percepatan pembangunan, karena tersedianya sumber daya manusia produktif. Agar bonus demografi menjadi peluang yang menguntungkan di daerah, diperlukan upaya serius semua pihak terutama yang menyangkut peningkatan kualitas SDM, penyiapan tenaga kerja berkualitas dan pembangunan kependudukan. Ketidakmampuan menyiapkan lapangan kerja dan peningkatan kualitas SDM seperti pendidikan yang tinggi dan pelayanan kesehatan dan gizi yang memadai, maka akan terjadi permasalahan, yaitu terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban daerah. Jumlah penduduk yang besar pada masa bonus demografi tentu akan meningkatkan penawaran angkatan kerja di Indonesia. Dan penawaran angkatan kerja dalam jumlah yang besar akan berpotensi meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Menyikapi fenomena bonus demografi ini Kabupaten Sinjai harus bisa memanfaatkan dengan baik peluang ini dengan Menyusun strategi untuk

mengembangkan SDM tersedia sehingga dapat berdaya saing, menyiapkan lapangan kerja melalui pengembangan UMKM dan sektor – sektor perekonomian lain yang dapat membuka peluang kerja.

2.3.2.2. Berkembangnya Ekonomi yang berkelanjutan

Ekonomi berkelanjutan merupakan kegiatan ekonomi yang berfokus pada kesejahteraan bersama yang menguntungkan bagi produsen dan konsumen dengan tidak hanya mengejar pada pertumbuhan ekonomi saja. Konsep ekonomi berkelanjutan menekankan pada keseimbangan aspek 3P yakni profit (keuntungan ekonomi), people (orang), dan planet (lingkungan hidup) sehingga terdapat *win-win opportunities* dalam ekonomi dan lingkungan pada proses produksi. Dalam prosesnya, penggunaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan menjadi penting untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Hal ini akan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat dalam konteks meningkatkan lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup. Merujuk pada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tujuan dari berkelanjutan adalah pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berkelanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan dan menjamin keadilan serta terlaksananya tata kelola yang menjaga kualitas hidup. Krusialnya ekonomi berkelanjutan dapat diamati melalui dua dampak utama yang dihasilkan oleh pertumbuhan ekonomi yang selama ini berkembang yakni penurunan kualitas lingkungan hidup yang menyebabkan maraknya bencana alam yang berdampak pula pada terganggunya aktivitas industri dan perekonomian secara masif. Kedua, kegiatan ekonomi yang hanya berfokus pada keuntungan berdampak pada tingkat kesenjangan sosial yang melebar karena pertumbuhan ekonomi tidak diiringi dengan aspek pemerataan ekonomi. Tantangan dalam pelaksanaan pengembangan ekonomi berkelanjutan ini adalah bagaimana pemerintah dapat menyeimbangkan pembangunan ekonomi namun tetap harus memperhatikan kelestarian lingkungan sekitarnya utamanya kelestarian hutan yang kita miliki. Dalam pelaksanaan ekonomi berkelanjutan ini juga tetap memperhatikan pentingnya untuk menciptakan kesejahteraan yang inklusif dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

2.3.2.3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Indeks kepuasan masyarakat merupakan salah satu indikator dalam menentukan suatu pelayanan yang telah sesuai standar operasional prosedur, juga menjadi indikator untuk penilaian tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk pelayanan kepada masyarakat diukur dari tingkat kepuasan masyarakat penerima manfaat pelayanan. Di tahun 2022 capaian kinerja pelayanan pemerintah Kabupaten Sinjai meningkat menjadi 82,81.

Pelayanan umum juga ditingkatkan melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). SPBE dilakukan untuk memberikan layanan kepada masyarakat agar lebih mudah mendapatkan pelayanan. Indeks SPBE Kabupaten Sinjai menunjukkan peningkatan pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Indeks SPBE Kabupaten Sinjai tahun 2022 sebesar 2,07 atau kategori cukup dan tahun 2023 sebesar 2,67 atau kategori Baik.

Berkembangnya pelayanan umum strategis yang menempatkan Sinjai sebagai sentra pelayanan utamanya pelayanan umum kepada Masyarakat dan khususnya di destinasi – destinasi wisata.

2.3.2.4. Meningkatnya taraf hidup masyarakat tidak mampu

Trend perkembangan jumlah penduduk miskin mengalami penurunan selama periode 2022-2023. Pada tahun 2023 angka kemiskinan sebesar 8,55%, menurun dari 2022 sebesar 8,8%. Meskipun peningkatan penurunan kemiskinan di Sinjai telah terjadi pertahun namun penurunan kemiskinan di Kabupaten Sinjai masih jauh dari target RPJMD periode sebelumnya

2.3.2.5. Perubahan Iklim dan Kebencanaan

Isu perubahan iklim global menjadi isu nasional yang harus dihadapi semua negara di dunia. Perubahan iklim merupakan suatu perubahan jangka panjang dalam pola cuaca tertentu di suatu wilayah. Perubahan iklim ini sendiri sering dikaitkan dengan pemanasan global. Pemanasan global adalah kenaikan pada suhu Bumi yang kemudian berlangsung selama satu dekade atau lebih dimana salah satu penyebabnya adalah perubahan iklim. Penyebab terjadinya perubahan iklim ini dipengaruhi oleh efek rumah kaca, peningkatan emisi, pemanasan global dan perubahan orbit bumi. Dampak perubahan iklim ini juga telah dirasakan Kabupaten Sinjai. Berupa musim kemarau panjang yang terjadi menyebabkan kerusakan lahan pertanian. Dari data Dinas Tanaman Pangan,

Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Sinjai, setidaknya ada ratusan hektar tanaman padi yang rusak, Kerusakan lahan pertanian tersebut dipicu karena debit air sungai berkurang yang menyebabkan saluran irigasi yang dialirkan ke sawah juga mengalami penurunan serta adanya pekerjaan rehabilitasi irigasi yang sementara berjalan sehingga penyaluran air ke persawahan tidak maksimal. Dampaknya tidak hanya mengancam sistem nafkah rumah tangga produk tersebut, tetapi juga mengancam suplai pangan bagi kebutuhan masyarakat secara luas.

Pencemaran lingkungan juga memberi sumbangan besar dalam perubahan iklim secara global baik berupa efek rumah kaca maupun meningkatnya emisi serta penggunaan bahan bakar fosil. Olehnya itu perlu dilaksanakan antisipasi agar kejadian tidak semakin meningkat dan meluas. Salah satu upaya untuk mencegah semakin luasnya pemanasan globab maupun pencemaran yaitu melalui menjaga kelestarian hutan mempertahankan lahan saeah berkelanjutan, penyediaan instalasi pengolahan limbah dan penyediaan infrastruktur penyediaan infrastruktur air minum yang merata dan mudah diakses. Juga melalui pengelolaan lingkungan yang lebih baik dengan menjaga kualitas sungai, dan usaha untuk mengurangi timbulan sampah.

Di sisi lain, bencana dalam bentuk banjir, banjir bandang, angin puting beliung, abrasi pantai, juga membawa kerentanan pada berbagai aspek kehidupan. Kabupaten Sinjai masuk dalam kabuipaten yang rentan terhadap bencana alam seperti tanah longsor, banjir, angin putting beliung dan abrasi Pantai. Karena itu, penguatan kapasitas pada level lokal hingga daerah dalam beradaptasi dan memitigasi dampak perubahan iklim dan kebencanaan lainnya. Penanganan bencana ini dilaksanakan dengan menyiapkan desa tanggap bencana, Masyarakat sadar bencana sama penguatan aparat untuk penanganan bencana. Bukan hanya itu dilaksanakan juga Upaya pencegahan melalui pengerukan saluran air perkotaan, sosialisasi buang sampah pada tempatnya utamanya ditempat umum, Pembangunan infrastruktur tahan bencana dan peningkatan pemahaman Masyarakat agar lebih peduli lingkungan serta tanggap bencana.

2.3.2.6. Disrupsi Teknologi dan tranasformasi Digital

Faktor utama pendorong transformasi digital daam pemerintahan adalah pandemic covid 19,dimana hampir semua sektor baik pendidikan ,pemerintahan

dan ekonomi dituntut untuk memaksimalkan penggunaan teknologi infomaso dan komunikasi untuk menjalankan pekerjaan ,hingga apada era digital semua sektor dituntut untuk meningkatkan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi modern untuk memudahkan banyak orang, hal lain yang mendukung terciptanya transformasi digital pemda harus menanamkan dan memiliki pola pikir dan budaya berbasis digital.

2.3.2.7. Penguatan Kelembagaan dan kemandirian Fiskal

Dari sisi pemerataan ketimbangan antar daerah dapat memberikan gambaran belum optimalnya tingkat pemerintah daerah di Indonesia . Indikator sederhana untuk melihat ketimpangan atau kesenjangan antardaerah dapat ditunjukkan dengan perbandingan pertumbuhan ekonomi daerah yang memberikan kontribusi pada produk domestik bruto regional Bruto (PDRB), sedangkan Indeks Kemandirian Daerah yang termuat dalam Laporan Hasil Reviu atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah, terakhir dirilis pada Mei 2021 untuk hasil tahun 2020 menunjukkan bahwa sebagian besar pemda masuk dalam kategori “Belum Mandiri”. Termaksud kabupaten Sinjai , Kinerja fiskal daerah terlihat dari banyaknya daerah mengalami kontraksi belanja daerah dan di tahun 2022 yang terjadi secara merata di seluruh wilayah Indonesia menunjukkan sebagian besar mengalami pertumbuhan tidak positif untuk belanja daerah.

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi

Visi dalam RPJMD Tahun 2025-2029 diartikan sebagai kondisi yang hendak diwujudkan selama periode 2025-2029. Rumusan visi ini dijabarkan dari visi Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2029. Adapun rumusan visi RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2025-2029 adalah:

“Sinjai Maju, Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan”

Penjelasan dari rumusan visi ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Sinjai 2025-2029

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Sinjai Maju, Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan	Maju	Terlaksananya pembangunan dilandasi oleh keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik didukung sumberdaya manusia yang unggul melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata sehingga mampu menyesuaikan tuntutan perkembangan zaman, meningkatkan pelayanan publik yang didukung dengan tatakelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi hasil riset dan inovasi untuk meningkatkan daya saing daerah.
	Sejahtera	Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan penurunan angka kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, mewujudkan ketahanan pangan dan daya saing produk daerah untuk

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
		memperluas lapangan kerja melalui pengembangan potensi daerah berbasis agrobisnis, agroindustri, pariwisata, pemberdayaan UMKM dan ramah investasi serta terwujudnya ketahanan keluarga, sosial budaya berlandaskan nilai religius dan kearifan lokal .
	Mandiri	Terwujudnya pelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan kehutanan secara berkelanjutan dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penurunan emisi gas rumah kaca yang dilakukan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang bertanggung jawab.
	Berkeadilan	Terwujudnya pemerataan infrastruktur yang berkualitas melalui pembangunan jalan dan jembatan, energi, pemenuhan sarana air bersih dan sanitasi layak serta transportasi yang memadai dengan tetap selalu meningkatkan ketaatan hukum untuk menciptakan keamanan dan ketertiban serta mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana.

3.2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut maka upaya umum yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan misi sebagai berikut:

- (1) Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
- (2) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel dengan penerapan teknologi informasi dan inovasi daerah;
- (3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan potensi daerah berbasis agrobisnis, agroindustri, pariwisata, pemberdayaan UMKM dan ramah investasi;

- (4) Mewujudkan ketahanan keluarga, sosial budaya berlandaskan nilai religius dan kearifan lokal;
- (5) Melestarikan sumber daya alam, lingkungan hidup dan kehutanan secara berkelanjutan;
- (6) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang merata dan berkeadilan;
- (7) Mewujudkan masyarakat yang taat hukum, tertib, aman, tangguh bencana dan demokrasi berkeadilan.

Penjelasan dari setiap misi dapat dilihat pada tabel 3.2. :

Tabel 3.2.
Penjelasan Misi RPJMD Kabupaten Sinjai 2025-2029

Pernyataan Visi:			
No.	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
1.	Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas	Misi ini mencakup upaya umum dalam menyelenggarakan layanan pendidikan dan layanan kesehatan untuk meningkatkan daya saing sumberdaya manusia.	Maju
2.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel dengan penerapan teknologi informasi dan inovasi daerah	Misi ini mencakup upaya umum dalam mengoptimalkan tata kelola pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi dalam meningkatkan daya saing daerah	Maju
3.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan potensi daerah berbasis agrobisnis, agroindustri, pariwisata, pemberdayaan UMKM dan ramah investasi	Misi ini mencakup upaya umum dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan daya saing produk daerah, peningkatan pariwisata, peningkatan produktivitas pertanian, pemenuhan cadangan pangan dan menciptakan iklim investasi yang baik guna peningkatan taraf hidup masyarakat.	Sejahtera

Pernyataan Visi:			
No.	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
4.	Mewujudkan ketahanan keluarga, sosial budaya berlandaskan nilai religius dan kearifan lokal	Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses lapangan kerja, peningkatan partisipasi perempuan, pelestarian nilai-nilai budaya masyarakat sehingga tercipta tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi solidaritas sosial dan kearifan lokal yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, sehingga dapat menjamin terciptanya rasa aman untuk berpartisipasi dalam setiap program pembangunan.	Sejahtera
5.	Melestarikan sumber daya alam, lingkungan hidup dan kehutanan secara berkelanjutan	Misi ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pengelolaan, pengendalian dan pengawasan pencemaran lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelestarian sumberdaya alam dan pelestarian kehutanan secara berkelanjutan.	Mandiri
6.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang merata dan berkeadilan	Misi ini mencakup upaya umum dalam mewujudkan kualitas infrastruktur wilayah yang sesuai standar dengan optimalisasi sarana prasarana wilayah guna mewujudkan kenyamanan bagi masyarakat.	Berkeadilan
7.	Mewujudkan masyarakat yang taat hukum, tertib, aman, tangguh bencana dan demokrasi berkeadilan	Misi ini mencakup upaya umum untuk meningkatkan pencegahan risiko bencana sehingga tercipta rasa aman, lingkungan yang kondusif dan tertib bagi masyarakat melalui peningkatan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan aturan serta penguatan kemampuan mitigasi dan penanganan bencana.	Berkeadilan

Misi pembangunan Kabupaten Sinjai sejalan dengan Asta Cita RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Keterkaitan Misi RPJMN Tahun 2025-2029 dengan misi pembangunan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2025-2029 dapat dicermati pada tabel berikut.

Tabel 3.3.
Keterkaitan Misi RPJMN Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Sinjai
Tahun 2025-2029

No.	Misi RPJMN 2025-2029	Misi RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2025-2029
1.	Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	M.4 Mewujudkan ketahanan keluarga, sosial budaya berlandaskan nilai religius dan kearifan lokal
		M.5 Melestarikan sumber daya alam, lingkungan hidup dan kehutanan secara berkelanjutan
		M.6 Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang merata dan berkeadilan
2.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru	M.7 Mewujudkan masyarakat yang taat hukum, tertib, aman, tangguh bencana dan demokrasi berkeadilan
		M.3 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan potensi daerah berbasis agrobisnis, agroindustri, pariwisata, pemberdayaan UMKM dan ramah investasi
		M.4 Mewujudkan ketahanan keluarga, sosial budaya berlandaskan nilai religius dan kearifan lokal
3.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,	M.5 Melestarikan sumber daya alam, lingkungan hidup dan kehutanan secara berkelanjutan
		M.6 Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang merata dan berkeadilan

No.	Misi RPJMN 2025-2029	Misi RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2025-2029
	mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	M.7 Mewujudkan masyarakat yang taat hukum, tertib, aman, tangguh bencana dan demokrasi berkeadilan
4.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	M.1 Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
5.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	M.3 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan potensi daerah berbasis agrobisnis, agroindustri, pariwisata, pemberdayaan UMKM dan ramah investasi
		M.4 Mewujudkan ketahanan keluarga, sosial budaya berlandaskan nilai religius dan kearifan lokal
6.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	M.3 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan potensi daerah berbasis agrobisnis, agroindustri, pariwisata, pemberdayaan UMKM dan ramah investasi
		M.4 Mewujudkan ketahanan keluarga, sosial budaya berlandaskan nilai religius dan kearifan lokal
7.	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi,	M.2 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel dengan

No.	Misi RPJMN 2025-2029	Misi RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2025-2029
	serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	penerapan teknologi informasi dan inovasi daerah
8.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	M.3 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan potensi daerah berbasis agrobisnis, agroindustri, pariwisata, pemberdayaan UMKM dan ramah investasi
		M.4 Mewujudkan ketahanan keluarga, sosial budaya berlandaskan nilai religius dan kearifan lokal

Misi pembangunan Kabupaten Sinjai sejalan dengan arahan Misi Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, berahlak, dan berdaya saing;
2. Meningkatkan perekonomian daerah yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, berintegritas, adaptif, dan produktif;
4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Keterkaitan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 dengan misi pembangunan RPJMD Kabupaen Sinjai Tahun 2025-2029 dapat dicermati pada tabel berikut:

Tabel 3.4.
Keterkaitan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029

dengan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2025-2029

No.	Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029	Misi RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2025-2029
1.	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, berahlak, dan berdaya saing	M.1 Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
		M.4 Mewujudkan ketahanan keluarga, sosial budaya berlandaskan nilai religius dan kearifan lokal
2.	Meningkatkan perekonomian daerah yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan	M.3 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan potensi daerah berbasis agrobisnis, agroindustri, pariwisata, pemberdayaan UMKM dan ramah investasi
3.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, berintegritas, adaptif, dan produktif	M.2 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel dengan penerapan teknologi informasi dan inovasi daerah
4.	Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi	M.5 Melestarikan sumber daya alam, lingkungan hidup dan kehutanan secara berkelanjutan M.6 Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang merata dan berkeadilan

No.	Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029	Misi RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2025-2029
		M.7 Mewujudkan masyarakat yang taat hukum, tertib, aman, tangguh bencana dan demokrasi berkeadilan

3.3. Tujuan

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Sasaran RPJMD disamping menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih sekurang-kurangnya berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Sasaran RPJMD juga dapat diterjemahkan ke dalam sasaran antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan pedoman dalam menyusun prioritas dan sasaran pembangunan RKPD.

Terkait RPJMD, perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut: (1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

3.4 Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian (*outcome*) program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan memenuhi kriteria SMART-C.

Langkah-langkah perumusan tujuan dan sasaran: (1) merumuskan rancangan pernyataan tujuan dari setiap misi dan melihat kesesuaian dengan program kepala daerah terpilih; (2) menguji apakah rancangan pernyataan tujuan dapat memecahkan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (3) merumuskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dari setiap tujuan; (4) merumuskan indikator tujuan dan sasaran yang terukur, sekurang-kurangnya memenuhi indikator sasaran pokok RPJPD periode RPJMD berkenaan; dan (5) menyelaraskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dan capaian indikator yang terukur terhadap pernyataan arah kebijakan dan sasaran RPJMN untuk penyusunan rancangan awal RPJMD.

3.5 Perumusan Tujuan dan sasaran RPJMD

Berdasarkan pemahaman tersebut maka rumusan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sinjai 2025-2029 dirumuskan pada Tabel 3.5 sebagai berikut

Tabel 3.5.
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sinjai

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Target						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Visi : Sinjai Maju, Sejahtra, Mandiri dan Berkeadilan										
Misi 1 Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas	Tujuan 1 Meningkatkan daya saing sumber daya manusia		T.1. Indeks Pembanguna n Manusia	71,89	72,06	72,37	72,92	73,54	73,76	
		Sasaran 1 Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan	S.1. Usia Harapan Hidup	74,40	74,50	74,60	74,70	74,80	74,90	
		Sasaran 2 Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan	S.2.1 Rata-Rata Lama Sekolah	7,10	7,30	7,55	7,70	7,89	8,09	
			S.2.2 Harapan Lama Sekolah	13.03	13.1	13.15	13.2	13.29	13,38	
Misi 2 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel dengan penerapan teknologi informasi dan inovasi daerah										
	Tujuan 2 Meningkatkan tata pemerintahan yang profesional dan akuntabel		T.2. Indeks Reformasi Birokrasi	80,25	80,35	80,52	80,72	81,25	81,45	
		Sasaran 3 Terwujudnya Tata kelola	S.3.1 Nilai SAKIP	68,52	69,10	70,05	70,52	70,80	71,15	
			S.3.2 Persentase Desa Mandiri	62,68	22,20	28,60	40,00	66,70	100,00	

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Target						Ket	
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		pemerintahan yang terintegrasi, Adaptif dan Inovatif									
			S.3.3 Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		
		Sasaran 4 Terwujudnya penerapan teknologi informasi dan inovasi daerah	S.4 Indeks Inovasi Daerah	43,63	45,45	47,27	49,09	50,91	52,73		
			S.4 Indeks SPBE	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,00		
Misi 3 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan potensi daerah berbasis agrobisnis, agroindustri, pariwisata, pemberdayaan UMKM dan ramah investasi											
	Tujuan 3 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan		T.3. Pertumbuhan Ekonomi	5,58	5,99	6,40	6,81	7,22	7,63		
		Sasaran 5 Meningkatnya integrasi ekonomi regional dan global	S.5.1 Net Ekspor Barang dan Jasa	1,05	1,07	1,09	1,11	1,13	1,14	ajakki	
			S.5.2 Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	38,05	38,15	38,25	38,30	38,45	38,55		
		Sasaran 6 Peningkatan	S.6.1 Tingkat Inflasi	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8		

**RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029**

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Target						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		stabilitas ekonomi makro daerah	S.6.2 Pertumbuhan Investasi Daerah	8	9	10	11	12	13	
		Sasaran 7 Terwujudnya ketahanan pangan dan peningkatan produktivitas pertanian	S.7 Indeks Ketahanan Pangan	81,70	81,71	81,73	81,75	81,77	81,79	
		Sasaran 8 Meningkatnya daya saing produktivitas Daerah	S.8 Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level kabupaten (%)	4300	4343	4385	4428	4471	4514	
		Sasaran 9 Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja	S.9 Tingkat Pengangguran Terbuka	1,64	1,59	1,54	1,49	1,44	1,39	
Misi 4 Mewujudkan ketahanan keluarga, sosial budaya berlandaskan nilai religius dan kearifan lokal										
	Tujuan 4 Terwujudnya ketahanan keluarga, sosial budaya berlandaskan nilai religius dan kearifan		T.4.1 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	73,20	74,20	74,40	74,55	74,70	74,85	

**RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029**

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Target						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	lokal		T.4.2 Tingkat Kemiskinan	8,54	8,53	8,52	8,51	8,50	8,49	
		Sasaran 10 Terwujudnya kerukunan umat beragama dan pemajuan kebudayaan	S.10 Indeks Kerukunan Umat Beragama	100	100	100	100	100	100	
		Sasaran 11 Terwujudnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif	S.11.1 Indeks Ketimpangan Gender	0,421	0,427	0,430	0,431	0,432	0,433	
			S.11.2 Indeks Perlindungan Anak	61,10	61,15	61,25	61,51	61,73	61,95	
		Sasaran 12 Terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif	S.12 Rasio Gini	0,345	0,340	0,338	0,336	0,335	0,334	
Misi 5 Melestarikan sumber daya alam, lingkungan hidup dan kehutanan secara										

**RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029**

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Target						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
berkelanjutan	Tujuan 5 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup		T.5 Indeks Kualitas lingkungan Hidup	77,34	77,60	77,76	77,97	78,18	78,39	
		Sasaran 13 Terwujudnya lingkungan hidup berkualitas dan berkelanjutan	S.13 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Tahunan	24,54	42,24	42,85	43,86	44,04	44,22	
Misi 6 Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang merata dan berkeadilan										
	Tujuan 6 Meningkatkan kualitas infrastruktur yang merata dan berkeadilan		T.6 Indeks Layanan Infrastruktur	72,14	73,80	74,20	75,68	76,58	77,48	
		Sasaran 14 Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur yang merata	1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	57,48	56,83	57,10	55,87	56,84	57,45	

**RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029**

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Target						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Tujuan 7 Mewujudkan masyarakat yang taat hukum, tertib, aman, tangguh bencana dan demokrasi berkeadilan		T.7 Indeks Reformasi Hukum	80,13	81,20	81,96	93,54	96,62	96,72	
		Sasaran 15 Meningkatnya ketaatan hukum, ketertiban dan keamanan serta demokrasi substansial	S.15 Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	100	100	100	100	100	100	
		Sasaran 16 Meningkatnya ketangguhan adaptasi dan mitigasi bencana	S.16 Indeks Risiko Bencana	161,40	162,6	163,3	164,7	165,5	165,5	

Berdasarkan permasalahan serta Isu strategis yang telah dikemukakan, dengan target-target solusi yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diuraikan dalam Bab V, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah selama 5 (lima) Tahun 2025-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut.

3.6 Strategi dan Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

a. Strategi

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah..

Rumusan strategi dalam RPJMD dipergunakan untuk mencapai tema pembangunan sesuai arah kebijakan tahap pertama pada RPJPD yaitu “Penguatan Fondasi Transformasi”. Strategi dan RPJMD ini merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sinjai periode 2025 -2029. Adapun Langkah yang ditempuh dalam perumusan strategi ini sebagai berikut :

1. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang dengan mengacu pada arah kebijakan RPJPD tahap pertama;
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan daerah;

3. Melakukan analisis SWOT untuk menganalisa hal-hal yang berpengaruh pada lingkungan baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. yang dianggap penting untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah;
 4. Merumuskan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan (*key success factors*) capaian pembangunan dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
 5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi;
 6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pembangunan.
- b. Prioritas Pembangunan Tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, Berdasarkan pengertian dan langkah-langkah perumusan tersebut maka arah kebijakan RPJMD Kabupaten Sinjai 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 3.6 sebagai berikut :

Tabel 3.6.
Pentahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2025 - 2029

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Program Pengelolaan Pendidikan	1. Program Pengelolaan Pendidikan	1. Program Pengelolaan Pendidikan	1. Program Pengelolaan Pendidikan	1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan	2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan	2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan	2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan	2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan
3. Program Pengembangan Ekonomi untuk mendorong investasi	3. Program Pengembangan Ekonomi untuk mendorong investasi	3. Program Pengembangan Ekonomi untuk mendorong investasi	3. Program Pengembangan Ekonomi untuk mendorong investasi	3. Program Pengembangan Ekonomi untuk mendorong investasi
4. Program Peningkatan Saarna Keagamaan	4. Program Peningkatan Saarna Keagamaan	4. Program Peningkatan Saarna Keagamaan	4. Program Peningkatan Saarna Keagamaan	4. Program Peningkatan Saarna Keagamaan
5. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	5. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	5. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	5. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	5. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
7. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	7. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	7. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	7. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	7. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
8. Program Penyelenggaraan Jalan	8. Program Penyelenggaraan Jalan	8. Program Penyelenggaraan Jalan	8. Program Penyelenggaraan Jalan	8. Program Penyelenggaraan Jalan

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9. Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	9. Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	9. Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	9. Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	9. Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

- c. Penyajian Lokus Pembangunan untuk Provinsi
- d. Penyajian Lokus Pembangunan untuk Kabupaten
- e. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Pelaksanaan pembangunan periode 2025-2029 merupakan tahap pembangunan pertama dari RPJPD Kabupaten Sinjai Tahun 2025-2045. Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD Kabupaten Sinjai Tahun 2025-2045, tema atau fokus pembangunan pada tahap pertama periode 2025 – 2029 diarahkan pada kebijakan “Penguatan Fondasi Transformasi”. Tahap pertama ini dilakukan konsolidasi penguatan landasan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang disertai dengan penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta penguatan keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah. Tahapan penguatan landasan transformasi ini didukung implementasi pembangunan kewilayahan yang merata dengan pemenuhan sarana prasarana, serta penguatan pembiayaan pembangunan. RPJMD akan menjabarkan tema tersebut setiap tahun, yang akan menjadi pedoman bagi penentuan fokus/tema pembangunan dalam RKPD. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan

Arah kebijakan dalam RPJMD ini diartikan sebagai pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Langkah-langkah dalam merumuskan arah kebijakan ini adalah :

- 1) Mengidentifikasi tiap sasaran dan target kinerja setiap tahun;

- 2) Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategik terkait setiap tahun;
- 3) Melakukan diskusi dengan tim atas bahan-bahan yang telah diidentifikasi;
- 4) Merumuskan draft arah kebijakan;
- 5) Menguji apakah rancangan arah kebijakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Menetapkan arah kebijakan.

Rumusan strategi dan arah kebijakan disusun dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang akan melahirkan program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Keterkaitan tema atau fokus pembangunan, arah kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Sinjai digambarkan sebagai berikut:

1. Tema pembangunan Kabupaten Sinjai Tahun 2025 : “ ***Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Untuk Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*** “
2. Tema pembangunan Kabupaten Sinjai Tahun 2026 : “ ***Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Pemenuhan Pelayanan Dasar*** “
3. Tema pembangunan Kabupaten Sinjai Tahun 2027 : ***Penguatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pertumbuhan Ekonomi Melalui Penggalan Potensi Sumberdaya***”
4. Tema pembangunan Kabupaten Sinjai Tahun 2028 : “***Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan daya saing daerah***”
5. Tema pembangunan Kabupaten Sinjai Tahun 2029 : “***Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik***”
6. Tema pembangunan Kabupaten Sinjai Tahun 2030 : “ **Mencapai Kemandirian Masyarakat**”

6.2. Strategis melalui Pendekatan Spasial

Pendekatan spasial mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 - 2032, khususnya dalam menyelaraskan kebijakan ruang antar wilayah, antar sektor dan dimensi waktu pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029. Fungsi RTRW merupakan matra spasial yang mengarahkan lokasi dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten Sinjai. Kedudukan RTRW adalah sebagai pedoman dalam: a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana sektoral lainnya; b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; c. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah Kabupaten/Kota, serta keserasian antarsektor; d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; e. Penataan ruang KSP; dan f. Penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Tahun 2025 - 2029 yang telah dirumuskan dengan pendekatan holistik-tematik dan integratif selain memperhatikan pelaksanaan urusan sesuai kewenangan kabupaten harus mengadopsi kebijakan penataan ruang yang terkait pengembangan wilayah, pengembangan struktur ruang (sistem perkotaan dan jaringan prasarana), dan pola ruang (kawasan lindung dan budidaya). Kebijakan penataan ruang merupakan arahan dalam mencapai tujuan penataan ruang yaitu a) Peningkatan kinerja kawasan perkotaan sebagai pusat distribusi pelayanan terhadap kawasan sekitarnya melalui pengembangan fungsi yang berhirarki sesuai dengan skala pelayanan masing-masing kawasan perkotaan; b) Peningkatan sistem transportasi guna membuka dan meningkatkan aksesibilitas terhadap seluruh kawasan; c) Peningkatan sistem jaringan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan wilayah dan meningkatkan produktivitas sentra-sentra produksi; d) Penetapan dan pelestarian kawasan yang berfungsi lindung sebagai perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; e) Pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya secara optimal guna memacu tingkat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah, sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lahan yang dimiliki; f) Pengembangan sektor-sektor unggulan dan optimalisasi potensi lokal guna

menunjang keterpaduan pembangunan dan pengembangan agro industri; g) Penetapan dan pengelolaan kawasan strategis guna menunjang pengembangan kepentingan ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan h) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Penjabaran dari tujuan dan kebijakan sebagai langkah-langkah operasional untuk mewujudkan penataan ruang Kabupaten Sinjai, dirumuskan strategi pembangunan, sebagai berikut:

- a. Strategi peningkatan kinerja kawasan perkotaan sebagai pusat distribusi pelayanan terhadap kawasan sekitarnya melalui pengembangan fungsi yang berhirarki sesuai dengan skala pelayanan masing-masing kawasan perkotaan, antara lain:
 1. Memantapkan fungsi kawasan-kawasan perkotaan (PKL, PPK dan PPL) sebagai pusat distribusi dan pelayanan yang merata;
 2. Membentuk sistem distribusi dan pemasaran yang berhirarki melalui interkoneksi antar pusat-pusat pelayanan;
 3. Meningkatkan keterhubungan antar kawasan, terutama terhadap kawasan terpencil, serta sentra-sentra produksi guna memacu pertumbuhan ekonomi wilayah; dan
 4. Mendorong pertumbuhan pada kawasan-kawasan yang berpotensi sebagai pusat pelayanan, melalui penyediaan dan peningkatan fungsi pelayanan pada kawasan-kawasan perkotaan.
- b. Strategi peningkatan sistem transportasi guna membuka dan meningkatkan aksesibilitas terhadap seluruh kawasan, antara lain:
 1. Meningkatkan kualitas jaringan jalan, terutama pada jalan-jalan utama dan jaringan jalan yang menghubungkan ke sentra-sentra produksi;
 2. Meningkatkan aksesibilitas pada jalur penghubung antar kawasan dan kepulauan, untuk meningkatkan jalur angkutan barang dan penumpang;
 3. Mengembangkan sarana transportasi melalui pengembangan simpul transportasi dan peralihan moda angkutan (terminal dan pelabuhan) untuk memudahkan sistem koleksi dan distribusi angkutan barang dan penumpang; dan

4. Membuka akses jalan baru (sistem jaringan primer dan sekunder) pada kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, kawasan terpencil dan sentra produksi guna pemerataan pelayanan dan pembangunan.
- c. Strategi peningkatan sistem jaringan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan wilayah dan meningkatkan produktivitas sentra-sentra produksi, antara lain:
 1. Meningkatkan sistem jaringan energi listrik melalui pengembangan dan penambahan daya dan sambungan listrik terutama pada kawasan perdesaan dan kawasan terpencil yang belum terjangkau dengan sistem interkoneksi kelistrikan PLTD baru serta PLTMH pada kawasan yang memungkinkan sistem aliran sungai deras;
 2. Meningkatkan sistem jaringan telekomunikasi, baik secara kualitas dan jangkauan pelayanan maupun jumlah sambungan sebagai media komunikasi dan informasi internal dan eksternal wilayah;
 3. Melestarikan dan mengembangkan sumberdaya air baku, untuk menunjang pemenuhan kebutuhan air minum maupun untuk kebutuhan produksi sentra-sentra ekonomi masyarakat;
 4. Mengembangkan sistem jaringan prasarana air baku berupa irigasi, waduk, embung, dan bendungan guna menunjang peningkatan produksi sektor pertanian dan sektor unggulan lainnya;
 5. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan akan pelayanan air minum, dan pengembangan sistem pengolahan dan sistem jaringan air minum melalui sistem perpipaan dan non perpipaan;
 6. Mengoptimalkan dan mengembangkan sistem pengolahan persampahan dan limbah, terutama pada kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan, sarana kesehatan, sarana pendidikan, perdagangan dan jasa, industri serta pelayanan umum dan pemerintahan; dan
 7. Mengoptimalkan dan mengembangkan sistem jaringan drainase terutama pada kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pengendali banjir perkotaan.
- d. Strategi penetapan dan pelestarian kawasan yang berfungsi lindung sebagai perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup, antara lain:

1. Menetapkan tapal batas kawasan hutan lindung, dan memberikan penegasan terhadap fungsi ruang pada kawasan hutan lindung;
 2. Menegaskan batas dan fungsi kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dan kawasan perlindungan setempat;
 3. Menegaskan fungsi ruang pada kawasan perlindungan setempat, melalui peraturan pemanfaatan ruang sesuai dengan kebutuhan dan manfaat ruang;
 4. Menetapkan kawasan lindung secara konsisten agar terjaga fungsinya untuk melindungi kawasan bawahannya, melindungi kawasan setempat, memberi perlindungan terhadap keanekaragaman flora dan fauna beserta ekosistemnya, serta melindungi kawasan rawan bencana;
 5. Melestarikan kawasan lindung terutama kawasan lindung yang mengalami penurunan kualitas lingkungan;
 6. Merehabilitasi dan melestarikan kawasan-kawasan yang teridentifikasi sebagai lahan kritis dan kawasan lindung yang telah dieksploitasi;
 7. Mengembalikan fungsi dan meremajakan kawasan lindung yang selama ini dibubidayakan oleh masyarakat;
 8. Mewujudkan ruang terbuka hijau pada kawasan terbangun terutama pada kawasan perkotaan; dan
 9. Melibatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung, sehingga dapat secara bersama menjaga kelestarian fungsi kawasan lindung.
- e. Strategi pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya secara optimal guna memacu tingkat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah, sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lahan yang dimiliki, antara lain:
1. Mengembangkan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan dan jasa, industri dan pariwisata guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah;
 2. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan untuk memacu pertumbuhan dan produktivitas sektor-sektor unggulan;

3. Mengembangkan usaha industri, terutama industri pengolahan hasil-hasil pertanian guna menunjang Kabupaten Sinjai sebagai lumbung pangan;
 4. Mengembangkan obyek-obyek wisata alam, buatan, bahari, petualangan dan agrowisata yang dapat menarik minat wisatawan;
 5. Mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan kepariwisataan, serta melakukan promosi pariwisata untuk meningkatkan jumlah wisatawan;
 6. Mengendalikan dan pengaturan pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya untuk menghindari konflik kepentingan antar sektor;
 7. Mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur dan suprastruktur kawasan perkotaan dan perdesaan; dan
 8. Merencanakan dan mengembangkan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP), sebagai pusat pertumbuhan baru yang ada disekitarnya.
- f. Strategi pengembangan sektor unggulan dan optimalisasi potensi lokal guna menunjang keterpaduan pembangunan dan pengembangan agro industri, antara lain:
1. Pengembangan ekonomi kerakyatan diarahkan pada dukungan sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan), perikanan dan kelautan, yang mendukung peningkatan produksi dan produktivitas hasil-hasil produksi dengan memperhatikan potensi lokal;
 2. Memperkuat sistem permodalan untuk membantu meningkatkan produktivitas usaha kecil dan nelayan, terutama pada sektor kegiatan perikanan dan kelautan;
 3. Meningkatkan sarana dan prasarana dasar sosial ekonomi perkotaan maupun perdesaan;
 4. Mengembangkan kegiatan usaha industri yang berbasis pada pengolahan hasil-hasil pertanian, perikanan & kelautan, perkebunan, dan peternakan, guna meningkatkan taraf ekonomi masyarakat;
 5. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembinaan, pelatihan dan penyuluhan tentang peningkatan komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan yang berkualitas;

6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, melalui pengembangan industri kecil/menengah dan rumah tangga yang dapat mengelola potensi daerah, dengan melakukan pembinaan komprehensif pelaku industri seperti; dan
7. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, kelembagaan, peralatan dan permodalan pelaku industri rumah tangga, hingga pada memberikan pelatihan teknis, penyediaan modal kerja, peralatan serta pembinaan manajemen & pemasaran serta Pengembangan Kemitraan.
- g. Strategi Penetapan dan pengelolaan kawasan strategis guna menunjang pengembangan kepentingan ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, antara lain:
 1. Mengembangkan kawasan yang mempunyai kegiatan sektor strategis yang potensial terutama dalam aspek ekonomi;
 2. Mendelineasi kawasan cagar alam dan pelestarian alam serta mencegah kegiatan budidaya pada daerah sekitarnya yang dapat mengancam kelestarian kawasan cagar alam;
 3. Menstimulasi kawasan-kawasan yang sulit berkembang melalui pengembangan desa-desa pusat pertumbuhan atau pembukaan kegiatan usaha pertanian;
 4. Mengembangkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai sentra produksi untuk meningkatkan perekonomian wilayah;
 5. Memberdayakan ekonomi rakyat dan mengembangkan usaha produksi masyarakat;
 6. Meningkatkan sarana dan prasarana dasar ekonomi;
 7. Memelihara dan melestarikan keberadaan cagar budaya, dan peninggalan sejarah ;
 8. Melestarikan dan merevitalisasi kawasan-kawasan tradisional dan nilai-nilai budaya tinggi;
 9. Menanggulangi kawasan rawan bencana melalui konservasi lingkungan, pengembangan jalur hijau, mengurangi bahkan meniadakan kegiatan budidaya pada daerah rawan bencana;

10. Melestarikan dan meremajakan kawasan hutan melalui kegiatan penghijauan; dan
 11. Mempertahankan fungsi kawasan Lindung Mangrove.
- h. Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara terdiri atas:
1. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 2. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan;
 3. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan; dan
 4. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

1. Pengembangan Wilayah

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Sinjai meliputi:

a. Pusat-pusat kegiatan;

Pusat-pusat kegiatan terdiri dari : PPK terdiri dari Kawasan Perkotaan Sinjai, yang meliputi seluruh wilayah administratif Kecamatan Sinjai Utara, dan sebagian wilayah administratif Kecamatan Sinjai Timur PKL, terdiri dari Kawasan Perkotaan Manipi di Kecamatan Sinjai Barat; Kawasan Perkotaan Bikeru di Kecamatan Sinjai Selatan; Kawasan Perkotaan Mannanti di Kecamatan Tellulimpoe; dan Kawasan Perkotaan Lappadata di Kecamatan Sinjai Tengah, dan PPL terdiri dari Kawasan Kambuno di Kecamatan Pulau Sembilan; Kawasan Bulupoddo di Kecamatan Bulupoddo; Kawasan Pasir Putih di Kecamatan Sinjai Borong.

b. Sistem jaringan prasarana utama;

Sistem jaringan prasarana utama yang ada di Kabupaten Sinjai terdiri atas: sistem jaringan transportasi darat; sistem jaringan transportasi laut; dan sistem jaringan transportasi udara;

c. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

sistem jaringan prasarana lainnya Sistem jaringan prasarana lainnya terdiri atas: sistem jaringan energi; sistem jaringan telekomunikasi;

sistem jaringan sumber daya air; dan sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

2. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya

3. Penetapan Kawasan Strategis

Kawasan strategis Kabupaten Sinjai merupakan bagian wilayah Kabupaten Sinjai yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan yang terdiri dari Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Strategis Kabupaten.

4. Arahan Pemanfaatan Ruang

Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Sinjai berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang; terdiri atas: indikasi program utama; indikasi sumber pendanaan; indikasi pelaksana; dan indikasi waktu pelaksanaan.

Arah pemanfaatan ruang khususnya untuk daerah perkotaan

Dalam rangka penanganan genangan dan banjir di Kota Sinjai, program yang diimplementasikan diharapkan dapat menjadi solusi dalam penanganan genangan dan banjir di Kota Sinjai.

A. Pembangunan Saluran Drainase

Program pembangunan saluran baru dalam master plan drainase Kota Sinjai meliputi pembangunan saluran prioritas yang merupakan jaringan drainase eksisting dalam upaya optimalisasi saluran yang ada, rehabilitasi saluran melalui pengaturan arah aliran, rehabilitasi saluran melalui perubahan dimensi saluran, dan pembangunan saluran pada bagian sisi jaringan jalan kota yang belum memiliki jaringan drainase.

Pengaturan arah aliran drainase difokuskan pada daerah yang hampir rutin terjadi genangan yang diakibatkan konsentrasi aliran air permukaan pada beberapa ruas jalan dan permukiman kota. Perubahan dimensi merupakan perencanaan jangka menengah dan panjang yang dapat dilakukan sesuai kebutuhan penanganan dan terutama ketersediaan sumber daya keuangan di daerah. Tindakan ini merupakan

salah satu perencanaan yang diharapkan dapat meminimalisir terjadinya genangan di Kota Sinjai sesuai dengan perhitungan kapasitas saluran dan debit rencana terhadap setiap saluran drainase yang ada di Kota Sinjai.

Berdasarkan analisa, terdapat 432 saluran memiliki kapasitas dibawah debit aliran masing-masing, sehingga diperlukan rehabilitasi atau pembangunan kembali saluran-saluran drainase tersebut agar dapat menampung debit saluran, diantaranya saluran tersier dengan panjang kurang lebih 33,38 Km, saluran sekunder sekitar 13,81 Km, dan saluran primer sekitar 2,44 Km. Rincian tiap saluran drainase yang perlu dilakukan perubahan dimensi bak pada sisi kirim maupun sisi kanan berdasarkan ruas jalan disajikan pada tabel dan gambar berikut.

B. Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir

Pembangunan bangunan pengendali banjir merupakan salah satu upaya struktur untuk mengendalikan banjir di Kota Sinjai. Alternatif tersebut prioritaskan dengan perencanaan pembangunan kolam retensi. Pemanfaatan bangunan tersebut dapat lebih luas dilakukan seperti penataan kawasan sebagai daya tarik wisata, dan kebutuhan pengairan.

C. Pemeliharaan Saluran

Program pelaksanaan pemeliharaan saluran diawali dengan melakukan inspeksi rutin sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun, yaitu pada awal musim hujan dan akhir musim hujan. Sedangkan inspeksi khusus dapat dilaksanakan pada setiap saat terjadi peristiwa/kejadian tertentu (luar biasa) seperti kecelakaan kendaraan atau bencana alam atau laporan dari masyarakat sekitarnya.

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan daerah merupakan implementasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah dan sekaligus juga merupakan janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati periode 2025 – 2029. Adapun prioritas pembangunan daerah terdiri dari:

1. Program Pengelolaan pendidikan :
 - Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sekolah
 - Peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik khususnya tenaga honorer
 - Pemberian beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa serta akses pendidikan di daerah terpencil dan kepulauan
 - Pendidikan gratis plus (baju batik)
2. Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
 - Pemberian pelatihan keterampilan dan vokasi untuk mempersiapkan generasi muda dalam memasuki dunia kerja dengan memanfaatkan teknologi informasi
 - Menyediakan pelatihan dan skema akses permodalan, kredit mikro untuk pengusaha baru, UMKM, melalui kolaborasi dengan perbankan dan komunitas kewirausahaan melalui Rumah Kreatif (Sinjai Creative center)
3. Program Kepegawaian Daerah
 - Pendidikan dan pengembangan kompetensi aparatur yang terencana dan berkelanjutan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional dan inovatif
4. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan :
 - Peningkatan fungsi Puskesmas maupun Pustu sebagai pusat pelayanan kesehatan dasar masyarakat
 - Peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga Kesehatan
5. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan :
 - Menjamin akses pelayanan kesehatan yang memadai
6. Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan :
 - Menjamin akses pelayanan kesehatan yang berkualitas
7. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
 -
8. Program Pelayanan Penanaman Modal

- Pengembangan ekonomi daerah : Mendorong investasi dan pengembangan sektor ekonomi,
 - “Ramah Investasi “ kemudahan dalam berinvestasi di Sinjai
 - UMKM yang berbasis potensi lokal dan pengembangan ekonomi hijau dan biru serta hilirisasi komoditi unggulan.
9. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- Mengembangkan destinasi pariwisata lokal
10. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
- Pembinaan dan promosi produk lokal :
 - Pembinaan pengusaha lokal dan mempromosikan produk lokal melalui pameran, business matching dan pemasaran digital untuk pasar lokal maupun internasional.
11. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- Peningkatan bantuan sarana dan prasarana ibadah untuk mendukung kegiatan keagamaan (hibah rumah ibadah)
 - Peningkatan kesejahteraan imam masjid , marbot, Penjaga Makam dan guru mengaji.
 - Peningkatan Imtaq ASN melalui kegiatan ASN Sinjai Mengaji.
 - Program pemberdayaan masyarakat dan fasilitas kegiatan keagamaan
12. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
13. Program Pengolahan Persampahan
- Pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan (regulasi, kelembagaan, pemberdayaan, teknologi, pembiayaan)
14. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
- Penataan Taman Kota
15. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
- Pengerukan sedimen Drainase
16. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum
- Tata Kelola Pelayanan Air bersih
 - Infrastruktur energi dan air : Meningkatkan pasokan energi dan infrastruktur air bersih untuk mendukung kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan
17. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- Penerangan Jalan
- 18. Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah
 - Pengelolaan dan keseimbangan Cadangan Pangan.
 - Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
- 19. Program Penyelenggaraan jalan
 - Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar : Meningkatkan kualitas jalan, jembatan, irigasi, dan sarana transportasi untuk memperlancar mobilitas penduduk dan ekonomi daerah
- 20. Program Penataan Bangunan Gedung
 - Peningkatkan infrastruktur publik : Membangun dan memperbaiki fasilitas umum seperti pasar, ruang terbuka hijau, dan sport center
- 21. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - peningkatan kualitas sanitasi kawasan perkotaan dan pedesaan
- 22. Program Penyelenggaran Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
 - Bantuan hukum gratis kepada Masyarakat Tidak mampu
- 23. Program Penanggulangan Bencana
 - Edukasi Masyarakat terkait kewaspadaan dan mitigasi bencana di daerah rawan bencana
- 24. Program Damkar Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
 - Penambahan kendaraan Damkar
- 25. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
 - Pembinaan Ormas dan Partai Politik

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sinjai Tahun 2025-2029, maka dirumuskan program pembangunan daerah yang merupakan implemetasi dari arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah. Program pembangunan daerah merupakan panduan dalam menentukan kegiatan prioritas perangkat daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun.

Program pembangunan berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sinjai dipetakan Matriks Program Pembangunan Daerah berdasarkan hasil pemetaan nomenklatur Program sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.7.
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program Prioritas dan Indikator Kinerja Pembangunan
Kabupaten Sinjai 2025 – 2029

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
VISI SINJAI MAJU, SEJAHTERA, MANDIRI, DAN BERKEADILAN					
MISI 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas	Tujuan 1: Meningkatkan Daya Sainhg Sumberdaya Manusia		Indeks Pembangunan Manusia		
		Sasaran 1 Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan	1. Usia Harapan Hidup	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Kesehatan	
		Sasaran 2: Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan	1. Rata-rata Lama Sekolah 2. Harapan Lama Sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
MISI 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel dengan Penerapan Teknologi Informasi dan Inovasi Daerah	Tujuan 2: Meningkatkan tata pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	-	
		Sasaran 3 Terwujudnya Tata kelola pemerintahan yang terintegrasi, Adaptif dan Inovatif	1. Nilai Sakip, 2. Persentase Desa Mandir, 3. Opini BPK	- Program penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota	
		Sasaran 4: Terwujudnya Penerapan Teknologi Informasi dan Inovasi Daerah	1. Indeks Inovasi Daerah 2. Nilai SPBE	Program penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota	
MISI 3 Meningkatkan pertumbuhan	Tujuan 3 Terwujudnya pertumbuhan		1. Pertumbuhan Ekonomi, 2. PDRB Perkapita, 3. Indeks		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
ekonomi melalui pengembangan potensi daerah berbasis agrobisnis, agroindustri, pariwisata, pemberdayaan UMKM dan ramah investasi.	ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi		Daya Saing Daerah, 4.Indeks Ekonomi biru		
		Sasaran 5 Meningkatkan Integrasi Ekonomi Regional dan Global	1. PDRB sektor barang dan jasa 2. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
		Sasaran 6 Peningkatan stabilitas Ekonomi Makro Daerah	1. Tingkat Inflasi(%) 2. Pertumbuhan Investasi Daerah	Program Pelayanan Penanaman Modal	
		Sasaran 7 Terwujudnya Ketahanan Pangan dan peningkatan	1. Indeks Ketahanan Pangan	Program penyediaan dan Pengembangan sarana Pertanian Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		produktifitas pertanian		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program penyediaan dan Pengembangan prasarana Pertanian	
		Sasaran 8 Meningkatnya daya saing produktivitas Daerah	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level kabupaten (%)	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	
		Sasaran 9 Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja	Tingkat Pengangguran terbuka	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	
Misi-4: Mewujudkan ketahanan Keluarga, sosial budaya berlandaskan nilai religius dan kearifan lokal	Tujuan 4 terwujudnya ketahanan Keluarga, sosial budaya berlandaskan		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga 2. Tingkat Kemiskinan		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
	nilai religius dan kearifan lokal				
		Sasaran 10 Terwujudnya kerukunan umat beragama dan pemajuan Kebudayaan	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
		Sasaran 11 Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Indeks Ketimpangan Gender, 2. Indeks Perlindungan Anak	Program pengelolaan sistem Data gender dan anak	
		Sasaran 12 Terwujudnya perlindungan sosail yang adaptif	Rasio Gini	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	
Misi 5: Melestarikan Sumber Daya Alam,	Tujuan 5 Meningkatkan kualitas		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
lingkungan hidup dan Kehutanan secara berkelanjutan	lingkungan hidup				
		Sasaran 13 Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas dan Berkelanjutan	Penurunan Emisi GRK Tahunan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (HAYATI)	
				Program Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan dan Program Pengelolaan Persampahan	
MISI 6 Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang merata dan berkeadilan	Tujuan 6 Meningkatkan kualitas infrastruktur yang merta dan berkeadilan		Indeks Layanan Infrastruktur		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		Sasaran 14 Meningkatnya kualitas layanan Infrastruktur yang merata	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Penyelenggaraan Jalan	
MISI 7 Mewujudkan Masyarakat Yang Taat Hukum, Tertib, Aman Dan Tangguh Bencana	Tujuan 7 Mewujudkan Masyarakat yang taat hukum, tertib, aman dan tangguh bencana		Indeks Reformasi Hukum		
		Sasaran 15 Meningkatnya Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan, serta Demokrasi Substansial	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		Sasaran 16 Meningkatnya ketangguhan adaptasi dan mitigasi bencana	Indeks Risiko Bencana	Program Penanggulangan Bencana	

Tabel 3.10
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan RPJMD

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET
1	MISI-1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Melalui Pendidikan Dan Kesehatan Yang Berkualitas	Memperkuat upaya preventif Kesehatan masyarakat khususnya penyakit menular	
2	Misi 2 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel dengan penerapan teknologi informasi dan inovasi daerah	Menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan	
3	Misi 3 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan potensi daerah berbasis agrobisnis, agroindustri, pariwisata, pemberdayaan UMKM dan ramah investasi	Pemanfaatan sumber daya lokal dengan optimalisasi penggunaan teknologi	
4	Misi 4 Mewujudkan ketahanan keluarga, sosial budaya berlandaskan nilai religius dan kearifan lokal	Pemberian insentif kepada pesantren, lembaga keagamaan dan pemuka agama	
5	Misi 5 Melestarikan sumber daya alam, lingkungan hidup dan kehutanan secara berkelanjutan	Penimngkatan pencegahan dan pengelolaan persampahan	
6	Misi 6 Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang merata dan berkeadilan	Menyediakan Rumah Layak Huni dan Aman dengan prioritas Masyarakat Berpenghasilan Rendah	
7	Misi 7 Mewujudkan masyarakat yang taat hukum, tertib, aman, tangguh bencana dan demokrasi berkeadilan	Memperkuat kapasitas lembaga-lembaga ketahanan masyarakat	

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Indikator kinerja adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang dilaksanakan. Penetapan indikator kinerja daerah dilakukan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil. Penetapan indikator kinerja daerah dituangkan dalam bentuk target kinerja yang akan dicapai pada waktu tertentu yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran target dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai tahun 2025 - 2030 telah ditetapkan sebanyak 26 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi acuan dalam menetapkan target capaian kinerja dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai pada tahun 2025-2030. Selain itu ditetapkan pula Indikator Kinerja Daerah, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan Indikator Kinerja SPM yang menjadi mandat nasional, dan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai mandat global.

1 Program Perangkat Daerah

Berdasarkan Kondisi Umum Daerah, Visi dan Misi, Strategi, Arah Kebijakan Keuangan dan Arah Kebijakan Umum yang telah diuraikan di atas , serta guna mencapai sinergitas dan sinkronisasi Kebijakan program dan kegiatan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dengan Pemerintah Kabupaten, maka rumusan program prioritas pembangunan daerah telah diformulasikan menurut urusan Pemerintahan, wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan daerah. Kemudian disesuaikan dan dikembangkan guna menjawab tantangan dan kebutuhan daerah yang akan dicapai selama lima tahun ke depan sebagai berikut :

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG GUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipsi dalam pendidikan Anak Usia Dini (SPM)	100	100	11,672,704,500	100	12,000,000,000	100	13,000,000,000	100	14,000,000,00 0	100	15,000,000,00 0	Dinas Pendidik an
	Persentase Warga Negara Usia 7-15 tahun yang berpartisipsi dalam pendidikan Dasar (SPM)	99.98	100	56,932,258,200	100	57,000,000,000	100	58,000,000,000	100	59,000,000,00 0	100	60,000,000,00 0	Dinas Pendidik an
	Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar atau Pendidikan Menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	67.56	100	5,319,574,800	100	6,000,000,000	100	7,000,000,000	100	8,000,000,000	100	9,000,000,000	Dinas Pendidik an

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG GUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	(SPM)												
PROGRAM PENGEMBANG AN KURIKULUM	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangk an Kurikulum Muatan Lokal	0	25	102,450,400	25	103,000,000	25	104,000,000	50	105,000,000	50	106,000,000	Dinas Pendidik an
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKA N	Indeks Pemerataan Guru	0	100	125,289,400	100	130,000,000	100	135,000,000	100	140,000,000	100	145,000,000	Dinas Pendidik an
	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidikan	0	100	100,000,000	100	110,000,000	100	120,000,000	100	130,000,000	100	140,000,000	Dinas Pendidik an
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100%	100%	100,283,166,940.0 0	100%	105,330,399,250 .00	100%	111,096,917,350 .00	100%	116,615,296,2 00.00	100%	122,446,059,0 00.00	DINAS KESEHA TAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian pemenuhan upaya peningkatan Sistem Pelayanan di RSUD Sinjai	100%	100%	2,335,200,000.00	100%	2,951,960,000.0 0	100%	3,099,557,850.0 0	100%	3,254,535,500. 00	100%	3,417,262,000. 00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI

TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG GUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang kompoten RSUD Sinjai	100%	100%	430,500,000.00	100%	452,025,000.00	100%	474,626,200.00	100%	498,357,500.00	100%	523,275,300.00	RUMAH SAKIT
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Cakupan pemenuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan.	100%	100%	872,315,700.00	100%	915,931,400.00	100%	961,727,900.00	100%	1,009,814,200.00	100%	1,060,304,900.00	DINAS KESEHA TAN
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemenuhan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Sesuai Standar	100%	100%	24,765,000.00	100%	26,003,200.00	100%	27,303,300.00	100%	28,668,300.00	100%	30,101,700.00	DINAS KESEHA TAN
PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga Berprilaku PHBS	100%	100%	175,497,500.00	100%	184,272,300.00	100%	193,485,900.00	100%	203,160,100.00	100%	213,318,100.00	DINAS KESEHA TAN
PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Penyelenggara an Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	100%	100%	181,202,800	100%	181,202,800	100%	181,202,800	100%	181,202,800	100%	181,202,800	Dinas P3AP2KB
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA	Persentase Irigasi Kabupaten	75.78	76.32	10,339,984,048	76.65	10,644,183,569	76.96	11,717,224,616	77.26	11,564,949,888	77.61	11,689,891,379	Dinas PUPR

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG GUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
AIR (SDA)	Dalam Kondisi Baik												
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANG AN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum layak, perkotaan dan perdesaan	86.65	100	500,000,000	100	850,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000	100	850,000,000	Dinas PUPR
PROGRAM PENGEMBANG AN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHA N REGIONAL	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	19.10	-	-	19.47	498,071,400	19.62	1,756,380,000	19.77	978,888,948	19.92	978,888,948	Dinas PUPR
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANG AN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	89.47	100	600,000,000	100	600,000,000	100	600,000,000	100	600,000,000	100	600,000,000	Dinas PUPR
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANG AN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	49.88	37.50	1,142,303,812	71.94	1,170,572,926	79.30	1,199,690,114	86.66	1,229,680,818	94.02	1,260,571,242	Dinas PUPR
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANG AN SISTEM DRAINASE	Rasio Permukiman Layak Huni	89.28	89.277	366,761,098.00	89.277	350,000,000.00	89.277	350,000,000.00	89.277	350,000,000.00	89.277	350,000,000.00	Bidang Perumahan/Bidang Kawasan Permukiman

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG GUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENGEMBANG AN PERMUKIMAN													
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Bangunan Gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	98.44	98.46	2,221,368,450	98.47	2,288,009,504	98.48	2,356,649,789	98.49	2,427,349,282	98.50	2,500,169,761	Dinas PUPR
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN NYA	Persentase Permukiman Yang Tertata	21.36	21.407	680,000,000.00	21.409	780,000,000.00	21.41 1	880,000,000.00	21.413	980,000,000.0 0	21.41 3	980,000,000.0 0	Bidang Perumahan/ Bidang Kawasan Permukima n
PROGRAM PENYELENGGA RAAN JALAN	Rasio Kemantapan Jalan Kabupaten	0.5721	0.6098	40,008,208,413	0.6118	40,960,665,373	0.623 8	40,479,019,291	0.6258	43,088,929,74 2	0.633 8	43,139,469,07 0	Dinas PUPR
PROGRAM PENGEMBANG AN JASA KONSTRUKSI	Rasio Tenaga operator/tekni si/analisis yang memiliki setifikat kompetensi	0.2016	0.1725	205,866,000	0.1929	212,041,980	0.213 2	218,403,239	0.2336	224,955,337	0.254 0	231,703,997	Dinas PUPR
PROGRAM PENYELENGGA RAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan Terhadap RTRW	100	100	570,157,200	100	51,500,000	100	68,045,000	100	69,636,350	100	1,256,275,441	Dinas PUPR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN													
PROGRAM PENGEMBANG AN	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak	86.14	86.18	350,000,000	86.19	350,000,000	86.21	350,000,000	86.23	350,000,000	86.23	350,000,000	Bidang Perumah an

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG GUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PERUMAHAN	Huni												
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	0.161	0.159	2,060,000,000	0.158	2,160,000,000	0.156	2,560,000,000	0.155	2,080,000,000	0.155	2,080,000,000	Bidang Kawasan Permukiman
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rasio Permukiman Layak Huni	89.28	89.277	366,761,098.00	89.277	350,000,000.00	89.277	350,000,000.00	89.277	350,000,000.00	89.277	350,000,000.00	Bidang Perumahan/Bidang Kawasan Permukiman
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH													
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman di dukung dengan PSU	1.13	2.69	600,000,000	2.82	700,000,000	3.39	900,000,000	3.95	900,000,000	3.95	900,000,000	Bidang Perumahan
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Pelayanan Sertifikasi,Kualifikasi,Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	0.00	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	Bidang Perumahan

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG GUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAM AN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Perda	100%	100%	3,617,000,000	100%	4,169,250,000	100%	3,670,250,000	100%	4,619,250,000	100%	3,670,250,000	POL.PP DAMKAR
PROGRAM PENANGGULA NGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	100%	287,000,000	100%	300,000,000	100%	320,000,000	100%	350,000,000	100%	375,000,000	BPBD
	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	435,000,000	100%	450,000,000	100%	450,000,000	100%	470,000,000	100%	50,000,000	BPBD
	Pelayanan Kedaruratan dan Logistik Bencana	100%	100%	120,000,000	100%	150,000,000	100%	170,000,000	100%	195,000,000	100%	200,000,000	BPBD
	Penataan Sistem Dasar Penanggulanga n Bencana	100%	100%	150,000,000	100%	175,000,000	100%	190,000,000	100%	230,000,000	100%	250,000,000	BPBD
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULA NGAN, PENYELAMAT AN KEBAKARAN DAN PENYELAMAT AN NON KEBAKARAN	Persentase Korban Kebakaran yang dilayani	100%	100%	476,000,000	100%	512,500,000	100%	1,357,500,000	100%	1,357,500,000	100%	592,500,000	POL.PP DAMKAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL													

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG GUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PEMBERDAYA AN SOSIAL	Persentase PSKS yang dilibatkan dalam pemberdayaan sosial	-	5%	290,000,000	5%	290,000,000	5%	290,000,000	5%	290,000,000	5%	290,000,000	Dinas Sosial
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	-	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	Dinas Sosial
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar diluar panti (SPM)		100%	755,774,141	100%	688,774,141	100%	691,774,141	100%	769,774,141	100%	912,774,141	Dinas Sosial
	Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)												
	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial luar panti (SPM)												

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG GUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase warga negara/gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti (SPM)												
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Keluarga Miskin dan Anak-Anak Terlantar yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial		100%	559,885,141	100%	492,885,141	100%	495,885,141	100%	573,885,141	100%	716,885,141	Dinas Sosial
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		100%	184,885,141	100%	67,885,141	100%	70,885,141	100%	73,885,141	100%	216,885,141	
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terpelihara		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA													
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kebijakan ketenagakerjaan dalam RTKD yang	100%	100%	75,000,000									

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG GUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	ditindaklanjuti												
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVIT AS TENAGA KERJA	Persentase lulusan yang memiliki sertifikat berdasarkan klaster kompetensi	100%	100%	375,000,000		425,000,000		425,000,000		500,000,000		500,000,000	Diskopna ker
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	68.5	69.5	184,885,141	70.5	67,885,141	71.6	70,885,141	72.7	73,885,141	73.8	216,885,141	Diskopna ker
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial		230 pekerja	26,988,100	235 pekerja	27,988,100	240 pekerj a	28,988,100	245 pekerja	29,988,100	250 pekerj a	30,988,100	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													
PROGRAM PENGARUSUT AMAAN GENDER DAN PEMBERDAYA AN PEREMPUAN	Persentase Perangkat daerah yang menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender(PPRG)	100%	100%	20,514,720	100%	20,514,720	100%	20,514,720	100%	20,514,720	100%	20,514,720	Dinas P3AP2KB

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG GUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PERLINDUNGA N PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Pelayanan	100%	100%	195,889,000	100%	195,889,000	100%	195,889,000	100%	195,889,000	100%	195,889,000	Dinas P3AP2KB
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase keluarga yang mendapatkan advokasi dan informasi peningkatan kualitas keluarga	100%	100%	7,339,080	100%	7,339,080	100%	7,339,080	100%	7,339,080	100%	7,339,080	Dinas P3AP2KB
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK													
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase anak yang mendapatkan pemenuhan hak anak	100%	100%	147,683,800	100%	147,683,800	100%	147,683,800	100%	147,683,800	100%	147,683,800	Dinas P3AP2KB
PROGRAM PERLINDUNGA N KHUSUS ANAK	Persentase anak yang mendapatkan perlindungan khusus	100%	100%	210,111,000	100%	210,111,000	100%	210,111,000	100%	210,111,000	100%	210,111,000	Dinas P3AP2KB
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN													
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Pendukung Kemandirian	5	-	-	4	1984500000	4	2,083,725,000	4	2187911250	4	2,297,306,813	Dinas Ketahana n Pangan

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG GUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Pangan												
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Jumlah Rata- Rata Ketersediaan Pangan Utama (Ton)	132.08	145.61	113,542,335	152.90	172,369,090	160.5 4	181,702,146	168.57	191,573,315	168.5 7	191,573,315	Dinas Ketahana n Pangan
	Angka Kecukupan Energi (kkal/kap/hari)	2,150.0 0	2,196		2,201		2,206		2,210		2,220		
	Angka Kecukupan Gizi (gr/kap/hari)	105.40	105.80		105.90		106.0 0		107.00		108.0 0		
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa Rentan Pangan (%)	100%	100%	6,195,000	100%	6,504,750	100%	6,829,988	100%	7,171,487	100%	7,171,487	Dinas Ketahana n Pangan
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase keamanan sampel pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang aman dikonsumsi dalam kurun waktu tertentu	100%	100%	15,789,585	100%	16,579,064	100%	17,408,017	100%	18,278,418	100%	18,278,418	Dinas Ketahana n Pangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN													

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG GUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	100	0		100	30,000,000	0	0	0	0	0	0	Bidang Pertanah an
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI													
PROGRAM PENYELESAIA N SENGKETA TANAH GARAPAN	Presentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	Bidang Pertanah an
PROGRAM PENYELESAIA N GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNA N	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	100	100	150,000,000	100	150,000,000	0	0	0	0	0	0	Bidang Pertanah an
PROGRAM PENGURUSAN HAK HAK ATAS TANAH	Luas Lahan Milik Pemda Yang Bersertifikat	3,148,9 41	3,218,9 41	160,000,000	3,253,9 41	160,000,000	3,288, 941	1,600,000	3,323,9 41	160,000,000	3,323, 941	160,000,000	Bidang Pertanah an
PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN	Laporan Penanganan Konflik,Sengke ta dan Perkara	1	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	Bidang Pertanah an
PROGRAM SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN	Persentase Luas Lahan Pemda Yang terpetakan	0	0	0	1	50,000,000	0	0	0	0	0	0	Bidan Pertanah an

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG GUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE													
PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT													
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG													
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Luas Lahan Milik Pemda Yang Bersertifikat	3,148,941	3,218,941	50,000,000	3,253,941	50,000,000	3,288,941	50,000,000	3,323,941	50,000,000	3,323,941	50,000,000	Bidan Pertanahan
PROGRAM PENATAGUNA AN TANAH													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	100	100	180,000,000.00	100	200,000,000.00	100	150,000,000.00	0	-	100	200,000,000.00	DLHK

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG GUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENGENDALIA N PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air (IKA)	60.63	84.92	582,997,460.00	85.12	674,048,505.50	85.32	722,044,103.03	85.52	775,950,057.0 3	85.72	826,956,937.7 3	DLHK
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	96.74	80.44		80.74		81.04		81.34		81.64		
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAG AMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Yang Terjaga Fungsinya	0.0119	0.0128	105,000,000	0.0139	60,500,000	0.013 9	66,550,000	0.0139	73,205,000	0.013 9	80,525,500	DLHK
PROGRAM PENGENDALIA N BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	16.8	18.3	11,000,000	19.1	22,100,000	19.9	24,310,000	20.7	26,741,000	21.5	16,105,100	DLHK
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGA N DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	60	50	96,500,000	40	104,450,000	40	76,645,000	40	129,609,500	40	54,570,450	DLHK

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG GUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
HIDUP (PPLH)													
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100	100	25000000	100	37500000	100	30250000	100	33275000	100	34938750	DLHK
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensiny a	0	20.00	137,500,000.00	20	151,250,000.00	20	166,375,000.00	20	183,012,500.0 0	20	201,313,750.0 0	DLHK
PROGRAM PENGHARGAA N LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	0	20	50000000	20	55000000	20	60500000	20	66550000	20	73205000	DLHK
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasu s Tindak	100	100	35000000	100	35000000	100	35000000	100	35000000	100	38500000	DLHK

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG GUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
HIDUP	Pidana Lingkungan Hidup												
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	0	40.5	6647182820	41	7346477939	41.5	7692144039	42	8250520931	42.5	9569173525	DLHK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL													
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik	100%	99%	120,000,000	99%	120,000,000	99%	120,000,000	99%	120,000,000	99%	120,000,000	DISDUKC APIL
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 - 18 tahun	100%	99%	115,000,000	99%	115,000,000	99%	115,000,000	99%	115,000,000	99%	115,000,000	DISDUKC APIL
	Persentase Penerbitan Akta Kematian	100%	99%		99%		99%		99%		99%		
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Perangkat Daerah Yang Melakukan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	100%	99%	18,342,100	99%	18,342,100	99%	18,342,100	99%	18,342,100	99%	18,342,100	DISDUKC APIL
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA													
PROGRAM PENATAAN													

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG GUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
DESA													
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA													
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAH AN DESA													
PROGRAM PEMBERDAYA AN LEMBAGA KEMASYARAK ATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													
PROGRAM PENGENDALIA N PENDUDUK	Persentase pengendalian penduduk dikabupaten/k ota	100%	100%	193,200,000	100%	193,200,000	100%	193,200,000	100%	193,200,000	100%	193,200,000	Dinas P3AP2KB
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase perempuan usia reproduktif yang menggunakan metode kontrasepsi	64%	52,60%	2,666,497,400	52,65%	2,666,497,400	52,70 %	2,666,497,400	52,75%	2,666,497,400	52,80 %	2,666,497,400	Dinas P3AP2KB
PROGRAM PEMBERDAYA AN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	Persentase Poktan yang melaksanakan program Bangga Kencana	85%	85%	1,711,000,000	85%	1,711,000,000	85%	1,711,000,000	85%	1,711,000,000	85%	1,711,000,000	Dinas P3AP2KB

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG GUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(KS)													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN													
PROGRAM PENYELENGGA RAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana	85%		4,925,513,328		5,057,651,571		5,745,928,058		6,663,481,029		6,663,481,029	DISHUB
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah Pelabuhan Pengumpnan Lokal yang Dikelola			37,134,000		40,134,000		43,134,000		46,134,000		46,134,000	DISHUB
PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGA N													
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAP IAN													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	81.39	1,942,1 26,900	81.40	1,903,2 84,362	81.41	1,941, 350,0 49	81.42	1,960,7 63,550	81.42	1,960, 763,5 50		DISKOMI NFOSAN

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG GUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Kabupaten Sinjai												
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur penyediaan informasi	78.57	80.95	1,212,472,600	83.33	1,544,982,600	85.71	1,560,432,426	88.10	1,622,849,723	88.10	1,622,849,723	DISKOMI NFOSAN
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	71.43	75.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH													
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Pertumbuhan Volume Usaha	58 Milyar	45 Milyar	14,300,000	46 Milyar	16,500,000	47 Milyar	18,500,000	47 Milyar	20,500,000	48 Milyar	22,500,000	Diskopna ker
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	0	40.74%	27,500,000	41.97%	29,500,000	43.20 %	31,500,000	44.44%	33,500,000	45.67 %	34,500,000	Diskopna ker
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI													
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASI AN													

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG GUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PEMBERDAYA AN DAN PERLINDUNGA N KOPERASI	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	58.57%	60%	30,000,000	61.42%	30,000,000	62.85 %	30,000,000	64.28%	30,000,000	65.71 %	30,000,000	Diskopna ker
PROGRAM PEMBERDAYA AN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Kecil yang Bertransforma si dari Informal ke Formal	7.00%	7.54%	228,480,000	7.99%	236,180,000	8.45 %	244,100,000	8.91%	252,175,000	9.37%	260,865,000	Diskopna ker
	Pertumbuhan Wirausaha												
PROGRAM PENGEMBANG AN UMKM	Persentase usaha mikro yang memenuhi indikator untuk menjadi usaha kecil	0.02%	0.04%	27,430,000	0.06%	28,430,000	0.08 %	29,430,000	0.10%	30,430,000	0.12%	31,430,000	Diskopna ker
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL													
PROGRAM PENGEMBANG AN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Realisasi Total Terhadap Target	100%	100%	??	100%		100%		100%		100%		
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Realisasi Peminat Investasi	15%	15%	??	15%		15%		15%		15%		
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100%	90%	??	90%		90%		90%		90%		

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG GUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENGENDALIA N PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Usaha Yang Taat Terhadap Peraturan Penanaman Modal	60%	70%	??	70%		70%		70%		70%		
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAHA													
PROGRAM PENGEMBANG AN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda Berprestasi pada Bidang Kepemudaan di Tingkat Provinsi/Nasio nal	352,82 1,900.0 0	100 %	363,406,557.00	100 %	381,576,900.00	100 %	400,655,745.00	100 %	420,688,600.0 0	100 %	441,723,500.0 0	DISPORA
PROGRAM PENGEMBANG AN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAHA AN	Persentase Atlit yang Meraih Medali Cabang Olahraga pada Tingkat ProvinsiNasion al	2,000,0 05,900. 00	100 %	2,060,006,000.00	100 %	2,163,006,300.0 0	100 %	2,271,156,615.0 0	100 %	2,384,714,500. 00	100 %	2,503,950,500. 00	DISPORA
PROGRAM PENGEMBANG AN KAPASITAS KEPRAMUKAA N	Persentase Gugus Depan yang Dibina	150,00 0,000.0 0	100 %	155,000,000.00	100 %	160,000,000.00	100 %	165,000,000.00	100 %	170,000,000.0 0	100 %	175,000,000.0 0	DISPORA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK													

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG GUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENYELENGGA RAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	100	59,613,900	100	60,210,039	100	63,220,541	100	65,749,363	100	65,749,363	
PROGRAM PENYELENGGA RAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase urusan pemerintahan kecamatan yang terkoordinasi	100	100	25,000,000	100	30,000,000	100	35,000,000	100	40,000,000	100	50,000,000	Kantor Kecamat an Bulupod do
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN													
PROGRAM PENYELENGGA RAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase SKPD yang menggunakan persandian dalam komunikasi Perangkat Daerah dan pengamanan informasi daerah	89.28	89.30	72,709,100	89.31	75,725,900	89.32	76,483,159	89.33	80,307,316	89.35	80,307,316	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN													
PROGRAM PENGEMBANG AN KEBUDAYAAN	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	34%	500 orang	-	550 orang	-	605 orang	-	666 orang	-	732 orang	-	Dinas Pariwisat a dan Kebuday aan

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG GUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENGEMBANG AN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase pengembangan kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	-	74%	-	81%	-	89%	-	96%	-	100%	-	Dinas Pariwisat a dan Kebuday aan
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH													
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya dan WBTB yang ditetapkan	31.03%	11.98%	-	12.50%	-	13.02 %	-	13.54%	-	14.06 %	-	Dinas Pariwisat a dan Kebuday aan
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMA N	Persentase kunjungan	13.70%	5.00%	-	5.00%	-	5.00 %	-	5.00%	-	5.00%	-	Dinas Pariwisat a dan Kebuday aan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN													
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAA N	Meningkatnya Nilai Indeks Pembangunan Literasi masyarakat	92.29	92.30	1,385,057,240	92.31	1,518,639,080	92.32	1,456,667,701	92.33	1,609,032,055	92.35	1,657,303,017	DISPUSIP
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN													
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Meninganya Nilai Indekas Pengawasan	CC	B	378,638,450	B	389,997,604	BB	38,999,760	BB	396,722,624	BB	406,624,303	DISPUSIP

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG GUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Kearsipan												
PROGRAM PERLINDUNGA N DAN PENYELAMAT AN ARSIP	Persentase Jumlah Arsip yang terselamatkan	100%	100%	8,500,796	100%	8,755,820	100%	8,755,820	100%	17,795,550	100%	9,316,917	DISPUSIP
PROGRAM PERIZINAN PENGUNAAN ARSIP													
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN													
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	39,269. 10	40,051	320,000,000	40,451	4,300,000,000	40,85 1	4,310,000,000	41,259	6,340,000,000	41,67 2	4,590,000,000	BIDANG PERIKAN AN TANGKA P
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan Produksi perikanan Budidaya	52,100	53,324	300,000,000	54,123	3,320,000,000	54,93 4	3,320,000,000	55,785	3,330,000,000	56,34 2	3,600,000,000	BIDANG PERIKAN AN BUDIDAY A
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN													
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Peningkatan produksi hasil olahan (Ton)	1,175	1,295	50,000,000	1,360	65,000,000	1,428	580,000,000	1,500	585,000,000	1,575	585,000,000	BIDANG PENGUA TAN DAYA SAING HASIL PERIKAN AN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA													

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG GUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan		2.00	-	2.00	550,000,000	2.00	550,000,000	2.00	550,000,000	2.00	2,215,900,000	Dinas Pariwisat a dan Kebuday aan
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	801,00 0,000	46.70%	-	53.33	-	66.70 %	-	73.33%	-	86.70 %	-	Dinas Pariwisat a dan Kebuday aan
PROGRAM PENGEMBANG AN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATA N DAN PERLINDUNGA N HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL													
PROGRAM PENGEMBANG AN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi		100.0%	-	100.0%	-	100.0 %	-	100.0%	0	100.0 %	-	Dinas Pariwisat a dan Kebuday aan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN													
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANG AN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Populasi Ternak Sapi	2.5	2.1	1,680,000,000	2.1	2,185,000,000	2.2	1,295,000,000	2.2	1,875,000,000	2.2	1,875,000,000	BIDANG PRODUK SI DAN PENGOL AHAN HASIL PETERN AKAN
	Persentase Kenaikan Kelahiran Hasil Inseminasi Buatan (IB)	3.5	3.5		3.6		3.6		3.6		3.6		

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG GUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	(%)												
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANG AN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya Produksi Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan :			1,810,000,000		1,810,000,000		1,810,000,000		1,810,000,000		1,810,000,000	DISTPHP
	1. Prosentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Padi dan Jagung)	1.08	2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		
	2. Prosentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura (Aneka Cabai dan Bawang Merah)	3.57	3.28		3.28		3.28		3.28		3.28		
	3. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan (Kopi, Kelapa, Kakao, Karet dan Lada)	2.39	1.20		1.20		1.20		1.20		1.20		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANG AN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Pemenuhan Prasarana Pertanian Sub Sektor Petrernakan	45	10	1,000,000,000	21	1,700,000,000	21	1,700,000,000	21	1,700,000,000	28	2,900,000,000	BIDANG PRODUK SI DAN PENGOL AHAN HASIL PETERN AKAN

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG GUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
													DAN BIDANG KESEHA TAN HEWAN DAN KESEHA TAN MASYAR AKAT VETERIN ER
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANG AN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase Pasarana Pertanian Yang dapat Digunakan/Ber operasi dengan baik	97	100	16,820,000,000	100	21,810,000,000	100	22,250,000,000	100	25,550,000,000	100	27,850,000,000	DISTPHP
PROGRAM PENGENDALIA N KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Jumlah Kasus Penyakit Hewan yang terlayani	100	100	500,000,000	100	530,000,000	100	535,000,000	100	590,000,000	100	590,000,000	BIDANG KESEHA TAN HEWAN DAN KESEHA TAN MASYAR AKAT VETERIN ER
	Persentase Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk hewan	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PENGENDALIA N DAN PENANGGULA NGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas area terdampak OPT dan DPI yang tertangani pada tanaman pertanian	80	100	200,000,000	100	240,000,000	100	260,000,000	100	280,000,000	100	300,000,000	DISTPHP

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG GUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN													
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan Kelompoktani ternak yang meningkat kelas kemampuannya	10	15	130,000,000	20	140,000,000	30	170,000,000	30	150,000,000	35	150,000,000	BIDANG BINA USAHA DAN AGRIBISNIS
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan	30	33	1,750,000,000	38	1,925,000,000	40	1,925,000,000	44	2,100,000,000	48	1,700,000,000	DISTPHP
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN													
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Nilai Indeks METT	72	72	745,600,000.00	73	732,660,000.00	73	784,426,000	74	830,768,600.00	74	878,712,960.00	DLHK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL													
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Porsi Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi	0.31%	0.34%	50,000,000	0.37%	60,000,000	0.40%	65,000,000	0.43%	70,000,000	0.46%	75,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN													

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG GUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi	75%	70%	30,000,000.00	78%	30,000,000.00	85%	30,000,000.00	93%	30,000,000.00	100%	30,000,000.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	16.66%	25%	500,000,000.00	29.16%	500,000,000.00	33.33 %	500,000,000.00	37.50%	500,000,000.00	41.66 %	500,000,000.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	7.30%	7.25%	60,000,000.00	7.19%	62,500,000.00	7.13 %	65,000,000.00	7.07%	67,600,000.00	7.01%	70,000,000.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR													
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang	72.66%	72%	50,000,000.00	72%	52,000,000.00	72%	54,080,000.00	72%	56,500,000.00	72%	58,500,000.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG GUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	bertanda tera sah yang berlaku												dan Sumber Daya Mineral
PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/dila ksanakan	27%	100%	100,000,000.00	100%	110,000,000.00	100%	125,000,000.00	100%	130,000,000.0 0	100%	135,000,000.0 0	Dinas Perdagan gan, Perindus trian, Energi dan Sumber Daya Mineral
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN													
PROGRAM PERENCANAA N DAN PEMBANGUNA N INDUSTRI	Persentase pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	100	100	460,000,000.00	100	480,000,000.00	100	498,000,000.00	100	518,000,000.0 0	100	537,000,000.0 0	Dinas Perdagan gan, Perindus trian, Energi dan Sumber Daya Mineral
PROGRAM PENGENDALIA N IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri yang diterbitkan	100%	100%	100,000,000.00	100%	104,000,000.00	100%	108,000,000.00	100%	112,500,000.0 0	100%	117,000,000.0 0	Dinas Perdagan gan, Perindus trian, Energi dan Sumber Daya Mineral

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG GUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	2.21%	3.92%	75,000,000.00	5.09%	78,000,000.00	6.27 %	81,120,000.00	7.45%	84,365,000.00	8.62%	87,750,000.00	Dinas Perdagan gan, Perindus trian, Energi dan Sumber Daya Mineral
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
SEKRETARIAT DAERAH													
PROGRAM PEMERINTAH AN DAN KESEJAHTERA AN RAKYAT													
PROGRAM PEREKONOMI AN DAN PEMBANGUNA N													
SEKRETARIAT DPRD													
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase agenda kerja DPRD yang yang difasilitasi	100%	100%	11,692,500,000	100%	13,059,905,000	100%	13,577,000,000	100%	14,652,000,00 0	100%	14,680,000,00 0	Set DPRD
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
PERENCANAAN													
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIA N DAN EVALUASI													

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG GUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PEMBANGUNA N DAERAH													
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAA N PEMBANGUNA N DAERAH													
KEUANGAN													
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Peningkatan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	169,028,474,700	100%	177,479,898,435	100%	186,353,893,357	100%	195,671,588,0 ₂₅	100%	205,455,167,4 ₂₆	BKAD
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Presentase Capaian Pengelolaan Keuangan	100%	100%	3,453,300	100%	3,453,300	100%	3,453,300	100%	3,453,300	100%	3,453,300	BAPEND A
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Peningkatan Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	100%	628,928,703	100%	660,375,138	100%	693,393,895	100%	728,063,590	100%	764,466,769	BKAD
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Presentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	100%	100%	1,242,810,226	100%	1,242,810,226	100%	1,242,810,226	100%	1,242,810,226	100%	1,242,810,226	BAPEND A
KEPEGAWAIAN													
PROGRAM KEPEGAWAIA N DAERAH	Persentase Kasus pelaanggaran disiplin yang selesai ditindak	0.13	0.13	136,288,373	0.15	126,664,110	0.17	135,747,200	0.19	145,035,000	0.21	154,550,000	BKPSDM A

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG GUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	lanjuti												
	Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik	92	94	136,288,373	95	126,664,110	96	135,747,200	97	145,035,000	98	154,550,000	BKPSDM A
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Administrasi Kepegawaian	85.3	86	1,078,056,005	86.5	1,039,370,785	87	1,093,987,675	87.5	1,151,313,450	88	1,211,133,400	BKPSDM A
	Jumlah Pemangku jabatan fungsional tertentu	1243	4300	406,193,227	4450	350,377,700	4600	367,896,500	4750	386,291,350	4900	405,605,900	BKPSDM A
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN													
PROGRAM PENGEMBANG AN SUMBER DAYA MANUSIA	Jumlah Diklat teknis dan Fungsional	590	610	951,500,000	620	1,033,914,800	630	458,470,700	640	1,010,249,800	650	594,351,000	BKPSDM A
	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	0.38	0.77	819,200,000	0.97	895,000,000	1.16	312,610,000	1.55	857,100,000	1.74	433,550,000	BKPSDM A
	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	1.38	1.5	38,587,500	1	40,516,800	1.2	42,542,700	1.2	44,669,800	1.2	46,900,000	BKPSDM A
	Persentase pegawai	21	23	93,712,500	24	98,398,000	25	103,318,000	26	108,480,000	27	113,901,000	BKPSDM A

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG GUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	fungsional yang memiliki Sertifikat Kompetensi (diluar guru dan tenaga kesehatan)												
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN													
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Dasar dalam Implementasi Pembangunan	1	100%	485,000,000	100%	600,000,000	100%	565,000,000	100%	590,000,000	100%	740,000,000.0	
PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH													
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN													
INSPEKTORAT DAERAH													
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Presentase program pengawasan yang dilaksanakan	Rp 2,110,475,780	100%	Rp 3,577,621,424	100%	Rp 3,720,726,280	100%	Rp 3,869,555,332	100%	Rp 4,024,337,545	100%	Rp 4,185,311,047	Inspektorat Daerah
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan	Rp 223,828,200	100%	Rp 621,615,280	100%	Rp 646,479,891	100%	Rp 672,339,086	100%	Rp 699,232,650	100%	Rp 727,201,956	Inspektorat Daerah
UNSUR KEWILAYAHAN													

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG GUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
KECAMATAN													
PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase terselenggaran ya kinerja Pelayanan perangkat daerah yang akuntabel dan transparan	100%	100%	83,511,200.00	100%	84,011,200.00	100%	84,011,200.00	100%	84,011,200.00	100%	84,011,200.00	Kec. Tellulimp oe
PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian pelaporan yang akuntabel	80.25	80.95	30,000,000	83.33	35,000,000	85.71	40,000,000	88.10	50,000,000	88.10	60,000,000	Kantor Kecamat an Bulupod do
PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemenuhan penyelenggara an pemerintahan dan pelayanan publik	100%	100%	52,330,000.00	100%	54,423,200.00	100%	56,600,128.00	100%	58,864,133.12	100%	61,218,698.44	Kantor Kec. Sinjai Timur
PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan program Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	122,229,500	100%	76,087,200	100%	76,087,200	100%	76,087,200	100%	76,087,200	Kantor Kec. Sinjai Barat
PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	100%	100%	495,816,500	100%	495,816,500.00	100%	495,816,500.00	100%	495,816,500.0 0	100%	495,816,500.0 0	Kec. Tellulimp oe

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG GUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat yang di bangun	89.28	89.30	72,709,100	89.31	75,725,900	89.32	76,483,159	89.33	80,307,316	89.35	80,307,316	Kantor Kecamat an Bulupod do
PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	409,241,600	100%	410,241,600	100%	411,241,600	100%	412,241,600	100%	413,241,600	Kec. Sinjai Selatan
PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	100%	400,000,000	100%	800,000,000		800,000,000	100%	800,000,000	100%	800,000,000	Kantor Kec. Sinjai Barat
PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemenuhan Pemberdayaan Msyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	400,000,000.00	100%	416,000,000.00	100	432,640,000.00	100%	449,945,600.00	100%	467,943,424.00	Kantor Kec. Sinjai Timur
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM													
PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM	Persentase terselenggara ya urusan pemerintahan umum	100%	100%	7,427,600.00	100%	7,427,600.00	100%	7,427,600.00	100%	7,427,600.00	100%	7,427,600.00	Kec. Tellulimp oe

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG GUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM	Persentase Pemenuhan Penyelenggara an Urusan Pemrintahan Umum	100%	100%	10,000,000.00	100%	10,400,000.00	100%	10,816,000.00	100%	11,248,640.00	100%	11,698,585.60	Kantor Kec. Sinjai Timur
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH AN DESA	Persentase sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat yang di bangun	89.28	89.30	20,000,000	89.31	25,000,000	89.32	30,000,000	89.33	35,000,000	89.35	40,000,000	Kantor Kecamat an Bulupod do
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH AN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	21,170,092.00	100%	21,170,092.00	100%	21,170,092.00	100%	21,170,092.00	100%	21,170,092.00	Kec. Tellulimp oe
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH AN DESA	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	5,999,900	100%	8,093,200	100%	8,093,200	100%	8,093,200	100%	8,093,200	Kantor Kec. Sinjai Barat
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH AN DESA	Persentase pemenuhan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100%	30,000,000.00	100%	31,200,000.00	100%	32,448,000.00	100%	33,745,920.00	100%	35,095,756.80	Kantor Kec. Sinjai Timur
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM													
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK													
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER	Persentase program penguatan ideologi pancasila dan karakter	100%	100%	821,000,000	100%	837,420,000	100%	854,168,400	100%	871,251,770	100%	888,676,803	Bakesban gpol

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG GUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
KEBANGSAAN	kebangsaan												
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANG AN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	100%	100%	652,123,000	100%	665,165,460	100%	678,468,769	100%	692,038,114	100%	692,038,172	Bakesban gpol
PROGRAM PEMBERDAYA AN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAK ATAN	Persentase program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakata n	100%	100%	58,000,000	100%	59,160,000	100%	60,343,200	100%	61,550,064	100%	64,627,567	Bakesban gpol
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANG AN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi,sosial dan budaya	100%	100%	96,000,000	100%	97,920,000	100%	99,878,402	100%	101,875,968	100%	103,913,487	Bakesban gpol

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANG GUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAA N NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	100%	100%	505,000,000	100%	505,515,100	100%	525,402,000	100%	535,910,040	100%	546,628,240	Bakesban gpol
PENUNJANG URUSAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KAB/KOTA	Persentase ASN yang berkinerja baik												
	Rata-rata capaian Indikator kinerja Kegiatan Perangkat Daerah												
	Persentase Temuan LHP yang selesai ditindaklanjuti												

2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan indikator kinerja daerah adalah memberikan gambaran tentang pencapaian visi dan misi dari kepala daerah terpilih. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil. Penetapan indikator kinerja daerah dituangkan dalam bentuk target kinerja yang akan dicapai pada waktu tertentu yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran target dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan berupa indikator makro pembangunan, Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Daerah, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Penetapan target indikator kinerja utama selanjutnya disajikan pada table berikut ini

Tabel 4.2
Target Indikator Kerja Utama (IKU)
Tahun 2025-2030 Kabupaten Sinjai

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Indeks Pembangunan Manusia	Persen	72,06	72,49	73,14	73,79	74,44	75,09	
1	Usia Harapan Hidup	Angka/ Tahun	74.40	74.50	74.60	74.70	74.80	74.90	
2	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7.83	7.84	7.85	7.86	7.87	8.00	
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.28	13.29	13.30	13.31	13.32	13.33	
	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	80.25	80.35	80.52	80.72	81.25	81.45	
4	Nilai SAKIP	Poin	69.10	70.05	70.52	70.80	71.15	71.30	
5	Persentase Desa Mandiri	%	70	75	80	87	95	100.00	
6	Indeks Maturitas SPIP	Level	Level 3 3,1	Level 3 3,2	Level 3 3,25	Level 3 3,3	Level 3 3,4	Level 3 3,5	
7	Indeks Inovasi Daerah	Poin	43.63	45.45	47.27	49.09	50.91	52.73	
8	Indeks SPBE	Nilai	3.20	3.40	3.60	3.80	4.00	4.00	
	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,99	6,05	6,60	7,15	7,7	8,25	
9	Net Ekspor Barang dan Jasa	Persen	1.05	1.07	1.09	1.11	1.13	1.14	
10	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	Persen	38.05	38.15	38.25	38.30	38.45	38.55	

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
11	Tingkat Inflasi	Persen	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	
12	Pertumbuhan Investasi Daerah	Persen	8	9	10	11	12	13	
13	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	82,41	82,51	82,61	82,71	82,81	82,91	
14	Jumlah Industri Kecil dan Menengah Pada Level Kabupaten	Jumlah Industri	4300	4343	4385	4428	4471	4514	
15	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	1,42	1,34	1,14	0,89	0,64	0,39	
	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Persen	73.2	74.2	74.4	74.55	74.7	74.85	
	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,90-6,50	6,51-5,61	6,35-5,75	6,00-5,25	5,75-5,20	5,20-4,85	
16	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persen	100	100	100	100	100	100	
17	Indeks Ketimpangan Gender	Persen	0.421	0.427	0.430	0.431	0.432	0.433	
18	Indeks Perlindungan Anak	Persen	61.10	61.15	61.25	61.51	61.73	61.95	
19	Rasio Gini	Nilai	0,293	0,274	0,245	0,210	0,185	0,155	
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	poin	77.34	77.6	77.76	77.97	78.18	78.39	
20	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Tahunan	Juta Ton CO2e	28,00	28,54	29,09	29,64	30,19	30,74	
	Indeks Layanan Infrastruktur	Persen	72.14	73.8	74.2	75.68	76.58	77.48	
21	Persentase Jalan Mantap	%	57.83	57.10	55.87	56.84	57.45	57.76	

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
22	Persentase Air Minum Layak	%	86.66	86.67	86.68	86.69	87.05	87.43	
23	Persentase Sanitasi layak	%	89.49	89.52	89.58	89.60	89.64	89.67	
24	Persentase Jaringan Irigasi	%	27.76	27.89	28.03	28.19	28.32	28.43	
	Indeks Reformasi Hukum	Poin	80.13	81.2	81.96	93.54	96.62	96.72	
25	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	
26	Indeks Risiko Bencana	Nilai	161.40	162.6	163.3	164.7	165.5	165.5	

Sumber: Data : Perangkat Daerah dan RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Sinjai Tahun 2025

Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja daerah (IKD) secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) maupun indikator sasaran (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program prioritas ditetapkan.

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan indikator yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada masa jabatan pemerintah daerah. Indikator Kinerja Kunci disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintah Kabupaten.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator yang disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintah provinsi. indikator kinerja kunci yang disajikan mengacu pada indikator yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025 -2030 khususnya pada indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja tahun 2024, Adapun capaian indikator kinerja kunci yang telah ditargetkan pencapaiannya dalam RPJMD 2025 – 2030, dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2025- 2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	INDIKATOR KINERJA DAERAH								
1	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI								
1.1	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%)	Persen	6,78	6,76	6,74	6,72	6,70	6,68	
1.2	Indeks Ketahanan Pangan		82,41	82,51	82,61	82,71	82,81	82,91	
1.3	Skor Pola Pangan Harapan	Persen	89,80	90,00	90,20	90,40	90,60	90,80	
1.4	Konsumsi Listrik Per Kapita (Kwh)		75,35	76.25	78.12	70.96	80.69	85,75	
1.5	Kapasitas Air Baku (m3/detik)*		230	270	370	390	410	410	
1.6	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	Persen	45.55	47.05	48.55	50.05	51.55	53.05	
1.7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		77.34	77.55	77.76	77.97	78.18	81.64	
1.8	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	89.67	89.87	90.07	90.27	90.47	90.67	
1.9	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	Persen	23.50	23.75	24.00	24.50	25.00	25.50	

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.10	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	Persen	22.93	22.95	22.96	22.98	22.99	23.56	
1.11	Proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia		NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1.12	Indeks pertanaman (IP) padi		47.24	48.18	48.43	48.67	48.91	49.89	
1.13	Proporsi sawah irigasi	Persen	63.63	63.63	63.63	63.63	63.63	63.63	
1.14	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	52,536	53,324	54,123	54,934	55,763	56,599	
1.15	Angka Konsumsi Ikan		50	50	50	50	50	50	
1.16	Indeks Risiko Bencana		161.40	162.6	163.3	164.7	165.5	165.50	
1.17	Penurunan Emisi GRK Tahunan		24.54	42.24	42.85	43.86	44.04	44.04	
2	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
2.1	Laju pertumbuhan ekonomi	%	5,99	6,05	6,60	7,15	7,7	8,25	
2.2	Tingkat kemiskinan	%	7,90-6,50	6,51-5,61	6,35-5,75	6,00-5,25	5,75-5,20	5,20-4,85	
2.3	PDRB Perkapita	Rp Juta	62,54	65,99	66,54	67,19	67,84	68,49	
2.4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,42	1,34	1,14	0,89	0,64	0,39	
2.5	Rasio Gini	Angka	0,293	0,274	0,245	0,210	0,185	0,155	

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6	Indkes Pembangunan Manusia	Angka	72,06	72,49	73,14	73,79	74,44	75,09	
2.7	Usia Harapan Hidup	Angka/ Tahun	74.40	74.50	74.60	74.70	74.80	74.90	
2.8	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7.83	7.84	7.85	7.86	7.87	8.00	
2.9	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.28	13.29	13.30	13.31	13.32	13.33	
2.10	Persentase persalinan di fasilitas kesehatan	Persen	100	100	100	100	100	100.00	
2.11	Jumlah Kematian Ibu	Persen	91.52	91.52	90.63	89.74	88.86	88.00	
2.12	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persen	20	15	20	18	16	14	
2.13	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage)	Persen	66.48	67.48	68.48	69.48	70.00	71.00	
2.14	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate)	Persen	90	90	90	90	90	90	
2.15	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Persen	98.40	98.55	98.70	98.85	99.00	99.15	
2.16	Literasi Membaca		70	73	77	80	85	90	
2.17	Numerasi		67	70	73	77	80	85	
2.18	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen	9.67	9.95	10.11	10.12	10.13	11,25	

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.19	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan (sumber BPS)	Persen	10.23	10.56	11.10	11.25	11.45	12,50	
2.20	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	Persen	1.96	1.97	1.98	2.00	2.01	2,50	
2.21	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen	81.51	82.73	84.38	85.65	87.37	89.37	
2.22	Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Persen	31,03	32.76	32.76	32.76	32.76	32.76	
2.23	Indeks Kerukunan Umat Beragama		100	100	100	100	100	100	
2.24	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga		73,20	74.20	74.40	74.55	74,70	74.85	
2.25	Indeks Perlindungan Anak		61,10	61.15	61.25	61.51	61,73	61.95	
2.26	Indeks Ketimpangan Gender		0.421	0.427	0.430	0.431	0.432	0.433	
3	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
3.1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	2.62	2,63	2,64	2,65	2,66	2,95	
3.2	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	0,38	0.38	0.39	0.39	0.40	0,46	

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.3	Jumlah Tamu Wisatawan Domestik dan Mancanegara (Orang)/ Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan domestik dan mancanegara	Jumlah Tamu	244,000	246,000	248,000	250,000	252,000	255.000	
3.4	Jumlah Industri Ekonomi Kreatif	Jumlah	519	524	529	534	539	547	
3.5	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD	Persen	6,26	6,27	6,28	6,29	6,30	6,31	
3.6	Jumlah industri kecil dan menengah pada level kabupaten	Jumlah Industri	4300	4343	4385	4428	4471	4514	
3.7	Persentase koperasi sehat di kabupaten	Persen	22,6	23,28	23,97	24,65	25,32	26,02	
3.8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	51.06	51.16	51.26	51.36	51.46	51.56	
3.9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	81.27	81.68	82.08	82.49	82.91	83.32	
3.10	Indeks Kapabilitas Inovasi	Persen	49.12	49.24	49.55	49.67	49.99	50.11	
3.11	Produktifitas padi	Kw/Ha	47.24	48.18	48.43	48.67	48.91	49.89	
3.12	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	39,655	40,051	40,451	40,851	41,259	41,672	
3.13	Indeks Ekonomi Hijau		95.35	95.65	95.85	95.98	96,08	97,65	
3.14	Return on Aset (ROA) BUMD	Persen	7.60	7.70	7.80	7.90	8.00	8,60	
3.15	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	100	100	100	100	100	100	
3.16	Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok	Persen	7.31	7.25	7.19	7.13	7.07	7,85	

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.17	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	Persen	38.05	38.15	38.25	38.30	38.45	38.55	
3.18	Net Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	Persen	1.05	1.07	1.09	1.11	1.13	1.14	
3.19	Kontribusi PDRB kab/kota terhadap provinsi	Persen	2.23	2.35	2.45	2.50	2.55	2,99	
3.20	Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persen	86.54	87.35	88.64	89.73	92.64	92.75	
3.21	Indeks Layanan Infrastruktur	Persen	72.14	73.80	74.20	75.68	76.58	77.48	
3.22	Persentase desa mandiri	Persen	70,00	75,00	80,00	87,00	95,00	100.00	
3.23	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	Persen	1.72	1.73	1.74	1.75	1.76	1.77	
3.24	Tingkat Inflasi Gabungan (%)	Persen	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	
3.25	Pertumbuhan Investasi Daerah	Persen	8	9	10	11	12	13	
3.26	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen	71.32	72.62	73.21	74.65	75,21	76,25	
3.27	Jumlah Kerja Sama Provinsi/Kabupaten/ Kota Kembar / Bersaudara (Sister Province/ Sister City)		1	1	1	1	3	3	
3.28	Indeks Daya Saing Daerah		3.17	3.21	3.22	3.23	3.25	3,25	
4	ASPEK PELAYANAN UMUM								
4.1	Indeks Reformasi Hukum		80.13	81.20	81.96	93.54	96.62	96.72	

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.2	Indeks SPBE	Nilai	3.20	3.40	3.60	3.80	4.00	4.00	
4.3	Indeks Pelayanan Publik		4.10	4.15	4.20	4.25	4.30	4,55	
4.4	Indeks Reformasi Birokrasi		80.25	80.35	80.52	80.72	81.25	81.65	
4.5	Indeks Survey Penilaian Integritas	Poin	75.35	77.37	77.39	77.41	77.43	77.45	
4.6	Nilai MCP KPK		86.36	86.38	86.4	86.42	86.44	86.46	
4.7	Indeks Maturitas SPIP	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
4.8	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	
4.9	Persentase tindak kriminal yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100	
4.1	Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD	Persen	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	
4.11	Perda yang merupakan inisiatif DPRD	Jumlah	1	1	1	1	1	1	
4.12	Persentase perempuan pengurus partai politik	Persen	30.39	30.39	30.39	30.39	30.39	30.39	
	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
	PENDIDIKAN								
1	Pendidikan Anak Usia Dini	%	70	72	74	76	80	85	

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Angka Partisipasi Kasar								
	SD/MI/Sederajat :	%	111	111.25	111.5	111.75	112	112	
	SMP/MTS/Sederajat:	%	112.1	112.2	112.3	112.4	112.5	112.5	
3	Persentase Angka Pendidikan yang Ditamatkan								
	Persentase SD/MI/Sederajat	%	100	100	100	100	100	100	
	Persentase SMP/MTS/Sederajat	%	100	100	100	100	100	100	
4	Angka Partisipasi Murni (APM)								
	SD/MI/Sederajat :	%	100	100	100	100	100	100	
	SMP/MTS/Sederajat:	%	100	100	100	100	100	100	
5	Angka Partisipasi Sekolah								
	Angka partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	100	100	100	100	100	100	
	Angka partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	100	100	100	100	100	100	
6	Angka Putus Sekolah								
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0	0	0	0	0	0	
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0	0	0	0	0	0	
7	Angka Kelulusan								
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100	100	100	100	
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100	100	100	100	100	
8	Angka Melanjutkan (AM);								
	Angka Melanjutkan (AM)dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100	100	100	100	100	100	

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA /SMK/MA	%	100	100	100	100	100	100	
9	Fasilitasi Pendidikan	%							
	Peresentase Sekolah Pendidikan SD/MI	%							
	Prosentase Sekolah Pendidikan SMP/MTs & SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik	%	100	100	100	100	100	100	
10	Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar								
	Rasio SD/MI		0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
	Rasio SMP/MTS		0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	
11	Rasio Guru/Murid Jenjang Pendidikan Dasar								
12	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun Perempuan & Laki-laki	%	100	100	100	100	100	100	
13	Penduduk yang Berusia > 15 Tahun Melek Huruf (tidak buta aksara)	%	100	100	100	100	100	100	
14	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV								
	Rasio SD/MI		100	100	100	100	100	100	
	Rasio SMP/MTs		100	100	100	100	100	100	

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KESEHATAN								
1	Angka Kematiaan Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran hidup	Bayi	14.17	13.73	13.29	12.86	12.74	12.61	
2	Angka kelangsungan hidup bayi	bayi	985.83	986.27	986.71	987.14	987.26	987.39	
3	Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	balita	2.77	2.44	2.11	1.79	1.48	1.17	
4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	bayi	11.70	11.29	10.88	10.47	10.07	9.68	
5	Angka Kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	Ibu Hamil	92.39	91.52	90.63	89.74	88.86	88,00	
6	Rasio posyandu persatuan balita	Per 1.000 Satuan Balita	21.6	21.5	21.3	21.1	21.0	20.85	
7	Rasio Puskesmas Persatuan	Per 1.000 Penduduk	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	
	Rasio poliklinik persatuan	Per 1.000 Penduduk	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	
	Rasio pustu persatuan penduduk	Per 1.000 Penduduk	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	
8	Rasio rumah sakit pe rpenduduk	Per 1.000 Penduduk	0.33	0.33	0.33	0.33	0.34	0.34	
9	Rasio dokter persatuan penduduk	Per 1.000 Penduduk	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Per 1.000 Penduduk	7.67	7.59	7.52	7.50	7.50	7.50	
11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	
12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenagakesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan		100	100	100	100	100	100	
13	Cakupan desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100	100	100	100	100	
14	Cakup balita Gizi buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100	
15	persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak		100	100	100	100	100	100	
16	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk	3.2	3.2	3.1	3.1	3.1	3.1	
17	Cakupan Balita pnemonia yang ditangani	%	40	40	40	40	40	40	
18	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	90	90	90	90	90	90	
19	Tingkat prevalensi tuberkulosis per 100.000 penduduk	Per 100.000 Penduduk	418	359	310	275	248	210	
20	Tingkat kematian karena tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Per 100.000	20.9	16.7	13.3	10.6	8.4	6.61	

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penduduk							
21	Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam programDOTS	%	90	90	90	90	90	90	
22	Proporsi kasus tuberkulosis yang di obati dan sembuh dalam program DOTS	%	90	90	90	90	90	90	
23	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100	100	
24	penderita diare yang ditangani		100	100	100	100	100	100	
25	Rasio Angka kejadian malaria	Per 100.000 Penduduk	<100	<100	<100	<100	<100	<100	
26	Tingkat kematian akibat malaria	Per 1.000 Penduduk	0	0	0	0	0	0	
27	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	%	indikator ini tidak ada di kabupaten sinjai. karna bukan daerah endemis malaria						
28	prevalensi HIV/AIDS (persen) dari totalpopulasi	%	0.097	0.078	0.077	0.076	0.076	0.075	
29	Proporsi jumlah penduduk 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	%	25	30	35	40	45	50	
30	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100	100	100	100	100	100	

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	Cakupan Kunjungan bayi	%	100	100	100	100	100	100	
32	Cakupan puskesmas	Per Kecamatan	177.7	177.7	177.7	188.8	188.8	188.8	
33	Cakupan pembantu puskesmas	Per Desa	78.75	78.75	78.75	80	80	80	
34	Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4	%	100	100	100	100	100	100	
35	Cakupan pelayanan nifas	%	100	100	100	100	100	100	
36	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang tangani	%	100	100	100	100	100	100	
37	Cakupan Pelayanan anak balita	%	100	100	100	100	100	100	
38	cakupan pemberian makanan pendamping MP ASI pada anak usia 6 -24 bulankeluarga miskin	%	100	100	100	100	100	100	
39	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	%	100	100	100	100	100	100	
40	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	100	100	100	100	100	100	
41	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100	100	100	100	100	100	
42	Cakupan desa kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi , 24 jam	%	100	100	100	100	100	100	
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1	Proporsi jalan dalam kondisi baik	%	0.5939	60.24	60.99	61.79	62.44	63.00	

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Km/ jumlah penduduk	0.0047	0.0047	0.0048	0.0047	0.0047	0.0049	
3	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	%	7.36	7.36	7.36	7.36	7.36	7.36	
4	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	59.39	70.74	71.49	72.79	73.49	74.55	
5	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	89.47	100	100	100	100	100	
6	Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar	%	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	
7	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik /Pembuangan Aliran Air	%	57.23	64.59	71.94	79.3	86.66	94.02	
8	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	%	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	
9	Persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	76.31	76.32	76.44	76.57	76.71	76.85	
10	Rasio jaringan irigasi	Mater/Ha	27.76	27.89	28.03	28.19	28.32	28.43	
11	Persentase penduduk berakses air minum	%	100	100	100	100	100	100	
12	Proporsi rumah terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	%	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase areal kawasan kumuh	%	0.160	0.159	0.158	0.156	0.155	0.155	
14	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk								

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk		0.002	0.003	0.004	0.005	0.006	0.007	
16	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB		3.47	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47	
17	Luasan RTH Public sebesar 20 % dari luas wilayah kota/kawasan	%	51.23	51.23	51.23	51.23	51.23	51.23	
18	Rasio bangunan ber IMB		75.47	75.50	75.53	75.56	75.59	75.62	
19	Ketaatan terhadap RTRW	%	100	100	100	100	100	100	
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
1	Rasio Rumah Layak Huni		0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	
2	Rasio pemukiman layak huni		89.28	89.28	89.28	89.27	89.27	89.27	
3	Cakupan Ketersediaan rumah layak huni	%	86.16	86.18	86.19	86.21	86.23	86.23	
4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	86.16	86.18	86.19	86.21	86.23	86.23	
5	persentase permukiman yang tertata	%	21.41	21.41	21.41	21.41	21.41	21.41	
6	persentase lingkungan permukiman kumuh	%	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	
7	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	56.58	57.78	59.00	60.24	61.50	61.50	

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	%	0.17	0.12	0.07	0.03	0.00	0.00	
9	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU		1.70	2.26	2.83	3.39	3.96	3.96	
10	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten		100	100	100	100	100	100	
11	Persentase Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten		0	0	0	0	0	0	
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	100	100	100	100	100	100	
2	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Jumlah kasus kebakaran di WMK yg tertangani dalam waktu maksimal 15 Menit	%	50	50	50	50	50	50	
4	Persentase Penegakan PERDA	%	100	100	100	100	100	100	
SOSIAL									
1	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	60	60	60	60	60	60	

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Persentase PMKS yang Tertangani	%	60	60	60	60	60	60	
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	100	100	100	100	100	100	
4	persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
5	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	100	100	100	100	100	100	
ASPEK PELAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR									
TENAGA KERJA									
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%	0.64	0.64	0.63	0.63	0.62	0.62	
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	100	100	100	100	100	100	
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	72.81	73.06	73.30	73.48	73.65	74.15	
4	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	20.97	24.92	27.13	29.55	31.87	34.35	
5	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	85.28	86.23	87.13	88.00	88.83	89.71	

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	86.96	87.63	88.24	88.79	89.29	89.79	
7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	86.87	87.21	87.54	87.85	88.15	88.45	
8	Rasio lulusan S1/S2/S3	%	8.55	861	8.68	8.74	8.81	8.91	
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	40	45	50	55	60	65	
2	Persentase Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	20	23	25	28	30	32	
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	20	23	25	28	30	32	
4	Rasio KDRT	%	0,015	0,013	0,010	0,08	0,05	0,05	
5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	0,07	0,10	0,12	0,15	0,17	0,05	
6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	55	60	65	70	75	80	
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100	100	

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100	100	100	100	100	100	
9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	100	100	100	100	100	100	
10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasuskasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100	100	100	100	
11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100	100	100	100	100	
12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	20	23	25	28	30	30	
13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100	100	
	PANGAN								
1	Ketersediaan pangan utama	%	50.50	53.00	55.70	58.50	61.40	61.68	
2	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	100	100	100	100	100	100	

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PERTANAHAN								
1	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	61.29	61.964	62.637	63.311	63.985	63.985	
	LINGKUNGAN HIDUP								
1	Tersedianya Dokumen RPPLH	Ada / Tidak Ada	ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
2	Tersedianya Dokumen RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kabupaten	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
3	Tersedianya Dokumen KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Provinsi	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas air	Point	84.72	84.92	85.12	85.32	85.52	85.72	
5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas udara	Point	80.14	80.44	80.74	81.04	81.34	81.64	
6	Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)	Point	59.48	59.54	59.61	59.68	59.75	56.00	
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Point	77.34	77.55	77.76	77.97	78.18	81.64	
8	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung- jawab usaha /atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap PPLH, PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	%	50	60.00	70.00	80.00	90.00	90.00	
9	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Persentase timbunan Sampah yang ditangani	%	55.00	55.15	55.25	55.35	55.45	65.50	
11	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	23.50	23.75	24.00	24.50	25.00	25.50	
12	Persentase cakupan area pelayanan	%	14.53	14.53	14.53	14.53	14.53	14.53	
13	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	70	70	70	70	70	70	
14	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten	Nilai	≥ 71	≥ 71	≥ 71	≥ 71	≥ 71	≥ 71	
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
1	Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk		99.91	99.93	99.95	99.96	99.97	99.97	
2	Rasio Bayi Berakte Kelahiran		99.91	99.92	99.93	99.94	99.95	99.95	
3	Rasio Pasangan Berakte Nikah		0.47	0.48	0.49	0.5	0.51	0.51	
4	Ketersediannya data base kependudukan skala Provinsi	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
5	Penerapan KTP berbasis NIK	Sudah / Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	
6	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	99.91	99.93	99.95	99.96	99.97	99.97	
7	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran	%	99.93	99.94	99.95	99.96	99.98	99.98	

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
1	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	%	64	64	64	64	64	64	
2	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan	Klp	1	1	1	1	1	1	
3	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	Klp	5480	5480	5480	5480	5480	5480	
4	Persentase LSM aktif	%	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	
5	Persentase LPM Berprestasi	%	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	
6	Persentase PKK Aktif	%	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Posyandu Aktif	%	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	%	80	83	85	90	95	95	
9	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	%	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	52.15	52.25	52.35	52.38	52.42	52.42	
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
1	Persentase Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	50	55	60	65	70	75	

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Rasio Akseptor KB	%	50	55	60	65	70	75	
3	Angka Pemakaian Kontrasepsi / CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49 Tahun	%	50	55	60	65	70	75	
4	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15 – 19) Per 1.000 Perempuan usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19)	%	50	47	45	40	37	35	
5	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya di Bawah 20 Tahun	%	30	27	25	20	17	15	
6	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak Terpenuhi	%	50	48	45	43	40	38	
7	Persentase Menggunakan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	45	50	55	60	65	70	
8	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	%	45	50	55	60	65	70	
9	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB	%	45	50	55	60	65	70	
10	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR)	%	45	50	55	60	65	70	
11	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber - KB	%	45	50	55	60	65	70	
12	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	
13	Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja / mahasiswa	%	7	9	12	15	17	20	

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Cakupan PKB/PLKB yang di dayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan & Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk	%	100	100	100	100	100	100	
15	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber –KB Mandiri	%	45	50	55	60	65	70	
16	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	
17	Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	%	25	30	35	40	45	50	
18	Persentase Faskes dan jejaringannya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	100	100	100	100	100	100	
19	Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga	%	100	100	100	100	100	100	
PERHUBUNGAN									
1	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	Orang	472,807	520,088	572,097	629,306	692,237	693,469	
2	Rasio Ijin Trayek		-	-	-	-	-		
3	Jumlah uji kir angkutan umum	%	-	100	100	100	100	100	

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Jumlah Pelabuhan Laut	Pelabuhan	2	2	2	2	2	2	
5	Jumlah terminal bis	Terminal	10	10	10	10	10	10	
6	Persentase Layanan Angkutan Darat	%	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Pemasangan Rambu-rambu	%	100	100	100	100	100	100	
8	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan		0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	
9	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	Orang	472,807	520,088	572,097	629,306	692,237	693,469	
10	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	Ton	3,851,081	3,928,103	4,006,665	4,086,798	4,168,534	4,279,645	
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	
2	Cakupan layanan telekomunikasi	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
5	Proporsi rumah tangga yang memiliki computer pribadi		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH								
1	Persentase koperasi aktif	%	48.63	49.32	49.32	50.00	52.05	51.36	
2	Persentase UKM non BPR / LKM Aktif	%	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase BPR/LKM aktif	%	0	0	0	0	0	0	
4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	
	PENANAMAN MODAL								
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	PMDN	7	7	7	7	9	9	
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp Juta)								
	Persetujuan Nilai Investasi	Proyek	29	29	29	29	32	32	
		Milyar	37,000	37,000	37,000	37,000	39,000	39,000	
	Realisasi Nilai Investasi	Proyek	5	5	5	5	5	5	
		Milyar	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
3	Rasio daya serap tenaga kerja		1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	
4	Persentase Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	%	1	1	1	1	1.5	1.5	

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA								
1	Persentase wirausaha muda	%	0.58	1.20	1.90	2.60	3.30	4.20	
2	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	8.50	8.50	8.65	8.65	8.85	8.85	
3	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	%	30.50	30.50	30.70	30.70	40.20	40.20	
4	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	14.20	14.28	14.30	14.40	14.50	14.50	
5	Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun	Atlit	5	7	7	8	8	9	
6	Jumlah prestasi cabang olahraga yang di menangkan dalam 1 Tahun	Medali	2	3	3	4	5	6	
	STATISTIK								
1	Tersedia Sistem Data Statistik yang Terintegrasi	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
2	Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
3	Buku PDRB	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PERSANDIAN								
1	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	
	KEBUDAYAAN								
1	Jumlah Penyelenggaraan Festival seni dan budaya	Event	6	6	6	6	6	6	
2	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	9.63	10.16	10.16	10.70	10.70	10.70	
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	CB	21	21	22	23	24	25	
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Situs	18	19	19	20	20	20	
	PERPUSTAKAAN								
1	Rasio pengunjung perpustakaan per tahun		28,951	29,000	30,000	30,500	31,000	31500	
2	Koleksi buku yang tersedia di dalam perpustakaan daerah	%	66	67	67	68	69	70	
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk		1	1	1	1	1	1	
4	Rata-rata pengunjung perpustakaan	Orang	28,951	29,000	30,000	30,500	31,000	31500	
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	judul	27,212	28,000	29,000	30,000	31,000	32000	

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KEARSIPAN								
1	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	%	50	51	52	53	54	55	
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kali	1	1	1	1	1	1	
	ASPEK LAYANAN URUSAN PILIHAN								
	PARIWISATA								
1	Kunjungan Wisata	%	100	100	100	100	100	100	
2	Lama Kunjungan Wisata	Kunjungan / bulan	24,897	25,395	25,903	26,421	26,950	26,950	
	PERTANIAN								
1	Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan Terhadap PDRB	%	45.81	45,54	45,08	44,63	44,18	43,74	
2	Kontribusi Sektor Pertanian (palawija) Terhadap PDRB	%	12.92	13,18	13,44	13,71	13,99	14,26	
3	Kontribusi Sektor Perkebunan (tanaman keras) Terhadap PDRB	%	11.26	11,49	11,71	11,95	12,19	12,43	
4	Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB	%	76,75	78,29	79,85	81,45	83,08	84,74	

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar	%	44.50	45.39	46,30	47,22	48,17	49,13	
6	Cakupan Bina Kelompok Petani	%	30	33,00	36,30	39,39	43,92	48,32	
	PETERNAKAN								
1	Ternak Unggas	Ekor	1,817,300	1,853,646	1,890,719	1,928,534	1,986,390	2,045,981	
2	Ternak Besar	Ekor	73,068	75,714	77,607	79,780	12,014	81,474	
3	Ternak Kecil	Ekor	21,375	22,644	22,916	23,191	23,469	23,750	
4	Daging	Kg	2,021,900.17	2,082,557.17	2,149,139.00	2,217,973.37	2,293,384.45	2,371,359.53	
5	Telur	Kg	1,445,917.27	1,534,005.46	1,583,093.63	1,638,501.91	1,695,849.48	1,756,900.06	
6	Jumlah kasus penyakit hewan menular	Ekor	3,100	2,080	1,080	550	550	50	
	PERDAGANGAN								
1	Cakupan bina usaha informal / pedagang	%	18.18	22.72	20	20	19.09		
	PERINDUSTRIAN								
1	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	%	-						

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KELAUTAN DAN PERIKANAN									
1	Produksi perikanan	Ton	92,283	93,206	94,138	95,079	96,030	96,990	
2	Konsumsi ikan	Kgb/ Kapita / Thn	50	50	50	50	50	50	
3	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	%	18.88	19.07	19.26	19.46	19.66	19.86	
4	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	%	25.45	25.83	26.22	26.61	27.01	27.42	
ASPEK PENUNJANG URUSAN									
PERENCANAAN PEMBANGUNAN									
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA /PERKADA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
4	Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	%	90.5	90.75	91.00	91.25	91.50	91.75	

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	%	97,39	97,64	97,89	98,14	98,39	98,64	
7	Kesesuai Rencana Pembangunan dengan RTRW	%	100	100	100	100	100	100	
KEUANGAN									
1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2	Penetapan APBD	Tepat waktu / tidak tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	
KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
1	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	%	1.41	1.50	1.59	1.69	1.78	1.83	
2	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	%	1.94	2.91	3.88	4.85	5.83	5.83	
3	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	Jabatan	38	38	38	38	38	38	
4	Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah	Jabatan	1250	1260	1270	1280	1290	1300	
5	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah	Pemangku Jabatan	4150	4300	4450	4600	4750	4900	

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
1	Persentase implementasi rencana Kelitbangan	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	%	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Perangkat Daerah yang di Fasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	%	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	%	100	100	100	100	100	100	
	PENGAWASAN								
1	Persentase tindak lanjut temuan	%	89	89.05	89.1	89.15	89.2	89.25	
2	Persentase Pelanggaran Pegawai	%	0.11	0.13	0.15	0.17	0.19	0.21	
3	Jumlah Temuan BPK	Temuan	12	11	10	9	8	7	
	SEKETARIAT DEWAN								
1	Tersedia rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Provinsi / Kab. / Kota	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Tersusun dan Terintegritas program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi - fungsi pengawasan , fungsi pembentukan Perda dan fungsi RPJMD dan RKPD	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
3	Terintegritas program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan , pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan Dokumen Setwan DPRD	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

3.4. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Sosial

Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4
Penetapan target Indikator (SPM) Kabupaten Sinjai Tahun 2025-2030
(Permendagri 59 Tahun 2021)

No.	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	Tahun				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
1	URUSAN PENDIDIKAN						
1.1.	Pendidikan Dasar						
1	Jumlah warga negara usia 7 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100	100	100	100	100
1.2.	Pendidikan Kesetaraan						
2	Jumlah warga negara Usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan Ppndidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100	100	100	100	100
1.3.	Pendidikan Anak Usia Dini						
3	Jumlah warga negara usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	100	100	100	100	100
2	URUSAN KESEHATAN						

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

No.	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	Tahun				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	100	100	100
2.2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	%	100	100	100	100	100
2.3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100	100	100
2.4	Pelayanan kesehatan balita	%	100	100	100	100	100
2.5	Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	%	100	100	100	100	100
2.6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	%	100	100	100	100	100
2.7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	%	100	100	100	100	100
2.8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	100	100	100	100	100
2.9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	%	100	100	100	100	100
2.10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	%	100	100	100	100	100
2.11	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	%	100	100	100	100	100
2.12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	%	100	100	100	100	100
3	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
3.1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	%	100	100	100	100	100

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

No.	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	Tahun				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
3.2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	%	100	100	100	100	100
4	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
4.1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kab / Kota	%	100	100	100	100	100
4.2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi	%	100	100	100	100	100
5	URUSANKETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
5.1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100	100	100
5.2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	%	100	100	100	100	100
5.3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	100	100	100	100	100
5.4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100
5.5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100
6	URUSAN SOSIAL						
6.1	Persentase Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti Yang Tertangani	%	100	100	100	100	100

RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029

No.	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	Tahun				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
6.2	Persentase jumlah anak terlantar di luar panti yang tertangani	%	100	100	100	100	100
6.3	Persentase jumlah lanjutan usia terlantar di luar panti yang tertangani	%	100	100	100	100	100
6.4	Persentase jumlah tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti yang tertangani	%	100	100	100	100	100

BAB V PENUTUP

Rencana Jangka Menengah Daerah memiliki peran strategis dalam pembangunan sebuah daerah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMD Provinsi dan RPJMN. Pelaksanaan Perda tentang RPJMD Kabupaten Sinjai tahun 2025- 2029 perlu memperhatikan beberapa kaidah, sehingga menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya dan dilaksanakan secara konsisten. Selain itu, perlu diatur juga mengenai pedoman transisi yang akan mengatur bagaimana perencanaan tahunan pada saat RPJMD akan berakhir periodenya.

5.1 Kaidah

Pelaksanaan Dokumen RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2025-2029 merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun, serta merupakan dokumen yang harus diperhatikan oleh perangkat daerah dalam menyusun perencanaan strategis Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan serta pemerintah desa dalam menyusun RPJM Desa atau dokumen perencanaan untuk 6 (enam) tahun kedepan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dengan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta masyarakat termasuk dunia usaha.
2. Bupati, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sinjai 2025-2029 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah.
3. Bupati Sinjai berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2025-2029 kepada masyarakat.

4. Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi berkala terhadap RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2025-2029.
5. Penyusunan RKPD Kabupaten Sinjai pada Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2029 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2025-2029, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sinjai Tahun 2025 sampai dengan 2029.
6. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
7. Kepala Desa melakukan penyusunan RPJM Desa berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sinjai 2025-2029 sehingga terwujud sinergi dan kolaborasi pembangunan di Kabupaten Sinjai.

5.2 Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2029 yang dilaksanakan pada Tahun 2030. Apabila masa jabatan Bupati berakhir dan RPJMD Kabupaten Sinjai untuk periode selanjutnya belum terbentuk, maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan daerah untuk masa 1 (satu) tahun kedepan mengacu pada RPJMD Teknokratik yang disiapkan oleh Bappeda dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah. Penyusunan RPJMD Teknokratik disusun 1 (satu) tahun sebelum masa jabatan Bupati periode 2025 – 2030 berakhir, dengan berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Sinjai dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk tetap menjaga kesinambungan pembangunan. Selanjutnya, dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati pada tahun terakhir masa jabatan menyusun RKPD. RKPD tersebut digunakan sebagai pedoman untuk menyusun

**RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025-2029**

Anggaran dan Belanja Daerah tahun pertama periode masa jabatan Bupati berikutnya. Pemerintah Kabupaten Sinjai akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2030 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas. Salah satu agenda penyusunan RKPD yaitu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani/terselesaikan sampai dengan Tahun 2025. Selain untuk menjawab isu-isu strategis tahun berikutnya, prioritas pembangunan nasional, provinsi dan Daerah.

Sinjai 19 Mei 2025

BUPATI SINJAI

Hj. RATNAWATI ARIF



Pemerintah Daerah
Kabupaten Sinjai

BAPPEDA
TAHUN 2025

